FUNDAMENTALISME MUHAMMADIYAH

Dr. H. Mahsun, M.Ag

MEI 2013

KATALOG DALAM TERBITAN (KDT)

FUNDAMENTALISME MUHAMMADIYAH
V+ Halaman,Ukuran 17,5 x 25 cm

Penulis :
Dr. H. Mahsun, M.Ag
Design Sampul:
Nana
Layout :
Hanny Leanita
©2013 PMN, Surabaya

Diterbitkan oleh :
Perwira Media Nusantara (PMN), 2013
Griya Kebraon Tengah XVII Blok FI/10, Surabaya
Telp.: 031 – 60909556, 92161344
Fax.: 031 – 7664673
E-mail : perwiramedia.nusantara@yahoo..co.id
Anggota IKAPI no.125/JTI/2010
ISBN : 978-602-7508-69-9

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang

Sanksi Pelanggaran Pasal 22
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta:

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

BAB I

PENDAHULUAN

A. Menelisik Akar Masalah.

Robert W. Hefner[1] memberi catatan khusus mengenai berdirinya Muhammadiyah di Indonesia ini. Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah adalah pembaru dan penggagas luar biasa di Indonesia. Ia mengalahkan capaian-capaian pembaruan pemikir Islam dunia, Muhammad Abduh di Mesir. Subhan Mas, menyebut Ahmad Dahlan adalah penggagas organisasi pembaruan keislaman modern yang berspirit *high politics* di bidang pemikiran, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Sementara Muhammad Abduh sebagai pemikir dunia tidak dapat menembus besi institusi negara atas ide-ide besarnya, walau pada akhirnya beberapa pembaruan dalam pendidikan masuk ke dalam kurikulum Universitas Al-Azhar.[2]

Lahirnya Muhammadiyah pada awal abad ke-20 di Indonesia, tidak lepas dari pengaruh gerakan pembaharuan Islam di luar negeri, khususnya Timur Tengah. Ia merupakan rangkaian matarantai kebangkitan Islam di kawasan Asia, yang dimulai sejak Ibnu Taimiyah (1263-1338)[3], Muhammad bin Abd al-Wahhab (1703-1787),[4].

[1]Guru besar ilmu Antropologi di Boston University Amerika Serikat, seperti dikutip oleh Munir Mulkhan, dalam, Bentara Kompas, 1-Oktober 2005, 1.

[2]Subhan Mas, *Muhammadiyah Pintu Gerbang Protestanisme Islam sebuah presisi Modernitas* (Mjkt: CV. al-Khikmah, 2005), 5.

[3]Ibnu Taimiyah, oleh Mustafa Kamal Pasha, digambarkan sebagai pemikir yang paling cemerlang di masanya. Ilmunya di bidang Tafsir, Hadith, Bahasa, Kalam, dan Filsafat. Hal ini bisa dirujuk pada salah satu bukunya: *Minhajussunnah an-Nabawiyyah fi naqdil kalam wa al-Shi'ah wa al-Qadariyah.* Sedangkan Firdaus AN. dalam bukunya, *Taqiyuddin Ibnu Taimiyah: Pokok-pokok Pedoman Islam dan Bernegara* (Bandung:

Kelompok yang kontra terhadap pemikiran dan dakwah Muhammad bin Abd al-Wahhab dalam pemurnian akidah Islam memberi nama *Wahabisme* yang berarti faham pemikiran yang dinisbahkan kepada Muhammad bin Abd al-Wahhab. Belakangan Wahabisme lebih dikenal sebagai gerakan Puritanisme. Selain Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abd al-Wahhab, tokoh lainnya adalah Jamaluddin al-Afghani (1838-1897),[5] dan Muhammad Abduh (1849-1905)[6]

Deponegoro, 1967), 9. Lebih lanjut Firdaus menjelaskan bahwa H.A.R Gibb menyebut Ibnu Taimiyah sebagai "…as professor of Hambali Law".

[4]Muhammad bin Abd al-Wahhab mempunyai gerakan yang diberi nama *" Muwahhidin".* Selanjutnya bisa dirujuk pada bukunya: Muhammad Ibnu Abd al-Wahhab, *Masaail al-Jaahiliyyah al-Latii Khaalafa Fiihaa Rasuulullaah SAW. Ahl Jaahiliyyah,* terj. As'ad Yasin (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), 173-190. juga dalam Arifin, Syamsul, *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamentalis* (Malang: UMM Press, 2005), 15-88. Sedangkan Smith, W.C. dalam bukunya Islam In Modern History (New York: The New American Liberary), 1961, 49. menyebut bahwa Muhammad bin Abd al-Wahhab sebagai "…it was puritanical, virogous, simple. It's massage was straight forward: return to classical Islam".

[5]Seorang ulama pembaharu Islam asal Afghanistan. Cita-cita Afghani adalah menggalang kesatuan dan persatuan umat Islam di seluruh dunia dengan semangat dan *"Tali"* Islam yang kemudian dikenal dengan *"Pan Islamisme".* Afghani pernah menerbitkan majalah *"al-Urwatul Wutsqo",* lebih lanjut lihat dalam *"al-Raddu 'ala al-Dahriyyin".* Oemar Amin Hussein, dalam bukunya Filsafat Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1963), 12, menyabutkan bahwa Jamaluddin al-Afghani sebagai *"Tokoh Renaissance Islam Abad 19".* Ia dikenal sebagai seorang mujaddid (reformer) dalam dunia Islam sekaligus sebagai seorang Mujaid (pejuang) yang terus menerus mengobarkan api semangat menegakkan *kalimatul Haq (kalimat/ agama yang benar)*. *E. Rennan* (seorang pemikir Prancis) mengomentari Jamaluddin al-Aghani: Kemerdekaan fikirannya, kemuliaan dan kejujuran budi pekertinya menebabkan saya percaya ketika bercakap-cakap dengannya. Ketika saya di hadapannya, seolah-olah saya sedang brhadapan dengan Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, lima ratus tahun yang lalu.

[6]Mahsun Jayady, *Muhammadiyah Purifikasi Aqidah dan Strategi Perjuangannya*, LP-AIK Univ. Muhammadiyah Surabaya, 1997, 3. Knneth, W. Morgan, dalam bukunya Islam Jalan Mutlak II (terjemahan). (Jakarta: Bulan Bintang, 1963), 12, menyebutkan bahwa Muhammad Abduh sebagai seorang tokoh asal Mesir yang ahli di bidang tafsir, hukum, bahasa Arab dan kesusasteraan, logika, kalam, dan filsafat ini, oleh Ishak M. Husaini dilukiskan sebagai orang luar biasa, bakatnya hampir melingkupi seluruh

Kehadiran sebuah organisasi keagamaan Muhammadiyah sebagai gerakan *tajdid* ini, dipandang sebagai suatu kemajuan besar di kalangan umat Islam di Indonesia. Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah menganggap bahwa tradisi keagamaan yang sinkretis, kehidupan aqidah dan amaliah Islam yang sudah kabur, serta masih statisnya pandangan hidup umat Islam terhadap ajaran dan amalan Islam murni, perlu diluruskan. Ahmad Dahlan memilih *tajdid* sebagai upaya meluruskan kembali ajaran Islam yang menurutnya telah banyak dikaburkan oleh umat Islam sendiri.[7]

Dalam perkembangan berikutnya, organisasi ini telah mampu melakukan berbagai terobosan melalui berbagai amal usaha. Berbagai terobosan yang dilakukan itu bertujuan untuk mencerahkan kehidupan umat dan bangsa Indonesia ke arah peningkatan kualitas pemahaman terhadap Islam. Dalam pada itu ia juga telah memposisikan diri sebagai oganisasi keagamaan dengan misi dakwah Islam amar makruf nahi munkar. Untuk menguatkan posisi itu, maka dirumuskan *Lima Pilar Muhammadiyah,* yaitu: 1) Muhammadiyah sebagai gerakan purifikasi aqidah Islam, 2) Muhammdiyah sebagai gerakan tajdid, 3) Muhammadiyah sebagai gerakan mobilisasi amal shaleh, 4) Muhammadiyah

aspek kehidupan, kegiatannya mempengaruhi banyak negeri Islam. Abduh menolak serangan-serangan barat dengan mengatakan bahwa tak ada pertentangan antara Islam dengan akal, malah bagi Islam akal adalah anak kunci keimanan akan Tuhan. Dua serangkai Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh berjuang demi terwujudnya *"Izzul Islam wa al-Muslimin".*

[7]Yusron Asyrofi, *KH. Ahmad Dahlan, Pemikiran dan Kepemimpinannya* (Yogyakarta: Ofset, Yogyakarta, 1995), 25.

sebagai gerakan pencerahan (al-Tarbiyah), 5) Muhammadiyah sebagai gerakan non-politik praktis.[8]

Salah satu poin dari *Hittah* tersebut, yang kemudian menjadi *trademark* Muhammadiyah sejak awal berdirinya adalah Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Dalam hal ini perlu dikedepankan tentang pemaknaan tajdid dalam khazanah Islam maupun dalam perspektif Muhammadiyah. Secara *lughawi*, *tajdid* berasal dari kata *jaddada-yujaddidu-tajdiidan* yang berarti memperbaharui atau menjadi baru.[9] Adapun konteks pembaharuan di sini adalah dalam hal pemahaman keagamaan. Hal ini merujuk pada hadits Nabi Muhammad SAW. riwayat Abu Dawud:

إنّ الله يبعث لهذه الأمّة على رأس كلّ مائة سنة من يجدّد لها
دينها (رواه أبو داود)

> "Allah mengutus kepada umat ini pada setiap penghujung seratus tahun orang yang memperbaharui (urusan) agama untuk umat ini (HR. Abu Dawud).[10] "

Yusuf Qardhawi memberi makna *tajdid* sebagai pembaharuan, modernisasi, yakni upaya mengembalikan pemahaman agama kepada kondisi semula sebagaimana masa Nabi. Ini bukan berarti hukum agama harus persis

[8]Amin Rais, *Moralitas Politik Muhammadiyah* (Yogyakarta: Dinamika, 1995), 28-49.
[9]Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-lughah wa al-a'laam* (Beirut: Daar al-Masyriq, 1986), 81.
[10]Muhammad Imaroh, *al-Ma'rokah al-mush-tholahaat baina al-ghorbiyyi wa al-Islaam* (Jakarta: Robbani Press), 238.

seperti yan terjadi pada waktu itu, melainkan melahirkan keputusan hukum untuk masa sekarang sejalan dengan maksud shar'i dengan membersihkan dari unsur-unsur *bid'ah, khurafat*, atau pikiran-pikiran asing.[11] Dengan rumusan *tajdid* seperti itu tampak jelas bahwa *tajdid* dalam pengertian umum adalah pembaharuan atau modernisasi. Modernisasi dalam pengertian masyarakat Barat mengandug arti pikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk merubah paham-paham, adat istiadat institusi-institusi lama dan sebagainya agar semua itu dapat disesuaikan dengan pendapat-pendapat dan keadaan-keadaan baru yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan modern. Pikiran dan aliran itu timbul pada periode yang disebut *age of reason* atau *englightenment* (masa akal atau masa terang) pada tahun 1950-1800.[12] Paham ini mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat Barat dan segera memasuki lapangan agama yang di Barat dipandang sebagai penghalang bagi kemajuan. Dengan demikian, modernisasi dalam hidup keagamaan di Barat mempunyai tujuan untuk menyesuaikan ajaran-ajaran yang ada dalam agama Katolik dan Protestan dengan ilmu pengetahuan dan falsafah modern. Aliran ini akhirnya membawa sekularisme di Barat.[13]

Tajdid atau pembaruan dalam perspektif Islam seperti yang dipahami oleh para intelektual muslim, Muhammad Imarah, lebih menekankan pada aspek non teologis sebagai medan *tajdid*. Pembaharuan tidak bertentangan dengan kesempurnaan dan kebakuan agama,

[11]Yusuf Qardlawi, *Dasar-dasar Hukum Islam (taqlid dan ijtihad)*, 96.
[12]Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* (UI-Press, 1978), 94.
[13] Ibid,, 95.

melainkan menjadi jalan perluasan pengaruh-pengaruh agama yang sempurna ini ke wilayah-wilayah jangkauan baru dan persoalan-persoalannya yang baru timbul, dan jaminan bagi kelangsungan dasar-dasar itu dalam menyertai perkembangan jaman dan tempat.

Hal senada Munir menyatakan bahwa *tajdid* ditilik dari akar sejarah pembaruan, mengandung tiga unsur yakni, 1) *Liberation*, berarti dalam proses berpikir lebih bersifat pembebasan daripada *ta'ashub* madhhab, *bid'ah* dan *khurafat*, 2) Reformation, berarti kembali kepada al-Qur'aan dan Hadith, 3) Modernization, berarti menyesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan modern dan teknologi canggih.[14]

Fungsi *tajdid* dalam pandangan Ulama *Nahdhiyyin*, mencakup dua sisi yang mendasar, yakni 1) fungsi Konservasi (*al-Muhaafazhah ala al-Qadiim al-Shaalih*), yakni melestarikan tradisi lama yang baik. 2) fungsi Dinamisasi (*al-ahzdu bi al-Jadiid al-Ashlah*), yakni mengembangkan dengan selalu selektif terhadap nilai-nilai dan kemajuan-kemajuan baru.[15]

Dalam perspektif Muhammadiyah, *tajdid* mempunyai dua pengertian. *Pertama, tajdid* berarti *tanzif*, atau *tathir*, yakni pemurnian atau purifikasi, maksudnya menjaga agar tuntunan agama Islam tetap terjaga sebagaimana aslinya; yang *kedua*, *tajdid* berarti *tashlih* atau

[14] A. Munir & Sudarsono, *Aliran Modern dalam Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 13.
[15]Ibid., 14.

tahdith, yakni pengembangan atau inovasi, atau pemodernan terhadap nilai-nilai ajaran Islam.[16]

Untuk merealisasikan tajdid ini, perlu adanya kerja keras yang dalam terminologi Muhammadiyah disebut *Ijtihad* [17]. Dalam pandangan Muhammadiyah pengertian *ijtihad* sebagaimana hasil Munas Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta tahun 2000, adalah mencurahkan segala kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan ajaran Islam baik dalam bidang hukum, aqidah, filsafat, tasawuf, maupun disiplin ilmu lainnya, berdasarkan wahyu dengan pendekatan tertentu.[18] Itulah sebabnya Muhammadiyah menganggap bahwa pintu ijtihad tetap terbuka sepanjang adanya dinamika Islam dan umat Islam itu sendiri. Ijtihad kemudian menjadi satu tuntutan yang tak bisa ditawar-tawar lagi, mengingat bahwa kekekalan shari'at Islam untuk mengakhiri matarantai risalah para rasul menuntut adanya *ijtihad* dalam rangka memenuhi fungsinya dengan zaman yang berbeda. Di samping itu keuniversalan sifat risalah Islam memerlukan adanya ijtihad agar bisa sesuai dengan lingkungan serta adaptasi terhadap zaman yang terus berubah.

---

[16]Mahsun Jayady, *Muhammadiyah: Pola Pemurnin Akidah Islam & Strategi Perjuangannya* (Surabaya: CV Alifah Alfian, 1997), 45.

[17]Secara harfiah, Ijtihad berasal dari kata *Jahada*, *tajahada*, dan terbentuk kata *Ijtahada* yang berarti berusaha atau bekerja dengan sungguh-sungguh. Demikian penjelasan S. Askar dalam kamusnya "Qomus al-Azhar) (Jakarta: Senayan Publishing, 2009), 76. sedangkan Harun Nasution menjelaskan bahwa ijtihad terfokus pada usaha keras atau daya upaya yang maksimal. Dengan demikian Ijtihad berarti berusaha keras untuk mencapai atau memperoleh sesuatu. Dalam kaitan ini pengertian ijtihad secara istilahi dengan menggunakan kata *al-jahdu atau al-Juhdu* adalah usaha maksimal dalam melahirkan hokum-hukum syari'at dari dasar-dasarnya melalui pemikiran dan penelitian yang serius. Demikian Yusuf Qardlawi menekankan makna ijtihad, *Dasar Hukum*, 74.

[18]Mahsun Jayady, *al-Islam Untuk Perguruan Tinggi dan Umum* (Surabaya: LP-AIK Universitas Muhammadiyah Surabaya, 1997), 63-64.

Kembali ke persoalan tajdid dalam perspektif Muhammadiyah, bahwa tajdid terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan teologi (aqidah) bisa didekati dengan *tanzhiif* atau *Tath-hiir,* hal ini dapat dilihat dari komitmen Muhammadiyah ketika memahami aqidah dalam *kitabul hipti* (kitab himpunan putusan tarjih), bahwa aqidah dalam pemahaman Muhammadiyah disebut sebagai aqidah *shahiihah* yakni aqidah yang berorientasi pada *salaf*. Implikasi dari pemahaman ini, maka Muhammadiyah merasa memandang perlu merumuskan pola pemurnian aqidah Islam sebab kenyataannya bahwa pada sebagian masyarakat Islam di Indonesia menurut perspektif ini banyak prilaku teologisnya yang menyimpang dari aqidah shahihah tersebut. Dalam masalah-masalah non teologis, Muhammadiyah menerapkan tajdid dalam pengertian *taṣlih* atau *tahdith* yakni pemodernan, inovasi, pengembangan, berwatak kekinian, tetapi tetap dijiwai oleh ruh Islam.[19]

Jika dirunut ke belakang pada awal proses berdirinya Muhammadiyah, sebenarnya pandangan Ahmad Dahlan tentang Agama Islam difahami sebagai agama amal, artinya seseorang belum disebut beragama sebelum beraktifitas sesuai dengan ajaran al-Qur'ān dan al-Sunnah. Beraktifitas keberagamaan bukan hanya yag bersifat ritus secara vertikal tetapi juga yang bersifat komunikasi sosial horisontal. Hal ini difahami karena dalam banyak hal Islam sangat memberikan peluang kepada akal untuk melakukan pembacaan terhadap gejala sosial yang terjadi. Banyak ayat-ayat al-Qur'aan yang menganjurkan umat manusia untuk berfikir terhadap gejala sosial, mulai dari yang

[19]Jindar Tamimy, *Penjelasan Dinul Islam, Persatuan* (Yogyakarta, 1985), 4.

menyuruh kepada diri sendiri hingga pembacaan-pembacaan terhadap realitas sosial yang terjadi melalui akal pikiran. Seorang yang berislam secara benar dan memahami Islam dengan cara yang benar, akan berfikir tentang perubahan dan dinamika yang terjadi, sehingga ada kepekaan sosial yang muncul sebagai bias dari keimanannya kepada Allah SWT. Seorang muslim dituntut memiliki *social sence* yang tinggi terhadap entitas sosial, sehingga apa yang terjadi mampu dipecahkan berdasarkan naluri iman yang tertancap dalam bathinnya.

Pengajian Ahmad Dahlan tentang surat al-Maa'uun yang legendaris itu [20] menyiratkan kandungan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi.

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ﴿١﴾ فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا
يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن
صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴿٧﴾

> Artinya: "Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya,

[20]Dalam strata pemikiran keislaman kontemporer dipopulerkan oleh Din Syamsuddin sebagai *"Teologi al-Ma'un"* dan pernah disampaikan dalam pidato sambutannya di Amerika Serikat, dalam forum perdamaian dan komunikasi antar agama dunia tanggal 6-8 Oktober 2009. ketika itu Din Syamsuddin ditunjuk sebagai pimpinan para tokoh agama sedunia untuk mewujudkan perdamaian pada *"World Conference on Religions For Peace"* dihadiri oleh 300 tokoh Islam dan kristen sedunia, (dikutip Md. dalam: PWM Jatim, Matan, edisi, 40, Nopember 2009, 39.

orang-orang yang berbuat riya. dan enggan (menolong dengan) barang berguna.[21]"

Ahmad Dahlan berulang-ulang mengajarkan surat al-Maa'uun kepada para santrinya, sehingga suatu ketika salah satu santrinya memprotes mengapa kita mempelajari surat ini terus menerus padahal kita sudah membahasnya berulang kali, bahkan sudah hafal baik ayat-ayatnya maupun artinya? Ahmad Dahlan memberi jawaban dalam bentuk pertanyaan: Apakah kamu sudah mengamalkan kandungan surat tersebut? Dengan kata lain al-Qur'aan dalam pemahaman Ahmad Dahlan, mendelegitimasi kehadiran mereka yang kaya punya harta melimpah, tetapi dengan harta tersebut mereka tidak pernah memperhatikan orang-orang miskin, maka harta itulah nantinya yang akan menjadi api neraka yang akan membakarnya. Hal demikian diungkapkan oleh al-Qur'aan:

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ
ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ
وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ
يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ
هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

[21]al-Qur'aan, 127 (al-Maa'uun): 1-7.

> Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".[22]”

Dari semula, paham keagamaan Muhammadiyah selalu mengaitkan dan mempertautkan dimensi ajaran kepada sumber al-Qur’aan dan Sunnah Shahihah dengan dimensi *ijtihad* dan *tauhid* dalam satu kesatuan yang utuh. Ibarat satu keping mata uang, paham keagamaan tersebut memiliki dua permukaan, yang dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Jika keduanya sampai terpisah atau sengaja dipisahkan maka paham keagamaan tersebut tidak layak lagi digunakan sebagai predikat paham keagamaan Muhammadiyah. tetapi selama ini ada anggapan Muhammadiyah terjebak dalam kubangan puritanisme yang akut, sehingga adagium *al-Rujuu’ ilaa al-Qur’aan wa al-Sunnah* hanya semata-mata terait dengan persoalan ibadah mahdhah. Dengan begitu ijtihad di Muhammadiyah

[22] al-Qur’ān, 9 (at-Taubah):34-35.

dikesankan hanya terkait dengan isu-isu hukum-hukum agama atau hukum-hukum fiqih *ansich*, dan tidak melebar pada *al-'Uluum al-Kawniyyah* dan juga *al-Hayaat al-Insaaniyyah*.

Anjar Nugroho[23] menilai, kecenderungan konservatisme alam pikiran Muhammadiyah, disebabkan oleh beberapa faktor, pertama, keterjebakan Muhammadiyah terhadap aktivisme yang cenderung memperluas demografi dan keanggotaan. Aktivitas tersebut mengakibatkan para aktifis Muhammadiyah terlalu bersifat politis-ideologis dan apologis katimbang berfikir secara reflektif-kontemplatif dan filosofis. Kedua, peran majlis tarjih sebagai *thik thank* Muhammadiyah terlalu bersifat Fiqh-Oriented dan tekstual-normatif. Kecenderungan ini telah menafikan konteks perkembangan zaman dan perubahan sosial yang menghajatkan suatu ola pemikiran keislaman yang asumtif-probabilistik-pluralis. Ketiga, di tingkat aplikasi praktis, muncul *truth-claim* dari pensakralan produk-produk majlis tarjih seperti Himpuan Putusan Tarjih (HPT) terhadap masalah-masalah muamalah. Dan keempat, belum meluasnya tradisi berfikir empirik di kalangan anggota majlis tarjih.[24]

Dalam perkembangan terakhir ini, perkembangan pemikiran keagamaan umat Islam menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Era orde baru ini ditandai semaraknya gerakan-gerakan Islam kontemporer,

[23]Anjar Nugroho, Anjar. *"Pemikiran Islam Di Muhammadiyah".* makalah disampaikan dalam tadarus pemikiran Islam oleh Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) pada tanggal 18-20 November 2003 di Universitas Muhammadiyah Malang.

[24] Terlepas benar atau tidaknya pendapat ini, yang jelas sebagian dari pendapat tersebut memang terjadi di kalangan Muhammadiyah, baik di tingkat pusat maupun akar rumput.

baik yang bercorak *fundamentalis radikal* (menurut Azzumardi Azra)[25] dan oleh Haedar Nashir disebut sebagai Islam Shariah,[26] maupun yang bercorak modern liberal[27]. Mereka telah mampu mengusung berbagai gagasan keagamaan yang cukup menarik simpati terutama kalangan muda terpelajar, khususnya di daerah perkotaan. Mereka telah mampu menawarkan berbagai konsep solusi berkaitan dengan masalah bangsa Indonesia ini baik yang bersentuhan dengan hajat hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, maupun masalah-masalah yang bersentuhan dengan pemahaman keagamaan khususnya tentang Islam.

Di antara ragam pemikiran keagamaan kontemporer yang banyak mendapat reaksi di masyarakat, adalah pluralisme atau pluralitas agama. Bagi pendukung pluralisme atau pluralitas agama, mereka merujuk kepada kejadian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. sewaktu memperkenalkan ajaran Islam di Madinah. Di tengah keragaman atau pluralitas keberagamaan pada masa kenabian Muhammad SAW. tidaklah menghalangi beliau untuk mengembangkan sikap-sikap toleransi antar pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda.

Tentu tidak demikian bagi yang tidak sependapat dengan pluralisme keagamaan. Kelompok ini menganggap pendekatan-pendekatan kompromistik teologis antar kepecayaan agama-agama justeru akan membawa dampak pada pendangkalan aqidah kaum muslimin. Bahwa apa yang terjadi ketika peristiwa Fathu Makkah bukanlah persoalan kompromis teologis antar kepercayaan agama-

6Azyumardi Azra, *Historiografi Islam Kontemporer* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 193-207.

[26]Haedar Nashir, "Gerakan Islam Shariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia", dalam *Maarif Institute*, vol 1, no. 2, 2006, 26-100.

[27] Ibid.,

agama yang ada, akan tetapi sudah selayaknya Nabi memberi penghormatan kepada penduduk Makkah. Bahkan pelajaran ini menjadi inspirasi bagi kaum muslimin di manapun berada bahwa antar pemeluk agama memang harus saling menghormati, akan tetapi tidak dengan mencampur adukkan persoalan-persoalan teologis, karema memang beda konsepnya. Bahkan Nabi cukup memberi bekal sikap: *Lakum Diinukum Walia Diin*.[28]

Munculnya *Islib* (Islam Liberal), *Hizb al-Tahrir*, Kelompok kajian *al-Tarbiyah*,[29] Majlis Mujahidin Indonesia, Gerakan salafi, Jamaah Tabligh, serta berbagai khalaqah lainnya telah melahirkan berbagai wacana pemikiran keagamaan kontemporer.[30] Di lain pihak munculnya beberapa cendekiawan muslim dunia yang pemikiran-pemikiran keislamannya banyak mendapat apresiasi kalangan intelektual muda –terutama- yang telah bersentuhan dengan pendidikan barat atau karena pertemanan dengan alumnus Perguruan Tinggi Eropa dan Amerika. Cendekiawan atau intelektual dunia tersebut misalnya Fazlurrahman,[31] Hassan Hanafi,[32] Mohammed

[28]Dalam pandangan George F. Hourani (1985), paradigma kebersamaan antar agama-agama harus dilakukan dengan menepikan sekat-sekat teologis, yag dalam Islam diformulasikan dengan statemen al-Qur'an : Kalimatun Sawa'. Lebih lanjut baca dalam, Anjar Nugroho, dalam, *Islam Liberal di Muhammadiyah*, dalam: WWW.Soegana.persepsi-agamamilennium.mash, Agustus-2007, dan diakses pada tanggal 1 april 2008.

[29]PP Muhammadiyah, "Majlis Tabligh dan Dakwah Khusus", *Majalah Tabligh*, edisi 04, Agustus, 2006, Suara redaksi, 11-17. lihat juga pada titel Muhammadiyah dan paham lain oleh Syamsul Hidayat di majalah yang sama, 21-23.

[30]Akh. Muzakki. *Importisasi dan Lokalisasi ideology Islam: Ekspresi gerakan Islam Pinggiran Pasca-soeharto*, dalam, Jurnal Ma'arif Institut, edisi 04 vol.2, 2007, 11-12.

[31]Abd. A'la. *Dari Neomodernisme ke Islam Liberal* (Jakarta: Paramadina, 2003), 47-53. Penulis mengurai pemikiran Fazlurrahman dalam berbagai karyanya, antara lain Islamic Metodology in History, Mayor Themes of

Arkoun,[33] Abid al-Jabiri,[34] Fatimah Mernissi,[35] dan lain-lain. Fenomena ini sesungguhnya telah memperkaya wawasan dan wacana keislaman di dunia Islam, khususnya Indonesia.

Jika secara garis besar dipetakan, perkembangan pemikiran ummat Islam, setidaknya ada 5 (lima) tren besar yang dominan, yakni;

Pertama : Fundamentalistik, yakni kelompok pemikiran yang sepenuhnya percaya kepada doktrin Islam sebagai satu-satunya alternatif bagi kebangkitan umat manusia. Bagi kelompok ini Islam telah cukup, mencakup tatanan sosial, politik, ekonomi, sehingga tidak butuh lagi segala metode maupun teori-teori dari *Barat*. Para pemikir yang punya kecenderungan ini, misalnya, Sayyid Qutb, Abu A'la al-Maududi, Said Hawa, dan Ziauddin Sardar.

Kedua : *Tradisionalistik*, yakni kelompok pemikiran yang berusaha untuk berpegang teguh pada tradisi-tradisi yang telah mapan. Bagi kelompok ini seluruh persoalan ummat telah dibicarakan secara tuntas oleh para ulama pendahulu, tugas kita sekarang hanyalah menyatakan

---

The Qur'an, dan Islam & Modernity (Cicago: The Cicago University Press, 1984).

[32]Hasan Hanafi, dikenal sebagai tokoh Islam Kiri. Hal ini apat dilacak lewat beberapa karyanya, antara lain: *al-Turath wa alTajdiid, Mauqifuna min al-Turath al-Qadiim* (Kairo: Muassasah al-Jam'iyyah, 1992).

[33]Tokoh pemikir modern ini bisa dilacak dari beberapa karyanya, antara lain yang berisi gagasan-gagasan pembaruan Islam: *Nalar Islami dan Nalar Modern, Berbagai Tantangan dan Jalan baru* (terjemahan) (Jakarta: INIS, 994).

[34]Pemikiran-pemikiran keagamaannya bisa dilacak dari beberapa karyanya antara lain, *Naqd al-Aql al-Arabi: Takwiin al-Aqd al-Arabi, Bunyah al-Aql al-Arabi* (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-Arabiyah), 1990.

[35]Seorang tokoh penggagas pembaruan pemikiran hak-hak Perempuan dalam Islam, bisa dilacak lewat salah satu karyanya, *Beyond the Veil: Male-Vemale Dynamics in a Modern Sociaty* (Cambridge: Schenkman Publishing Company), 1975.

kembali apa yang pernah dikerjakan oleh mereka. Modernitas adalah salah satu yang pernah dihasilkan oleh ummat periode lalu. Para pemikir yang punya kecenderungan ini, misalnya, Husein Nashr, Murtaḍa Muṭahari dan Naquib Alatas.

Ketiga: *Reformistik*, yakni kelompok pemikiran yang berusaha merekonstruksi ulang warisan-warisan budaya Islam dengan cara memberi tafsiran-tafsiran baru. Menurut kelompok ini sesungguhnya ummat Islam telah memiliki *turats* warisan budaya yang bagus, tetapi itu harus dibangun kembali dengan cara baru yang lebih rasional dan modern. Para pemikir yang punya kecenderungan ini, misalnya, Hasan Hanafi, Asghar Ali Engineer, Amina Wadud, dan M. Imarah.

Keempat: Postradisionalistik, yakni kelompok pemikiran yang berusaa mendekonstruksi warisan-warisan budaya Islam berdasarkan standar-standar modernitas. Kelompok ini pada satu sisi tidak berbeda dengan reformistik (bahwa warisan tradisi Islam tetap relevan untuk era modern selama ia dibaca, diinterpretasi, dan dipahami sesuai standar modernitas), pada sisi lain bagi Postradisionalistik relevansi tradisi Islam tersebut tidak cukup dengan interpretasi baru lewat pendekatan rekonstruktif, tetapi harus lebih dari itu, yakni dekonstruktif. Pemikir kelompok ini, misalnya, Mohamed Arkoun, Abid al-Jabiri, Shahrur, Naṣr Hamid Abu Zayd, Fatimah Mernissi.

Kelima : Modernistik, yakni kelompok pemikiran yang hanya mengakui sifat rasional-ilmiah dan menolak cara pandang agama serta kecenderungan mistik yang tidak berdasarkan nalar praktis. Menurut kelompok ini agama dan tradisi masa lalu sudah tidak relevan dengan tuntutan

zaman sehingga ia harus dibuang dan ditinggalkan. Karakter utama gerakan ini adalah keharusan berpikir kritis dalam soal-soal kemasyarakatan dan keagamaan serta menolak kejumudan dan *taqlid*. Para pemikir kelompok ini, misalnya, Kassim Ahmad, Ṭayyib Taiziniy, dan Zaki Najib Mahmud.

Ke lima tipologi pemikiran keagamaan Islam tersebut merupakan *trend* pemikiran yang sedang diminati sampai saat ini baik di Tmur Tengah, Barat, maupun Tmur pada umumnya. Dengan kata lain ke lima tipologi pemikiran ini sangat hegemonik di masyarakat muslim. Bahkan berbagai harakah, halaqah, atau organisasi keagamaan (Islam) yang bermunculan dewasa ini, jika dirunut silsilahnya, maka akan menginduk juga pada salah satu dari lima tipe tersebut.[36]

Shonhadji Sholeh melihat dalam tiga tipologi pemikiran Islam, yakni: *Pertama,* Tipologi pemikiran *transformatik*, yang mewakili para pemikir Islam yang secara radikal menawarkan proses transformasi umat Islam dari budaya tradisional patrialkal ke masyarakat yang rasional dan ilmiah. Mereka menolak cara pandang agama dan kecenderungan mistik yang tidak berdasarkan nalar. *Kedua,* Tipologi Pemikiran *Reformistik,* yakni pemikiran yang melakukan penafsiran-penafsiran baru yang lebih hidup dan lebih cocok dengan tuntutan zaman. Secara lebih khusus kelompok ini dibagi menjadi dua kecenderungan, a) para pemikir yang menggunakan pendekatan rekonstruktif, yakni melihat tradisi dengan perspektif pembangunan kembali, tetapi berbeda dengan tradisionalis. b) para pemikir yang menggunakan metode dekonstruktif. Pola

[36] A. Khudori Soleh (ED), *Pemikiran Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2003), xv-xxi.

pemikiran ini diilhami oleh gerakan strukturalis Prancis dan beberapa tokoh post-modernis lainnya. *Ketiga*, Tipologi Pemikiran *Ideal Totalistik*, yang berpandangan idealis terhadap ajaran Islam yang bersifat totalistik. Kelompok ini sangat komit dengan aspek religius budaya Islam. Peradaban hendak mereka bangun dengan menghidupkan kembali Islam sebagai agama, budaya, dan peradaban. Mereka menolak unsur-unsur asing yang datang dari Barat, karena dalam Islam sendiri sudah cukup untuk semua aspek kehidupan manusia.[37]

Analog dengan perkembangan pemikiran tersebut, di dalam Persyarikatan Muhammadiyah juga terjadi perkembangan wacana pemikiran keagamaan terutama yang dilakukan oleh para elit pimpinan Persyarikatan tersebut. Pemikiran keagamaan para elit Muhammadiyah ini sebenarnya merupakan pengembangan dan atau interpretasi atas rumusan-rumusan ideologis di Muhammadiyah, seperti Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, serta rumusan-rumusan resmi lainnya. Rumusan-rumusan tersebut disebut Rumusan Ideologis, karena Muhammadiyah memandang bahwa kandungan atau isi dari rumusan-rumusan tersebut bersifat mendasar yang kemudian ditetapkan secara resmi oleh Persyarikatan untuk dijadikan sebagai pedoman, pegangan, landasan, dan sumber motivasi bagi para pimpinan dan warga Muhammadiyah dalam menggerakkan roda organisasi.[38]

[37]Sonhadji Sholeh, "Pembaruan Wacana Kaum Nahdliyyin, Kajian Sosiologis tentang perubahan dari tradisionalisme ke Pos-tradisionalisme", (Disertasi, UNAIR Surabaya, Surabaya, 2004), 24-30.

[38]A. Rasyad Sholeh, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam* (Yogyakarta: PT. Persatuan, 1998) 48. juga bisa dilihat dalam, Haedar Nashir, *Meneguhkan*

Perlu ditegaskan di sini, bahwa kata ideologi erat kaitannya dngan visi atau gambaran verbal tentang masyarakat yang baik. Ideologi menurut Charles Glock adalah sesuatu yang paling signifikan ketika terjadi perubahan sosial.[39] Dalam hal ini Fachri Ali menyimpulkan bahwa salah satu kualitas yang paling fundamental dari ideologi adalah bahwa ia merupakan refleksi dari realitas kehidupan yang dihadapi manusia. Karena realitas bersifat dinamis, maka ideologi pun bersifat dinamis. Kualitas semacam inilah yang menyebabkan ideologi-ideologi besar tetap hidup, berkembang, dan relevan.[40] Dalam makna yang sama, Muhammadiyah juga memiliki beberapa rumusan ideologi. Melalui ideologi dapat ditanamkan dan diperkuat solidaritas kolektif seluruh komponen Muhammadiyah dalam menjalanan misi dan usaha menuju terwujudya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.[41]

Berdasarkan fenomena tersebut maka Muhammadiyah harus segera memperluas paradigma tajdidnya bukan hanya *fiqih sentris*, atau berputar pada persoalan TBC tetapi lebih penting lagi harus merambah pada ranah-ranah pengembangan pemikiran, terutama yang bersinggungan dengan persoalan teologi atau *ideology*. Jika tidak, maka akan semakin dipertanyakan eksistensi ke-*tajdid*-an Muhammadiyah, bahkan bisa jadi Muhamadiyah sudah tidak layak lagi memegang predikat sebagai gerakan *tajdid.*

Ideologi Gerakan Muhammadiyah (Yogyakarta: UMM Press,Suara Muhammadiyah, dan Majlis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, 2006), 101-194.

[39]Charles Glock, *Religion ang Society, Intension*, R. Rand Mc Nally, pc. 25

[40] Fachri Ali, *Islam Ideologi Dunia dan Dominasi Struktural* (Bandung: Mizan, 1993), 62.

[41]Haedar Nashi, *Dialok Pemikiran Islam dalam Muhammadiyah* (Yogyakarta: BPK PP Muhammadiyah, 1992), 21.

Dalam perkembangan mutakhir, munculnya para elit pimpinan Muhammadiyah yang pemikiran-pemikiran ideologisnya sangat berpengaruh terhadap massa Muhammadiyah di kalangan bawah, merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dicermati. Terdapat beberapa nama elit pimpinan Muhammadiyah yang cukup fenomenal, yakni Muhammad Amin Rais., Achmad Syafii Maarif, M. Din Syamsuddin, dan Yunahar Ilyas.

Muhammad Amin Rais di kalangan warga Muhammadiyah dikenal sebagai tokoh yang lahir dari lingkungan kultur Muhammadiyah serta lingkungan keluarga yang religius di Solo Jawa tengah. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Periode 1995-2000 ini menjabat sebagai Penasehat Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2010. M. Amien Rais pernah mencetuskan ide *Tauhid Sosial* dalam rangka revitalisasi organisasi Muhammadiyah. Amin Rais juga dikenal sebagai lokomotif reformasi. Amin Rais mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai partai terbuka yang bukan hanya sebagai wadah berhimpunnya umat Islam saja tetapi untuk semua warga Indonesia apapun agamanya yang peduli terhadap nasib bangsa. Amin juga dikenal sebagai peletak dasar pola berpolitik Muhammadiyah. Amin merumuskan sikap berpolitik Muhammadiyah dalam dua pola, yakni *High Politic* dan *Low Politics.* Pola Low *Politics,* dianggap kurang cocok bagi Muhammadiyah karena identik dengan jatah kursi atau jabatan tertentu. Sedangkan pola High Politic dianggapnya lebih cocok bagi Muhammadiyah karena pola ini lebih adiluhung, etis, dan harus dibingkai dengan akhlaqul karimah. Meskipun demikian dinamika perjuangan Amin Rais di ranah Politik justeru diindikasikan sebagai representasi Muhammadiyah. Amin Rais, juga

dikenal tokoh yang menggagas ide membangun kekuatan di atas keberagaman.[42]

Achmad Syafii Maarif, di kalangan warga Muhammadiyah dikenal sebagai sosok intelektual muslim di Indonesia yang berkualitas. Tokoh asal Sumatera Barat ini memiliki pengetahuan agama yang cukup memadai, dan memiliki komitmen memperjuangkan *pluralisme* di Indonesia, khususnya di kalangan ummat Islam. Syafii dikenal gigih menolak dicantumkannya kembali tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang diperjuangkan beberapa elemen masyarakat Muslim era tahun 2000-2004. Syafii membuat pernyataan tajam tentang perilaku Islam Fundamentalis. Menurutnya al-Qur'an jauh lebih toleran dibandingkan segelintir orang yang intoleran terhadap perbedaan, dan kaum fundamentalis termasuk kategori ini.[43] Syafii juga yang dikenal keras menyuarakan bahwa upaya mendirikan Negara Islam di Indonesia adalah sebuah *Illusi* atau mimpi di siang bolong.[44] Untuk melestarian berbagai gagasan pemikiran segarnya, beliau mendirikan *Maarif Institute*.

M. Din Syamsuddin di kalangan warga Muhammadiyah dikenal sebagai tokoh *lunak* yang telah berhasil menaungi berbagai elemen yang cenderung saling bersebrangan khususnya di internal Muhammadiyah. Din Syamsuddin seorang tokoh intelektual muda yang berasal dari Nusa Tenggara Barat ini bernama asli Muhammad Sirojuddin (putera seorang tokoh NU H. Muhammad Syamsuddin), berlatar belakang keluarga Nahdhiyyin

[42]M. Amin Rais, *Membangun Kekuatan di atas Keberagaman* (Yogyakarta: Pustaka SM, 1998), 111-121.
[43]Abdurrahman Wahid (ED), *Illusi Negara Islam* (Jakarta: The Wahid Institut, 2009), 8.
[44] Ibid., 17-19.

mampu berkomunikasi dengan baik terhadap para elit NU sehingga nyaris tak terjadi gesekan-gesekan terbuka antara dua ormas islam ini. Din Syamsuddin dikenal dekat dengan para elemen JIMM (Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah), Juga dekat dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang ditengarai terkontaminasi dengan Jaringan Islam Liberal. Tetapi Din Syamsuddin juga dikenal sangat akrab dan pemberi support besar terhadap kalangan Muhammadiyah Murni yang dalam banyak hal sangat menentang atau setidak-tidaknya berseberangan dengan JIMM maupun JIL, bahkan pernah menghadiri dan memberi sambutan pada acara forum *Hizbuttahrir* di Senayan Jakarta. Din Syamsuddin juga perumus utama slogan Islam tengahan *Attawazun Baina al-Tajrid fi al-Aqidah wa al-Tajdid fi al-Mu'amalah.* Ketika melihat adanya pelabelan pada Islam di era pemikiran kontemporer ini, Din Syamsuddin menilai bahwa pelabelan Islam dengan label-label *Islam Liberal, Islam Madhhab Kritis, Islam Progresif, Islam Transformatif* dan lain-lain, justeru akan mereduksi makna Islam itu sendiri. Karena Islam adalah sistem yang komprehensif (kaffah), sehingga memberikan label-label partikular tersebut justeru akan mengurangi kadar *universalitas* dan *comprehensiveness* Islam.[45] Pernah menjadi pimpinan delegasi tokoh agama sedunia dalam forum dialog antar umat beragama "Word Confrence on Religions For Peace" di Georgetown, Washington, DC, Amerika Serikat.[46]

[45]Pradana Boy ZTF, *Islam Dialektis, Membendung Dogmatisme menuju Liberalisme* (Malang: UMM Press, 2005), iii-v.
[46]PWM Jawa Timur, "Dunia Islam", *Matan (majalah bulanan)*, edisi November 209, 39.

Yunahar Ilyas, dikenal di kalangan Muhammadiyah sebagai tokoh Pimpinan Pusat yang teguh mengawal Purifikasi Aqidah Islam di Muhammadiyah. Yunahar sebagai sosok intelektual muda dari Sumatera Barat, lulusan perguruan tinggi Timur Tengah ini dikenal gigih melakukan penguatan ideologi Muhammadiyah dengan terus menekankan sosialisasi rumusan-rumusan ideologis *Muhammadiyah, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah dan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah*. Yunahar juga dikenal di banyak tulisannya mengedepankan makna Islam Murni yang harus selalu dijaga dan dikawal. Yunahar pula yang dikenal menolak pemikiran-pemikiran Islam kontemporer yang cenderung mengarah kepada Pluralisme, Sekularisme, maupun Liberalisme.

Dengan demikian tentu saja pemkiran para pimpinan Muhammadiyah akan berpengaruh pada umat atau warga Muhammadiyah di bawah. Hal ini adalah wajar sebab dalam sebuah organisasi tentu ada relasi atau pola-pola hubungan antara pinpinan dan yang dipimpin. Muhammadiyah dikenal memiliki kesatubahasaan yang tinggi ketika pimpinannya membuat atau mensosialisasikan sebuah kebijakan, meskipun juga merupakan keadaan yang wajar terjadinya polarisasi perbedaan pemikiran di internal Muhammadiyah sendiri, baik dalam aspek politik, ekonomi, maupun hukum keagamaan. Disamping itu kenyataan bahwa warga Muhammadiyah ternyata juga memiliki keanekaragaman pemikiran dan pemahaman terhadap *ideologi* Muhammadiyah. Bahkan dalam penelitian Abdul Munir Mulkhan, terdapat empat varian keberagamaan warga Muhammadiyah, yakni kelompok *al-Ikhlash* atau

Islam Murni, kelompok Mainstreem atau *Dahlanis, Kelompok MUNU* atau kelompok campuran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, dan kelompok *Marmud* atau *Marhaenisme* Muhammadiyah.[47]

Berdasarkan pemikiran di atas, maka penulis melakukan penelitian tentang seberapa jauh umat atau warga Muhammadiyah memaknai pemikiran-pemikiran ideologis para pimpinannya, dengan judul "*Relasi Pimpinan Dan Warga Persyarikatan: Studi Makna Pemikiran Ideologis Pimpinan Muhammadiyah bagi Warga Muhammadiyah Paciran, Lamongan".*

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dalam penulisan ini penulis perlu melakukan beberapa pembatasan berkaitan dengan penentuan fokus kajian bahwa yang dimaksud pimpinan Muhammadiyah adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah di tingkat pusat. Tokoh-tokoh tersebut dianggap oleh khalayak khususnya warga Muhammadiyah memiliki reputasi yang menonjol dan dianggap sangat berpengaruh terhadap warga Muhammadiyah. Mereka itu ialah:

1. Muhammad Amin Rais, ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode muktamar ke-43 tahun 1995-2000, dan Penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2010.
2. Achmad Syafii Maarif, ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode muktamar ke-44 tahun 2000-2005, dan menjadi Penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2010.

[47]Abdul Munir Mulkhan, *Islam Murni dalam Masyarakat Petani* (Yogyakarta: Bentang, ii-iii.

3. M. Din Syamsuddin, ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode muktamar ke-45 tahun 2005-2010, dan terpilih kembali menjadi ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode muktamar ke-46 tahun 2010- 2015.
4. Yunahar Ilyas, ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode muktamar ke-45 tahun 2005-2010, dan terpilih kembali menjadi ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode Muktamar ke 46 tahun 2010-2015.

Pembatasan berikutnya berkaitan dengan lokasi penelitian, yakni Desa Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur. Lokasi ini menjadi sasaran penulis melakukan penelitian karena adanya beberapa pertimbangan yaitu:

1. Desa Paciran dikenal sebagai basis Muhammadiyah di Kabupaten Lamongan. Lamongan itu sendiri dianggap salah satu basis Muhammadiyah di Jawa Timur.
2. Desa Paciran adalah sebuah desa transisi (menuju desa kota), berada di pesisir pantai utara dikenal sebagai basis masuknya agama Islam awal yang dilakukan Wali Songo, sehingga memiliki semangat keagamaan yang tinggi sampai sekarang. Paciran dikenal banyak menelorkan kader-kader Muhammadiyah yang banyak berkiprah di Muhammadiyah baik secara regional maupun nasional.
3. Pemikiran Teologis warga Muhammadiyah Paciran memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan daerah-daerah lain baik di Kabupaten Lamongan maupun di Wilayah Jawa Timur, hal ini memerlukan pelacakan secara cermat melalui penelitian.

C. Fokus Kajian

Berdasarkan paparan baik dalam upaya menelisik akar masalah maupun identifikasi dan batasan masalah di atas, maka Fokus kajian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: pertama, Bagaimana bentuk relasi dan pola-pola hubungan, antara Pimpinan dengan warga di dalam Persharikatan Muhammadiyah. Kedua, Bagaimana karakteristik pengembangan pemikiran Ideologis (pengembangan atau interpretasi atas rumusan-rumusan ideologis) yang dilakukan oleh para Pimpinan Persharikatan Muhammadiyah. Ketiga, Bagaimana warga Muhammadiyah Paciran Lamongan memaknai pengembangan pemikiran ideolgis yang dilakukan oleh para elit Pimpinan Persharikatan Muhammadiyah. Penulisan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dengan fokus Makna Pemikiran ideologis Elit Pimpinan Muhammadiyah bagi masyarakat atau warga Muhammadiyah Paciran Lamongan ini, bertujuan: Memahami relasi dan pola-pola hubungan antara warga dan Pimpinan di dalam Persharikatan Muhammadiyah. Selanjutnya diharapkan bisa Memahami pola-pola pengembangan pemikiran dan bentuk-bentuk interpretasi atas rumusan-rumusan Ideologis yang dilakukan oleh para pimpinan persyarikatan Muhammadiyah. Yang tidak kalah pentingnya adalah Memahami makna Pemikiran ideologis Pimpinan Persharikatan Muhammadiyah bagi warga Muhammadiyah Paciran Lamongan.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori pola-pola dalam relasi antara Elit dengan Massa, khususnya di kalangan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai salah satu Ormas Islam terbesar di Indonesia. Di samping itu, secara praktis diharapkan hasil

penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu masukan dan pertimbangan bagi para elit pimpinan Muhammadiyah untuk merekonstruksi pola-pola sosialisasi kebijakan yang dilakukan oleh para elit Muhammadiyah berkaitan dengan pemikiran Ideologis atau teologis terhadap warga Muhammadiyah. Kebijakan tersebut berkaitan erat dengan karakteristik pemikiran para elitnya atau para pimpinannya khususnya berkaitan dengan pemikiran ideologis mereka. Hal ini sangat besar pengaruhnya bagi warga Muhamadiyah.

D. Kajian Terdahulu.

Penelitian-penelitian yang pernah dilakukan terdahulu dengan obyek penelitian Muhammadiyah memang sudah ada, tetapi focus penelitiannya tidak sama, dalam hal ini bisa disebutkan beberapa diantaranya:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Mitsuo Nakamura. Dalam hasil laporannya *"The Reformist Ideology Of Muhammadiyah",* peneliti dari Jepang ini melakukan studi lapangan beberapa bulan di "Kota gede" yang dianggapnya sebagai perkampungan yang khas berideologi Muhammadiyah di Yogyakarta. Salah satu focus penelitiannya adalah mengenai pembaharuan keagamaan di kalangan Muhammadiyah, hasilnya adalah bahwa di Muhammadiyah terjadi pembaharuan yang cukup signifikan di bidang pendidikan dan social, Hali ini merujuk kepada pemikiran A. Dahlan sang pendiri Muhammadiyah yang mengatakan bahwa "Agama itu adalah amal, bukan teori". Tetapi dia tidak menemukan adanya pembaharuan, setidak-tidaknya pembaharuan pemahaman di bidang teologi. Di samping itu dia melakukan telaah kritis terhadap ada tidaknya dunia tasawuf di lingkungan Muhammadiyah.

Hasilnya sangat mengejutkan bahwa kehidupan tasawuf di Muhammadiyah sangat subur (dia melacak hamper semua elit di Muhammadiyah terutama tokoh-tokoh yang pernah menjadi Ketua pimpinan pusat adalah para pengamal tasawuf yang disiplin). Ini sekaligus menjawab tesis yang mengatakan bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan modern dalam Islam tidak mungkin adanya kehidupan tasawuf di dalamnya.[48]

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh James L. Peacock. Dalam hasil laporannya *"Purifying The Faith The Muhammadiyah Movement In Indonesia Islam"*, peneliti dari Amerila ini melakukan perjalanan panjang keliling Nusantara untuk singgah dan mengobservasi di kantong-kantong basis Muhammadiyah. Fokus utama penelitiannya adalah tentang proses kegiatan kaderisasi yang diadakan oleh organisasi Islam Muhammadiyah, yang memungkinkan organisasi ini memiliki cadangan kader yang terus mengalir dan siap pakai setiap saat. Hasilnya adalah bahwa di Muhammadiyah ada sebuah model perkaderan yang khas Muhammadiyah yang relative berpola sama dan berkesinambungan di seluruh kota-kota, daerah-daerah di seluruh Indonesia. Pola perkaderan itu bernama Darul Arqam dan Baitul Arqam. Pola perkaderan ini menurutnya dinilai cukup bagus.[49]

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Munir Mulkhan. Dalam laporannya, Munir menemukan adanya varian keberagamaan warga Muhammadiyah di sebuah desa di Kecamatan Wuluhan, Jember Jawa Timur. Varian

[48]Mitsuo Nakamura, *The Reformist of Ideologis in Muhammadiyah Movement Organization*, alih bahasa, Muhajir Darwin, (Yogyakarta: Hapsara,1985), 20.

[49]James L., Peacock, *Purifying The Fait The Muhammadiyah in Indonesia Islam* (Yogyakarta: Cipta Kreatif, 199), 68

tersebut yaitu: 1). Kelompok al-Ikhlash, yakni kelompok yang dikenal *fundamentalis* dan mengklaim dirinya sebagai kaum Islam Murni serta cenderung tidak berkompromi dengan warga lain yang tidak sependapat dengan pemikirannya. 2) Kelompok Dahlan, yakni merupakan kelompok mainstream di Muhammadiyah, mereka cenderung taat semua aturan dan keputusan di Muhammadiyah serta cenderung akomodatif terhadap pemikiran lain yang tidak sejalan dengan mereka. 3) Kelompok Munu, yakni kelompok campuran antara faham Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (baca: Munu=Muhammadiyah NU). Kelompok ini sangat toleran terhadap berbagai perbedaan bahkan mereka cenderung mencampur adukkan antara amalan ibadah faham Muhammadiyah dan faham Nahḍatul Ulama. 4) Kelompok Marmud, yakni kelompok Marhaenisme dalam Muhammadiyah. Kelompok ini terdiri dari orang –orang yang memiliki semangat nasionalis yang tinggi sekaligus memliki keganggaan yang tinggi terhadap Muhammadiyah meskipun kedalaman pemahaman keagamaan mereka sebenarnya tidak mendalam.[50]

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Jainuri. Penelitiannya ini dilakukan dalam rangka menyelesaikan studinya di program doctoral Institute Of Islamic Studies McGill, Montreal, Canada. Focus kajiannya adalah pada masalah pandangan ideologis Muhammadiyah sebagai gerakan modern. Hasil penelitiannya antara lain ialah, bahwa Muhammadiyah pada perkembangan awalnya dipimpin oleh perpaduan antara para intelektual lulusan atau minimal terpengaruh pemikiran tokoh-tokoh muslim

[50]Abdul Munir Mulkhan, *Islam Murni dalam Masyarakat Petani*,

timur tengah, dengan para pedagang kelas menengah. Perpaduan ini melahirkan pandangan keagamaan, pandangan dunia, dan sistem nilai etika yang khas, di mana nilai-nilai keterbukaan, toleransi, pluralitas, kerja keras, kalkulasi rasional, dan semangat liberalisme, yang kesemuanya didorong untuk bisa dikembangkan. Semua nilai ini akhirnya menjadi cirri orientasi ideology dan pola-pola aktifitas gerakan Muhammadiyah.

Temuan-temuan lainnya, misalnya, Muhammadiyah memahami bahwa Islam menyediakan landasan teologis bagi misi gerakan dan pembaruan social. Muhammadiyah meyakini bahwa ketika nilai-ilai iman dan ibadah diletakkn dalam konteks sosal, akan memiliki implikasi yang jauh lebih luas. Muhammadiyah meyakini bahwa Islam sebagai agama, baru akan berakna jika diaplikasikan dalam tindakan nyata, sehingga Islam nampak sebagai kebenaran doctrinal yang praktis, tidak teoritis, tidak abstrak. Implementasi ajaran Islam meruakan tujuan utama dari makna Islam yang sesungguhnya.[51]

Di samping penelitian-penelitian tersebut di atas, beberapa karya lain yang sebagian besar berbentuk esai atau buku yang bercorak biografis dan selama ini menjadi rujukan bagi para penulis mengenai Muhammadiyah, yang mencakup paparan mengenai perjuangan dan gagasan Ahmad Dahlan antara lain adalah oleh Abdullah Puar, *Perjuangan dan Pengabdian Muhammadiyah* (1949), A. Mukti Ali, *The Muhammadiyah Movement : A Bibliographical Introduction* (1957), Solihin Salam, *Ahmad*

[51]chmad Jainuri. *Ideologi Kaum Reformis, Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal* (awalnya adalah disetasi gelar Doktornya dengan judul: *The Formation Of The Muhammadiyah's Ideology 1912-1942*, di Institut of Islamic Studies, Mc Gill University, Canada). Surabaya: Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat (LPAM), 2002.

Dahlan, Reformer Indonesia (1963), Syamsi Sumardjo, *Pengetahuan Muhammadiyah dan Tokoh-tokohnya* (1967), Djarnawi Hadikusuma, *Matahari-matahari Muhammadiyah* (tanpa tahun), Yunus Salam, *Riwayat Ahmad Dahlan dan Amal Perjuangannya* (1968), Ahmad Jainuri, *Muhammadiyah Gerakan Reformasi Islam di Jawa Pada Awal Abad Kedua Puluh* (1981) M. Rusli Karim (editor), *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentar* (1986) dan masih banyak lagi artikel-artikel seminar yang tidak disebutkan dalam daftar ini.

Dari data-data penelitian yang pernah ada itu penulis memfokuskan pada masalah lain yang belum disentuh oleh para peneliti tersebut, yaitu pada masalah bagaimana pengembangan dan interpretasi-interpretasi ideologis telah dilakukan oleh para elit pimpinan Muhammadiyah, dan peneliti juga akan menelusuri bagaimana warga Muhammadiyah memaknainya. Design penelitiannya berjudul *"Relasi Pimpinan dan Warga Persyarikatan: Studi tentang makna Pemikiran Ideologis Elit Pimpinan Muhammadiyah bagi Warga Muhammadiyah Paciran".*

E. Metode Penelitian.

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian kualitatif dengan studi atau kajian pada fokus tententu, sehingga peneliti berharap memperoleh data yang relatif lengkap dan mendalam, juga bisa dilakukan interpretasi terhadap berbagai fenomena yang ditemui di lapangan. Jika merujuk pada teori Edmund Husserl maka peneliti memilih menggunakan metode fenomenologi karena metode fenomenologi ini lebih tepat untuk penelitian kualitatif sosiologis.

Istilah penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miler (1986: 9) pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif. Pengamatan kuantitatif melibatkan pengukuran tingkatan suatu ciri tertentu. Untuk menemukan sesuatu dalam pengamatan, pengamat harus mengetahui apa yang menjadi ciri sesuatu itu. Untuk itu pengamat mulai mencatat atau menghitung dari satu, dua, tiga, dan seterusnya. Berdasarkan pertimbangan dangkal demikian, kemudian peneliti menyatakan bahwa penelitian kuantitatif mencakup setiap penelitian yang didasarkan atas perhitungan persentase, rata-rata, dan perhitungan statistik lainnya. Dengan kata lain penelitian kuantitatif melibatkan diri pada perhitungan atau angka atau kuantitas.

Dalam perkembangan lebih lanjut ada sejumlah nama yang digunakan para ahli tentang metodologi penelitian kualitatif[52] seperti: interpretif *grounded research*, ethnometodologi, paradigma naturalistik, interaksi simbolik, semiotik, heuristik, hermeneutik, atau holistik, yang kesemuanya itu tercakup dalam klasifikasi metodologi penelitian *post-positivisme* phenomenologik interpretif. Berdasarkan beragam istilah maupun makna kualitatif, dalam dunia penelitian istilah penelitian kualitatif setidak-tidaknya memiliki dua makna, yakni makna dari aspek filosofi penelitian dan makna dari aspek desain penelitian.

1. Filosofi Penelitian.
   Dari aspek filosofi, penelitian kualitatif dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: a) Penelitian kualitatif

[52]Noeng Muhajir.,*Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi IV* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 17.

dalam paradigma kuantitatif (positivisme). Penelitian kualitatif jenis pertama ini menggunakan paradigma positivisme. Kriteria kebenaran menggunakan ukuran frekwensi tinggi. Data yang terkumpul bersifat kuantitatif kemudian dibuat kategorisasi baik dalam bentuk tabel, diagram, maupun grafik. Hasil kategorisasi tersebut kemudian dideskripsikan, ditafsirkan dari berbagai aspek, baik dari segi latar belakang, karakteristik dan lain sebagainya. Dengan kata lain data yang bersifat kuantitatif ditafsirkan dan dimaknai lebih lanjut secara kualitatif.

b) Penelitian kualitatif dalam paradigma bahasa. Penelitian kualitatif dalam paradigma bahasa (dan sastra) menggunakan paradigma postpositivisme. Penelitian kualitatif jenis kedua ini berusaha mencari makna, baik makna di balik kata, kalimat, maupun karya sastra. Penelitian kualitatif jenis ini masih bisa dibedakan menjadi : sosiolinguistik, strukturalisme linguistik, dan strukturalisme genetik.

c) Penelitian kualitatif dalam paradigma phenomenologi. Penelitian kualitatif dalam paradigma phenomenologi berusaha memahami arti (mencari makna) dari peristiwa dan kaitan-kaitannya dengan orang-orang biasa dalam situasi tertentu.[53] Dengan kata lain penelitian kualitatif dalam paradigma phenomenologi adalah penelitian yang berusaha mengungkap makna terhadap fenomena perilaku kehidupan manusia, baik manusia dalam kapasitas sebagai individu, kelompok, maupun masyarakat luas. Penelitian kualitatif dalam paradigma phenomenologi

[53] Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake sarasin, 2001), 9.

telah mengalami perkembangan mulai dari model Interpretif Geertz, model grounded research, model ethnographik, model paradigma naturalistik dari Guba, dan model interaksi simbolik.

Model penelitian naturalistik (the naturalistic method of inquiry, menurut istilah Guba) menurut Noeng Muhajir[54] disebut sebagai model yang telah menemukan karakteristik kualitatif yang sempurna, artinya bahwa kerangka pemikiran, filsafat yang melandasinya, ataupun operasionalisasi metodologinya bukan rektif atau sekedar merespons dan bukan sekedar menggugat yang kuantitatif, melainkan membangun sendiri kerangka pemikirannya, filsafatnya, dan operasionalisasi metodologinya. Para ahli metodologi penelitian kualitatif pada umumnya mengikuti konsep model naturalistik yang dikemukakan oleh Guba. Moleong menggunakan istilah paradigma alamiah untuk menunjuk pada paradigma kualitatif naturalistik sebagai kebalikan dari paradigma ilmiah untuk menunjuk pada paradigma kuantitatif .[55]

Lebih lanjut, Guba mengetengahkan 14 (empat belas) karakteristik penelitian naturalistik, yaitu:

a) Konteks natural (alami), yaitu suatu konteks keutuhan (entity) yang tak akan dipahami dengan membuat isolasi atau eliminasi sehingga terlepas dari konteksnya.
b) Manusia sebagai instrumen. Hal ini dilakukan karena hanya manusia yang mampu menyesuaikan

[54] Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 147.

[55] Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 15.

diri dengan berbagai ragam realitas dan menangkap makna, sedangkan instrumen lain seperti tes dan angket tidak akan mampu melakukannya.

c) Pemanfaatan pengetahuan tak terkatakan. Sifat naturalistik memungkinkan mengungkap al-hal yang tak terkatakan yang dapat memperkaya hal-hal yang diekspresikan oleh responden.
d) Metode kualitatif. Sifat naturalistik lebih memilih metode kualitatif dari pada kuantitaif karena lebih mampu mengungkap realitas ganda, lebih sensitif, dan adaptif terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.
e) Pengambilan sampel secara purposive.
f) Analisis data secara induktif, karena dengan cara tersebut konteksnya akan lebih mudah dideskripsikan. Yang dimaksud dengan analisis data induktif menurut paradigma kualitatif adalah analisis data spesifik dari lapangan menjadi unit-unit dan dilanjutkan dengan kategorisasi.
g) Grounded theory. Sifat naturalistik lebih mengarahkan penyusunan teori diangkat dari empiri, bukan dibangun secara apriori. Generalisasi apriorik nampak bagus sebagai ilmu nomothetik, tetapi lemah untuk dapat sesuai dengan konteks idiographik.
h) Desain bersifat sementara. Penelitian kualitatif naturalistik menyusun desain secara terus menerus disesuaikan dengan realita di lapangan, tidak menggunakan desain yang telah disusun secara ketat. Hal ini terjadi karena realita di lapangan tidak dapat diramalkan sepenuhnya.
i) Hasil dirundingkan dan disepakati bersama antara peneliti dan responden. Hal ini dilakukan untuk

menghindari salah tafsir atas data yang diperoleh karena responden lebih memahami konteksnya daripada peneliti.

j) Lebih menyukai modus laporan studi kasus, karena dengan demikian deskripsi realitas ganda yang tampil dari interaksi peeliti dengan responden dapat terhindar dari bias. Laporan semacam itu dapat menjadi landasan transferabilitas pada kasus lain.

k) Penafsiran bersifat idiographik (dalam arti keberlakuan khusus), bukan ke nomothetik (dalam arti mencari hukum keberlakuan umum), karena penafsiran yang berbeda nampaknya lebih memberi makna untuk realitas yang berbeda konteksnya.

l) Aplikasi tentatif, karena realitas itu ganda dan berbeda.

m) Ikatan konteks terfokus. Dengan pengambilan fokus, ikatan keseluruhan tidak dihilangkan, tetap terjaga keberadaannya dalam konteks, tidak dilepaskan dari nilai lokalnya.

n) Kriteria keterpercayaan. Dalam penelitian kuantitatif keterpercayaan ditandai dengan adanya faliditas dan reliabilitas, sedangkan dalam penelitian kualitatif naturalistik oleh Guba diganti dengan kredibilitas, transferabilitas, dipendabilitas, dan konfirmabilitas.[56]

2. Teknik Pengumpulan data.

   Untuk mencapai tingkat pemahaman yang mendalam, diperlukan cara penggalian data yang

[56]Guba, Egon G.& Lincoln, Yvonna S. *Competing Paradigms in Qualitative Research. dalam Handbook of Qualitative Research,* Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, ed (London: Sage Publications, 1994), 39-44.

handal. Di sinilah letak relevansi teknik wawancara mendalam. Dipilih teknik wawancara mendalam karena teknik ini tidak sekedar untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan melainkan lebih dari itu yaitu memahami pengalaman orang lain. Wawancara semacam ini sering disebut *in-depth interviewing* (Sutopo, 1988). Patton (1983) mengemukakan tentang tujuan wawancara itu, sebagai berikut, " *The purpose of interviewing is to find out what is in and someone else's mind….We interview people to find out from them those things we cannot directly observe*". Untuk itu, Patton mengingatkan bahwa wawancara atau percakapan informal terletak pada spontanitas mengajukan pertanyaan yang dapat terjadi pada waktu penelitian lapangan sedang berlangsung. Bahan wawancara untuk lebih menstrukturkan pertanyaan diangkat dari seperangkat isu yang dieksplorasi sebelum wawancara dilangsungkan (Cole, 1980). Wawancara kadang-kadang dilakukan berda-sarkan perjanjian. Beberapa wawancara direkam dengan menggunakan mesin perekam (*tape-recorder*), setelah terlebih dahulu meminta ijin kepada responden.

Dengan wawancara mendalam, bisa digali apa yang tersembunyi di sanubari seseorang, apakah yang menyangkut masa lampau, masa kini, maupun masa depan. Wawancara yang cocok untuk itu adalah wawancara yang tak terstruktur, karena bisa secara leluasa melacak ke berbagai segi dan arah guna mendapatkan informasi yang selengkap mungkin dan semendalam mungkin. Dengan demikian, upaya

undestanding of understanding bisa terpenuhi secara memadai. Wawancara yang sifatnya terbuka (*open-ended*) dilakukan secara informal maupun formal dimaksudkan untuk menggali pandangan subyek penelitian tentang informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

Wawancara dilakukan pada waktu dan konteks yang dianggap tepat guna mendapatkan data yang mempunyai kedalaman, dan dilakukan berkali-kali sesuai dengan keperluan untuk mempe-roleh kejelasan informasi dan kegiatan. Singkatnya, wawancara mendalam dan kegiatan observasi menjadi sama utamanya dalam penelitian kualitatif. Kegiatan observasi dimaksudkan untuk memburu *tabel hidup* yang terhampar dalam kenyataan sehari-hari di masyarakat. Sedangkan wawancara mendalam dimaksud untuk memburu makna yang tersembunyi di balik *tabel hidup* tersebut sehingga sesuatu fenomena sosial menjadi bisa dipahami.Teknik ini digunakan untuk mempe-roleh data tentang bagaimana para informan memahami budaya yang dianut dan manifestasinya berupa bentuk-bentuk perilaku untuk mengetahui pemikiran keagamaan serta sikapnya dalam memakna pemikiran orang lain, dalam hal ini pemikiran ideologis para elit pimpinan Muhammadiyah.

3. Teknik Observasi Partisipasi (Participant Observation)

Pengamatan peran serta adalah proses di mana peneliti memasuki latar atau suasana tertentu dengan tujuan untuk melakukan pengamatan tentang

bagaimana peristiwa-peristiwa (*events*) dalam latar memiliki hubungan (Goetz dan LeComte, 1981; Wilson, 1977; dan Bryman, 1984). Emerson memberikan pengertian dan fungsi pengamatan peran serta lebih luas sebagaimana berikut :

> *Participant observation-establishing a place in some natural setting on a relatively long-term basis in order to investigate, experience and represent the social life and social processes that accur in that setting—comprises one core activity in etnographic fieldworks. Until recently, etnographers restricted their interest in participant observation to such issues as the vagaries of establishing such a place, the need for emphathetic immersion in the daily life and meaning systems of those studied, and the ethical and political issues arising with these efforts. But participant observation involves not only gaining access to and immersing oneself in new social worlds, but also producing written accounts and descriptions that bring versions of these worlds to others. Geertz's early insistence on the centrality of inscription in etnography, calling attention to the fact that 'the ethnographer "inscribes" social discourse, he writes it down (Emerson, Fretz, Shaw dalam Atkinson, ed., 2001; 352).*

Tingkat kedalaman peran serta beragam menurut latar dan tujuan penelitian. Spradley (1980) mengemukakan adanya lima tingkat peran serta yang terletak dalam suatu kontinum, mulai dari yang sama sekali tidak berperan serta, kemudian yang pasif, selanjutnya moderat lalu aktif, bahkan sampai dengan yang benar-benar terlibat dalam peran serta. Lofland dan Lofland (1984) yang merujuk pendapat Schatzman dan Straus, mengemukakan enam tingkat peran serta itu, masing-masing adalah; melihat dari luar (jauh), hadir secara pasif, berinteraksi secara terbatas, aktif namun terkendali, dan berperan serta dengan identitas yang tersembunyi. Untuk penelitian ini, tingkat peran serta peneliti merujuk pendapat Spradley (1980) di atas, bergerak dari tingkat pasif ke tingkat peran serta aktif. Keputusan untuk melakukan suatu tingkat peran serta itu, ditentukan oleh data yang diperlukan, misalnya keterlibatan peneliti dalam wawancara mengenai perubahan-perubahan sosial, setelah observasi mengamati perilaku, kegiatan-kegiatan informan di lapangan. Sutopo (1988) menjelaskan pentingnya menetapkan peran serta, sebagai berikut:

Pemilihan peran yang tepat sangat diperlukan dalam menggunakan cara ini. Peran yang berbeda, akan memberikan kesempatan yang berbeda dan juga akan mendapatkan kualitas data yang berbeda pula.

Dalam penelitian ini teknik observasi peranserta digunakan untuk mendukung data-data yang diperoleh dengan teknik interview mendalam. Pelaksanaannya kedua teknik ini berlangsung bersama-sama dalam satu situasi maupun situasi yang

berbeda. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data berupa berbagai perilaku/tingkah laku, kejadian, peristiwa atau situasi yang bisa diobservasi dalam aktivitas sosial warga Muhammadiyah yang berlangsung di lingkungan tempat penelitian.

1. *Teknik Dokumentasi (Documentation).*

Selain itu tiga macam teknik pengumpulan data di atas, peneliti juga menggunakan bahan-bahan dokumentasi yang relevan dan tersedia di berbagai sumber setempat; pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumentasi. Dengan menggunakan teknik ini peneliti mengumpulkan bahan-bahan berupa catatan-catatan, data-data statistik jumlah penduduk dan warga Muhammadiyah, lembaga pendidikan dan bahan-bahan lainnya yang dianggap mendukung dari perolehan data melalui teknik wawancara mendalam dan observasi partisipasi.

Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri. Dengan bekal aspek teori dan metodologi yang relevan dengan masalah yang ada, peneliti juga adalah bagian dari warga desa tempat penelitian ini dilakukan. Meskipun peneliti telah mengenali kondisi masyarakat di tempat penelitian, peneliti juga akan melakukan prosedur-prosedur dan teknik pengum-pulan data yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian data yang ingin diperoleh semakin absah.

Di muka telah disebutkan bahwa penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, interview mendalam, observasi partisipasi di samping juga catatan lapangan dan dokumentasi. Dengan

memasuki ke kehidupan dan mengamati segala aktivitas di desa sehari-hari, berarti model penggalian data yang konvensional dengan memegang pedoman-pedoman pertanyaan tidak mutlak digunakan. Namun peneliti tetap membuat pedoman pertanyaan dengan maksud agar informasi yang ingin didapat tetap terkendali dengan pedoman tersebut, meski dimungkinkan pada kenyataannya di dalam melakukan dialog-dialog antara peneliti dengan informan kadang-kadang melebar dan tidak jarang meluas keluar dari konteks pertanyaan yang diajukan. Hal ini justeru kadang-kadang diharapkan bermanfaat bagi peneliti karena hal-hal yang "tersembunyi" yang tidak diperkirakan sebelumnya terkuak dalam proses dialog tersebut.

Untuk mendapatkan dan menemui informan yang dipilih dirasakan tidak terlalu sulit karena di samping mereka lebih banyak tinggal di desa ini, pekerjaan sehari-hari juga di desa. Informan penelitian ini didapat dan ditentukan dengan menggunakan pedoman *theoretical sampling* di mana teknik pengambilan sampelnya dilakukan dengan cara *snowball sampling*, di mana melalui key persons akan didapat informan dengan ciri-ciri yang telah ditetapkan sebelumnya.

Para simpatisan yang terpilih sebagai informan dari warga Muhammadiyah di desa ini akan diajak berdialog dengan peneliti mengenai wawasannya, idenya, pendapatnya dan pemahamannya tentang pemikiran keislaman dan kemuhammadiyahan. Dalam waktu itu juga atau di waktu yang lain akan diamati / observasi perilaku dan aktivitasnya untuk

memperkuat data-data yang hasilkan dari dialog atau interview mendalam.

F. Analisis Data.

Proses pengumpulan data dan analisis data penelitian naturalistik dalam prakteknya tidak secara mudah dipisahkan. Kedua kegiatan itu, kadang-kadang berjalan secara serempak, artinya analisis data seharusnya dikerjakan bersamaan dengan pengumpulan data, dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai (Spradley, 1979; 1980; Bogdan & Biklen, 1982; Milliams, 1988; Miles & Huberman, 1984). Hakekat analisis data jenis penelitian ini, diterangkan oleh Bogdan dan Biklen (1982; 145), sebagai berikut:

> *Data analysis is the process of systematically searching and arranging in the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you accumulate, to increase your understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others. Analysis involves working with data, organizing it, breaking it into manageable units, synthezing it. Searching for patterns, discovering what is it important and what is to be learned, and deciding what you will tell others….the end products of research are….presentations.*

Kutipan di atas, sekaligus pula menjelaskan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam menganalisis data yang diperoleh. Teknik analisis

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif yang dikembangkan oleh *Miles* dan *Huberman* (1984). Melalui model ini, kegiatan analisis data penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap kegiatan, yaitu (a) reduksi data (*data reduction*), (b) penyajian data, (*data display*) dan (c) penyimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification)*, yang juga dilakukan selama dan sesudah pengumpulan data penelitian. Dengan memadukannya dengan analisis data yang dianjurkan oleh *Bogdan* dan *Biklen* (1982), maka analisis data penelitian ini, dikerjakan melalui langkah-langkah sebagai berikut: *Pertama*, analisis selama pengumpulan data meliputi kegiatan (1) mengambil keputusan mengenai jenis kajian yang akan diperoleh dan membatasi lingkup kajian tersebut, (2) mengembangkan pertanyaan-pertanyaan analitik, (3) merencanakan tahapan pengumpulan data dengan memperhatikan hasil pengamatan sebelumnya, (4) menuliskan "komentar pengamat" mengenai gagasan-gagasan yang muncul, (5) menulis "memo" bagi diri sendiri mengenai hal-hal yang sedang dikaji, (6) menggali sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan masalah budaya dan perubahan sosial selama penelitian berlangsung. *Kedua*, analisis sesudah pengumpulan data mencakup kegiatan (1) mengembangkan kategori-kategori koding (*coding categories*) dengan sistem koding (*coding system*) yang ditetapkan kemudian, dan (2)

mengembangkan mekanisme kerja terhadap data yang telah dikategorikan tersebut.[57]

Keabsahan data merupakan konsep yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validias) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi positivisme dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, criteria, dan paradigmanya sendiri. Penelitian kuwalitatif memiliki tiga criteria untk memeriksa keabsahan data, yaitu: *Credibility, transferability, dan dependability*.

Credibility (kredibilitas/kepercayaan), dapat dilakukan dengan cara: pertama, Memperpanjang waktu pengamatan (tinggal dengan responden). Kedua, pengamatan secara tekun dan terus menerus (untuk memperoleh data secara lebih mendalam). Ketiga, Triangulasi, yang dapat dilakukan dengan: menggunakan sumber ganda, menggunakan metode ganda, menggunakan peneliti ganda, dan *peer debriefing* (diskusi dengan teman sejawat), dan *member chek* (pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam pengumpulan data).

Transferability (transferabilitas), maksudnya adalah keteralihan, analog dengan generalisasi dalam teori positivisme.[58]

Dependability (Dependabilitas atau auditabilitas), dilakukan dengan cara: pengamatan oleh dua atau lebih pengamat, cheking data, dan audit trail atau menelusur dari ata kasar.

---

[57]Sayekti, P.S, "Metodologi Penelitian Kualitatif",(Diktat, Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2001).

[58]Noeng Muhajir. *Filsafat Ilmu, Positivisme, Post-Positivisme, dan Post-Modernisme*. (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2001), 20.

Setelah data dibaca, dipelajari, dan ditelaah, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan reduksi data dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Kemudian menyusun dalam satuan-satuan dan kategorisasi.

Kategorisasi disusun berdasarkan criteria tertentu. Mengkate-gorisasikan kejadian-kejadian mungkin saja mulai dari berdasarkan namanya, fungsinya, atau kriteria yang lain. Pada tahap kategorisasi ini peneliti sudah mulai melangkah mencari ciri-ciri setiap kategori. Pada tahap ini penelti bukan sekedar memperbandingkan atas pertimbangan rasa-rasanya mirip atau sepertinya mirip, melainkan pada ada tidaknya muncul ciri berdasarkan kategori. Dalam hal ini ciri tidak didudukkan sebagai kriteria, melainkan ciri didudukkan tentatif, artinya pada waktu hendak memasukkan kejadian pada kategori berdasarkan cirinya, sekaligus diuji apakah ciri bagi setiap kategori sudah tepat.

Langkah penting yang dilakukan adalah penafsiran/pemaknaan data. Moleong (2001: 197) menggunakan istilah penafsiran data,[59] sedangkan Noeng Muhajir (2000: 187) menggunakan istlah pemaknaan data. Noeng membedakan antara 1)

[59]Lexi Moleong. *Penafsiran Data Kualitatif*. dalam, Eko Putro Widoyoko. *Analisis Kualitatif Dalam Penelitian Sosial* (Jakarta: Karya Cipta, 2008), 8-11.

terjemah atau translation, 2) tafsir atau interpretasi, 3) ekstrapolasi, da 4) pemaknaan atau meaning. Membuat terjemah berati upaya mengemukakan materi atau substansi yang sama dengan media yang berbeda, media tersebut mungkin berupa bahasa satu ke bahasa lain, dari verbal ke gambar, dan sebagainya, konteksnya agar dapat dikemukakan konsep atau gagasannya lebih jelas. Ekstrapolasi lebih menekankan pada kemampuan daya pikir manusia untuk menangkap di balik yang tersajikan.

Memberi makna merupakan upaya lebih jauh dari penafsiran dan mempunyai kesejajaran dengan ekstrapolasi. Pemaknaan lebih menuntut kemampuan integratifmanusia: inderawinya, daya pikirnya, dan akal budinya. Di balik yang tersajikan bagi ekstrapolasi terbatas dalam arti empirik logik, sedangan pada pemaknaan menjangkau yang etik maupun yang transendental. Dari sesuatu yang muncul sebagai empiri dicoba diberi kesamaan, kemiripan, kesejajaran, dalam arti inpidual, pola, proses, latar belakang, arah dinamika, dan banyak lagi kemungkinan-kemungkinan lainnya.[60]

Dalam langkah kategorisasi dilanjutkan dengan langkah menjadikan ciri kagori menjadi eksplisit, peneliti sekaligus mulai berupaya untuk mengintegrasikan kategori-kategori yang dibuatnya. Menafsirkan dan memberi makna hubungan antar kategori sehingga hubungan antar kategori menjadi

[60]Noeng Muhajir.,*Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi IV* (Yogyakarta: Rake sarasin, 2000), 153.

semakin jelas. itu berarti telah tersusun atribut-atribut teori.[61]

Perumusan teori, dimulai dengan mereduksi jumlah kategori-kategori sekaligus memperbaiki rumusan dan integrasinya. Modifikasi rumusan semakin minimal, sekaligus isi data dapat terus semakin diperbanyak. Atribut teori yang tersusun dari hasil penafsiran/pemaknaan dilengkapi terus dengan data baru, dirumuskan kembali dalam arti diperluas cakupannya sekaligus dipersempit kategorinya. Jika hal itu telah tercapai dan peneliti telah merasa yakin akan hasilnya, pada saat itu peneliti sudah dapat mempublikasikan hasil penelitiannya.

---o0o---

[61]Noeng Muhajir, *Analisis data dalam Penelitian Kualitatif*. dalam, Eko Putro Widoyoko. *Analisis Kualitatif dalam Penelitian Sosia* (Jakarta: Karya Cipta, 2008), 10.

BAB II

MUHAMMADIYAH DAN PERKEMBANGAN PEMIKIRAN ISLAM KONTEMPORER

A. Kelahiran Muhammadiyah dan Perkembangannya

Sebelum membahas latar belakang berdirinya Muhammadiyah dan perkembangannya, ada baiknya dijelaskan pengertian Muhammadiyah. Hal ini ada kaitannya ketika mengkaji persyarikatan ini lebih lanjut.

Secara Etimologis, Muhammadiyah berasal dari bahasa arab, dari kata *"محمد"* yaitu nama Nabi dan Rasul Allah terakhir. Muhammad itu sendiri berarti: yang terpuji. Kemudian mendapatkan tambahan *ya' nisbah*[1] yang

[1]Louis Ma'luf . *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Daar al Mashriq, 1986,: م . ketika menjelaskan tentang nisbah ini Louis Ma'luf tidak menjelaskan adanya *ya' nisbah* dalam bentuk *"Yah"* (يـة). Syafiq A. Mughni memahaminya sebagai nisbah jamak, lebih lanjut Louis ma'luf menulis :

النسبة هي الحاق أخر الإسم ياء مشدّدة للدلالة على نسبة شئ إليه, وحكمها ان يكسّر ما قبل الياء للمناسبة

Ketentuan terebut berlaku untuk beberapa jenis munasabah/nisbah :

الإسم المختوم بألف مقصورة
الأسم المختوم بألف التأنيث الممدودة
الإسم المنقوص
االنسبة إلى وزن فعيل
االنسبة إلى وزن فعيلة
االنسبة إلى الإسم المختوم بواو
االنسبة إلى الإسم المختوم بياء مشدّدة

Meskipun demikian, semua referensi resmi dari Muhammadiah menyatakan bahwa *yah* tersebut adalah nisbah kepada Nabi Muhammad SAW. sedangkan . Najih Achyad dalam bukunya *Ta'thirat Kitab al-Tawhid Shekh Muhammad Ibn Abd al Wahhab fi al-Harakah al-Islamiyah al-Islahiyh fi Indonesia*, menegaskan bahwa *yah* pada kata Muhammadiyah tersebut bukan nisbah kepada Nabi Muhamad SAW, tetapi adalah nisbah kepada Syekh Muhammad ibn Abd al Wahab.

berfungsi menjeniskan atau membangsakan atau bermakna pengikut. Jadi Muhammadiyah adalah kelompok Pengikut Nabi Muhammad SAW. (*yah* dalam hal tersebut adalah merupakan bentuk jamak).

Secara Terminologis, menurut sumber-sumber primer dijelaskan sebagai berikut:

a. Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang didirikan oleh Ahmad Dahlan, pada tanggal 8 Dhul hijjah tahun 1330 H., bertepatan dengan tanggal 18 Nopember tahun 1912 M., di Yogyakarta.
b. Muhammadiyah adalah organisasi gerakan dakwah Islam Amar makruf, nahi munkar dan *tajdid*, berakidah Islam, dan bersumber pada al-Qur'aan dan Assunnah.[2]

Maksud dan tujuan Muhammadiyah dijelaskan dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab III pasal 6 (enam), sebagai berikut:

"Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya".[3]

Penjelasan mengenai masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sebagaimana yang tertera dalam Maksud dan Tujuan Muhammadiyah di atas, oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dimaknai sebagai masyarakat tauhid yang moderat, teladan, inklusif dan toleran, solid dan peduli sesama serta mempunyai kesadaran mengemban amanah

[2]PP Muhammadiyah, *AD dan ART Muhammadiyah*, hasil Muktamar Muhammadiyah ke 45 di (Malang: 2005), Bab I pasal 2, dan Bab II pasal 4.
[3]PP Muhammadiyah, *AD Muhammadiyah* (Yogyakarta: Toko Buku Suara Muhammadiyah, 2005), 2.

sebagai wakil Allah di bumi yang bertugas menciptakan kemakmuran, keamanan, kenyamanan dan keharmonisan serta cepat menyadari kesalahan dan kekhilafan untuk kemudian meminta maaf sehingga *ummah* terhindar dari dosa dan durhaka yang berkepanjangan sebagai upaya mendapatkan kebahagiaan di akhirat.[4]

Mengenai profil Ahmad Dahlan, berdasar data literature yang ada dapat dijelaskan sebagai berikut: Nama kecil Ahmad Dahlan adalah "Raden Ngabei Ngabdul Darwis" kemudian dikenal dengan nama Muhammad Darwisy.[5] Ia merupakan anak keempat dari tujuh orang bersaudara yang keseluruhanya saudaranya perempuan, kecuali adik bungsunya. Dalam silsilah ia termasuk keturunan yang kedua belas dari Maulana Malik Ibrahim, seorang wali besar dan seorang yang terkemuka diantara Wali Songo, yang merupakan pelopor pertama dari penyebaran dan pengembangan Islam di Tanah Jawa.[6] Adapun silsilahnya ialah: Muhammad Darwisy (Ahmad Dahlan) bin Abu Bakar bin Muhammad Sulaiman bin Kyai Murtadla bin Kyai Ilyas bin Demang Djurung Djuru Kapindo bin Demang Djurung Djuru Sapisan bin Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribig (Djatinom) bin Maulana

[4]Fatah Wibisono, *Masyarakat Islam Yang Sebenar-benarnya: Kajian Teks*, PP Muhammadiyah Majlis Tarjih dan Tajdid, 3.

[5]Abdul Munir Mulkhan, *Etika Welas Asih dan Reformasi Soaial Budaya Kyai Ahmad Dahlan* (Jakarta: Bentara, Kompas, 2005), 3. lebih lanjut Mulkhan mendapatkan data bahwa kepergian Raden Ngabei Ngabdul Darwis ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji, adalah atas perintah Sri Sultan Hamengkubuwono VII, karena raja menganggap penting baginya untuk belajar agama dari Negara asalnya yakni Makkah. Sesudah pulang dari hajjinya, Sri Sultan memerintahkan Ahmad Dahlan bergabung dalam organisasi Budi Utomo. Reformasi Islam pun mulai berlangsung dari sini.

[6] Kutojo dan Safwan, 1991

Muhammad Fadlullah (Prapen) bin Maulana ‘Ainul Yaqin bin Maulana Ishaq bin Maulana Malik Ibrahim[7]

Pada umur 15 tahun, beliau pergi haji dan tinggal di Mekah selama lima tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam, seperti Muhammad Abduh, al-Afghani, Rashid Riḍa dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya tahun 1888, beliau berganti nama menjadi Ahmad Dahlan.

Pada tahun 1903, beliau bertolak kembali ke Makkah dan menetap selama dua tahun. Pada masa ini, beliau sempat berguru kepada Sheh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri NU yakni Hasyim Asy’ari. Pada tahun 1912. Beliau kemudian mendirikan Muhammadiyah di kampung Kauman, Yogyakarta. Sepulang dari Makkah, ia menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Penghulu Fadhil, yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang Pahlawanan Nasional dan pendiri Aisyiyah. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, Ahmad Dahlan mendapat enam orang anak yaitu Djohanah, Siradj Dahlan, Siti Busyro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, Siti Zaharah. Disamping itu Ahmad Dahlan pernah pula menikahi Nyai Abdullah, janda Abdullah. la juga pernah menikahi Nyai Rum, adik K. Munawwir Krapyak. Ahmad Dahlan juga mempunyai putera dari perkawinannya dengan Ibu Nyai Aisyah (adik Adjengan Penghulu) Cianjur yang bernama Dandanah. Beliau pernah pula menikah dengan Nyai Yasin Pakualaman Yogyakarta [8]

[7] Yunus Salam, *Riwayat Hidup KH. Ahmad Dahlan* (Yogyakarta: TB Yogya, 1968), 6.
[8]Ibid,, 9.

Djindar Tamimi (mantan Sekretaris PP Muhammadiyah) menyatakan bahwa sebelum Muhammadiyah resmi menjadi organisasi atau persyarikatan seperti sekarang ini, Muhammadiyah adalah sebuah gerakan (bentuk gerakan bersama yang dilakukan oleh beberapa orang secara spontan) yang diprakarsai oleh Ahmad Dahlan yang dibantu oleh para sahabat, santri, dan orang-orang yang sepaham dengan beliau, dimulai dari kampung kauman Yogyakarta pada sekitar tahun 1905 M. (sekembali dari ibadah hajinya yang kedua).[9] Menurut keterangan Ki Bagus Hadikusumo, gerakan tersebut oleh para santri dan sahabat Ahmad Dahlan disebut *Gerakan Ittiba' Nabi Muhammad.*[10]

Latar belakang berdirinya Muhammadiyah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Subyektif.

   Yang dimaksud faktor subyektif ini adalah faktor yang berkaitan pribadi Ahmad Dahlan, bahwa beliau sebagai pendiri Muhammadiyah pada saat itu dianggap memiliki karakteristik yang khas, antara lain:

   a. Sebagai ulama dan intelektual muslim yang relatif cerdas pada zamannya,[11] hal ini dibuktikan antara

[9]Riezam, Muhammad, *Muhammadiyah Prakarsa Besar Kyai Dahlan* (Yogyakarta: Badan Penerbit UAD, 1 Muharram 1426 H), 5. (lebih lanjut dalam tulisan itu ditemukan data bahwa pada awalnya Muhammadiyah itu bukanlah organisasi, melainkan sebuah gerakan faham untuk mewujudkan keyakinan dan cita-cita hidup yang telah diyakini kebenarannya atau yang kemudian dikenal dengan istilah "Ideologi". Sedangkan organisasi atau persyarikatan yang kemudian berdiri pada tanggal 8 Dzul Hijjah 1330 H./ 18 Nopember 1912 M. Merupakan upaya peningkatan peran dari gerakan, dengan maksud agar gerakan-gerakan yang dilakukan menjadi semakin efektif dan efisien. Gerakan yang mendahului organisasi inilah yang sebenarnya menjadi substansi dan esensi Muhammadiyah.

[10]Ibid., 36.

[11]Mengenai pribadi Ahmad Dahlan ini, Presiden RI pertama: Soekarno sebagai orang yang pernah *nginthil* (menjadi santri) kepada Ahmad Dahlan sejak

lain pada saat itu Beliau pergi ke Lembang Bandung untuk mencocokkan hasil penghitungan hisabnya dengan teknologi meteorologi dan geofisika di tempat itu.

b. Memiliki kepekaan sosial yang tinggi, cepat mendiagnosa penyakit umat dan menentukan terapinya. Salah satu obsesinya ialah ingin menyatukan ulama di Indonesia serta meningkatkan pendidikan umat Islam, sebab hanya dengan pendidikan yang memadai umat Islam bisa lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan. (kebodohan dan keterbelakangan, hanya bisa diatasi dengan satu kata: pendidikan).

c. Sebagai ulama bertipe ulama praktis, bukan ulama teoritis, hal ini terbukti antara lain dari pengajian tafsir yang dilakukannya yakni menggunakan metode tematik yakni memulai dari ayat-ayat yang paling mudah difaham dan mudah diamalkan.

d. Beliau terpengaruh oleh pemikiran para tokoh pembaharu Islam, khususnya dari kawasan timur tengah. Beberapa tokoh di antaranya Taqiyuddin ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abd al Wahhab, Jamaluddin al-Afghani, dan Muhammad Abduh. Dari

usia 15 tahun (lihat Siaran Departemen Penerangan RI, no. Stc.AI/95-62, tanggal 1 Desember 1962), dan secara resmi menjadi anggota Muhammadiyah tahun 1938 menyatakan: Kita mengenal Ahmad Dahlan, tidak sekadar sebagai seorang pendiri dan Bapak Muhammadiyah saja, akan tetapi beliau adalah seorang perintis Keerdekaan dan Reformer Islam di Indonesia. Ahmad Dahlan adalah manusia amal, manusia yang *sepi ing pamrih*, tapi *rame ing gawe*, manusia yang berjiwa besar, yang dadanya penuh dengan cita-cita luhur, penuh dengan semangat berjuang dan berkorban untuk kemuliaan Agama. Selanjutnya lihat dalam Solichin Salam: *Kyai Achmad Dachlan, Tjita-tjita dan Perjoeangannja*, Jakarta, 1962. bandingkan juga dalam buku Soekarno dan Muhammadiyah (Jakarta: al-Wasat, 2009).

beberapa penelitian disebutkan bahwa tokoh-tokoh tersebut memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam hal membangkitkan semangat Izzul Islam Wal Muslimin.

2. Faktor Obyektif.

Yang dimaksud dengan faktor obyektif adalah fakta-fakta riil yang terjadi dan menimpa umat dan bangsa Indonesia. Faktor Obyektif ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu *internal* dan *Eksternal.*

Dari segi internal, meliputi antara lain :

a. Kondisi ummat Islam Indonesia pada saat itu secara umum adalah rendah pemahamannya terhadap ajaran Islam. Hal ini sebagai akibat rendahnya kualitas pendidikan yang dimiliki. Akibat dari rendahnya pemahaman mereka terhadap agama Islam, maka sering kali terjadi distorsi, terlebih pada kurun waktu itu Islam lebih difahami secara *Fiqhi* semata.

Clifford Geertz, menemukan adanya varian tingkat keberagamaan umat Islam di Indonesia dalam tiga kategori yakni priyayi, abangan, dan santri.[12]

[12]Clifford Geertz, *The Relegion of Java* (Chicago: The University Of Chicago Press, 1960), 5. Peneliti dari Amerika yang meneliti di sebuah desa (Mojokuto) Kediri, Jawa Timur ini menemukan tiga varian sikap keberagamaan umat Islam di Jawa (Indonesia), bahwa kelompok *Abangn* adalah kelompok mayoritas yang kehidupannya sangat tergantung pada *ekonomi*. Kelompok Priyayi adalah kelompok pegawai pemerintahan yang hidupnya sudah terjamin karena mendapat gaji dari pemerintah colonial Belanda. Kelomok *Santri* yakni kelompok yang hidupnya ada di sekitar Kyai atau ulama. Menurut Geertz, yang paling dikhawatirkan adalah apabila kelompok abangan membantu kelompok santri menentang Belanda, maka yang akan terjadi Belanda akan menjadi repot. Itulah sebabnya Geertz memberi saran kepada Belanda untuk mengupayakan agar kelompok abangan tidak membantu (sejalan) dengan kelompok santri, dengan cara membuat suatu persaingan tidak sehat antara kelompok santri dengan kelompok priyayi. Dalam pandangan Geertz kelompok priyayi pasti akan

b. Keterbelakangan umat Islam dan bangsa Indonesia adalah akibat penjajahan, dan penjajahan ini juga mengakibatkan umat Islam dan bangsa Indonesia menjadi bodoh dan miskin.
c. Lembaga Pendidikan khususnya umat Islam di Indonesia di samping secara akademis tidak memenuhi syarat seagai lembaga pendidikan yang modern, juga tidak berorientasi ke depan yang bersifat *Problem solfer* terhadap berbagai tantangan yang sedang dihadapi umat Islam dan bangsa Indonesia pada saat itu.

   Dari segi eksternal, meliputi antara lain:

   a. Kondisi bangsa Indonesia pada saat itu dijajah oleh Belanda, dan sangat logis bahwa bangsa yang terjajah adalah bangsa yang rendah harga dirinya, bodoh, dan miskin, serta kehilangan dinamika.
   b. Penjajah Belanda bukan hanya menjajah, tetapi juga menyiarkan ideologi agama yakni agama Kristen. Hal ini wajar karena para penjajah bukan hanya membawa misi memperoleh keuntungan secara finansial tetapi juga mempunyai misi kristenisasi.
   c. Secara global pada saat itu sedang terjadi trend kebangkitan umat Islam yang didengungkan oleh para tokoh islam diberbagai negara Islam di dunia, serta sedang memuncaknya semangat

menjadi pemenang karena ada dukungan dari Belanda, juga akan memperoleh dukungan dari kelompok abangan karena kelompok priyayi dapat memberi janji-janji ekonomi kepada kelompok abangan yang memang mereka butuhkan.

ummat Islam khususnya di Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. [13]

Teologi reformasi Ahmad Dahlan berpijak pada *etika welas asih* dalam hal kepeduliannya pada nasib bangsa dan umat Islam penduduk pribumi yang sengsara dan tertindas. Itulah fenomena yang kemudian menarik elit priyayi jawa Sutomo, hingga bersedia menjadi penasehat Muhammadiyah bidang kesehatan. Bahkan kemudian, bersama-sama para dokter Belanda, Sutomo mengelola Rumah Sakit Muhammadiyah Surabaya tanpa gaji. Semangat kemanusiaan berbasis cinta kasih telah mempersatukan orang-orang berbeda bangsa dan agama itu.[14]

Perlu ditegaskan pula disini, bahwa sebelum Muhammadiyah tersebar merata di seluruh Indonesia, sesungguhnya Ahmad Dahlan telah melakukan berbagai upaya legalisasi terhadap organisasi yang baru didirikannya itu.

Pada tanggal 20 Desember 1912, Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Hindia

[13]Yusron Asyrofi, *Kyai Ahmad Dahlan Pemikiran dan Kepemimpinannya* (Yogyakarta: 27-40)

[14]Abdul Munir Mulkhan, *Etika Welas Asih*, 2. Mulkhan mengomentari gerakan yang dilakukan Dahlan, bahwa Gagasan dasar Dahlan terletak pada kesejajaran kebenaran tafsir al-Qur'an, akal suci, temuan iptek, dan pengalaman universal kemanusiaan. Belajar filsafat baginya adalah kunci pengembangan kemampuan akalsuci, dari sini diperoleh pengetahuan tentang bagaimana mencapai tujuan penerapan ajaran Islam. Realisasi tujuan tersebut dilakukan dengan mendirikan sekolah modern, rumak sakit, kepanduan, panti asuhan, dan pemberdayaan kaum tertindas dalam sistem manajemen dan organisasi modern. Berbagai ritus Islam difungsikan sebagai dasar teologi realisasi tujuan tersebut. Dari kehidupan kaum nasrani dan temuan iptek, kiyai belajar tentang pengembangan kehidupan sosial. Dari tokoh-tokoh pembaharu, ia peroleh ide rasionalisasi ajaran Islam. Sementara dari fakta-fakta sosiologis dan sejarah manusia, diperolehnya inspirasi kerja pragmatis dan humanis.

Belanda untuk mendapatkan badan hukum. Permohonan itu baru dikabulkan pada tahun 1914, dengan Surat Ketetapan Pemerintah No. 81 tanggal 22 Agustus 1914. Izin itu hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta dan organisasi ini hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta. Dari Pemerintah Hindia Belanda timbul kekhawatiran akan perkembangan organisasi ini. Itulah sebabnya kegiatannya dibatasi.

Walaupun Muhammadiyah dibatasi perkembangannya, tetapi di daerah lain seperti Srandakan, Wonosari, Imogiri dan lain-lain tempat telah berdiri cabang Muhammadiyah. Hal ini jelas bertentangan dengan keinginan pemerintah Hindia Belanda. Untuk mengatasinya, maka Ahmad Dahlan menyiasatinya dengan menganjurkan agar cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta memakai nama lain. Misalnya Nurul-Islam di Pekalongan, di Ujung Pandang (makassar) dengan nama al-Munir, di Garut dengan nama Ahmadiyah. Sedangkan di Solo berdiri perkumpulan Sidiq Amanah Tabligh Fathonah (SATF) yang mendapat bimbingan dari cabang Muhammadiyah. Bahkan dalam kota Yogyakarta sendiri ia menganjurkan adanya jama'ah dan perkumpulan untuk mengadakan pengajian dan menjalankan kepentingan Islam.

Perkumpulan dan Jama'ah ini mendapat bimbingan dari Persyarikatan Muhammadiyah. Di antara perkumpulan itu ialah Ikhwanul Muslimin, Taqwimuddin, Cahaya Muda, Hambudi-Suci, Hayatul Qulub, Priya Utama, Dewan Islam, Ṭaharatul Qulub, Ṭaharatul-Aba,Ta'awanu alal birri, Ta'ruf bima kanu, wal-Fajri, Wal-Ashri, Jamiyatul Muslimin, Ṣahratul Mubtadi.

Gagasan pembaharuan Muhammadiyah disebarluaskan oleh Ahmad Dahlan dengan mengadakan

tabligh ke berbagai kota, disamping juga melalui relasi-relasi dagang yang dimilikinya. Gagasan ini ternyata mendapatkan sambutan yang besar dari masyarakat di berbagai kota di Indonesia. Ulama-ulama dari berbagai daerah lain berdatangan kepadanya untuk menyatakan dukungan terhadap Muhammadiyah. Muhammadiyah makin lama makin berkembang hampir di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1921 Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Permohonan ini dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 2 September 1921.

Sebagai seorang yang demokratis dalam melaksanakan aktivitas gerakan dakwah Muhammadiyah, Ahmad Dahlan juga memfasilitasi para anggota Muhammadiyah untuk proses evaluasi kerja dan pemilihan pemimpin dalam Muhammadiyah. Selama hidupnya dalam aktivitas gerakan dakwah Muhammadiyah, telah diselenggarakan dua belas kali pertemuan anggota (sekali dalam setahun), yang saat itu dipakai istilah *Algemeene Vergadering* (persidangan umum).

Salah satu komitmen Muhammadiyah sejak berdirinya sampai sekarang adalah bahwa Muhammadiyah memposisikan dirinya sebagai gerakan dakwah Islam berbasis akidah yang murni. Jadi dasar utama yang kemudian menjadi khittahnya adalah *tanḍif al-Aqidah* atau pemurnian akidah. Komitmen dasar ini sekaligus menjadi karakter utama dalam pengembangan pemikiran keagamaan yang dilakukannya.

Ketika Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Ahamad Dahlan, pemahaman keagamaan diarahkan kepada

amal perbuatan. Beliau bahkan meninggalkan pesan monumentalnya (yang kemudian dirangkum dalam sebuah buku oleh Abdul Munir Mulkhan: Pesan-pesan dua pemimpin besar Umat Islam Indonesia Ahmad Dahlan dan Hashim Ash'ari) bahwa Islam adalah *agama amal.* Seseorang dianggap beragama jika dia berbuat atau beramal serta mempraktekkan ajaran-ajaran yang ada dalam al-Qur'aan dan Hadith. Di bidang ubudiyah beliau memulai dengan mengarahkan orang yang melakukan ibadah sholat ke arah ka'bah dan bukan lurus ke barat. Adapun bentuk-bentuk amal nyata yang beliau lakukan adalah santunan kepada fakir miskin serta anak-anak yatim. Beliau memiliki landasan amaliah yang monumental dalam hal ini yaitu *Teologi al-maa'uun.* Teologi inilah yang telah mampu menggerakkan umat Islam di kawasan Yogyakarta waktu itu untuk cinta beramal, bahkan kemudian melembaga menjadi sebuah amal usaha yakni Majlis Pembina Kesengsaraan Ummat, di kemudian hari berbah menjadi Majlis Pembina Kesejahteraan Ummat (PKU).

Pemikiran keagamaan Muhammadiyah pada saat ini belum banyak berbicara tentang fiqh dan uṣul fiqh, juga belum berbicara tentang ilmu takhrij al-hadith. Bahkan yang sangat menonjol adalah pemikiran teologis, baik dari serapan pemikiran Ibnu Taimiyyah (wafat a328 M) yang mengkritik rasionalisme filsafat dan teologi. Pemikiran Ibnu Taimiyah yang mengarah kepada rekonstruksi teologis (kalam) yang cenderung literalistik dan neo-hambalistik ini, mencapai puncaknya pada gerakan wahabi yang didirikan oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab (w.1792).[15] Tetapi

[15]Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Idonesia* (Bandung: Mizan, 1994), 17-18.

pada sisi lain gerakan modernisme Islam pun muncul di mesir, ketika kolonialisme Eropa memasuki kawasan timur tengah, menginspirasi Jamaluddin al-Afghani (w.1897), Muhammad Abduh (w. 1905) untuk melakukan pembaruan khususnya di bidang pendidikan dan politik. Situasi teologis dan kecenderungan pemikiran seperti itulah yang ditemui Ahmad Dahlan terutama ketika menunaikan ibadah haji dan sempat membaca buku-buku karangan mereka, bahkan pernah beremu dengan Muhammad Rashid Riḍa. Bermula dari sinilah Ahmad Dahlan menemukan bentuk dan keyakinan agama yang mantap yang tidak jauh dari paradigma pemikiran Wahabi dan kaum modernis di Mesir.[16]

Muhammadiyah baru memulai bergeser pada persoalan *takhrij al-Hadith* dan persoalan-persoalan ubudiyah, pada tahun 1927 (zaman kepemimpinan Kyai Ibrahim), ketika seorang tamu dari India memprotes ubudiyah Muhammadiyah yang melaksanakan Ṣalat Idul Fitri di dalam masjid Keraton Yogyakarta, menurut tamu itu seharusnya Muhammadiyah yang telah memposisikan diri sebagai gerakan *tajdid* melaksanakan ṣolat Idul Fithri maupun Idul Aḍha di tanah lapang sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka mulai saat itulah Muhammadiyah menghimpun para ulama Muhammadiyah untuk membicarakan berbagai persolan ubudiyah, yang kemudian diberi nama Majlis Tarjih. Majlis Tarjih ini baru menampakkan eksistensinya secara profesional pada zaman kepemimpinan Mas Mansur tahun 1936-1942. Meskipun

[16] M. Djindar Tamimi, "Latar Belakang Berdirinya Muhammadiyah", dalam *Berita Resmi Muhammadiyah*, no. 06/1995-2000, Muharram 1417/Mei 1996.

demikian dalam perkembangan berikutnya terjadi variasi penekanan pemikiran keagamaan dalam Muhammadiyah.

Pada tahap berikutnya yakni pada zaman kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo (1942-1953) pemikiran keagamaan di Muhammadiyah lebih menonjol pada persoalan Aqidah dan Akhlaq *ijtimaiyah*. Pada saat ini dirumuskannya Muqaddimah Anggaran dasar Muhammadiyah. Dalam rumusan tersebut dirumuskan secara singkat dan padat gagasan dan pokok-pokok pikiran Ahmad Dahlan yang akhirnya melahirkan Muhammadiyah. Arah pemikiran keagamaan pada periode ini juga banyak mengarah pada persoalan perjuangan politis. Hal ini bisa dicermati ketika terjadi perdebatan sengit di PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang dibentuk pada tanggal 14 Agustus 1945 (tugas PPKI adalah menetapkan Undang-undang dasar dan Mukaddimahnya). Perdebatan antara yang pro dan kontra penghapusan tujuh kata dalam piagam jakarta dengan kewajiban menjalankan *shari'at* Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ki bagus Hadikusumo termasuk yang paling getol mempertahankan tujuh kata tersebut, yang pada waktu itu sebagai Ketua umum PP Muhammadiyah.[17]

Kasman Singodimejo, anggota PP Muhammadiyah, berhasil memberi penjelasan kepada Ki Bagus bahwa bangsa Indonesia menghadapi Jepang dan sekutu yang memiliki senjata canggih sehingga dibutuhkan ketenangan dan kesatuan. Lebih dari itu menurut UUD dan aturan tambahan, dalam jangka waktu duabelas bulan sesudah MPR terbentuk UUD baru akan ditetapkan ulang dan akan

[17]Kasman Singodimejo. "Peranan Umat Islam Sekitar 17 Agustus 1945", dalam *Mimbar Ulam*, September 1979, 26. Begitu juga lihat dalam, bahrussurur-Iyunk, Teologi Amal Saleh. Surabaya: Ipam, 2005, 43.

lebih memuaskan umat Islam. Penjelasan terakhir ini didasarkan atas keterangan Soekarno bahwa UUD itu bersifat sementara, karenanya menurut Kasman kita masih punya kesempatan untuk memperjuangkannya kembali. Dengan demikian Kibagus akhirnya menyetujui, meskipun belakangan ia masih sering menanyakannya.[18]

Pada periode kepemimpinan AR. Sutan mansur (1953-1959), periode H.M. Yunus Anis (1959-1962), periode Ahmad Badawi (1962-1968), seterusnya sampai pada periode Azhar Bashir (1990-1995), pemikiran keagamaan dalam Muhammadiyah bisa disebut *fiqh sentris* atau juga ada yang menyebut sharī'ah sentris meskipun juga tidak menegasikan adanya perkembangan lain dalam masalah-masalah aqidah dan akhlaq *ijtima'iyah* yang cukup signifikan.

Haedar Nashir menemukan data yang penting tentang para elit Muhammadiyah dilihat dari segi aktifitas keseharian mereka. Bahwa Muhammadiyah sejak kelahirannya tahun 1912 sampai sekitar tahun 1960an banyak dipimpin dan digerakkan oleh elit Ulama yang memiliki latar belakang pendidikan pondok pesantren dengan pekerjaan sebagai pedagang (wiraswasta) atau swasta. Ketua-ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yaitu Ahmad Dahlan (pendiri dan ketua yang pertama dari tahun 1912 sampai tahun 1923), Ibrahim (tahun 1923 sampai 1934), Hisyam (tahun 1934 sampai 1937), Mas Mansyur (tahun 1937 sampai 1942), Ki Bagus Hadikusumo (tahun 1942 sampai 1953), AR. Sutan Mansyur (tahun 1953 sampai 1959), dan HM. Yunus Anis (tahun 1959 sampai 1962), adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah tamatan

[18] Ibid.,

pendidikan pesantren yang juga sebagai pedagang, guru (dosen) dan swasta.[19]

Pada era kepemimpinan Ahmad Badawi (tahun 1962 sampai 1968), Faqih Utsman (tahun 1968), dan AR. Fakhruddin (tahun 1968 sampai 1990, dalam beberapa periode), Muhammadiyah dipimpin oleh tokoh yang berlatar belakang sebagai pegawai negeri (Departemen Agama) kendati ke tiganya dikenal pula sebagai kiai tamatan pondok pesantren. Faqih Utsman bahkan pernah menjadi Menteri Agama selama dua kali, yaitu pada zaman kabinet Halim (1949) dan pada zaman kabinet Wilopo-Prawiro (1952-1953).[20]

Kehadiran elit utama yang juga pegawai negeri dalam Muhammadiyah tersebut tampak menonjol sejak masa kepemimpinan AR. Fakhruddin yang cukup lama (22 tahun) yang diikuti oleh kecenderungan serupa di jajaran kepemimpinan lainnya baik di tingkat pusat maupun wilayah dan daerah. Gejala sosial ini dikenal sebagai kehadiran elit birokrat dalam Muhammadiyah.[21]

---

[19] Haedar Nashir, *Perilaku Politik Elit Muhammadiyah* (Yogyakarta: Tarawang, 2000), 7. juga bisa dilihat dalam Sujarwanto & MT Arifin, dkk, *Persepsi Masa Depan Muhammadiyah* (Surakarta: PP Muhammadiyah & Lebaga penelitian Universitas Muhammadiyah Surakarta), 190.

[20]Mengenai profil para tokoh (ketua) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dapat dibaca dalam buku M. Yunus Anis (et.al), *Kenalilah Pemimpin Anda: Riwayat Hidup dan Perjoangan Ketua-ketua PP Muhammadiyah* A. Dahlan sampai dengan Pak AR (Yogyakarta: PP Muhammadiyah Majlis Pustaka, tt), juga dalam Djarnawi Hadikusumo, *Matahari-Matahari Muhammadiyah* (Yogyakarta: PT Persatuan, tt).

[21]Penelitian yang pernah dilakukan oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan PP Muhammadiyah tentang profil Pimpinan Muhammadiyah anggota tanwir di tingkat pusat dan wilayah, tahun 1997, didapatkan data bahwa 78 % anggota pimpinan Muhammadiyah adalah pegawai negeri. Sedangkan penelitian sebelumnya yakni tahun 1990 oleh lembaga yang sama menunjukkan 77,09 % anggota pimpinan Muhammadiyah dari tingkat pusat, wilayah dan daerah adalah pegawai negeri, dan hanya 7,74 % sebagai wiraswasta dan pedagang.

Dalam konstelasi pemikiran keagamaan baru di Indonesia, sebenarnya sudah mulai muncul mulai tahun 1970an sampai 1990an, yakni dengan munculnya wacana *Teologi Pembaruan Islam*, ide-ide itu adalah *Sekularisasi* dan *Desakralisasi*, kemudian *Pemikian Islam Alternatif*, *Membumikan Islam*, *Reaktualisasi Islam, Islam Tekstual Versus Islam Kontekstual*, dsb.[22] Berbarengan dengan munculnya *teologi pembaruan pemikiran Islam* itu, Muhammadiyah mulai mendapat gugatan khususnya menjelang Muktamar ke-41 di Surakarta tahun 1985. Muhammadiyah dinilai telah berhenti peranannya sebagai gerakan pembaruan Islam, telah menjadi gerakan tradisional, bahkan sudah tidak lagi memiliki semangat ijtihad.[23] Akibat kritikan itu maka pasca Muktamar, benar-benar terjadi lonjakan kemajuan pemikiran keagamaan di Muhammadiyah yang luar biasa. Bermunculan *otokritik* terhadap rumusan-rumusan keagamaan (rumusan Ideologis) yang selama ini dianggap telah mapan, tak terkecuali keputusan Majlis Tarjih dalam HPT mengenai *al-Masailul Khomsu*[24], dan lain-lain. Dan pada saat yang sama pula mulai berulir wacana Islam Liberal, Islam Sekuler, Islam Plural, dll.

Perkembangan baru yang cukup menonjol dan bahkan dalam hal-hal tertentu menimbulkan polemik berkepanjangan dalam hal pemikiran keagamaan dalam Muhammadiyah. Perkembangan baru ini adalah pada era

[22] Dawam Raharjo, *Intelektual, Intelegensiadan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim* (Bandung: Mizan, 1993), 98-113.

[23]Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonom* (Bandung: Mizan, 1993), 276. Menenai kritik terhadap Muhammadiyah, lihat juga Panji Masyarakat, no. 486, 21 November 1985, dan no. 487, 1 Desember 1985, dan o. 488, 11 Desember 1985 sebagai ”laporan utama”.

[24] PP Muhammadiyah, HPT, 277.

kepemimpinan Muhammad Amin Rais (1995-2000). Dalam waktu dua tahun perjalanan kepemimpinan M. Amin Rais mampu menghegemoni pemikiran keagamaan di tubuh Muhammadiyah. Beliau mengangkat ketua Majlis Tarjih bukan tokoh yang berbasis *shari'ah* tetapi tokoh yang berbasis *ushuluddin* yakni Muhammad Amin Abdullah. Hal ini termasuk kejadian yang di luar kebiasaan. Amin Abdullah pun telah merumuskan draf manhaj majlis tarjih sebagai kelengkapan manhaj yang telah ada sebelumnya, yang kemudian disahkan dalam munas tarjih di Jakarta tahun 2000. Salah satu poin penting dalam keputusan tersebut adalah tentang kemungkinan menggunakan pendekatan Hermeneutika dalam pemahaman teks-teks keagamaan, di samping pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani.

Pemikiran Amin Abdullah yang cukup *revolusioner* dan keberaniannya memasukkan unsur-unsur *liberalisme* dan *pluralisme* serta *multikulturalisme* dalam pemikiran-pemikiran keagamaannya ke dalam ranah pemikiran Muhammadiyah, pada satu sisi menjadikan Muhammadiyah menjadi semakin mampu memperluas wacana pemikiran keagamaannya, membawa angin segar bagi terciptanya suasana keberagamaan yang relatif damai menghadapi keyakinan-keyakinan yang berbeda bahkan perbedaan agama pun bisa dijembatani dengan gaya pemikiran ini. Tetapi pada sisi lain, pemikiran keagamaan model ini justeru menimbulkan masalah sendiri bagi sebagian elit Muhammadiyah, sampai-sampai ada yang mengkhawatirkan akan terjadinya pendangkalan aqidah di kalangan Muhammadiyah. Hal ini juga terus berlaku sampai berakhirnya kepemimpinan Achmad Syafii Maarif (2000-2005).

Era baru terjadi pada periode kepemimpinan M. Din Syamsuddin (2005-2010). Pada periode ini pemikiran keagamaan dalam Muhammadiyah tidak lagi diwarnai berbagai kontroversi. Majlis tarjih pun dikesankan kembali ke gaya pemikiran keagamaan yang sudah pernah berlaku di Muhammadiyah sebelumnya, (era kepemimpinan yang lalu majlis ini bernama: *Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, maka pada kepemimpinan M. Din Syamsuddin disederhanakan menjadi: *Majlis Tarjih dan Tajdid*), tentunya tetap memperkaya wacana dan bersifat antisipatif terhadap berbagai persoalan global sesuai dengan perkembangan zaman.

Ada sesuatu yang patut dicatat, bahwa profil Din Syamsuddin yang alumni Pondok Pesantren Modern Gontor, sementara Hasyim Muzadi (PB. NU) yang juga alumni Pondok Pesantren Modern Gontor, setidak tidaknya kesamaan ini difahami juga oleh warga Muhammadiyah maupun warga Nahdliyyin (apa lagi latar belakang keluarga Din Syamsuddin adalah Keluarga Nahdhiyyin), menjadikan kedua organisasi besar Islam di Indonesia ini sangat terlihat *uḥuwah* nya. Warga Muhammadiyah maupun warga Nahḍatul Ulama pada era kepemimpinan dua tokoh ini sangat harmonis hubungan mereka, dan masing-masing juga sangat kondusif dan relativ tidak terjadi pertentangan terbuka yang menonjol.

Selanjutnya, pada era kepemimpinan M. Din Syamsuddin ini (2005-2010) Muhammadiyah mengedepankan pokok-pokok pikiran yang menjadi sikap resmi Muhammadiyah. Pokok-pokok pikiran tersebut terutama tentang komitmen gerakan, pandangan keagamaan, kebangsaan, serta kemanusiaan, dituangkan

dalam sebuah slogan *Zawahir al-Afkar al-Muhammadiyyah Abra Qarn min al-Zaman.*

Sikap resmi ini mengandung pokok-pokok pikiran tentang 1) Komitmen Gerakan (antara lain penegasan bahwa Muhammadiyah sesuai jatidirinya senantiasa istiqamah untuk menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memajukan kehidupan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan sebagai wujud ikhtiar menyebarluaskan Islam yang bercorak *rahmatan lil-'alamin,* Muhammadiyah akan melaksanakan tajdid (pembaruan) dalam gerakannya sehingga di era kehidupan modern abad ke-21 yang kompleks ini sesuai dengan Keyakinan dan Kepribadiannya dapat tampil sebagai pilar kekuatan gerakan pencerahan peradaban di berbagai lingkungan kehidupan). 2) Pandangan Keagamaan (antara lain berisi penegasan Bahwa Islam sebagai Wahyu Allah yang dibawa para Rasul hingga Rasul akhir zaman Muhammad SAW., adalah ajaran yang mengandung hidayah, penyerahan diri, rahmat, kemaslahatan, keselamatan, dan kebahagiaan hidup umat manusia di dunia dan akhirat. Keyakinan dan paham Islam yang fundamental itu diaktualisasikan oleh Muhammadiyah dalam bentuk gerakan Islam yang menjalankan misi dakwah dan tajdid untuk kemaslahatan hidup seluruh umat manusia). 3) Pandangan tentang Kehidupan (antara lain berisi penegasan memasuki babak baru globalisasi, selain melahirkan pola hubungan positif antarbangsa dan antarnegara yang serba melintasi, pada saat yang sama melahirkan hal-hal negatif dalam kehidupan umat manusia sedunia. Di era global ini masyarakat memiliki kecenderungan penghambaan terhadap egoisme *(ta'bid al-nafs)*, penghambaan terhadap materi *(ta'bid al-mawãd)*, penghambaan terhadap nafsu seksual *ta'bid al-ṣalawãt*, dan

penghambaan terhadap kekuasaan *ta'bid al-siyasiyyah* yang menggeser nilai-nilai fitri (otentik) manusia dalam bertauhid (keimanan terhadap Allah SWT) dan hidup dalam kebaikan di dunia dan akhirat). 4)Tanggungjawab Kebangsaan dan Kemanusiaan (antara lain beisi penegasan bahwa Masalah korupsi, kerusakan moral dan spiritual, pragmatisme perilaku politik, kemiskinan, pengangguran, konflik sosial, separatisme, kerusakan lingkungan, dan masalah-masalah nasional lainnya jika tidak mampu diselesaikan secara sungguh-sungguh, sistematik, dan fundamental akan semakin memperparah krisis nasional. Wabah masalah tersebut menjadi beban nasional yang semakin berat dengan timbulnya berbagai musibah dan bencana nasional seperti terjadi di Aceh, Nias, dan daerah-daerah lain yang memperlemah dayatahan bangsa. Krisis dan masalah tersebut bahkan akan semakin membebani tubuh bangsa ini jika dipertautkan dengan kondisi sumberdaya manusia, ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur nasional maupun lokal yang jauh tertinggal dari kemajuan yang dicapai bangsa lain). 5) Agenda dan Langkah ke Depan (antara lain berisi penegasan Usia jelang satu abad telah menempa kematangan Muhammadiyah untuk tidak kenal lelah dalam berkiprah menjalankan misi da'wah dan tajdid untuk kemajuan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan. Jika selama ini Muhammadiyah telah menorehkan kepeloporan dalam pemurnian dan pembaruan pemikrian Islam, pengembangan pendidikan Islam, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan, serta dalam pembinaan kecerdasan dan kemajuan masyarakat; maka pada usianya jelang satu abad ini Muhammadiyah selain melakukan revitalisasi gerakannya juga berikhtiar untuk

menjalankan peran-peran baru yang dipandang lebih baik dan lebih bermasalahat bagi kemajuan peradaban.[25]

Sesuai dengan bidang dan konsentrasi yang penulis pilih yakni Pemikiran Islam, maka penelitian ini menfokuskan diri pada pencermatan pemikiran keagamaan (ideologis) para elit Muhammadiyah dalam kaitannya dengan pemaknaan pemikiran tersebut bagi warga Muhammadiyah di bawah.

Penulis mencermati bahwa pemikiran para elit Muhammadiyah yang paling besar pengaruhnya adalah pada era muktamar ke-43 tahun 1995, muktamar ke-44 tahun 2000, muktamar ke-45 tahun 2005, dan muktamar ke-46 tahun 2010. Relevansi periode muktamar tersebut penulis pilih berdasarkan pertimbangan bahwa masa-masa itu adalah masa semaraknya berbagai pemikiran keagamaan dalam Islam sedang memperoleh apresiasi dari ummat Islam di Indonesia.

Jika dilihat dari konteks sejarah, kelahiran Muhammadiyah (tanggal 8 Dzul Hijjah 1330. atau tanggal 18 Nopember 1912 M.) benar-benar terjadi pada saat yang tepat, yakni pada saat dunia Islam sedang demam untuk bangkit dari keterpurukan. Hampir seluruh negara-negara Islam di dunia sedang mengalami ketertindasan dalam penjajahan, termasuk Indonesia yang pada saat itu dijajah oleh Belanda. Ada dua faktor utama pendorong geliat ummat Islam Indonesia, yakni keinginan untuk merdeka, dan keinginan meningkatkan kualitas ummat Islam Indonesia sebagaimana gema kebangkitan Islam di dunia yang sedang membahana.

[25] Lebih lanjut, lihat naskah aslinya dalam lampiran.

Tidak dapat disangkal bahwa Islam merupakan komponen penting yang turut membentuk dan mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu. Perjuangan umat Islam merupakan suatu proses ke arah pembentukan pola tatanan baru dalam dinamika kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara.

Dalam kurun waktu permulaan abad 20 hingga abad 21 sekarang ini, pergerakan Islam memberikan peran tersendiri di negeri ini. Perjalanan sejarah umat Islam di Indonesia memperlihatkan peranan yang amat dominan dalam menyuarakan dan menegakkan kemerdekaaan dalam segala aspeknya; menentang penjajahan, mengupayakan kemerdekaan politik untuk membebaskan diri dari belenggu pen-jajahan, perjuangan bersenjata dalam perang kemerdekaan, perjuangan di alam pembangunan dalam mengisi kemerde-kaaan, hingga menyuarakan kemerdekaaan berpikir, umat Islam tampil paling depan dengan segala konsekwensinya. Tapi, terkadang ia tampil dalam pentas politik nasional, dan terkadang pula ia terpental darinya.

1. Zaman Kolonial Belanda

Bangsa Indonesia (baca: umat Islam) sejak abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20 berada di bawah kekuasaan imperialisme Barat (Belanda yang paling lama) yang menguasai segala aspek kehidupan dan mencoba melumpuhkan kekuatan ummat dan bangsa ini. Sejak zaman *VOC* [26] masa awal penjajahan Belanda, berganti ke zaman *Cultuur Stelsel* (tanam paksa) terus ke periode *Etische Politiek* (polotik etis), hingga zaman *Volksraad* (Dewan Rakyat) tempat berbagai diplomasi

[26] *Verenigde Oost Indische Compagnie*, merupakan sarikat dagang Hindia Belanda.

politik ber-kembang, dan berakhir pada zaman *Exorbitante Rechten* (hak luar biasa di tangan Gubernur Jenderal), kekayaan dan kemakmuran bangsa Indonesia dihisap oleh penjajah Belanda. Kemerdekaan berpikir dan bertindak dirampas oleh kekuatan politik kolonial. Akibat dari lima periode penjajahan Belanda tersebut bangsa Indonesia menanggung penderi-taan yang tiada tara. Umat Islam pun bangkit menentangnya. Umat Islam men-jadi barisan terdepan dalam menghadapi penjajahan Belanda, karena Islam pada dasarnya anti imperialisme dalam segala bentuk dam manifestasinya. Sebut saja Sultan Hasanudin, Sultan Ageng Tirtayasa, Imam Bonjol, Pengeran Dipenogoro, Teuku Umar, Tjut Nyak Dien, dan masih banyak pemimpin-pemimpin Islam lainnya, mereka bangkit mengobarkan perlawanan untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan.

Pemerintah Belanda pun memahami, jika kesadaran persatuan umat Islam yang bersumber kepada ajaran islam tergalang, maka bahaya dan bencana besar bagi kekuatan kolonial Belanda akan mengancam. Pada akhirnya mereka pun menggunakan politik *devide et impera*; memecah belah untuk kemudian menguasai.

Kesadaran akan pentingnya persatuan umat Islam dalam menentang penjajahan kolonial Belanda dalam bentuk organisasi, baru terwujud dan berkembang pada awal abad ke-20. Masa akhir penjajahan Belanda, memberikan gambaran tentang pertumbuhan pergerakan keislaman di Indonesia. Pada masa permulaan abad 20, ketika rasa nasionalisme modern masih baru tumbuh, kata *Islam* merupakan kata pemersatu bagi bangsa Indonesia yang berhadapan bukan saja dengan pihak Belanda tapi juga dengan orang-orang Cina. Lihatlah

sebab berdirinya Sharikat Islam (1912) di Solo yang berdasarkan atas hubungan spiritual agama sekaligus sebagai front untuk (1) melawan semua penghinaan dan penindasan terhadap rakyat Bumi Putera; (2) reaksi terhadap rencana krestenings politiek dari Gubernur Jenderal *Idenburg* dengan dukungan kaum *Zending;* (3) perlawanan terhadap kecurangan dan penindasan dari kaum ambtenar Bumi Putera; dan (4) perlawanan terhadap permainan dan kecurangan praktik dagang orang-orang Cina. Kesemuanya itu merupakan reaksi terhadap bentuk penindasan dan kesombongan rasial dengan Islam sebagi alat pemersatu untuk melawannya.

Persoalan kemudian yang muncul ke permukaan pada permulaan abad 20 adalah tampilnya berbagai organisasi Islam yang di satu pihak memberikan pembaruan ke dalam pola pemikiran Islam dengan melakukan pemurnian aqidah dari unsur-unsur pra Islam, dan di lain pihak, melahirkan kelompok yang berpegang teguh pada paham dan anggapan lama serta madzhab yang dianutnya. Kelompok pertama yang membawa arus gerakan pembaruan mendirikan orga-nisasi-organisasi untuk menggalang umat Islam dan mendidik mereka agar sejalan dengan tuntutan masa. Di antaranya dengan mendirikan lembaga pendidikan (pesantren) yang memasukkan berbagai mata pelajaran non agama ke dalam kurikulumnya. Organisasi-organisasi pembaru itu antara lain Muhammadiyah yang didirikan tahun 1912 di Yogyakarta, al-Irshad yang berdiri di Jakarta tahun 1914, Persatuan Islam (Persis) di Bandung pada tahun 1923, dan berbagai organisasi lain yang sejenis.

Sementara kelompok kedua, untuk mempertahankan diri dari paham pembaru dan mempertahankan praktik

bermadhhab dari ancaman kaum Wahabi, maka golongan tradisional Islam ini, khususnya di Jawa, memperkuat diri dengan mendirikan organisasi Nahḍatul Ulama (kebangkitan para ulama) pada tahun 1926. Nahḍatul Ulama (NU) kemudian menjadi tempat berhimpun bagi kalangan mereka yang bermadhhab.[27]

Perkembangan selanjutnya, perbedaan-perbedaan yang semula timbul di kalangan koelompok modernis dan tradisionalis yang lebih merupakan perbedaan-perbedaan dalam masalah *furu'* (cabang) dan bukan dalam masalah ushul (pokok) mulai dapat menimbulkan saling pengertian. Persatuan di antara umat Islam pun semakin terasa di kala berhadapan dengan kekuatan politik yang menghambatnya.

Ketika tahun 1935 berdiri Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) tempat berhimpunnya berbagai organisasi Islam yang telah banyak bermunculan pada awal abad ke-20 guna merespon perilaku politik pemerintah kolonial. Pertemuan-pertemuan antar ulama dari berbagai organisasi menjadi dialog kerjasama untuk memecahkan masalah bersama; lepas dari penjajahan. Demikian pula, hubungan antara organisasi-organisasi Islam dan kalangan nasionalis yang netral agama dan berbeda pandangan sejak pertengahan tahun 1920-an hingga permulaan tahun 1930-an, mulai membaik dengan adanya GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang didirikan tahu 1939, serta Majelis Rakyat Indonesia (MRI) yang didirikan pada tahun 1941. Dimana MRI merupakan pertemuan antara GAPI, MIAI, dan Persatuan

[27] lebih jauh lihat Deliar Noer,1980: 241-254

Vakbonden Pegawai Negeri (federasi pekerja dalam jawatan pemerintahan). Salah satu contoh dari hubungan yang membaik itu dapat dilihat dari dukungan umat Islam terhadap memorandum tuntutan Indonesia berparlemen pada tahun 1939 yang disokong sepenuhnya oleh golongan nasionalis, termasuk kalangan Islam, demikian pula tentang perubahan konstitusi Indonesia yang dituntut oleh pergerakan nasional pada tahun 1941.

2. Zaman Kolonial Jepang

Masa selanjutnya, ketika Jepang menjajah bangsa Indonesia, kolonial baru tersebut berusaha menerapkan pola *nipponisasi* terhadap bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Bangsa Jepang memerintahkan rakyat Indonesia, termasuk para ulamanya, melakukan saikerei (memberi hormat dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari terbit). Cara penghormatan yang hampir sama dengan *ruku'* ini membuat marah kalangan umat Islam. Selain itu, umat Islam tidak dapat menerima kepercayaan Jepang yang meyakini bahwa mereka bangsa terpilih di dunia dan bahwa kaisar mereka merupakan turunan dewa. Menurut kalangan Islam anggapan seperti itu jelas menjurus ke arah kemusyrikan.

Kesalahan yang dapat menyinggung perasaan umat Islam itu berusaha dihapus oleh pihak Jepang; mereka berusaha menarik kaum muslimin dan mengangkatnya dengan cara memberikan kebebasan bergerak dalam organisasi Islam dengan mendirikan kembali MIAI pada 5 September 1942, dan kemudian berubah menjadi Majelis Shuro Muslimin Indonesia (Mashumi) bukan Masyumi pimpinan Mohammad Natsir.

Cara lain yang ditempuh oleh pihak Jepang untuk menarik simpati kaum Muslimin, yang di kemudian hari memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia adalah diselenggarakannya latihan-latihan kemiliteran bagi para santri, ulama, dan umumnya umat Islam. Latihan kemiliteran itu lamanya satu bulan berturut-turut mulai pertengahan tahun 1943 dan diikuti oleh sekitar 60 orang ulama dari berbagai kabupaten di Jawa. Kemudian suatu latihan yang lamanya tiga bulan diadakan untuk 80 orang guru agama dalam tahun 1944. Pada latihan-latihan ini, para peserta diajari berbagai ilmu pengetahuan umum, semangat dan kepercayaan Jepang, metode mengajar, olah raga militer, serta baris-berbaris.

Latihan-latihan itu menurut Deliar Noer (1987) memberikan hasil, di antaranya *pertama,* para ulama dan para santri memperoleh kesempatan untuk bertemu dengan rekannya yang lain, di tempat ataupun di dalam perjalanan selama latihan, yang memberikan kesempatan untuk bertukar pikiran. *Kedua,* mereka ditantang oleh pikiran dan pendapat yang selama ini kurang mendapat perhatian, misalnya isi semangat dan kepercayaan Jepang. Dengan cara berdiskusi antar-sesama ulama atau santri di tempat latihan, mereka dapat membandingkan antara Islam dan kepercayaan Jepang; bahwa Islam lebih mulia dari keyakinan apa pun, termasuk keyakinan yang dianut oleh Jepang.

Latihan-latihan kemiliteran yang diselenggarakan oleh Jepang bagi para santri dan ulama, nantinya akan menumbuhkan semangat juang yang tinggi dan berguna dalam menghadapi perang kemerdekaan; Revolusi Fisik 1945-1949. Pada masa Jepang inilah, umat Islam mendirikan laskar perjuangan Hizbullah pada 1944, yang

dalam Revolusi Fisik, laskar ini turut ambil bagian memper-tahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Di samping itu, sebagian besar para pemuda muslim banyak yang tergabung dalam barisan tentara Pembela Tanah Air (PETA) yang telah didirikan pada bulan Oktober 1943. Selain itu, perlawanan fisik juga dilakukan oleh umat Islam terhadap Jepang yang melakukan penindasan. Romusha atau kerja paksa yang diterapkan bagi rakyat Indonesia telah mengundang kemarahan, di samping paksaan ideologi *nipponisasi.*

Dari data-data tersebut dapat diambil pemahaman bahwa meskipun Bangsa Indonesia dan ummat Islam pada khususnya sebagai bangsa dan ummat yang terjajah, dan pemahaman keagamaannya juga tergolong rendah, tetapi telah muncul era kesadaran dari ummat Islam sendiri akan perlunya peningkatan kualitas ummat Islam. Peningkatan kualitas itu kongkrit riilnya adalah adanya upaya-upaya mendirikan lembaga pendidikan yang berusaha mencerdaskan kehidupan penduduk bumi putera. Di samping itu muncul pula kesadaran bahwa keterpurukan dan keterbelakangan yang dialami penduduk bumi putera ini adalah akibat adanya penjajahan. Oleh karenanya penjajahan harus diakhiri, dengan cara ummat Islam harus membakar semangat diri untuk lepas dari penjajahan, baik dengan cara-cara yang kooperatif maupun dengan cara-cara yang konfrontatif.

Salah satu upaya menumbuhkan kesadaran baik dalam upaya meningkatkan kualitas ummat Islam, maupun upaya penyadaran betapa pentingnya persaudaraan, kerjasama, dan pentingnya menjaga harkat dan martabat sebagai komunitas yang mandiri, adalah Ahmad Dahlan seorang ulama yang intelektual pada waktu itu berhasil

menggerakkan ummat Islam dan bangsa pribumi ini untuk bersama-sama menjadi bangsa yang mandiri, terlepas dari penjajah, serta memiliki kemampuan pemahaman terhadap Islam yang benar, dengan mendirikan persyarikatan Muhammadiyah.

Dalam perkembangan berikutnya, Muhammadiyah kemudian merasa perlu menegaskan pijakan dan landasan perjuangannya yang kemudian di kenal dengan *Khitah* Muhammadiyah, lebih lanjut mengenai *Khitah* Muhammadiyah dapat dijelasan sebagai berikut:

Khitah berasal dari kata حطّة [28] yang berarti rencana, design, skema, garis kebijakan, misalnya حطّة تنفيذية yang berarti rencana pelaksanaan.[29] Gerakan kembali ke *Kitabullah Wa Sunnata Rasulih*, dikumandangkan oleh Ahmad Dahlan sambil menyadarkan umat bahwa perbuatan shirik merupakan penyakit terberat sedangkan obat yang sejati adalah tauhid yang benar. Dari penegasan ini jelaslah bahwa pemurnian tauhid merupakan bagian dari *Khitah* Muhammadiyah.[30] *Khitah* Muhammadiyah kemudian dinyatakan oleh persyarikatan ini yakni merujuk pada keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 40 di Surabaya tahun 1978,[31] *Khitah* Muhammadiyah dirumuskan sebagai berikut:

1. Hakekat Muhammadiyah.

Perkembangan masyarakat Indonesia, baik yang disebabkan oleh daya dinamik dari dalam ataupun karena

[28] Kata Hith-thah terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 58.

[29]Attabik Ali, dan A. Zuhdi Muhdhor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* Yogyakarta: Multi karya Grafindo, 2006), 844.

[30]Selanjutnya lihat Amin Rais, *Visi dan Misi Muhammadiyah* (Yogyakarta: TB. Suara Muhammadiyah, 1997), 15.

[31]Mahsun jayady, *Muhammadiyah Pirifikasi Aqidah Islam dan strategi Perjuangannya* (Surabaya: LP-AIK UM, 1997), 43.

persentuhan dengan kebudayaan dari luar, telah menyebabkan perubahan tertentu. Perubahan itu menyangkut seluruh segi kehidupan masyarakat, diantaranya bidang sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan, yang menyangkut perubahan strukturil dan perubahan pada sikap serta tingkah laku dalam hubungan antar manusia.

Muhammadiyah sebagai gerakan, dalam mengikuti perkembangan dan perubahan itu, senantiasa mempunyai kepentingan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi-munkar, serta menyelenggarakan gerakan dan amal usaha yang sesuai dengan lapangan yang dipilihnya ialah masyarakat, sebagai usaha Muhammadiyah untuk mencapai tujuannya: menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridlai Allah SWT.

Dalam melaksanakan usaha tersebut, Muhammadiyah berjalan diatas prinsip gerakannya, seperti yang dimaksud di dalam Matan Keyakinan Cita-cita Hidup Muhammadiyah.

Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah itu senantiasa menjadi landasan gerakan Muhammadiyah, juga bagi gerakan dan amal usaha dan hubungannya dengan kehidupan masyarakat dan ketatanegaraan, serta dalam bekerjasama dengan golongan Islam lainnya.

2. Muhammadiyah dan Masyarakat

Sesuai dengan Khitahnya, Muhammadiyah sebagai Persharikatan memilih dan menempatkan diri sebagai Gerakan Islam amar-ma'ruf nahi mungkar dalam masyarakat, dengan maksud yang terutama ialah membentuk keluarga dan masyarakat sejahtera sesuai dengan Dakwah Jamaah.

Di samping itu Muhammadiyah menyelenggarakan amal-usaha seperti tersebut pada Anggaran Dasar Pasal 4, dan senantiasa berikhtiar untuk meningkatkan mutunya. Penyelenggaraan amal-usaha tersebut merupakan sebagian ikhtiar Muhammadiyah untuk mencapai Keyakinan dan Cita-Cita Hidup yang bersumberkan ajaran Islam dan bagi usaha untuk terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridlai Allah SWT.

3. Muhammadiyah dan Politik

Dalam bidang politik Muhammadiyah berusaha sesuai dengan khittahnya: dengan dakwah amar ma ma'ruf nahi munkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya, Muhammadiyah harus dapat membuktikan secara teoritis konsepsionil, secara operasionil dan secara kongkrit riil, bahwa ajaran Islam mampu mengatur masyarakat dalam Negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 menjadi masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera, bahagia, materiil dan spirituil yang diridlai Allah SWT. Dalam melaksanakan usaha itu, Muhammadiyah tetap berpegang teguh pada kepribadiannya.

Usaha Muhammadiyah dalam bidang politik tersebut merupakan bagian gerakannya dalam masyarakat, dan dilaksanakan berdasarkan landasan dan peraturan yang berlaku dalam Muhammadiyah.

Dalam hubungan ini, Muktamar Muhammadiyah ke-38 telah menegaskan bahwa:

a. Muhammadiyah adalah Gerakan Dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris

dengan dan tidak merupakan afiliasi dari sesuatu Partai Politik atau Organisasi apapun.

b. Setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain, sepanjang tidak menyimpang dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Persharikatan Muhammadiyah.

4. Muhammadiyah dan Ukhwah Islamiyah

Sesuai dengan kepribadiannya, Muhammadiyah akan bekerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan Agama Islam serta membela kepentingannya.

Dalam melakukan kerjasama tersebut, Muhammadiyah tidak bermaksud menggabungkan dan mensubordinasikan organisasinya dengan organisasi atau institusi lainnya.

5. Dasar dan Program Muhammadiyah

Berdasarkan landasan serta pendirian tersebut di atas dan dengan memperhatikan kemampuan dan potensi Muhammadiyah dan bagiannya, perlu ditetapkan langkah kebijaksanaan sebagai berikut:

a. Memulihkan kembali Muhammadiyah sebagai Persyarikatan yang menghimpun sebagian anggota masyarakat, terdiri dari muslimin dan muslimat yang beriman teguh, ta'at beribadah, berakhlaq mulia, dan menjadi teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat.

b. Meningkatkan pengertian dan kematangan anggota Muhammadiyah tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan kepekaan

sosialnya terhadap persoalan-persoalan dan kesulitan hidup masyarakat.

c. Menempatkan kedudukan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan untuk melaksanakan dakwah amar-ma'ruf nahi-mungkar ke segenap penjuru dan lapisan masyarakat serta di segala bidang kehidupan di Negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.

Selain itu, Muhammadiyah juga merumuskan berbagai strategi perjuangan ketika menghadapi problem-problem dakwah atau ketika bersinggungan dengan politik ketata negaraan di Indonesia ini, yang kemudian dikenal dengan *Khitah Perjuangan* Muhammadiyah. Di antara khiṭṭah perjuangan Muhammadiyah itu adalah:

1. ***Khitah Palembang*** (Khittah Perjuangan Muhammadiyah yang diputuskan dalam Muktamar ke 33 di Palembang tahun 1956), dan dinyatakan berlaku untuk tahun 1956-1959).

Adapun isi Khitah Palembang pada intinya adalah sebagai berikut:

a. Menjiwai pribadi para anggota terutama para pimpinan Muhammadiyah. yaitu dengan langkah-langkah:
   1) Memperdalam dan mempertebal tauhid.
   2) Menyempurnakan ibadah dengan khushu' dan tawadhu'
   3) Mempertinggi akhlaq
   4) Memperluas ilmu pengetahuan
   5) Menggerakkan Muhammadiyah dengan penuh keyakinan dan rasa tanggung jawab

hanya mengharapkan keridlaan Allah dan kebahagiaan umat.

b. Melaksanakan uswatun hasanah. Yaitu dengan langkah-langkah :
   1) Muhammadiyah harus selalu di muka membimbing ke arah pendapat umum, sehingga tetap maju dan memperbaharui
   2) Menegakkan dakwah Islam dengan menampakkan kepada dunia manusia tentang keindahan agama Islam
   3) Membentuk rumah tangga bahagia menurut sepanjang kemauan agama Islam.
   4) Mengatur hidup dan kehidupan antara rumah tangga dengan tetangga sehingga terwujud desa atau kampung islam.
   5) Anggota Muhammadiyah harus menyesuaikan hidup dan segala gerak geriknya sebagai seorang anggota masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

c. Mengutuhkan organisasi dan merapikan administrasi, yaitu dengan langkah-langkah:
   1) Dengan keutuhan organisasi kita kuat dan dengan kerapian administrasi kita terpelihara dari fitnah
   2) Pembaharuan dan memudakan tenaga pengurus, kalau perlu dengan mutasi agar tetap segar dan giat
   3) Menanamkan kesadaran berorganisasi kepada para anggota untuk mewujudkan organisasi yang sehat
   4) Administrasi diatur menurut tuntunan yang ada

5) Memelihara harta benda atau kekayaan Muhammadiyah.

d. Memperbanyak dan mempertinggi mutu amal, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:
   1) Memperbaiki dan memperlengkapkan amal usaha Muhammadiyah
   2) Menggiatkan gerakan perpustakaan, karang mengarang, penterjemahan, penerbitan, taman bacaan, dan Kutub Khannah
   3) Mendirikan asrama-asrama di sekolah-sekolah, serta pendidikan jasmani dan rohani.

e. Mempertinggi mutu anggota dan membentuk kader, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:
   1) Menetapkan minimum pengertian dan amalan agama yang perlu dimiliki oleh tiap-tiap anggota Muhammadiyah
   2) Memberi penghargaan kepada tiap keluarga Muhammadiyah dan anak Muhammadiyah yang berjasa, yang tua dihormati, yag muda disayangi
   3) Menuntun anggota menurut bakat dan kecakapannya
   4) Menempatkan pencinta dan pendukung Muhammadiyah berjenjang naik; simpatisan, calon anggota, anggota, dan anggota teras
   5) Mengadakan kursus kemasyarakatan di daerah.

f. Mempererat ukhuwah, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:
   1) Mempererat hubungan antar sesama muslim

2) Mengadakan ikatan yang nyata, umpama berjamaah, himpunan berkala, *ta'ziyah*, dll.
3) Mengadakan badan islah untuk penghubung jika terjadi keretakan atau menyelesaikan perselisihan dan persengketaan.

g. Menuntun penghidupan anggauta, yaitu dengan langkah-langkah: Membimbing usaha keluarga Muhammadiyah yang meliputi segenap persoalan-persoalan, penghidupan dan pencarian nafkah dan menyalurkannya kepada saluran yang menuju ke arah kesempurnaan.[32]

2. ***Khitah Ponorogo*** (Khiṭṭah Perjuangan Muhammadiyah yang diputuskan dalam forum Tanwir kota Ponorogo Jatim, tahun 1969. Tanwir tersebut atas amanat Muktamar Muhammadiyah ke 37 di Yogyakarta tahun 1968). Adapun isi pokoknya adalah sebagai berikut :
   a. Pola dasar Perjuangan :
      1) Muhammadiyah berjuang untuk mencapai cita-cita dan keyakinan hidup yang bersumber ajaran Islam.
      2) Dakwah Islam amar makruf nahi munkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya sebagaimana yang dituntunkan oleh Muhammad SAW. Adalah satu-satunya jalan untuk mencapai cita-cita dan keyakinan hidup tersebut.
      3) Dakwah Islam dan amar makruf nahi munkar seperti yang dimaksud harus dilakukan melalui dua saluran/bidang secara

[32]Disarikan dari, Haedar Nashir, *Khitah Muhammadiyah Tentang Politik* (Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2008), 19-24.

simultan: (1) saluran politik kenegaraan (politik praktis), (2) saluran masyarakat.

4) Untuk melakukan perjuangan dakwah Islam amar makruf nahi munkar seperti yang dimaksud di atas, dibuat alatnya masing-masing yang berupa organisasi: (1) untuk saluran bidang politik kenegaraan (politik praktis) dengan organisasi politik (partai), (2) untuk saluran/bidang masyarakat dengan organisasi non partai.
5) Muhammadiyah sebagai organisasi, memilih dan menepatkan diri ”Gerakan Islam dan Amar Makruf Nahi Munkar dalam Bidang Masyarakat”. Sedang untuk alat perjuangan di bidang politik kenegaraan (politik praktis), Muhammadiyah membentuk suatu partai Politik di luar organisasi Muhammadiyah.
6) Muhammadiyah harus menyadari bahwa partai tersebut adalah merupakan proyeknya dan wajib membinanya.
7) Antara Muhammadiyah dan partai politik tidak ada hubungan organisatoris, tetapi tetap mempunyai hubungan ideologis.
8) Masing-masing berdiri dan berjalan sendiri-sendiri menurut caranya sendiri-sendri, tetapi dengan saling pengertian dan menuju tujuan yang satu.
9) Pada prinsipnya tidak dibenarkan adanya perangkapan jabatan, terutama jabatan pimpinan antara keduanya demi tertibnya pembagian pekerjaan (spesialisasi).

b. Program Dasar Perjuangan:

Dengan dakwah amar makruf nahi munkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya, Muhammadiyah harus dapat membuktikan secara teoritis konsepsional, secara operasional dan secara konkrit riil, bahwa ajaran Islam mampu mengatur masyarakat dalam negara Republik Indonesia yang ber-Pancasila dan UUD 1945 menjadi masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera, bahagia, materiil dan spirituil yang diridloi Allah SWT.[33]

3. ***Khitah Ujung Pandang*** (Khittah Perjuangan Muhammadiyah yang diputuskan dalam Muktamar Muhammadiyah ke 38 di kota Ujung Pandang/Makassar pada tahun 1971. Khitah inilah yang paling banyak dirujukan menjadi pedoman atau acuan pokok dalam menentukan sikap organisasi menghadapi dunia politik).

   Isi pokok Khitah Ujung Pandang/Makassar adalah sebagai berikut:

   a. Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam bidang manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari suatu partai atau organisasi apa pun.
   b. Setiap anggota Muhammadiyah, sesuai dengan hak asasinya, dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lai, sepanjang tidak menyimpang dari Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan-ketentuan lain

[33] Ibid., 24-26.

yang berlaku dalam prsyarikatan Muhammadiyah.

c. Untuk lebih memantapkan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam setelah pemilu tahun 1971, Muhammadiyah melakukan amar makruf nahi munkar secara konstruktif dan positiv terhadap partai Muslimin Indonesia seperti halnya partai-partai politik dan organisasi-organisasi lainnya.

d. Untuk lebih meningkatkan patisipasi Muhammadiyah dalampelaksanaan pembangunan nasional, mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menggariskan kebijaksanaan dan mengambil langkah-langkah dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan mental spiritual. [34]

4. ***Khitah Surabaya*** (Khittah Perjuangan Muhammadiyah yang diputuskan di kota Surabaya pada tahun 1978). Khittah ini sudah penulis cantumkan di awal pembicaraan tentang Khittah Muhammadiyah.
5. ***Khitah Denpasar*** (Khittah Perjuangan Muhammadiyah yang diputuskan di Denpasar, bali, pada tahun 2002).

Rumusan Khittah Denpasar dijelaskan sebagai berikut :

> Muhammadiyah adalah Gerakan Islam yang melaksanakan da'wah amar ma'ruf nahi munkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud

[34] Ibid,, 29-33.

masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah berpandangan bahwa Agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan meliputi aqidah, ibadah, akhlaq, dan mu'amalat dunyawiyah yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan dalam kehidupan perseorangan maupun kolektif. Dengan mengemban misi gerakan tersebut Muhammadiyah dapat mewujudkan atau mengaktualisasikan Agama Islam menjadi rahmatan lil-'alamin dalam kehidupan di muka bumi ini.

Muhammadiyah berpandangan bahwa berkiprah dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan da'wah amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana telah menjadi panggilan sejarahnya sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia. Peran dalam kehidupan bangsa dan negara tersebut diwujudkan dalam langkah-langkah strategis dan taktis sesuai kepribadian, keyakinan dan cita-cita hidup, serta Khitah perjuangannya sebagai acuan gerakan sebagai wujud komitmen dan tanggungjawab dalam mewujudkan *Baldatun Thoyyibatun Wa Rabbun Ghafur*.

Bahwa peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan melalui dua strategi dan lapangan perjuangan. Pertama, melalui kegiatan-kegiatan politik yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan/kenegaraan (real politics, politik praktis) sebagaimana dilakukan oleh partai-partai politik atau kekuatan-kekuatan politik formal di tingkat kelembagaan negara. Kedua, melalui kegiatan-

kegiatan kemasyarakatan yang bersifat pembinaan atau pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan-kegiatan politik tidak langsung (high politics) yang bersifat mempengaruhi kebijakan negara dengan perjuangan moral (moral force) untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tingkat masyarakat dan negara sebagaimana dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan (interest groups).

Muhammadiyah secara khusus mengambil peran dalam lapangan kemasyarakatan dengan pandangan bahwa aspek kemasyarakatan yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat tidak kalah penting dan strategis daripada aspek perjuangan politik kekuasaan. Perjuangan di lapangan kemasyarakatan diarahkan untuk terbentuknya masyarakat utama atau masyarakat madani *(civil society)* sebagai pilar utama terbentuknya negara yang berkedaulatan rakyat. Peran kemasyarakatan tersebut dilakukan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti halnya Muhammadiyah. Sedangkan perjuangan untuk meraih kekuasaaan *(power struggle)* ditujukan untuk membentuk pemerintahan dalam mewujudkan tujuan negara, yang peranannya secara formal dan langsung dilakukan oleh partai politik dan institusi-institusi politik negara melalui sistem politik yang berlaku. Kedua peranan tersebut dapat dijalankan secara objektif dan saling terkait melalui bekerjanya sistem politik yang sehat oleh seluruh kekuatan nasional menuju terwujudnya tujuan negara.

Muhammadiyah sebagai organisasi sosial dan keagamaan (organisasi kemasyarakatan) yang

mengemban misi da'wah amar ma'ruf nahi munkar senantiasa bersikap aktif dan konstruktif dalam usaha-usaha pembangunan dan reformasi nasional sesuai dengan *khiṭah* (garis) perjuangannya serta tidak akan tinggal diam dalam menghadapi kondisi-kondisi kritis yang dialami oleh bangsa dan negara. Karena itu, Muhammadiyah senantiasa terpanggil untuk berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berdasarkan pada khittah perjuangan sebagai berikut:

a. Muhammadiyah meyakini bahwa politik dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam dalam urusan keduniawian *(al-umur al-dunyawiyat)* yang harus selalu dimotivasi, dijiwai, dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur agama dan moral yang utama. Karena itu diperlukan sikap dan moral yang positif dari seluruh warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan politik untuk tegaknya kehidupan berbangsa dan bernegara.
b. Muhammadiyah meyakini bahwa negara dan usaha-usaha membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui perjuangan politik maupun melalui pengembangan masyarakat, pada dasarnya merupakan wahana yang mutlak diperlukan untuk membangun kehidupan di mana nilai-nilai Ilahiah melandasi dan tumbuh subur bersamaan dengan tegaknya nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, perdamaian, ketertiban, kebersamaan, dan keadaban untuk terwujudnya *Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*.

c. Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan atau pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya masyarakat madani *(civil society)* yang kuat sebagaimana tujuan Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan kenegaraan sebagai proses dan hasil dari fungsi politik pemerintahan akan ditempuh melalui pendekatan-pendekatan secara tepat dan bijaksana sesuai prinsip-prinsip perjuangan kelompok kepentingan yang efektif dalam kehidupan negara yang demokratis.
d. Muhammadiyah mendorong secara kritis atas perjuangan politik yang bersifat praktis atau berorientasi pada kekuasaan *(real politics)* untuk dijalankan oleh partai-partai politik dan lembaga-lembaga formal kenegaraan dengan sebaik-baiknya menuju terciptanya sistem politik yang demokratis dan berkeadaban sesuai dengan cita-cita luhur bangsa dan negara. Dalam hal ini perjuangan politik yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan politik hendaknya benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat dan tegaknya nilai-nilai utama sebagaimana yang menjadi semangat dasar dan tujuan didirikannya negara Republik Indonesia yang diproklamasikan tahun 1945.
e. Muhammadiyah senantiasa memainkan peranan politiknya sebagai wujud dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan jalan mempengaruhi

proses dan kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan cita-cita luhur bangsa. Muhammadiyah secara aktif menjadi kekuatan perekat bangsa dan berfungsi sebagai wahana pendidikan politik yang sehat menuju kehidupan nasional yang damai dan berkeadaban.

f. Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun. Muhammadiyah senantiasa mengembangkan sikap positif dalam memandang perjuangan politik dan menjalankan fungsi kritik sesuai dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar demi tegaknya sistem politik kenegaraan yang demokratis dan berkeadaban.
g. Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap anggota Persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai hati nurani masing-masing. Penggunaan hak pilih tersebut harus merupakan tanggungjawab sebagai warga negara yang dilaksanakan secara rasional dan kritis, sejalan dengan misi dan kepentingan Muhammadiyah, demi kemaslahatan bangsa dan negara.
h. Muhammadiyah meminta kepada segenap anggotanya yang aktif dalam politik untuk benar-benar melaksanakan tugas dan kegiatan politik secara sungguh-sungguh dengan mengedepankan tanggung jawab *(amanah),* akhlak mulia *(akhlaq al-karimah),* keteladanan *(uswah ḥasanah),* dan perdamaian *(ishlah).* Aktifitas politik tersebut harus sejalan dengan upaya memperjuangkan

misi Persyarikatan dalam melaksanakan da'wah amar ma'ruf nahi munkar.

i. Muhammadiyah senantiasa bekerjasama dengan pihak atau golongan mana pun berdasarkan prinsip kebajikan dan kemaslahatan, menjauhi kemudharatan, dan bertujuan untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik, maju, demokratis dan berkeadaban.[35]

B. Pemikiran Ideologis dalam Muhammadiyah

Charles Glock memaknai ideology sebagai sesuatu yang paling niscaya ketika terjadi perubahan social.[36] Sedangkan Strark memaknai ideology sebagai suatu visi, gambaran verbal tentang masyarakat yang baik, dan sarana-sarana utama untuk mencapainya.[37] Sejalan dengan Strark, Riberru memberi tekanan ideologi pada sistem paham atau seperangkat pemikiran yang menyeluruh, yang bercita-cita menjelaskan dunia dan sekaligus mengubahnya.[38]

Ali Shari'ati mengatakan bahwa ideologi seagai ilmu tentang keyakinan dan cita-cita yang dianut oleh kelompok tertentu, kelas sosial tertenu, atau suatu bangsa dan ras tertentu. Jadi ideologi dapat dikatakan sebagai sistem paham mengenai dunia yang mengandung teori perjuangan dan disnut kuat oleh para pengikutnya menuju

[35]Mahsun, *Pemikiran Kegamaan Gerakan Islam Kontemporer* (Surabaya: LP-AIK Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2009), 25-37.
[36]Charles Glock,, *Religion and Society, Intension* (Chicago: Rrand Mc Nally), 25.
[37]John B. Thompson, *Analisis Ideologi: Kritik Wacana Ideologi-ideologi Dunia* (Yogyakarta: Ircisod, 2003), 17.
[38]Riberru, J. dkk, *Menguak Mitos-mitos Pembangunan, Telaah Etis dan Kritis* (Jakarta: Gramedia, 1986), 4.

cita-cita sosial tertentu dalam kehidupan.[39] Selanjutna dalam perspektif sosiologi ilmu pengetahuan, Karl Mannheim, membedakan ideologi dengan utopia, bahwa keduanya sama yakni keduanya merupakan sesuatu yang belum terjadi dan bukan merupakan fakta yang empiris. Ideologi merupakan proyeksi ke depan tentang gejala yang akan erjadi berdasarkan sistem tertentu, misalnya berdasarkan sitem kapitalisme maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi, sedangkan berdasar sosialisme akan terjadi pemerataan. Sementara utopia ialah ramalan tentang masa depan yang didasarkan pada sistem lain yang pada saat ini tidak sedang berlangsung.[40]

Dalam kaitannya dengan ideologi Muhammadiyah, Haedar Nashir (ketua PP Muhammadiyah 2005-2010), menjelaskan ideologi secara umum dimaknai sebagai 1) kumpulan konsep bersstem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, 2) cara berpikir seseorang atau suatu golongan, 3) paham, teori, dan tujuan yang terpadu dan merupakan satu kesatuan program sosial politik.[41]

Ideologi gerakan dalam Muhammadiyah secara mencair sesungguhnya telah melekat dalam gerakan awal organisasi Islam ini, ketika Ahmad Dahlan merumuskan dan merintis gerakan dakwahnya yang menjadi titik awal berdirinya Muhammadiyah. Jika disederhanakan, kiranya *ideologi* gerakan Muhammadiyah waktu itu ialah ideologi Islam tranformatif. Yakni gerakan dakwah yang dibangun

[39]Ali Shari'ati,, *Tugas Cendekiawan Muslim* (terjemahan) (Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1982), 146.
[40]Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politi* (Jakarta: Kanisius, 1994), 18.
[41]Haedar Nashir, *Ideologi Muhammadiyah* (Yogyakarta: TB Suara Muhammadiyah, 2001), 30.

diatas pandangan keagamaan yang fundamental yang berorientasi pada perubahan di kalangan umat dan masyarakat kea rah yang lebih baik. Ahmad Dahlan bahkan dapat dikatakan sebagai pelopor gerakan trasformatif di negeri ini, jauh sebelum konsep gerakan Islam transformatif menjadi perbincangan luas dalam pemikiran Islam tahun 1980an.

Pada era Mas Mansur Muhammadiyah juga mensistematisasi gerakan melalui *langkah dua belas*. Konsep *lngkah dua belas* mengandung pemikiran-pemikiran mendasar tentang Islam dan tentang Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam melalui gerakan organisasi yang teratur. Konsep ini cukup penting sebagai acuan bagi tindakan warga dan pimpinan Muhammadiyah dalam mengerakkan organisasi berdasarkan misi Islam.

Tahun 1942 pada era Ki Bagus Hadikusumo juga dirumuskan *Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah*. Konsep Muqoddimah AD Muhammadiyah termasuk hal mendasaar karena dirumuskan untuk mensistematisasi langkah dan pemikiran Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah sebelum itu. Selain itu, Muqaddimah juga di rumuskan sebagai jawaban atas kecenderungan melemahnya ruh Islam di kalangan warga Muhammadiyah. Dengan demikian, konsep Muqaddimah maupun *duabelas langkah* dapat dikatakan sebagai rumus ideologi Muhamadiyah dalam bentuk yang berupa prinsip-prinsip.

Konsep ideologi dalam Muhammadiyah secara lebih sistematik disusun dan tertuang dalam *Matan keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah* (MKCH). Konsep ini dirumuskan tahun1969 sebagai amanat dari Muktamar ke-

37 tahun 1968 diYogyakarta. Muktamar ke-37 itu sendiri termasuk monumental karena menetapkan langkah baru untuk melakukan *Re-tajdid* atau mentanfidzkan kembali gerakan Muhammadiyah dari kejumudan. Maka MKCH merupakan pilar konsepsional untuk memperbaharui gerakan Muhammadiyah melalui prinsip-prinsip keyakinan dan pemikiran yang mendasar tentang Islam, tentang Muhammadiyah, dan dalam memerankan Muhammadiyah di tengah dinamika baru masyarakat Indonesia. Kondisi social politik saat itu juga berada pada awal era Orde Baru, sehingga MKCH sekaligus merupakan *antisipasi ideology* terhadap perkembangan baru bangsa dan masyarakat Indosesia.

Dari gambaran sekilas itu tampak bahwa Muhammadiyah senantiasa responsive dalam menanggapi perkembangan yang terjadi dalam masyarakat untuk kemudian menjawab secara kosepsional sebagai acuan bagi tindakan gerakan. Konsep-konsep yang mendasar yang disistematisasi sebagai jawaban atas perkembangan zaman sekaligus memuat pandangan hidup Muhammadiyah itu, tiada lain sebagai konsepsi *ideologi* dalam Muhammadiyah. Namun. Karena sistem politik yang monolitik yang diterapkan oleh rezim Orde Baru yang menghendaki Pancasila sebagai ideology tunggal, maka konsepsi ideology dalam muhammadiyah dirumudkan dalam format lain seperti MKCH. Tapi semangat dasarnya tetap, bahwa warga Muhammadiyah senantiasa memerlukan pandangan-pandangan dunia yang mendasar dalam melakukan gerakan dakwah, yang secara longgar disebut sebagai ideologi gerakan Muhammadiyah.

C. Muhammadiyah dan Puritanisme

Clifford Geertz antropolog dari Amerika ini ketika melakukan risetnya di Mojokutho (Kediri, Jawa timur), mencermati hubungan antara keyakinan keagamaan dengan perilaku ekonomi di kalangan muslim Mojokutho. Pikiran Geertz pun *terset up* reformisme Islam untuk melihat hubungan antara muslim reformis dan perilaku ekonomi di kalangan muslim mojokutho, yang akhirnya Geertz berkesimpulan bahwa reformisme/modernisme Islam dan pembangunan ekonomi berjalan secara beriringan. Para pemimpin komunitas bisnis di Mojokutho adalah sebagian besar muslim reformis. 7 (tujuh) dari pertokoan modern yang berdiri kokoh di Mojokutho, 6 (enam) di antaranya adalah dijalankan oleh muslim *reformis puritan.* Geertz, secara eksplisit merujuk pada Muhammadiyah sebagai prototipe *santri reforis* yang memang terjadi hubungan antara spirit enterpreneurship dan muslim *reformis-puritan* di Indonesia.

Jika mengikuti teori Geerrtz ini, maka tampak karakteristik utama Muhammadiyah yang distingtif dengan varian abangan di Jawa. Sementara abangan, baik di kalangan petani maupun elit priyayi kurang individualis dan lebih hirarkhis. Muslim *reformis-modernis* Muhammadiyah cenderung individualis, pritan, egaliter, asketis, rasional, dan punya kaitan langsung dengan tradisi *enterpreneorship*.[42] Akan tetapi masih perlu dilacak tentang ada tidaknya kaitan antara karakter puritan di Muhammadiyah ini dengan gerakan puritanisme secara global.

[42]Clifford Geerts, *Islam Observed: Religious Development in Marocco and Indonesia* (Chicago & London: The University of Chicago Press, 1971), 2.

Puritanisme, dalam khazanah teologi Islam oleh para ahli sejarah diidentikkan dengan Wahhabi/wahabisme, atau diidentikkan dengan *fundamentalisme* (الأصوليّة).

Tetapi pemaknaan fundamentalisme dalam perspektif barat sesungguhnya berbeda dengan makna fundamentalisme dalam perspektif Islam. Jika dirunut pemaknaan fundamentalisme dalam perspektif Islam, berasal dari kata الأصوليّة yang berarti mempunyai akar Islam dan mengandung makna islami.[43]

Dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam, *fundamentalisme* memiliki rujukan dalam al-Qur'aan, misalnya dalam surat al-Hashr ayat 5:

> Artinya: "Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka (semua itu) adalah dengan izin Allah; dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.[44]"

Kemudian dalam surat as-Shaaffat ayat 64:

> Artinya: "Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang ke luar dari dasar neraka Jahim.[45]"

Dan dalam surat Ibrahim ayat 24:

> Artinya: "Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang

[43]Muhammad Imarah, *Ma'rakah al-Mustalahat Baina al-Gharbiyyi wa al-Islam*, (terj. Mustalahah Maufur) (Jakarta: Rabbani Press, 1998), 67-69.
[44] al-Qur'an, 59 (al-Hashr): 5.
[45] al-Qur'an, 14 (al-Shaaffaat): 64.

baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit.[46],,

Kata *ashl* atau fondamen, pada umumnya digunakan untuk hukum agama, atau kaidah yang cocok dan bersesuaian dengan masalah-masalah yang bersifat particular. Kata *Ushul* berarti prinsip-prinsip yang diyakini dan diterima, sehingga makna keseluruhannya adalah: dalil/argument kaidah umum, yang kuat atau yang lebih dapat diterima *(rajih).* Dalam peradaban Islam, banyak bidang ilmu yang mempunyai inisial ushul, diantaranya: *Ushuul al-Diin*, yaitu ilmu kalam, tauhid, fiqih akbar; *Ushuul al-Fiqh,* yaitu ilmu tentang kaidah-kaidah dan bahasan yang mengantarkan pada istinbat; dan *Ushuul al-Hadiith,* yaitu ilmu yang mencermati berbagai hal yang bekaitan dengan hadits, atau disebut Musthalaahul Hadith.[47]

Dari pemaparan tersebut tidak ditemukan makna fundamentalisme Islam dalam arti *al-Ushuliyyah* sebagaimana yang difahami oleh kalangan intelektual barat. Tetapi pada umumnya mereka mengidentifikasikan Puritanisme Islam itu dengan Wahabisme atau Wahabiyyah.

Wahhabisme atau Wahhabiyah dinisbahkan kepada Sheikh Muhammad ibn `Abd al-Wahhab (1703-1792), pendiri gerakan puritanisme keagamaan di Semenanjung Arabia. Ia dilahirkan pada tahun 1703 di Uyainah, sebuah kota yang sekarang ini sudah tidak ada lagi, di wilayah Najd, Arabia. Ia memperoleh pendidikan agama, dan

[46] al-Qur'aan, 14 (al-Shaaffaat): 24.
[47]Lebih lanjut lihat, Muhammad Ibnu Abd al-Wahhab. *Masaail al-Jaahiliyyah al-Latii Khaalafa Fiihaa Rasuulullaah SAW. Ahl Jaahiliyyah,* terj. As'ad Yasin, (Surabaya : Bina Ilmu, 1985), 173-190.

pernah belajar di Madinah. Ia kemudian berkelana ke mana-mana, berkunjung dan belajar ke tempat-tempat seperti Shiria, Irak, Kurdistan, dan Persia. Ketika kembali ke Arabia, ia mulai mengajarkan bentuk Islam yang puritan, yang menyerukan kaum Muslim untuk kembali kepada dasar-dasar Islam seperti yang dikemukakan dalam al-Qur'aan dan hadith, tentunya sebagaimana yang ia sendiri pahami dan tafsirkan.

Pada sekitar tahun 1777, ia tinggal di Dir'iyyah, Arabia, dan di sana ibn al-Wahhab menjadi *pemimpin spiritual* keluarga besar Sa`ud. Pada masa itu, klan Sa`ud adalah sebuah kelompok pembesar atau elite lokal yang sedang berusaha untuk memperluas pengaruh dan wewenang. Wahhab lalu menandatangani semacam perjanjian kerja sama dengan Muhammad ibn Sa`ud, pemimpin klan di atas. Ibn al-Wahhab dan pengikut-pengikutnya akan mendukung upaya-upaya keluarga ibn al-Sa`ud untuk memperluas pengaruh dan wewenang mereka, dan keluarga al-Sa`ud – sebagai konpensasinya – akan menyebarkan Islam yang puritan itu.[48]

Tentang pertemuan keduanya di Oasis Dir`iyyah. Menurut Abu Hakimah, salah satu penulis sejarah ibn al-Wahhab:

Muhammad ibn Sa`ud menyambut Muhammad ibn al-Wahhab dan berkata, "Oasis ini milikmu, dan jangan takut kepada musuh-musuhmu. Dengan nama Allah, bahkan jika semua (orang) Najd dipanggil untuk menyingkirkan kamu, kami tidak akan pernah setuju untuk

[48]Muhammad Nur Hakim, *Gerakan Revivalisme Islam dan Formalisasi Shari'ah di Indonesia,* (makalah seminar internasional "contemporary Islamic in southeast asia in the contect of social, political, and cultural change"), Malang : UMM Press, 2008, 1-8.

mengusirmu." Muhammad ibn `Abd al-Wahhab menjawab, "Anda adalah pemimpin mereka yang menetap di sini dan Anda adalah seorang yang bijak. Saya ingin Anda menyatakan sumpah Anda kepada saya bahwa Anda akan melaksanakan *jihad* (perang suci) terhadap orang-orang kafir. Sebagai imbalannya, Anda akan menjadi imam, pemimpin masyarakat Muslim, dan saya akan menjadi pemimpin dalam masalah-masalah keagamaan.[49]

Dengan terbentuknya koalisi antara Ibn Sa`ud dan `Abd al-Wahhab, Wahhabiyah menjadi ideologi keagamaan bagi suatu unifikasi antarsuku di Arabia Tengah dan apa yang dapat disebut sebagai gerakan Wahhabiyah pun dimulai. Sebagai imam kembar gerakan Wahhabiyah, Ibn Sa`ud dan `Abd al-Wahhab menjadi pemimpin spiritual dan temporal wilayah itu.Banyak deskripsi mengenai keberhasilan ekspansi Wahhabi-Saudi yang awal menekankan fakta bahwa *raid* sejalan dengan praktik-praktik kesukuan yang dominan kala itu. Sekalipun mengandung kebenaran, hal ini menyepelekan pentingnya dimensi spiritual koalisi itu, yang menjadi daya tarik sedikitnya bagi sebagian pengikut Wahhabi yang awal. Selain keuntungan material, Wahhabisme juga menawarkan penyelamatan bukan saja di dunia ini, melainkan juga di akhirat kelak. Menurut sejarawan Madawi,[50] al-Wahhab membawa sesuatu yang baru, yakni pentingnya *tauḥid*, ke dalam tradisi keislaman Najd yang sebelumnya didominasi *fiqh*.[51]

[49] dikutip dalam al-Rasheed, 2002: 17

[50]Dikutip dari al-Rasheed (2002: 20)

[51]Meskipun demikian ada reaksi yang bernada *kontra* terhadap pelopor pemurnian aqidah ini, misalnya : Seluruh karya Muhammd b. 'Abd al-Wahhab sangat tipis, baik dari segi isi maupun ukurannya. Dalam rangka

Selain itu, peran essensial dalam pembentukan negara Wahhabi juga dimainkan oleh kelompok yang disebut Ikhwan, kekuatan militer yang dibentuk dari unsur-unsur suku, dan yang dengannya `Abd al-`Aziz berhasil menduduki Hasa. Seorang sejarawan mendefinisikan Ikhwan sebagai: "(orang-orang) Badui yang menerima ajaran-ajaran pokok ortodoksi Islam aliran Hanbali yang disampaikan kepada mereka oleh `Abd al-Wahhab yang sudah dilupakan atau tidak lagi diacuhkan oleh bapak atau kakek mereka. Mereka juga adalah orang-orang Badui yang, melalui pendekatan persuasif pada missionaris agama dan karena bantuan material yang disediakan untuk mereka oleh `Abd al-`Aziz, bersedia meninggalkan cara hidup nomadik mereka untuk tinggal di Hijrah yang dibangun oleh `Abd al-`Aziz khusus untuk mereka. [52]

Beberapa Ajaran Pokok Wahhabisme

a. Kembali kepada ajaran-ajaran Islam yang asli, seperti yang ada dalam al-Qur'ān dan hadith;
b. Kebutuhan untuk menyatukan iman dan perbuatan;
c. Pelarangan atas semua pandangan dan praktik yang tidak ortodoks. Hal ini menyebabkan Wahhab

menjustifikasi pujiannya bagi Muhammd b. 'Abd al-Wahhab, al-Faruqi menambahkan daftar "isu-isu lebih lanjut" yang ia susun sendiri pada terjemahan-Inggrisnya atas setiap bab *Kitab al-Tauhid*. Hal ini menyiratkan bahwa seolah-olah sang pengarang, yakni Muhammd b. 'Abd al-Wahhab, pada mulanya telah mendiskusikan sejumlah "isu" yang muncul dari hadis-hadis di buku itu, yang sebenarnya tidak ia lakukan. Demikian pula, sebuah edisi *Kasyaf al-Shubuhat* karya Muhammd b. 'Abd al-Wahhab yang diterbitkan di Riyadh pada 1388 H/1968 M memiliki catatan pada halaman judulnya, "dijelaskan secara lebih terperinci (*qama bi tafsilihi*) oleh 'Ali al-Hamad al-Salihi." Sebuah buku lain yang dinisbatkan kepada Muhammd b. 'Abd al-Wahhab, *Masa'il al-Jahiliyyah* (Madinah: al-Jami'ah al-Islamiyah, 1395/1975), memuat keterangan "diperluas oleh (tawassa'a fiha) al-Sayyid Mahmud Shukri al-Alusi".

[52]Rasheed, 2002: 59).

untuk sepanjang hidupnya memerangi praktik-praktik seperti penyembahan kepada para wali dan ziarah ke makam-makam dan tempat-tempat keramat untuk memperoleh berkah;

Muhammad ibn `Abd al-Wahhab membentuk sebuah gerakan yang pengaruhnya lebih besar dari sekadar berdirinya Arab Saudi sekarang ini. Pengaruh Wahhabi telah menyebar ke seluruh dunia Islam bahkan hanya lewat ekspose versi Islam ini kepada jutaan jamaah haji yang pergi ke Mekkah setiap tahunnya.[53] Wahhabi mengajarkan bahwa kaum Muslim yang benar harus memiliki kepedulian terhadap politik dan jalannya pemerintahan di sebuah negara. Jika para penguasa mereka gagal bertindak dan berperilaku sebagai Muslim yang baik, jika mereka gagal membangun suatu negara di mana hukum-hukum Shari`ah dilembagakan dan dijalankan, maka setiap Muslim memiliki kewajiban keagamaan untuk menggantikan penguasa itu dan pemerintahannya yang tidak Islami. Sekalipun corak khusus keislaman versi al-Wahhab yang puritan itu bukan merupakan tujuan akhir semua pembaru Muslim dewasa ini, pesan-pesannya mengenai aktivisme politik dan kaitan antara iman dan perbuatan jelas sudah tertanam dalam.

Orang-orang yang bersimpati pada ajaran-ajaran yang disebut sebagai Wahhabisme di sini tentu mungkin keberatan dengan penggunaan penamaan tersebut, karena istilah itu diberikan oleh orang-orang yang berada di luar

[53]Bandingkan dengan pernyataan Nadjih Achjad yang cenderung mengatakan bahwa Muhammad Bin Abd al Wahhab sebagai seorang pemurni akidah dan tidak berbicara soal politik. Selanjutnya lihat dalam, Achyad, Najih. *Ta'thiiraat Kitaab al-Tauhid Shekh Muhammad Bin Abd al Wahhab fi al-Harakah al-Ishlaahiyyah bi Induniisiyyah,* ma'had Maskumamban Al-Islamy, 17-70.

gerakan tersebut, dan kerap kali dengan makna yang terkesan buruk. Kaum Wahhabi sendiri lebih memilih istilah nama *al-Muwahhhiduun* atau *Ahl al-Tawhiid* untuk menamakan kelompok mereka.[54] Namun, nama yang mereka gunakan sendiri itu justru mencerminkan keinginan untuk menggunakan secara eksklusif prinsip tawhid, yang merupakan landasan Islam itu sendiri. Hal ini menyiratkan pengabaian terhadap seluruh kaum Muslim yang lain, yang mereka cap telah melakukan syirik. Tidak ada alasan untuk menerima monopoli atas prinsip tawhid tersebtu, dan karena gerakan yang menjadi pokok pembahasan ini merupakan karya seorang manusia, yakni Muhammad b. 'Abd al-Wahhab, maka cukup beralasan dan lazim untuk menyebut mereka *Wahhbisme dan kaum Wahhabi.* [55]

Ada dua catatan lainnya. *Pertama,* dalam sejarah pemikiran Islam yang telah berlangsung lama dan sangat kaya, Wahhabisme tidak menempati tempat yang khususnya penting. Secara intelektual marjinal, gerakan Wahhabi memiliki nasib baik muncul di Semenanjung Arab (meski di Najad, sebuah tempat yang relativ jauh dari semenanjung itu) dan karena itu dekat dengan Haramayn, yang secara geografis merupakan jantung dunia Muslim. Keluarga Saudi, yang menjadi patron gerakan Wahhabisme, bernasib baik ketika pada abad keduapuluh mereka memperoleh kekayaan minyak yang luar biasa, yang sebagiannya telah digunakan untuk menyebarluaskan Wahhabisme di dunia Muslim dan lainnya. Jika tidak ada dua faktor tersebut, Wahhabisme mungkin saja hanya

[54]Lebih lanjut dalam, Abd al-Wahhab, Muhammad Ibnu. *Masaail al-Jaahiliyyah al-Latii Khaalafa Fiihaa Rasuulullaah SAW. Ahl Jaahiliyyah,* terj. As'ad Yasin (Surabaya : Bina Ilmu, 1985), 22-35.

[55] Algar, 2003: 1-2

dicatat dalam sejarah sebagai gerakan sektarian yang marjinal dan berumur pendek. Kedua faktor yang sama pula, yang diperkuat dengan adanya sejumlah kesamaan dengan kecenderungan-kecenderungan kontemporer lainnya di dunia Islam, telah menyebabkan Wahhabisme dapat bertahan lama. [56]

Kedua, Wahhabisme adalah sebuah fenomena yang sepenuhnya unik, yang perlu disebut sebagai suatu aliran pemikiran atau bahkan sekte tersendiri. Kadang kaum Wahhabi dicirikan, khususnya oleh para pengamat non-Muslim yang mencari deskripsi ringkas mengenainya, sebagai kaum Sunni yang *ekstrem* atau sebagai kaum Sunni yang *konservatif* dengan kata-kata sifat seperti *stern* atau *austere* ditambahkan di belakangnya, untuk memberi ukuran yang lebih pasti. Namun, kalangan Sunni yang jauh lebih dikenal sudah lama mengamati bahwa kaum Wahhabi, sejak pertamakali aliran mereka dikumandangkan, tidak bisa dimasukkan sebagai bagian dari *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā̤h*. Hal itu karena hampir semua praktik, tradisi dan keyakinan yang dikecam oleh Muhammad Bin `Abd al-Wahhab sudah lama diakui sebagai bagian integral dari Islam Sunni, diuraikan dalam banyak sekali literatur dan diterima oleh sebagian besar kaum Muslim. Persis karena alasan ini, maka banyak ulama yang hidup pada masa ketika Wahhabisme pertamakali dikampanyekan mengecam pendukungnya sebagai bukan bagian dari *Ahl al-Sunnah wa al-Jamaa̤ah.* Bahwa sekarang Wahhabisme dipandang sebagai bagian dari Sunni, hal itu menunjukkan bahwa istilah Sunni mulai memperoleh makna yang luar biasa luasnya.

[56] Ibid., 2

Ciri-ciri umum dari fundamentalisme Islam menurut Mudjahirin Thohir, ialah: (a) gerakan-gerakan Islam yang secara politik menjadikan Islam sebagai ideologi dan secara budaya menjadikan Barat sebagai *the others*; (b) memiliki prinsip yang mengarah pada paham perlawanan *(oppotitionalisme)*; (c) penolakan terhadap hermeneutika karena pemahaman al-Qur'aan sepenuhnya adalah *skriptualistik;* (d) dan secara epistemologis, dalam wilayah gerakan sosial-politik menolak pluralisme dan relativisme; serta (e) penolakan perkembangan historis dan sosiologis, karena dalam pandangan mereka, umat manusia yang tengah melakukan aktivitas sejarah di dunia harus menyesuaikan diri dengan teks al Qur'ān, bukan sebaliknya.

Sementara konsep religio-politik di sini analog dengan sosio-politik. Jika yang akhir ini dimaknai sebagai kekuatan dan penguatan politik dalam kehidupan sosial, maka religio-politik bisa dimaknai sebagai kekuatan dan penguatan politik dalam kehidupan keagamaan. Kata politik di samping bisa mengacu pada kegiatan berpolitik, tetapi bisa juga mengarah dan diarahkan kepada strategi (baca: strategi adaptasi atau strategi merespons) yang berkembang dan yang dikembangkan oleh suatu kelompok masyarakat dalam kerangka meneguhkan, mengembangkan, atau mempertahankan diri sesuai dengan apa yang mereka ketahui dan yakini mengenai ajaran agama yang dipeluknya. Dengan demikian, radikalisme religio politik, secara spesifik berarti paham-paham, sikap-sikap, dan strategi-strategi termasuk praktik-praktik (tindakan) yang berjalan dan dijalankan oleh kelompok-kelompok masyarakat (keagamaan) dalam kerangka meneguhkan, mengembangkan, atau mempertahankan ajaran agama yang

diikuti dengan cara-cara radikal. Tindakan radikal dipilih bisa karena dipahaminya sebagai ajaran, pandangan, atau pensikapan yang terkait langsung atau tidak langsung dengan kepentingan agama maupun kepentingan warga komunitas keagamaan itu sendiri, atau karena adanya tekanan-tekanan dari luar.

Dalam bidang politik, seperti halnya dalam bidang agama, radikalisme atau terkadang disebut fundamentalisme , diberi arti sebagai suatu pendirian yang tegas dan tidak ragu-ragu bahwa keyakinan-keyakinan tertentu tentang suatu kebenaran – biasanya diambil dari teks-teks suci – merupakan kewajiban orang-orang beriman untuk menggiatkan kehidupan mereka dan mengarahkan aktivitas-aktivitas mereka sesuai dengan keyakinan-keyakinannya itu, sehingga untuk beberapa hal membenarkan penggunaan istilah militan. Militansi di sini, umumnya terkait pada ciri usaha merombak secara total suatu tatanan politik atau tatanan sosial yang ada dengan menggunakan kekerasan dan dengan semangat militan. Sikap militan itu ditunjukkan dari gerakan-gerakannya yang bersifat agresif, gemar atau siap berjuang, bertempur, berkelahi, atau berperang, terutama untuk memperlihatkan pengabdian mereka yang total terhadap suatu cita-cita. Sikap radikal dan tidak-tolerant demikian itu, adalah karena "mereka menyederhanakan persoalan yang ada dalam suatu masyarakat secara berlebih-lebihan. Mereka melakukan oversimplikasi terhadap persoalan yang ada" .[57]

Puritanisme merupakan salah satu bentuk hegemoni agama terhadap budaya lokal. Proses hegemonisasi ini

[57] Mudjahirin Thohir, *Agama dan Radikalisme*, dalam: http://staff.undip.ac.id/sastra/mudjahirin/2009/03/06/agama-dan-radikalisme/, diakses pada tanggal 29 Desember 2009.

terjadi saat memandang agama sebagai entitas sakral, turun dari langit yang sama sekali baru dan berbeda dengan entitas budaya lokal yang dianggap profan. Agama dan budaya ditempatkan secara diametral dan tidak terjadi proses dialektika antara keduanya, tetapi yang terjadi adalah konflik dan penindasan yang satu terhadap yang lain. Puritanisme secara tidak langsung menggiring Muhammadiyah berwajah tunggal. Sebuah kenyataan yang sulit dipertahankan dalam konteks pluralitas budaya dan seni.

Selain itu, semangat puritanisme berimplikasi pada kuatnya komunalisme warga Muhammadiyah. Hal ini tampak begitu kental saat Sidang Tanwir 2002 dengan tidak sabar merekomendasikan kader terbaiknya untuk menjadi pemimpin bangsa. Mudah diduga, Amien Rais-lah kader yang dimaksud. Artinya, Muhammadiyah belum bisa melepaskan kader-kader terbaiknya meluncur *keluar* dari struktur Muhammadiyah untuk menjadi milik bangsa. Semangat puritan dan komunalisme Muhammadiyah tidak bisa memahami filosofi perguruan silat ini.

Sebagaimana Robbert N. Bellah, beyond puritanisme Muhammadiyah dimaksudkan sebagai gerakan yang melompati cagar ideologi puritan yang masih tumbuh subur di kalangan sebagian besar ulama dan warga Muhammadiyah-dan tentu saja ulama organisasi modernis lainnya-baik di tingkat pusat, wilayah, maupun daerah. Untuk itu, gerakan pemikiran beyond puritanisme Muhammadiyah meniscayakan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, memberikan keluasan jendela pemikiran keislaman dalam konteks budaya dan seni lokal. Upaya pelonggaran pemikiran saatnya dimulai kembali agar tidak

terjebak kungkungan sakralitas pemikiran[58] yang diwariskan para pendahulunya. Muhammadiyah yang hadir sebagai hal pemikiran dan aktivisme umat dan bangsa, selama ini terkesan telah berubah menjadi semacam *keraton* yang sakral, eksklusif, dan ideologis serta teralinasi dari dinamika sosial, umat, dan bangsa.

Secara metodologis hal ini dimulai dari pembongkaran visi dan paradigma lama kebudayaan Muhammadiyah yang tidak akomodatif terhadap budaya dan seni lokal. Budaya dan seni lokal tidak lagi ditempatkan secara berhadap-hadapan dengan doktrin agama secara tekstual-fiqhiyah yang cenderung bersifat menghakimi. Sebaliknya, melihat seni dan budaya lokal sebagai kenyataan yang harus diakomodasi dalam rangka lokalisasi nilai-nilai Islam.

Kedua, menggali kecerdasan lokal dan menggalang gerakan desentralisasi atau lokalisasi agama. Temuan Abdul Munir Mulkhan (2000) di Jember, Jawa Timur, cukup mengejutkan warga Muhammadiyah. Tesis Mulkhan menunjukkan, Islam murni-yakni Muhammadiyah-dalam konteks budaya lokal tidak menampakkan wajah tunggal, tetapi tampil dengan varian beragam. Beragamnya varian pengikut Muhammadiyah merupakan visualisasi dari kecerdasan lokal melalui proses dialektik antara Islam dan pluralitas budaya.

Varian al-Ikhlas, Ahmad Dahlan, Munu Muhammadiyah-NU, dan Marmud/Marhaenisme Muhammadiyah) itu juga menunjukkan, artikulasi

[58]M. Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 35-36. Lebih lanjut Amin Abdullah menyebut fihak yang melakukan *Truth Claim* terhadap hasil pemikirannya sendiri, oleh Amin disebut: al-Taqdis al-Afkar al-Diniy.

keagamaan ternyata tampil dengan membawa warna lokal. Di sinilah perlunya desentralisasi agama baik secara kelembagaan maupun produk fatwa sosial yang dihasilkan. Desentralisasi agama dalam konteks budaya lokal membuka ruang lebar bagi tumbuhnya kreativitas dan inovasi dari bawah dalam merespons dan menyelesaikan persoalan yang muncul di kawasan lokal dengan kekentalan budaya masing-masing.

Secara antropologis, gerakan keagamaan pada akhirnya adalah gerakan kebudayaan karena manifestasi akhir dari perilaku seseorang tampil dalam ranah budaya. Jika agama tidak mampu mengaktualisasi diri dalam wadah budaya sebagai gerakan emansipatoris, maka agama akan ditinggalkan orang. Karena itu, tugas ulama Muhammadiyah dan umat Islam umumnya adalah bagaimana membudayakan Islam, bukan mengislamkan budaya, sehingga Islam lalu menjadi pohon peradaban yang akarnya di Bumi. Ini berarti Islam perlu membuka diri secara pro-eksistensif dan akomodatif terhadap dinamika lokal.

Ketiga, membangun jaringan kebudayaan dengan kalangan seniman dan budayawan, misalnya, dilakukan dengan cara mendirikan sanggar-sanggar budaya. Sebagai sebuah gerakan pemikiran, *beyond puritanisme* tentu saja memerlukan infrastruktur yang memadai dalam proses aktualisasinya. Infrastruktur bisa dimulai dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan membuka fakultas atau jurusan seni dan budaya. Beyond puritanisme dengan ketiga agenda itu akan dapat mengawal proses dialektik Islam dan budaya lokal yang emansipatoris. Ini merupakan bagian dari salah satu kerja dan kekayaan Islam di masa depan, yang mencoba mengawinkan nilai-nilai Islam yang

universal tanpa harus terjebak proses pemiskinan kultural, sebagaimana telah dilakukan Muhammadiyah dan sebagian golongan modernis Muslim selama ini. Hingga pemiskinan kultural dimaksud, berakibat munculnya perlawanan kultural, terutama di wilayah yang rawan konflik.[59]

Maka, jika menggunakan teori Geertz dan lainya seperti yang telah terurai di atas, bisa difahami bahwa nilai-nilai Puritanisme dalam Muhammadiyah telah ada sejak awal berdirinya sampai awal-awal perkembangannya. Sementara jika menggunakan teori Din Syamsuddin ketika mengkritisi pemikiran Rashid Ridha, Muhammadiyah lebih tepat disebut berteologi *proporsional* yaitu *Puritan Ortdoksi* dan *Salafiyah* dalam bidang ibadah mahdhah. Paradigma salafiyah merupakan pilihan Ahmad Dahlan dalam memposisikan Persyarikatan Muhammadiyah.[60]

D. Muhammadiyah dan Modernisme

William Shepard, mengkategorisasikan Muhammadiyah sebagai kelompok *Islamic-Modernisme*, yang lebih terfokus bergerak membangun *Islamic society* (masyarakat Islam) daripada perhatian terhadap *Islamic state* (negara Islam); yang fokus gerakannya pada bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, serta tidak menjadi organisasi politik kendati para anggotanya tersebar di

[59] Muṭohharun Jinan, *Beyond Puritanisme Muhammadiyah*, dalam : *http://muhammadiyahstudies.blogspot.com/2009/11/beyond-puritanisme-muhammadiyah.html*, diakses pada 22 Desember 2009.

[60] Din Syamsuddin. *Memahami Gerakan Tajdid Muhammadiyah: Pendekatan Induksi Sosiologis*. dalam, Rowi, Mukhlas, M. (ed). *Muhammadiyah Menuju Millenium III*. Yogyakarta: Pustaka Suara Muhammadiyah, 1999, 64-65. lebih lanjut Dien menegaskan jika dikaitkan dengan pemikiran Muhammad Abduh, maka yang terjadi di Muhammadiyah adalah cenderung "Modernis Puritan". Posisi ini lebih bagus sebagai Median Position (psisi tengah) yang mempunyai resiko dan tantangan yang besar.

berbagai partai politik. Pandangan modernis tersebut berbeda dengan pandangan sekular dan radikal Islam.[61]

Para penulis atau peneliti Islam seperti James L. Peacock, Mitsuo Nakamura, Clifford Geertz, Robert van Neil, Harry J. Benda, George T. Kahin, Alfian, Deliar Noer, dan lain-lain mengkategorikan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modernis yang gerakannya bersifat kultural dan non-politik. Karena itu, Muhammadiyah memang sejak awal berdirinya dan telah menjadi fakta sejarah bahwa dirinya tidak bergerak dalam lapangan politik dan lebih berkonsentrasi dalam gerakan dakwah di ranah kemasyarakatan.[62]

Karena itu, Khitah dan kebijakan-kebijakan Muhammadiyah menghadapi tarikan politik-praktis diletakkan dalam kerangka dan kepentingan yang besar yakni menjaga eksistensi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah non-politik dengan tetap mampu memainkan peran kebangsaan secara lebih proaktif dan konstruktif. Khith-thah dan kebijakan Muhammadiyah dalam berbagai langkah dan keputusannya yang memagari gerakan Islam ini dari tarikan-tarikan partai politik dan kepentingan politik-praktis memiliki landasan teologis, historis-sosiologis, dan organisatoris yang kuat sehingga Muhammadiyah tetap berdiri di atas garisnya yang istiqamah sebagai gerakan dakwah yang tidak berpolitik-praktis.

---

[61] Ahmad Syafii Maarif, *al-Qur'an dan Tantangan Modernitas* (Yogyakarta: Sipress, 1990), 5-33.

[62] Lihat pula, Mohammad al-Bahiy, *al-Fikr al-Islaam al-Hadiith Wa Siraatuhu Bi al- Isti'maari al-Ghabiyyi*, alib bahasa, Su'adi Saat (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986), 107-116.

Demikian pula tentang larangan rangkap jabatan di Muhammadiyah dengan jabatan-jabatan politik merupakan bagian dari implementasi Khitah dan sikap Muhammadiyah yang secara tersistem memisahkan ranah gerakannya dari perjuangan politik-praktis sehingga merupakan langkah penyelamatan dan pemurnian Muhammadiyah.

Tokoh-tokoh semacam Muhammad Bin Abdul Wahhab, Ibn Taimiyyah, Jamaluddin, atau Muhammad Abduh, dalam terminologi umat Islam disebut *mujaddid* (pembaharu, reformis), dan gerakan atau pemikiran yang dicanangkannya dinamakan *tajdid* (pembaharuan, reformasi). Istilah-istilah tersebut dijabarkan dari sebuah hadith yang memberitakan isyarat Nabi Muhammad SAW. bahwa akan muncul orang-orang yang memperbaharui (*yujaddidu*) agama Islam "pada setiap pangkal seratus tahun" (*`ala a kulli ra'si mi'ati sanah*) :

إنّ الله يبعث لهذه الأمّة على رأس كلّ
مائة سنة من يجدّد لها
دينها (رواه أبو داود)

Artinya: "Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat ini pada setiap penghujung seratus tahun orang yang memperbaharui (urusan) agama untuk umat ni (HR. Abu Dawud).[63]"

Lebih lanjut pembicaraan tentang tajdid atau pembaharuan, sebagaimana yang telah dikemukakan pada Bab I (Pendahuluan), Yusuf Qardlawi, memberi makna *tajdid* sebagai pembaruan, modernisasi, yakni upaya mengembalikan pemahaman agama kepada kondisi semula

[63]Muhammad Imaroh, *al-Ma'rokah al-Mush-tholahaat baina al-ghorbiyyi wa al-Islaam* (Jakarta: Robbani Press), 238.

sebagaimana masa Nabi. Ini bukan berarti hukum agama harus persis seperti yan terjadi pada waktu itu, melainkan melahirkan keputusan hokum untuk masa sekarang sejalan dengan maksud *shar'i* dengan membersihkan dari unsur-unsur *bid'ah, khurafat*, atau pikiran-pikiran asing.[64] Dengan rumusan tajdid seperti itu nampak jelas bahwa tajdid dalam pengertian umum adalah pembaruan atau modernisasi. Tetapi dalam pengertian masyarakat barat kata modernisasi mengandug arti pikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk merubah paham-paham, adat istiadat institusi-institusi lama dan sebagainya agar semua itu dapat disesuaikan dengan pendapat-pendapat dan keadaan-keadaan baru yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan modern. Pikiran dan aliran itu timbul pada periode yang disebut *age of reason* (masa akal) atau *englightement* (masa terang) pada tahun 1950-1800.[65] Paham ini mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat barat dan segera memasuki lapangan agama yang di Barat dipandang sebagai penghalang bagi kemajuan. Dengan demikian modernisasi dalam hidup keagamaan di Barat mempunyai tujuan untuk menyesuaikan ajaran-ajaran yang ada dalam agama Katolik dan Protestan dengan ilmu pengetahuan dan falsafah modern.aliran ini akhirnya membawa sekularisme di Barat.[66]

Gelombang reformasi atau *tajdid* yang berdampak luas ke segenap penjuru Dunia Islam, dari Afrika Utara sampai Asia Tenggara, mulai berlangsung pada abad ke-18, tatkala umat Islam kehilangan kreativitas dan tenggelam dalam kebekuan pemikiran, akibat tertutupnya pintu ijtihad

[64]Yusuf Qardlawi. Dasar-dasar Hukum Islam (taqlid dan ijtihad), 96.
[65]Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. UI-Press, 1978, 94.
[66] Ibid., 95.

oleh institusi-institusi keagamaan yang sudah mapan. Maka bangkitlah para tokoh pembaharu seperti Muhammad ibn Abd al-Wahhab (1703–1792) di Semenanjung Arabia, Syah Waliyullah ad-Dahlawi (1703–1762) di India, dan Muhammad ibn Ali as-Sanusi (1791-1859) di Afrika Utara. Sebagaimana halnya Ibn Taimiyyah lima abad sebelumnya, para pembaharu pada abad ke-18 itu memusatkan gerakan mereka untuk mencairkan "kebekuan internal" yaitu memurnikan tauhid, menentang dominasi mazhab, dan memberantas hal-hal yang dianggap bid`ah. Adapun masalah "ancaman eksternal" tidaklah menjadi fokus pemikiran, sebab sebagian besar Dunia Islam belum tersentuh oleh hegemoni kelompok non-Muslim. Meskipun sejak abad ke-17 bangsa-bangsa Eropa Barat sudah berdatangan sebagai pedagang, penyebar Injil atau prajurit (*gold, gospel, glory* atau*mercenary, missionary, military*), kehadiran mereka sampai akhir abad ke-18 tidaklah menggoyahkan tatanan peradaban umat Islam.

Bangsa-bangsa Eropa Barat sebelum abad ke-16 tidaklah pernah memiliki peradaban yang dapat dibanggakan dalam sejarah. Malahan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang-orang Eropa Barat pada abad-abad pertengahan mempelajari ilmu pengetahuan dan filsafat pada universitas-universitas Muslim di Spanyol dan Sisilia. Berkat perkenalan dan pembelajaran dari peradaban Islam, Eropa Barat terstimulasi untuk bangkit dari suasana kebodohan yang mereka sebut *Dark Age* (Zaman Kegelapan), menuju masa *renaissance* (kelahiran kembali) yang bermula pada abad ke-16. Kebangkitan Eropa Barat diawali dengan proses sekularisasi atau penerapan faham sekularisme, yaitu pemisahan agama Nasrani dari pengaturan kehidupan. Dengan demikian masyarakat

terbebas dari kungkungan dogma-dogma gereja dan terbukalah pengembangan ilmu pengetahuan melalui penalaran akal. Maka pada abad ke-18 yang dikenal sebagai Masa Pencerahan (*enlightenment*), Eropa Barat melahirkan peradaban modern.

Istilah *modern* baik yang berlaku di timur maupun di barat selalu mengacu pada pemaknaan secara etimologis, yakni, berasal dari kata Latin modernus yang artinya *baru saja; just now*, pengertian modern mengacu bukan hanya kepada zaman (kita mengenal pembagian zaman menjadi zaman purba, zaman pertengahan dan zaman modern), tetapi yang lebih penting mengacu kepada cara berfikir dan bertindak. Peradaban modern ditandai oleh dua ciri utama, yaitu rasionalisasi (cara berfikir yang rasional) dan teknikalisasi (cara bertindak yang teknikal). Tumbuhnya sains dan teknologi modern diikuti oleh berbagai inovasi di segenap bidang kehidupan.

Di bidang politik muncul faham nasionalisme, sistem partai dan parlemen, serta pembagian kekuasaan dalam pemerintahan. Di bidang ekonomi lahir berbagai industri, sistem pertukaran barang, serta korporasi bisnis. Di bidang sosial budaya timbul institusi dan cara hidup yang lebih efisien, mulai dari sistem administrasi dan pendidikan sampai kepada pemeliharaan kesehatan dan cara berpakaian. Semua ini ditunjang oleh proses pertukaran ide yang efektif melalui buku cetak dan media massa serta sarana komunikasi dan transportasi yang canggih sebagai buah lezat dari ilmu pengetahuan.

Dengan segala keunggulan peradaban modern, terutama di bidang persenjataan militer, bangsa-bangsa Eropa Barat melakukan ekspansi ke seluruh penjuru bumi, termasuk Dunia Islam. Setelah selama satu alaf

(*millennium*) umat Islam berada di peringkat atas dalam peradaban dunia dan tidak tergoyahkan oleh peradaban manapun, tiba-tiba pada abad ke-19 arus sejarah berubah arah. Daerah-daerah Muslim, dari Maroko sampai Merauke, satu demi satu jatuh ke dalam cengkeraman imperialisme dan kolonialisme Eropa. Indonesia dikuasai Belanda, India dan Malaysia dijajah Inggris, Asia Tengah jatuh ke tangan Rusia, Austria merebut Bosnia-Herzegovina, Italia mencaplok Libia dan Ethiopia, sedangkan sebagian besar Afrika dan Timur Tengah terbagi-bagi ke dalam kekuasaan Inggris dan Perancis. Pada akhir Perang Dunia I tahun 1918, daerah-daerah Muslim yang masih merdeka hanyalah Afghanistan, Iran, Turki, dan Arabia. Untunglah bangsa-bangsa Eropa tidak tertarik kepada daerah Hijaz yang gersang, sehingga terhindarlah kota-kota suci Makkah dan Madinah dari sentuhan hegemoni Eropa.

Dominasi bangsa-bangsa Eropa Barat mengakibatkan tersebarnya peradaban modern di seluruh dunia. Ketika berkenalan dengan peradaban modern, umat Islam sudah terbelenggu dengan pemahaman agama yang merupakan konsensus dan pembakuan para ulama abad pertengahan, sehingga banyak aspek modernitas yang dianggap *haram* dan ditolak mentah-mentah. Sikap ini sangat berbeda dengan sikap kreatif para ulama pada abad-abad permulaan Islam, ketika penafsiran tentang al-Qur'aan dan Sunnah Nabi belum disekat oleh rambu-rambu mazhab. Berdasarkan perintah kitab suci agar para hamba Allah gemar menginventarisasi ide-ide, lalu mengikuti yang terbaik (*yastami`uunal-qaula fa yattabi`uuna ahsanah*), umat Islam pada masa-masa awal dengan sikap tanpa keraguan dan penuh percaya diri (sebab hegemoni politik di tangan mereka) mengambil dan menyerap nilai-nilai yang

dipandang baik dari peradaban-peradaban purba di sekitar Mesopotamia dan Mediterrania, lalu menciptakan Peradaban Islam (*Islamic Civilization*) selama berabad-abad yang penuh dengan inovasi intelektual, eksperimen ilmiah, monumen yang artistik, dan karya literer yang bermutu tinggi. Sikap broad-minded yang diperintahkan al-Qur'aan itu tidak lagi dimiliki kaum Muslimin tatkala berhadapan dengan peradaban modern.

Maka pada akhir abad ke-19 bermunculan tokoh-tokoh pembaharu (*mujaddid*) yang menyeru umat Islam agar mengambil peradaban modern yang menunjang kemajuan, sebab modernisasi dalam arti yang benar, yaitu yang didasari rasionalisasi dan teknikalisasi, tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam bahkan justru diperintahkan oleh al-Qur'aan. Oleh karena para mujaddid ini bersikap positif terhadap modernitas, mereka oleh para ahli sejarah dijuluki kelompok *modernis* dan ide mereka disebut *modernisme Islam*.

Awal Modernisme Islam.

Gerakan modernis Islam pada abad ke-19 dipelopori oleh Sayyid Jamaluddin al-Afghani (1839–1897). Meskipun di Afghanistan, usianya dihabiskan di berbagai bagian Dunia Islam: India, Mesir, Iran, dan Turki. Dia mengembara ke Eropa, dari Saint Petersburg sampai Paris dan London. Di mana pun dia tinggal dan ke mana pun dia pergi, Jamaluddin senantiasa mengumandangkan ide-ide pembaharuan dan modernisasi Islam.

Bersama muridnya, Shaikh Muhammad Abduh (1849–1905) dari Mesir, Jamaluddin pergi ke Paris untuk menerbitkan majalah *al-`Urwah al-Wutsqaa* (*Le Lien Indissoluble*), yang berarti "ikatan yang teguh". Abduh

menjadi pemimpin redaksi, dan Jamaluddin menjadi redaktur politik. Nomor perdana terbit 13 Maret 1884 (15 Jumad al-Ula 1301), memuat artikel-artikel dalam bahasa Arab, Perancis, dan Inggris. Terbit setiap Kamis, majalah itu penuh dengan artikel-artikel ilmiah dan mengobarkan semangat umat untuk kembali kepada al-Qur'aan dan Sunnah Nabi, serta menyerukan perjuangan umat Islam agar terlepas dari belenggu penjajahan Eropa. Majalah *al-`Urwah al-Wuthqaa* tersebar di kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, India, dan kota-kota besar di Eropa. Sayangnya, majalah ini hanya sempat beredar 28 nomor saja dan terpaksa berhenti terbit pada bulan Oktober 1884. Hal ini disebabkan pemerintah kolonial Inggris melarang majalah itu masuk ke Mesir dan India, lalu pemerintah Turki Usmani (yang kuatir akan gagasan *jumhuriyah* atau republik yang diusulkan Jamaluddin) juga melarangnya beredar di wilayah kekuasaannya, sehingga *al-Urwat al-Wutsqaa* kehilangan daerah pemasarannya. Namun dalam masa delapan bulan beredar, majalah Muslim pertama di dunia itu berhasil menanamkan benih-benih modernisme di kalangan umat Islam.

Gagasan pembaharuan Jamaluddin dan Abduh menjadi lebih tersebar luas di seluruh Dunia Islam, tatkala seorang murid Abduh yang bernama Muhammad Rasyid Ridha (1865–1935) menerbitkan majalah *al-Manar* di Mesir. Nomor pertamanya terbit 17 Maret 1898 (22 Syawwal 1315), dan beredar sampai tahun 1936. Majalah *al-Manar* inilah yang secara kongkrit menjabarkan ide-ide Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh, serta berpengaruh langsung kepada gerakan modernisme Islam di Asia Tenggara pada awal abad ke-20, antara lain:

a. Singapura

Pembukaan Terusan Suez tahun 1869 menyebabkan rute pelayaran antara Eropa dan Asia Tenggara tidak lagi melalui ujung selatan Afrika melainkan beralih melalui Laut Merah. Akibatnya, kaum Muslimin di Asia Tenggara makin mudah menunaikan ibadah haji melalui pelabuhan Jeddah. Jika pada tahun 1850-an jemaah haji Indonesia rata-rata cuma 1600 orang per tahun, maka jumlah ini menjadi tiga kali lipat pada dasawarsa 1880an, lalu meningkat menjadi lebih dari 7000 jemaah per tahun pada awal abad ke-20. Selama berada di tanah suci banyak jemaah haji yang berkenalan dan mempelajari gagasan modernisasi Islam, kemudian membawanya pulang untuk disebarkan di kampung halaman.

Sebagian besar jemaah haji Indonesia berangkat ke tanah suci melalui Singapura, kota pelabuhan yang didirikan Thomas Stamford Raffles tahun 1819. Selain karena di Singapura jumlah kapal ke Jeddah lebih banyak dan ongkosnya lebih murah, banyak calon haji yang menetap dahulu di Singapura untuk bekerja mencukupkan biaya ke tanah suci. Memang tidak semuanya berhasil, sehingga timbul sebutan "Haji Singapura" bagi orang-orang yang gagal pergi ke Makkah. Faktor lain yang menyebabkan calon haji Indonesia pergi dari Singapura adalah karena pemerintah kolonial Hindia Belanda sangat membatasi hubungan umat Islam Indonesia dengan Timur Tengah.

Tidak dapat disangkal bahwa pengaruh Timur Tengah sangat berperan dalam membangkitkan perlawanan ulama-ulama Islam terhadap kolonial

Belanda sepanjang abad ke-19. Perang Paderi (1821–1837) di Minangkabau timbul setelah para haji pulang dari Makkah dengan membawa ide pembaharuan Wahhabi. Pengaruh Turki sangat jelas pada Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya dalam mengobarkan Perang Jawa (1825–1830). Pemberontakan rakyat Cilegon tahun 1888 dipimpin oleh para haji. Dan yang paling berat dihadapi Belanda adalah Perang Aceh (1873–1904) yang sangat diwarnai semangat keislaman melawan kaum kafir. Semua ini menyebabkan pemerintah Hindia Belanda memperketat persyaratan haji, sehingga para calon haji banyak memilih Singapura sebagai tempat transit.

Pada awal abad ke-20 Singapura menjadi pusat jaringan komunikasi gerakan modernisme Islam di Asia Tenggara. Meskipun kaum Muslimin di kota metropolitan itu hanya seperlima jumlah penduduk (mayoritas penduduknya adalah Tionghoa), suasana urban dengan segala fasilitasnya, terutama penerbitan buku-buku dan media massa, sangat menunjang tersebarnya faham modernisme Islam yang dicanangkan Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh di Timur Tengah. Apalagi kaum Muslimin di Singapura itu merupakan perpaduan berbagai etnis dari Sumatera, Semenanjung, Jawa, Bugis, Hindustan, dan Hadramaut. Dari Singapura ide-ide pembaharuan Islam tersebar baik melalui para haji yang singgah maupun melalui buku dan majalah yang diterbitkan di kota itu.

b. Minangkabau (Sumatera Barat).

Dalam perkembangan gerakan modernisme Islam di Indonesia, tidaklah dapat diabaikan peranan orang-orang Minangkabau. Di samping karena Minangkabau telah mengenal ide pembaharuan Islam sejak masa Perang Paderi, suku Minangkabau memiliki watak seperti suku Quraisy, yaitu senang mengembara (*rihlata sh-shitaa'i wa ṣaif*), sehingga mereka terbiasa mengadakan kontak dengan dunia luar dan terbuka kepada ide-ide baru.

Menjelang akhir abad ke-19, seorang putra Minangkabau menjadi imam Masjid al-Haram di Makkah, yaitu Shaikh Ahmad Khaṭib al-Jawi al-Minankabawi (1840–1916). Dia banyak mempunyai murid yang datang dari tanah air, antara lain Ahmad Dahlan (1868–1923) yang kelak mendirikan Muhammadiyah serta Hasyim Asy`ari (1871–1947) yang kelak mendirikan Nahḍatul-`Ulama'.

Meskipun memegang teguh madhhab Shafi`i, Shyaikh Ahmad Khaṭib tidaklah melarang para muridnya mempelajari ide-ide pembaharuan dari Jamaluddin, Abduh, dan Rashid Riḍa. Salah seorang murid Shaikh Ahmad Khaṭib adalah sepupunya, Shaikh Muhammad Ṭahir Jalaluddin (1869–1957), yang pada tahun 1893 sampai 1897 kuliah di Universitas al-Azhar di Kairo dan menjadi sahabat akrab Rashid Riḍa. Ketika Rashid Riḍa menerbitkan al-Manar tahun 1898, dia ikut menyumbangkan artikelnya. Shaikh Ṭahir pulang ke tanah air tahun 1899 dengan tekad menerbitkan majalah seperti Al-Manar di kawasan Asia Tenggara, agar gagasan

modernisasi Islam lebih cepat tersiar di kalangan masyarakat.

Maka pada bulan Juli 1906 di Singapura terbitlah majalah bulanan berbahasa Melayu dengan nama Al-Imam: Majalah Pelajaran Pengetahuan Perkhabaran. Dengan Shaikh Ṭahir Jalaluddin sebagai pemimpin redaksi, majalah itu memuat artikel-artikel yang mengajak umat Islam untuk membuka pintu ijtihad dan mempelajari ilmu-ilmu modern, serta terjemahan artikel-artikel dari majalah al-Manar. Majalah ini terbit sebanyak 31 nomor dan berhenti tahun 1909 lantaran kehabisan dana. Gagasan modernisasi Islam yang disebarkan al-Imam ternyata lebih bergaung di Indonesia, terutama Sumatera dan Jawa, daripada di Malaysia. Hal ini disebabkan pengaruh para sultan dan mufti kerajaan sangat kuat di Malaysia, sehingga ide-ide pembaharuan yang dianggap menggoyahkan kedudukan mereka sulit untuk tersebar.

Sementara itu beberapa orang murid Shaikh Ahmad Khaṭib di tanah suci pulang ke Minangkabau, yaitu Muhammad Jamil Jambek (1860–1947), Muhammad Ṭaib Umar (1874–1920), Abdullah Ahmad (1878–1933), dan Abdulkarim Amrullah (1879–1945). Setelah majalah Al-Imam berhenti terbit, timbul niat di kalangan mereka berempat untuk menerbitkan majalah semacam itu di Minangkabau. Maka pada tanggal 1 April 1911 terbit majalah al-Munir di Padang, dengan Abdullah Ahmad sebagai pemimpin redaksi. Inilah majalah modernisasi Islam yang pertama di Indonesia. Sebingkai sha'ir yang ditulis Muhammad Thaib Umar dalam al-Munir

mencerminkan tujuan majalah ini: "Satu dua tiga dan empat, hendaklah pelajari segera cepat, membaca buku supaya sempat, ilmu pengetahuan banyak didapat. Jangan seperti orang tua kita, menuntut ilmu hanya suatu mata, fiqh saja yang lebih dicinta, kepada yang lain matanya buta".

Selama lima tahun usianya majalah al-Munir beredar di seluruh Indonesia, terutama di Sumatera dan Jawa. Artikel-artikel majalah ini mengeritik praktek-praktek keagamaan yang tidak sesuai dengan al-Qur'ān dan Sunnah Nabi serta menganjurkan umat Islam menata metode dan sarana pendidikan. Tidaklah mengherankan jika daerah Minangkabau mempelopori sekolah-sekolah agama yang menerapkan sistem kurikulum modern. Pada tahun 1909 Abdullah Ahmad mendirikan Sekolah Adabiyah di Padang, lalu Abdulkarim Amrullah mendirikan Surau Jembatan Besi tahun 1914 di Padang Panjang. Setahun kemudian Padang Panjang juga memiliki Sekolah Diniyah Putri yang didirikan oleh Zainuddin Labai (1890–1924) dan adiknya, Rahmah al-Yunusiyah (1900–1969). Kemudian Surau Jembatan Besi bergabung dengan Surau Parabek, yang didirikan tahun 1908 oleh Ibrahim Musa (1882–1963), menghasilkan sekolah Sumatera Thawalib tahun 1918.

c. Jakarta (Jamiatul Khair dan al-Irshad).

Semangat modernisasi Islam mengalir pula ke Pulau Jawa. Masyarakat Arab di Jakarta mendirikan organisasi *Jam`iyat al-Khair* tahun 1901, akan tetapi baru memperoleh izin resmi dari pemerintah Hindia Belanda tanggal 17 Juli 1905. Organisasi ini

membangun sekolah-sekolah modern di beberapa kota, dan keanggotaannya terbuka bagi orang-orang Muslim pribumi. *Jam`iyat al-Khair* aktif mendatangkan guru-guru dari Timur Tengah, antara lain Syaikh Ahmad Surkati (1872–1943) dari Sudan. Ahmad Surkati yang merupakan penganut faham Muhammad Abduh ini tiba di Jakarta pada bulan Maret 1911.

Setelah aktif di Jam`iyat al-Khair, Ahmad Surkati menyadari bahwa organisasi ini terlalu didominasi oleh kaum sayyid yang berpikiran sempit. Maka pada tanggal 6 September 1914 (15 Syawwal 1332) Ahmad Surkati mendirikan organisasi *Jam`iyah al-Iṣlah wal-Irshad*. Organisasi yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Irshad ini segera berkembang dan memiliki cabang-cabang di Cirebon, Tegal, Pekalongan, Surakarta, Surabaya, dan beberapa kota lainnya di Jawa.

d. Yogyakarta (Muhammadiyah).

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa organisasi pembaharuan dan modernisasi Islam yang terbesar adalah Muhammadiyah yang didirikan oleh Ahmad Dahlan (1868–1923). Semasa kecil bernama Muhammad Darwis, Ahmad Dahlan menjabat khatib mesjid kesultanan Yogyakarta dengan julukan *Ketib Amin.* Sejak remaja Ahmad Dahlan sudah membaca majalah al-`Urwah al-Wutsqa yang diselundupkan ke Jawa. Pada tahun 1890 Ahmad Dahlan menjadi murid Shaikh Ahmad di Makkah, dan tahun 1903 dia sengaja ke Makkah lagi untuk bermukim selama dua tahun. Ahmad Dahlan makin akrab dengan gagasan modernisasi Islam, bahkan sempat berkenalan dengan

Muhammad Rashid Riḍa. Setelah pulang ke Yogyakarta, Ahmad Dahlan membina hubungan yang baik dengan para tokoh pembaharu di Minangkabau, Khatib terutama dengan Abdulkarim Amrullah yang terkenal dengan sebutan Haji Rasul. Anak Haji Rasul, Abdul Malik, dan menantu Haji Rasul, Ahmad Rashid, kelak menjadi tokoh-tokoh Muhammadiyah, masing-masing populer dengan nama Hamka dan A.R.Sutan Mansur.

Pada dasawarsa pertama abad ke-20 di Jawa berdiri tiga organisasi. Selain *Jam`iyat al-Khair* yang dipelopori masyarakat Arab, tumbuh pula dua organisasi pribumi, yaitu Budi Utomo tahun 1908, serta Sarekat Islam tahun 1911. Ahmad Dahlan menjadi anggota yang aktif dari ketiga organisasi tersebut. Akan tetapi dia merasa perlu mendirikan suatu organisasi yang benar-benar berorientasi kepada gerakan modernisme Islam. Ahmad Dahlan menilai Budi Utomo tidak memperjuangkan Islam, sedangkan Sarekat Islam dilihatnya menjurus ke bidang politik. Dalam suatu pertemuan antara Ahmad Dahlan dan Ahmad Surkati, kedua tokoh ini sepakat untuk berbagi tugas dengan masing-masing mendirikan organisasi: Ahmad Surkati menghimpun masyarakat Arab dan Ahmad Dahlan menghimpun masyarakat pribumi.

Maka pada hari Senin Legi tanggal 18 November 1912 (8 Dzulhijjah 1330), Ahmad Dahlan mendirikan organisasi yang diberi nama *Muhammadiyah*, yang berarti "penegak ajaran Nabi Muhammad". Organisasi ini berlambang matahari yang dihiasi dua kalimat syahadat, persis

seperti hiasan gambar matahari di pintu Ka`bah! Dengan lambang matahari, diharapkan Muhammadiyah menjadi sumber energi yang senantiasa bersinar untuk menerangi umat Islam di Indonesia. Menurut Ahmad Dahlan, organisasi Muhammadiyah merupakan realisasi firman Allah, *waltakun minkum ummah* (hendaklah ada dari kalanganmu suatu kelompok) yang berfungsi ganda, yaitu *yad`uuna ila l-khair* (mengajak kepada kebaikan) sebagai fungsi eksternal, serta *ya'muruuna bi l-ma`ruuf wa yanhauna `anil-munkar* (memerintahkan yang ma`ruf dan mencegah yang mungkar) sebagai fungsi internal. Itulah sebabnya Ahmad Dahlan merumuskan dua butir tujuan Muhammadiyah: (1) memajukan dan menggembirakan peladjaran dan pengadjaran agama Islam*;* serta (2) memajukan dan menggembirakan hidoep sepandjang kemauan agama Islam dalam kalangan sekota-sekotanja.

Sejak kelahirannya, Muhammadiyah telah menetapkan garis perjuangan (*Khitah*) untuk bergerak di bidang da`wah, sosial, dan pendidikan. Dengan semboyan sedikit bicara banyak bekerja serta siapa menanam dia mengetam, Ahmad Dahlan bertujuan memurnikan ajaran Islam dari apa yang disebutnya T.B.C. (*takhayul, bidah, khurafat*). Muhammadiyah mempelopori penentuan arah kiblat secara eksak; penggunaan metode hisab untuk menentukan awal dan akhir puasa Ramadhan; shalat hari raya di lapangan; pengumpulan dan pembagian zakat fitrah dan daging kurban kepada fakir miskin; pemberian khutbah dalam bahasa yang difahami

jemaah; pelaksanaan shalat Jum`at dan tarawih yang sesuai dengan cara Nabi; penghilangan bedug dari mesjid; penyederhanaan upacara kelahiran, khitanan, perkawinan, dan pengurusan jenazah; serta masih banyak lagi usaha-usaha Muhammadiyah yang mengembalikan umat Islam kepada ajaran al-Qur'aan dan Sunnah Nabi.

Di bidang sosial dan pendidikan Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah, panti asuhan, dan poliklinik. Agar kaum wanita terangkat derajatnya, Ahmad Dahlan dan istrinya, Siti Walidah (Nyai Ahmad Dahlan), mendirikan perkumpulan *Sopotresno* tahun 1914, yang diubah namanya menjadi *Aisyiyah* pada tahun 1917.

Kemudian berdiri pula kepanduan *Hizbul Wathan* tahun 1918, di samping perkumpulan *Siswapraja Wanita* dan *Siswapraja Pria* sebagai wadah anak-anak muda, yang kemudian masing-masing menjadi Nashi'atul-Aisyiyah tahun 1931 dan Pemuda Muhammadiyah tahun 1932. Sampai tahun 1920 organisasi Muhammadiyah dimatangkan di Yogyakarta dan sekitarnya. Sesudah itu Muhammadiyah mulai menyebar dan mendirikan cabang-cabang di beberapa kota: Surakarta (1920), Surabaya dan Madiun (1921), serta Pekalongan, Garut dan Jakarta (1922). Setelah Ahmad Dahlan wafat tahun 1923, kepemimpinan Muhammadiyah dipegang oleh sahabatnya, Kyai Haji Ibrahim, yang memimpin organisasi sampai tahun 1932. Pada periode Ibrahim ini Muhammadiyah menyebar ke

luar Jawa: Sumatera (1925), Kalimantan (1927), dan Sulawesi (1929).

Demikianlah akhirnya Muhammadiyah tersebar di seluruh Nusantara, sehingga dalam Kongres Muhammadiyah ke-22 di Semarang bulan Juni 1933 dengan bangga Pimpinan Pusat (*Hoofdbestuur*) melaporkan bahwa "Moehammadijahlah Persjarikatan jang pertama-tama banjak tjabang dan groepnja, tersiar moelai dari Sabang sampai Merauke dan dari Teloekbetoeng sampai Manado dan Ternate*".*

Muhammadiyah merupakan gerakan modernis Islam yang mempunyai dampak paling luas di Indonesia. Pada mulanya organisasi ini mendapat tantangan dan hambatan, terutama dari kaum adat dan ulama tradisional. Muncul tuduhan bahwa Muhammadiyah menyimpang dari garis *ahlus-sunnah wal-jama`ah.* Akan tetapi lambat laun masyarakat menyadari bahwa modernisasi memang suatu keharusan. Kegiatan Muhammadiyah yang dahulu dicela kini ditiru diam-diam. Sekolah-sekolah modern yang dahulu menjadi tuduhan kepada Muhammadiyah meniru Belanda terpaksa didirikan orang juga. Kepanduan yang dahulu dianggap *tashabbuh* (menyerupai orang kafir) di mana-mana telah tumbuh. Golongan-golongan yang dahulu menghambat langkah Muhammadiyah akhirnya tidak mendapat jalan lain kecuali meniru jejak Muhammadiyah.

Sejak mulai berdiri, Muhammadiyah bukanlah organisasi politik. Tidak mencampuri politik, itulah politiknya. Ia semata-mata gerakan

da`wah. Akan tetapi tidaklah dapat dinafikan pengaruh Muhammadiyah dalam perjuangan bangsa. Sebagai satu-satunya organisasi di zaman kolonial yang tersebar luas dari Sabang sampai Merauke, maka kongres-kongres Muhammadiyah yang berlangsung setiap tahun sangat berperan dalam membina persatuan nasional. Apalagi bahasa Melayu selalu digunakan dalam kongres-kongres tersebut, meskipun bahasa Melayu saat itu belum dikukuhkan sebagai Bahasa Indonesia. Perjuangan di bidang politik banyak diisi oleh orang-orang Muhammadiyah, meskipun Muhammadiyah sebagai organisasi tidak berpolitik praktis. Cukuplah di sini disebutkan bahwa ketika Republik Indonesia lahir tahun 1945 jabatan-jabatan strategis di negara ini dipegang oleh orang Muhammadiyah, yaitu Presiden Sukarno, Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman, Jaksa Agung Kasman Singodimedjo, serta Menteri Agama Muhammad Rasyidi. Beberapa tokoh Muhammadiyah ditetapkan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional, yaitu Ahmad Dahlan, Nyai Siti Walidah Ahmad Dahlan, Fachruddin, dan Mas Mansur.

e. Bandung (Persatuan Islam).

Pembicaraan mengenai gerakan modernis Islam tidaklah lengkap apabila kita mengabaikan sebuah organisasi pembaharuan yang bersifat "cabe rawit": kecil tetapi pedas! Itulah organisasi Persatuan Islam (Persis) yang didirikan di Bandung tanggal 17 September 1923 (5 Safar 1342) oleh ulama asal Palembang, Zamzam (1894–1952), yang juga pernah bertahun-tahun menuntut ilmu

keagamaan di Makkah. Seperti Muhammadiyah dan al-Irshad, Persatuan Islam juga menyatakan sebagai penerus gerakan pembaharuan Muhammad Abduh dan Rashid Ridha. Kelahiran organisasi ini dilandasi firman Allah "berpegang-teguhlah kepada tali Allah bersama-sama dan janganlah bercerai-berai "*wa`tashimuu bi hablillaahi jamii`an wa laa tafarraquu"*serta sabda Nabi "tangan Allah bersama orang-orang yang mengelompok *yadullaahi ma`al-jama`ah.*

Tokoh Persatuan Islam yang terkenal adalah Ahmad Hassan (1887–1958). Lahir dan besar di Singapura, Ahmad Hassan sejak remaja sudah mengenal gagasan pembaharuan yang disebarkan majalah al-Imam. Dia banyak menulis artikel mengenai keharusan umat Islam kembali kepada ajaran al-Qur'ān dan As-Sunnah. Pada tahun 1921 Ahmad Hassan pindah ke Surabaya, daerah asal ibunya. Di sini dia menjadi akrab dengan Ahmad Surkati. Kemudian pada tahun 1925 Ahmad Hassan pindah ke Bandung, menjadi anggota Persatuan Islam tahun 1926, dan segera menjadi tokoh yang mewarnai corak dan gaya organisasi itu, yaitu keras, konsisten, dan tidak mengenal kompromi.

Ahmad Hassan berpendapat bahwa pintu ijtihad harus dibuka dengan cara *shock therapy*, sehingga umat Islam terbangun dari tidur lelap. Jika Muhammadiyah mengutamakan aksi-aksi sosial melalui sekolah, rumah sakit dan panti asuhan, maka Persatuan Islam mengutamakan da`wah lisan dan tulisan, seperti memperbanyak tabligh, menerbitkan buku dan majalah, menyelenggarakan

debat publik, dan berpolemik di media massa. Buku-buku dan majalah yang diterbitkan Persatuan Islam menjadi bahan rujukan bagi kaum modernis di Indonesia, terutama majalah *Pembela Islam* dan *al-Lisan*. Demikian pula seri buku *Soe'al Djawab* karya Ahmad Hassan tersebar di seluruh Indonesia dan Malaysia.

Pada tahun 1940 Ahmad Hassan pindah ke Bangil sampai ia wafat tahun 1958, meskipun pusat Persatuan Islam tetap di Bandung. Ahmad Hassan banyak meninggalkan karya berupa buku-buku yang sampai kini terus dicetak ulang, misalnya *Tafsir al-Furqaan*, *Pengajaran Shalat* dan terjemahan *Bulughul-Maram*. Murid-murid Ahmad Hassan tersebar di mana-mana. Salah seorang muridnya yang cemerlang adalah Mohammad Natsir (1908–1993), siswa AMS di Bandung yang menjadi aktivis Persatuan Islam, dan kelak menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia serta tokoh yang terkenal di Dunia Islam. Bahkan Bung Karno pun mengaku sebagai murid Ahmad Hassan, sebagaimana tertulis pada "Surat-surat Islam dari Ende" dalam buku *Di Bawah Bendera Revolusi*.

Munculnya gerakan modernisme menyebabkan para pengamat keislaman membagi umat Islam Indonesia menjadi dua kelompok, yaitu kaum modernis dan kaum tradisionalis. Disebut terakhir ini pada garis besarnya mempunyai tiga ajaran utama. Pertama, menganut madz-hab Muhammad ibn Idris ash-Shafi`i (767-820) dalam masalah hukum agama, dengan tidak mengesampingkan mazhab Abu Hanifah (700–767), madz-hab Malik ibn Anas (711–795), dan madz-hab Ahmad ibn Hanbal (780–855).

Kedua, menganut skolastisisme Abuu Hasan al-Ash`ari (873–935) dan Abuu Mansur al-Maturidi (896–944) dalam masalah ketuhanan. Ketiga, menganut ajaran Abul-Qasim al-Junaidi (828–910) dan Abuu Hamid al-Ghazali (1058–1111) dalam masalah tasawuf. Kaum modernis pada umumnya tidak merasa terikat pada ajaran pertama dan ketiga, sedangkan faham Ash`ariyyah diterima dalam bentuk seperlunya saja.

Kaum tradisionalis di Indonesia juga terstimulasi untuk membentuk organisasi. Pada tahun 1917 Abdul Halim di Majalengka mendirikan *Persharikatan Ulama* (sejak 1952 bernama Persatuan Umat Islam atau PUI). Lalu pada 31 Januari 1926 (17 Rajab 1344) di Surabaya lahir *Nahdhatul-`Ulama* (NU) yang didirikan Hasyim Asy`ari (1871–1947). Kemudian menyusul dua organisasi di Sumatera, yaitu *Persatuan Tarbiyah Islamiyah* (Perti) di Minangkabau pada tanggal 5 Mei 1928 (15 Dzulqa`dah 1346), serta *Jam`iyyah al-Washliyyah* di Medan pada tanggal 30 November 1930 (9 Rajab 1349). Semua organisasi kaum tradisionalis ini mempertahankan madhhab Shafi`i.

Kemajuan sains dan teknologi mengantarkan umat manusia memasuki abad ke-21 dengan segala persoalan yang multikompleks, seperti pencemaran lingkungan, menipisnya sumber daya alam, ledakan jumlah penduduk, kesenjangan sosial, serta pembauran kultural akibat canggihnya informasi dan komunikasi. Semua ini memiliki dampak terhadap pemahaman agama oleh umat manusia, termasuk umat Islam. Tidaklah dapat dihindari kemungkinan untuk melakukan reinterpretasi (penafsiran ulang) terhadap pemahaman ajaran agama yang selama ini dianggap baku.

Gerakan-gerakan modernisme Islam oleh beberapa pengamat dinilai telah kehilangan semangat pembaharuannya, karena terlalu sibuk mengelola amal usaha dan kegiatan rutin lainnya, sehingga kurang tanggap terhadap masalah-masalah baru yang dihadapi umat Islam. Terlepas dari benar atau tidaknya anggapan tersebut, Muhammadiyah, Persatuan Islam, al-Irshad, dan gerakan sejenisnya yang terlanjur dijuluki kaum pembaharu lebih meningkatkan ijtihad dalam merespons tantangan abad ke-21 yang makin rumit dan tidak terduga arahnya.

Nilai-nilai Modernisme dalam Muhammadiyah, dapat dilacak lewat pemahaman pengertian modern yang mengacu bukan hanya kepada zaman (kita mengenal pembagian zaman menjadi zaman purba, zaman pertengahan dan zaman modern), tetapi yang lebih penting mengacu kepada cara berfikir dan bertindak. Peradaban modern ditandai oleh dua ciri utama, yaitu rasionalisasi (cara berfikir yang rasional) dan teknikalisasi (cara bertindak yang teknikal). Hal ini bisa dirujuk lewat catatan sejarah bahwa Ahmad Dahlan sangat dipengaruhi oleh pemikiran para tokoh yang oleh para ahli sejarah disebut sebagai tokoh aliran Modern dalam Islam, yakni Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridha. Ahmad Dahlan mempunyai referensi yang sebagain besarnya adalah buku-buku tulisan tokoh-tokoh tersebut.

E. Muhammadiyah dan Liberalisme.

Dalam khasanah pemikiran politik Barat klasik, istilah *liberal* bertaut erat dengan dikotomi antara *liber* dan *servus.* Yang pertama mengacu pada warga negara yang bebas, yang kedua berarti budak yang tidak bebas karena senantiasa berada dalam dominasi tuannya. Dalam

pengertian klasik, liber, sang warga negara bebas dalam arti tidak berada dalam dominasi siapapun. Inillah pengertian bebas dalam tradisi republik

Islam liberal menurut Charless Kurzman muncul sekitar abad ke-18 dikala kerajaan Turki Utsmani Dinasti Shafawi dan Dinasti Mughal tengah berada digerbang keruntuhan. Pada saat itu tampillah para ulama untuk mengadakan gerakan permurnian, kembali kepada al-Qur'aan dan sunnah. Pada saat ini muncullah cikal bakal paham liberal awal melalui Shah Waliyullah (India, 1703-1762), menurutnya Islam harus mengikuti adat lokal suatu tempat sesuai dengan kebutuhan pcnduduknya. Hal ini juga terjadi dikalangan Shi'ah. Ada Muhammad Bihbihani (Iran, 1790) mulai berani mendobrak pintu ijtihad dan membukanya lebar-lebar.

Ide ini terus bergulir. Rifa'ah Rafi' al-Tahtawi (Mesir, 1801-1873) memasukkan unsur-unsur Eropa dalam pendidikan Islam. Shihabuddin Marjani (Rusia, 1818-1889) dan Ahmad Makhdun (Bukhara, 1827-1897) memasukkan mata pelajaran sekuler kedalam kurikulum pendidikan Islam.[67]

Di India muncul Sir Sayyid Ahmad Khan (1817-18%) yang membujuk kaum muslimin agar mengambil kebijakan bekerja sama dengan penjajah Inggris. Pada tahun 1877 ia membuka suatu kolese yang kemudian menjadi Universitas Aligarh (1920). Sementara Amir Ali (1879-1928) melalui buku *The Spirit of Islam* berusaha mewujudkan seluruh nilai liberal yang dipuja di Inggris

[67]Charless Kurzman: xx-xxiii

pada masa Ratu Victoria. Amir Ali memandang bahwa Nabi Muhammad adalah Pelopor Agung Rasionalisme.[68]

Di Mesir muncullah Muhammad Abduh (1849-1905) yang banyak mengadopsi pemikiran Mu'tazilah berusaha menafsirkan Islam dengan cara yang bebas dari pengaruh salaf. Lalu muncul Qasim Amin (1865-1908) kaki tangan Eropa dan pelopor emansipasi wanita, penulis buku *Tahrir al-Mar'ah*. Lalu muncul Ali Abd. Raziq (1888-1966), yang mendobrak sistem khilafah, menurutnya Islam tidak memiliki dimensi politik karena Muhammad hanyalah pemimpin agama. Lalu diteruskan oleh Muhammad Khalafullah (1926-1997) yang mengatatan bahwa yang dikehendaki oleh al-Qur'aan hanyalah sistem demokrasi tidak yang lain.[69]

Di al-Jazair muncul Muhammad Arkoun (lahir 1928) yang menetap di Perancis, ia menggagas tafsir al-Qur'aan model baru yang didasarkan pada berbagai disiplin Barat seperti dalam lapangan semiotika (ilmu tentang fenomena tanda), antropologi, filsafat dan linguistik. Intinya Ia ingin menelaah Islam berdasarkan ilmu-ilmu pengetahuan Barat modern. Dan ingin mempersatukan keanekaragaman pemikiran Islam dengan keanekaragaman pemikiran diluar Islam.[70] Di Pakistan muncul Fazlur Rahman (lahir 1919) yang menetap di Amerika dan menjadi guru besar di Universitas Chicago. Ia menggagas tafsir konstekstual, satu-satunya model tafsir yang adil dan terbaik menurutnya. Ia mengatakan al-Qur'aan itu

[68]Watt, William Montgomery Watt, *Islamic Fundamentalism and Modernity* (London: Routledge, 1988), 132, 180-185.
[69]Charless: xxi,l8
[70]Mohammed Arkoun, *Aaql al-Arabiy*, Pemikiran Arab, terj. Yudian W. Asmin. (Yogyakarta: Pustaka Relajar, 1996), 14. lihat juga, Jurnal Salam vol.3 No. 1/2000 hal 100-111; Abd. Rahman al-Zunaidi: 180; Willian M Watt: 143).

mengandung dua aspek: *legal spesifik* dan *ideal moral*, yang dituju oleh al-Qur'aan adalah ideal moralnya karena itu ia yang lebih pantas untuk diterapkan.[71] Di Indonesia muncul Nurcholis Madjid (murid dari Fazlur Rahman, intelektual muslim yang pernah bermukim di Chicago) yang memelopori gerakan firqah liberal bersama dengan Djohan Efendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wachid.[72]

Nurcholis Madjid, telah memulai gagasan pembaharuannya sejak sekitar tahun l970-an. Pada saat itu ia telah menyuarakan pluralisme agama dengan menyatakan: "Rasanya toleransi agama hanya akan tumbuh diatas dasar paham kenisbian (relativisme) bentuk-bentuk formal agama ini dan pengakuan bersama akan kemutlakan suatu nilai yang universal, yang mengarah kepada setiap manusia, yang kiranya merupakan inti setiap agama".[73]

Selain itu, pengertian liberal dalam artinya yang modern juga tidak lepas dari perlawanan terhadap ketidakadilan. Liberalisme yang lahir di Eropa abad 17 bertaut erat dengan perlawanan terhadap ketidakadilan kekuasaan monarki. Liberalisme lahir sebagai upaya untuk melindungi hak-hak sipil warga negara dari kekuasaan absolut sang raja. Ada semacam penegasan bahwa hak-hak sipil, terutama hak milik pribadi, tidak bisa begitu saja diklaim oleh sang raja, atau menjadi milik sewenang-wenang dari kaum aristokrat. Makanya tidak heran kalau semangat liberalisme adalah pembatasan kekuasaan tiranik dan absolut yang datang dari manapun agar setiap warga

[71]Fazhul Rahman: 21; William M. Watt: 142-143).
[72]Adiyan Husaini dalam makalah *Islam Liberal dan misinya menukil* dari Greg Barton, Sabili no. 15: 88).
[73]Nur Cholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 198), 239

punya kebebasan untuk menikmati hak-hak sipilnya dan mengembangkan dirinya sendiri. Kekuasaan mesti dikontrol dan diawasi agar tidak mencaplok kebebasan individu.

Meskipun liberalisme lahir dan berkembang di Barat, tapi esensinya, yakni "penolakan terhadap kekuasaan tiranik demi melindungi hak-hak warga negara" merupakan kebajikan yang relevan dengan masyarakat non Barat, termasuk dalam ajaran agama Islam.

Rifa'ah Tahtawi pembaharu muslim dari Mesir abad ke-18 yang menjadi pendahulu Afghani dan Abduh. Tahtawi pernah tinggal di Paris selama lima tahun dan menyaksikan dari dekat sistem politik, tata budaya, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Perancis yang sedang bergairah mengamalkan Pencerahan. Seperti terekam dalam bukunya *Takhlis al-Ibriz ila talkhis al-Bariz* (baru-baru ini diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi al-Imam in Paris), Tahtawi tertarik dengan konsep kebebasan di Eropa yang memberi tempat pada hak-hak individu dan sangat antipati dengan absolutisme kekuasaan yang menurut sangkaan awal Tahtawi tidak dikenal dalam tradisi politik Islam.[74]

Tapi semakin lama ia mendalami kebebasan Eropa, Tahtawi akhirnya berkesimpulan bahwa apa yang disebut oleh manusia Eropa sebagai kebebasan sesungguhnya sedikit banyak paralel dengan konsep keadilan dalam Islam. Bukankah Islam menyerukan agar penguasa bersikap adil? Bukankah keadilan dalam Islam adalah pernyataan antipati terhadap kekuasaan yang zalim? Demikian Tahtawi.

[74]Mohammad al-Bahiy, *al-Fikr al-Islaam al-Hadiith Wa Siraatuhu Bi al-Isti'maari al-Ghabiyyi*, alib bahasa, Su'adi Saat, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1986), 107-116.

Muhammad Tahir Djalaluddin (1869-1956) adalah murid Muhammad Abduh yang paling berjasa menyebarkan gagasan pembaharuan Islam diIndonesia. Selesai berguru kepada Abduh, ia meninggalkan Mesir. Karena situasi politik tak menguntungkan, ia tak kembali ke Indonesia, transit di Singapura mulai menyebarkan gagasan pembaruannya. Di Singapura (1906) ia mendirikan majalah *Islam al-Imam.* Nama ini terinspirasi dari panggilan akrab Syekh Muhammad Abduh. Lewat Djalaluddin, gagasan pembaruan dan liberalisme Islam Timur Tengah disebarkan di Indonesia dan Malaysia.

Majalah al-Imam menjadi media Islam pertama yang menyebarkan gagasan liberalisme Islam di Indonesia. Pada tahun 1911 majalah Islam lainnya *al-Munir* terbit di Sumatera. Pendirinya Abdullah Ahmad adalah murid Shekh Ahmad Khatib (reformis Melayu yang bermuqim di Makkah). Majalah ini bersama al-Imam menjadi corong kaum muda menyebarkan gagasan Islam Liberal.

Zuly Qodir mencermati munculnya komunitas Islam Liberal sekitar awal tahun 2001, dengan menggunakan *mailing-list Islamlib,* dan berkantor di Utan Kayu 58 H, Jakarta, adalah bagian dari perjalanan panjang warna pemikiran dan gerakan Islam Indonesia. Islam Liberal dengan komunitasnya melakukan kampanye besar-besaran di harian umum Jawa Pos minggu, dan Radio 68 H dengan cabangnya hampir di seluruh provinsi. Islam Liberal diandakan untuk mengemas corak Islam yang lebih relevan dengan pluralisme dan demokrasi. Namun yang lebih penting adalah bahwa kemunculan Islam Liberal telah menyita banyak perhatian umat Islam, yakni Islam shri'ah atau Islam fundamentalis. Akan tetapi selama ini Islam Liberal lebih banyak mengusung tema-tema yang elitis,

maka keberadaannya terkesan elitis. Bahkan Zuly Qodir menengarai Islam liberal ini terkesan propasar/kapitalis dan neo-liberalisme. Dengan adanya kesan negatif ini, maka khalayak pun pada akhirnya harus rela menyatakan bahwa Islam Liberal memang gerakan Islam yang kurang membumi, tetapi elitis dalam arti gagasan.

Di kalangan Muhammadiyah, muncul istilah baru, yakni Islam Transformatif, yang diusung oleh Muslim Abdurrahman, generasi Muhammadiyah yang tampak lebih dekat dengan kaum Nahdhiyyin, sekalipun belakangan tercatat sebagai pengurus PP Muhammadiyah[75] sebagai ketua Lembaga Pemberdayaan Buruh, Tani, dan Nelayan, (lembaga yang menurutnya paling tidak ilmiah) di lingkungan Muhammadiyah.

Nilai-nilai Liberalisme dalam Muhammadiyah jika diukur menggunakan teori Kurzman[76] yang mendasarkan pada 6 (enam) state of mind yakni 1) Sikap terhadap Teokrasi, 2) Sikap terhadap Demokrasi, 3) Penghargaan terhadap hak-hak Perempuan, 4) Penghargaan terhadap hak-hak Non Muslim, 5) Kebebasan berfikir, dan 6) Progresifitas atau Kemajuan [77], maka sebagian besar point-point tersebut berlaku di Muhammadiyah. Hal ini bisa dikonfirmasikan dengan materi yang ada dalam rumusan MKCH (Matan Keykinan dan Cita-cita Hidup) Muhammadiyah, dan dalam dokumen ideologis *al-Mar'ah*

[75]Hasil Muktamar Muhammadiyah ke 45 di malang tahun 2005, mencantumkan Muslim Abdurrahman sebagai salah satu pengurus PP Muhammadiyah.

[76]Charles Kurzman,. "Introduction: Liberal Islam and its Islamic Context". dalam *Liberal Islam: A Source Book,* Charles Kurzman, ed. New York: Oxford University Press.

[77]Luthfi Assyuani, *Mencerahkan dan Membebaskan*, dalam: Marjohan, *www.islamlib.com/wawancara/marjohan.html. tertanggal 28-2-2008*, diakses 12 Desember 2009.

Fi al-Islam , serta dalam HPT (Himpunan Putusan Tarjih) Muhammadiyah.[78]

F. Muhammadiyah dan Pluralisme

Anthony Gidden memaknai Pluralisme sebagai perspektif pemikiran dan gerakan yang ingin menghapuskan sekat-sekat primordialisme (asal usul kelahiran, agama, dan hal-hal bawaan) dalam pola dan proses interaksi sosial manusia dalam kehidupan. Secara sederhana pluralisme dikatakan sebagai paham tentang kemajemukan masyarakat. Masyarakat majemuk *(plural society)* ialah suatu masyarakat di mana sejumlah etnik dan golongan hidup secara berdapingan yang sebagian besar berbeda satu sama lain.[79] Dalam perkembangan umat manusia di tengah globalisasi dan kesadaran akan pentingnya harmoni, pluralisme telah tumbuh menjadi semacam ideologi baru yang digandrungi oleh generasi baru. Dalam dunia politik kini lahir partai-partai politik dengan ideologi inklusif (terbuka) sebagai antitesis dari partai politik dengan ideologi eksklusif di mana dalam kalangan umat Islam masih mengalami perdebatan yang kontroversial baik di level strategi maupun teologi.

Kompleksitas kehidupan dan interaksi masyarakat dengan dunia luar telah pula ikut menciptakan kompleksitas budaya. Kalau sekarang muncul eksklusivisme kelompok yang kian menonjol, dimana rasa persaudaraan dan semangat kebersamaan semakin hilang, dan konflik-konflik sosial yang menafikan kemajemukan muncul di berbagai tempat, semua itu terjadi karena sebagai bangsa kita kurang memahami fondasi keindonesiaan. Pluralisme

[78]PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih.*
[79]Anthony Gidden, *Sociology* (Cambridge: Polity Press, 1993), 45.

agama adalah sebuah konsep yang mempunyai makna yang luas, berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda, dan dipergunakan dalam cara yang berlain-lainan pula:

a. Sebagai pandangan dunia yang menyatakan bahwa agama seseorang bukanlah sumber satu-satunya yang eksklusif bagi kebenaran, dan dengan demikian di dalam agama-agama lain pun dapat ditemukan, setidak-tidaknya, suatu kebenaran dan nilai-nilai yang benar.
b. Sebagai penerimaan atas konsep bahwa dua atau lebih agama yang sama-sama memiliki klaim-klaim kebenaran yang eksklusif sama-sama sahih. Pendapat ini seringkali menekankan aspek-aspek bersama yang terdapat dalam agama-agama.
c. Kadang-kadang juga digunakan sebagai sinonim untuk ekumenisme, yakni upaya untuk mempromosikan suatu tingkat kesatuan, kerja sama, dan pemahaman yang lebih baik antar agama-agama atau berbagai denominasi dalam satu agama.
d. Dan sebagai sinonim untuk toleransi agama, yang merupakan prasyarat untuk ko-eksistensi harmonis antara berbagai pemeluk agama ataupun denominasi yang berbeda-beda.

Dalam pandangan Islam (mainstream), sikap menghargai dan toleransi kepada pemeluk agama lain adalah mutlak untuk dijalankan *(pluralitas).* Namun bukan berarti beranggapan bahwa semua agama adalah sama *(pluralisme),* artinya tidak menganggap bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang kalian sembah. Dalam hal ni Majelis Ulama Indonesia (MUI) menentang faham pluralisme dalam agama Islam. Namun demikian, faham

pluralisme ini banyak dijalankan dan kian disebarkan oleh kalangan Muslim itu sendiri. Solusi Islam terhadap adanya pluralisme agama adalah dengan mengakui perbedaan dan identitas agama masing-masing (*lakum diinukum wa liya dīn*). Tapi solusi paham pluralisme agama diorientasikan untuk menghilangkan konflik dan sekaligus menghilangkan perbedaan dan identitas agama-agama yang ada.

Muhammadiyah, dalam perjalanan panjangnya sebagai gerakan keagamaan, telah tercatat sebagai gerakan Islam modernis *par excellence* di Indonesia. Tentu saja, modernitas yang hendak dikembangkan dan diemban oleh Muhammadiyah adalah modernitas yang tidak semata-mata mengakomodasi nilai-nilai Barat *ansich*, tetapi lebih dari itu justru ingin melakukan modernisasi Islam lewat gerakan purifikasi ajaran-ajaran Islam yang dianggap telah menyimpang.

Realitas tersebut banyak memberi kontribusi dalam perkembangan gerakan Muhammadiyah baik yang ada di daerah maupun pusat. Hal tersebut wajar karena memang pada dasarnya Muhammmadiyah adalah gerakan sosial keagamaan yang berbasis pada massa, sehingga lembaga-lembaga itu secara tidak langsung bersinggungan dengan masyarakat riil.

Dalam hal ini seringkali Muhammadiyah menemui jalan buntu, terutama ketika dihadapkan dengan persoalan antaragama. Karena disadari atau tidak Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang teguh dalam menjalankan ajarannya, seringkali dianggap masih ragu untuk melakukan lompatan-lompata kultural apalagi kultur yang dimotori oleh perbedaan agama.

Nilai-nilai pluralisme dalam Muhammadiyah, jika menggunakan ukuran Abd. A'la ketika menganalisis

pemikiran keagamaan dalam Nahḍatul Ulama, yakni dengan mengedepankan 5 (lima) indikator yaitu 1) *tawasuṭ* (moderat), 2) *i'tidal* (proporsional), 3) *uḥuwah* (persaudaraan), 4) *tasamuh* (toleran), dan 5) *tawazun* (keseimbangan)[80] maka secara analogis (meskipun tidak sama dan sebangun) di dalam perkembangan pemikiran Muhammadiyah juga erjadi hal yang sama. Hal ini dapat dirujuk ke berbagai dokumen rumusan ideologis Muhammadiyah seperti MKCH, Kepribadian Muhamadiyah, pernyataan Pemikiran Muhammadiyah Jelang Satu Abad (hasil Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang).[81]

Secara umum, dapat ditemukan adanya polarisasi sikap dalam kalangan Muhammadiyah berkaitan dengan wacana pluralisme agama. Secara kategoris, penulis bisa menyebut ada tiga kelompok dalam Muhammadiyah yang merespon wacana ini. Ada generasi tua konservatif, generasi tua yang progresif dan kelompok muda yang cenderung liberal. Kelompok pertama, oleh Zuly Qodir sering disebut sebagai kelompok konservatif, yang menurutnya, adalah sekelompok orang Muhammadiyah yang menjadikan sebagai organisasi yang kegemukan, namun tidak lagi progresif menangkap tanda-tanda zaman. Muhammadiyah konservatif telah terjebak pada aktivitas

[80]Abd. A'la. *Pluralisme dan Islam Indonesia Ke Depan: Ketakberdayaan Umat dan Politisasi Agama Sebagai Tantangan. Dalam, Sururin (ed). Nilai-nilai Pluralisme dalam Islam, Bingkai gagasan yang berserak. Bandung: Nuansa, 2005, hal. 137.* Lebih lanjut Abd. A'la menegaskan bahwa melalui pola keberagamaan yang disebut Ahli sunnah wal jamaah (aswaja) ini, NU menyatakanbahwa Indonesia dalam bentuk negara yang berdaarkan UUD 1945 merupakan bentuk final bagi umat Islam Indonesia. Sikap ini merupakan bentuk kongkret dari sikap moderasi keberagamaan NU yang menggambarkan secara jelas tentang pluralisme ang dianutnya.

[81]Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 45 di Malang, tahun 2005.

amal usaha praktis yang menjadi semacam ritual dalam Muhammadiyah. Akibatnya respon mereka terhadap isu-isu baru yang dicurigai merupakan produk Barat sangatlah negatif.

Kelompok kedua adalah sejumlah pemikir generasi tua Muhammadiyah yang justru berpandangan berbeda dengan kelompok pertama. Meskipun dari kategori usia, mereka tidak jauh berbeda dengan kelompok pertama, tetapi kelompok kedua lebih progresif dalam merespon isu-isu baru, termasuk di dalamnya pluralisme agama. Sekadar contoh, kelompok ini diwakili oleh Amin Abdullah, Munir Mulkhan dan Moeslim Abdurrahman.

Sementara kelompok ketiga didominasi anak-anak muda Muhammadiyah yang belakangan juga mulai tergugah untuk merespon stagnasi pemikiran dalam Muhammadiyah. Kelompok ini menamakan diri Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) yang meskipun masih seumur jagung, tetapi garis dan *mainstream* pemikirannya mulai bisa dilihat. Sebagian orang memang masih memandang kelahiran kelompok ini sebagai pemberontakan, yang bisa saja menimbulkan ekses negatif. Sebab, kata Kuntowijoyo, setiap ada pemberontakan mestilah timbul gejala *sawan kekanak-kanakan* (meminjam istilah Lenin) yang berupa cara berpikir *kekanan-kananan* (sok liberal) atau *"kekiri-kirian"* (sok radikal).[82]

---o0o---

[82]*Pradana Boy ZTF, Rekonstruksi Pemikiran Muhammadiyah, 8. diakses dari : http://publikasi.umm.ac.id/files/disk1/1/jiptummdppm-gdl-pradanaboy-6-1-rekonstr-h.rtf. 20 November 2009.*

BAB III
MEMAHAMI RELASI ELIT PIMPINAN DENGAN WARGA PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

A. Relasi Formalis-skriptualis dan Substansialis Pimpinan dan Warga

Walter Lippmann, mengurai adanya kenyataan hubungan timbal balik antara elit pimpinan dengan massa yang dipimpin. Bahwa elit memimpin opini publik tentang berbagai kebijakan. Dalam kasus politik luar negeri Amerika Serikat, Lippmann menegaskan bahwa elit pimpinan tidak bisa terelakkan memimpin opini publik tentang kebijakan luar negeri. Tetapi dalam kasus dimana tidak bisa ketergantungan pada pendapat-pendapat masa.[1]

Murdick lebih rinci memaknai relasi sebagai hubungan antara suatu himpunan dengan himpunan entitas yang lainnya. Pada penggambaram diagram hubungan entitas, relasi adalah perekat yang menghubungkan suatu entitas dengan entitas lainnya. Relasi merupakan hubungan yang berarti antara suatu entitas dengan entitas lainnya. Frasa ini berimplikasi bahwa relasi mengijinkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hubungan suatu entitas dengan lainya. Hubungan dibedakan antar bentuk hubungan antar entitas dengan isi. Misalnya kasus hubungan antara entitas pegawai dan entitas bagian adalah jam kerja, sedangkan isi hubungannya dapat berupa total jam kerja, dan gaji lembur. Relasi digambarkan dalam

[1]Haryanto, *Kekuasaan Elit* (Yogyakarta: Fisipol UGM Press, 2005), 1-2.

bentuk intan. Pada model data relasi hubungan antar data dihubungkan dengan kunci relasi. Tipe hubungan di antara beberapa buah tipe entitas adalah kumpulan dari relasi di antara entitas-entitas dari tipe entitas tersebut.[2]

Dalam perspektif politis, hubungan elit dan massa merupakan hubungan yang niscaya. Keberadaan dua kelompok tersebut (elit pimpinan dengan massa atau anggota masyarakat) merupakan dinamika yang tidak terelakkan dalam teori *model elite*, di mana pada gilirannya akan menyentuh pada persoalan-persoalan kekuasaan berkaitan dengan massa di bawah di wilayah kekuasaannya.[3] Berdasarkan teori ini, maka di setiap institusi yang terstruktur adanya susunan kepemimpinannya termasuk organisasi keagamaan, berlaku juga hal yang sama tentang relasi elit pimpinan dengan warga atau anggota organisasi bersangkutan.

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi keagamaan, sebagaimana ketentuan organisasi tersebut, meniscayakan adanya relasi antara pimpinan dengan warganya. Relasi elit pimpinan dengan warga atau massa yang dipimpin, merupakan sebuah keniscayaan dalam Muhammadiyah. Menurut aturan Anggaran Dasar Muhammadiyah, meskipun berdirinya sebuah ranting (di tingkat Kelurahan) bersifat *battom up* yakni muncul dari inisiatif sekelompok masyarakat yang kemudian tersusun pimpinan di tingkat ranting, maka keberadaan ranting tersebut baru absah jika dikomunikasikan kepada pimpinan di atasnya, yakni pimpinan cabang, dan pimpinan cabang mengkomunikasikan kepada pimpinan di atasnya lagi;

[2]Murdick,et al, *Information System for Modern Management* (Prentice Hall Int, 1984), 10.
[3]Ibid.,

begitu seterusnya sehingga terjadi relasi yang mengikat antara pimpinan ranting sampai pimpinan tertinggi.

Implikasi dari teori ini, maka di dalam Persyarikatan Muhammadiyah dimungkinkan adanya sosialisasi atas suatu kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan Muhammadiyah kepada warganya. Banyak kasus yang pernah terjadi di Persyarikatan menunjukkan bahwa para elit pimpinan telah melakukan pembentukan opini kepada warga Muhammadiyah, misalnya penentuan awal bulan Ramaḍan, penentuan Idul Fithri dan Idul Aḍha, penentuan saat terjadinya gerhana matahari dan bulan. Dalam bidang politik Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah melakukan pembentukan opini publik tentang keanggotaan Muhammadiyah dalam partai Islam *Masyumi*. Pengarahan opini juga dilakukan ketika pembentukan partai *Parmusi*. Pembentukan opini juga terjadi pada saat pencalonan M. Amien Rais sebagai calon presiden RI. Adanya relasi antara pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah dengan warga Muhammadiyah terjadi bukan hanya adanya ikatan aturan organisasi berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah serta berbagai aturan organisasi lainnya, tetapi juga adanya ikatan ideologi di antara keduanya. Ikatan ideologi dalam Muhammadiyah memungkinkan terjadinya ikatan emosional yang kuat antara pimpinan dengan warganya.

Hasan al-Banna dalam teori pembentukan komunitas yang kuat menghendaki adanya tahapan-tahapan yang harus dilakukan sehingga terwujud satu kesatuan atau ukhuwah yang mantap dalam komunitas tesebut.[4]

[4]Hasan al-Banna, *Takwin Al-Ummah* (Jakarta: Rabbani Press, 1997),17-45.

Pembentukan komunitas atau umat yang kuat diawali dengan pembentukan kepribadian. Lebih lanjut disebutkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:

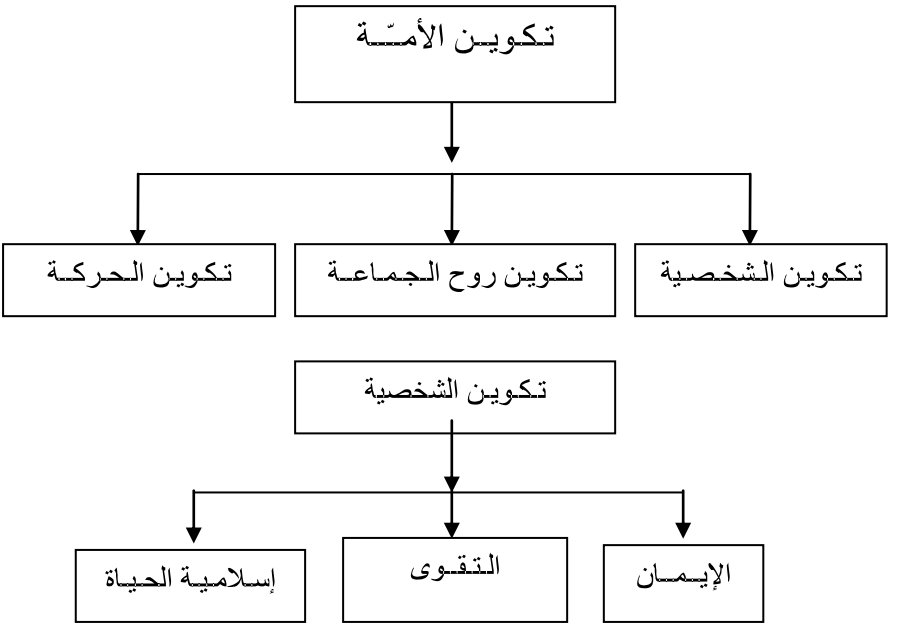

Gambar Bagan: 3.1
Teori Pembentukan Komunitas

Dari konsep *takwin al-Ummah* yang dikemukakan oleh Hasan al-Banna tersebut, terlihat adanya keterkaitan antara pembentukan kepribadian pada masing-masing jamaah secara individual dengan organ atau aspek lain yang berkaitan dengan komunitas tersebut, berupa pimpinan pada masing-masing tingkatan. Analog dengan ini maka apa yang terjadi di Muhammadiyah sesungguhnya memperkuat teori tersebut, yakni bahwa terjadi relasi yang positif antara elit pimpinan persyarikatan Muhammadiyah dengan warga

Muhammadiyah, baik secara struktural maupun secara fungsional.

Perlu ditegaskan di sini bahwa relasi itu sering kali terjadi bukan hanya secara formalis-skriptualis, tetapi juga terjadi relasi secara lebih substansialis. Ketika Azyumardi Azra menganalisis relasi antara suatu partai politik dengan konstituen atau massanya sering kali terjadi tidak efektif ketika sebuah partai tersebut menggunakan relasi berdasarkan uang atau atas nama agama. Azra menduga, yang menyebabkan tidak efektifnya partai-partai bersimbolkan agama antara lain adalah karena masyarakat semakin terdidik. Selai itu faktor ekonomi jug berpengaruh. Karena faktor ekonomi inilah yang sebenarnya membuat partai-partai politik kemudian menebar *money politics*.[5] Pendapat Azra ini pada akhirnya menguatkan pandangan kaum faksi Islam Substansialis dalam hal hubungan Islam dan negara.[6] Hubungan Islam dan negara tidak lagi harus bersifat formalis-skripturalis yang tampak lebih konfrontatif, tetapi lebih bersifat substansialis.

Zainuddin Maliki ketika mencermati tentang pemikiran skripturalistik,[7] menyatakannya sebagai pemahaman agama yang dilakukan secara tekstual. Dengan teori ini maka simbol-simbol agama yang bersumber dari ajaran Islam melegitimasi bagi pembentukan negara Islam sebagai pengejawantahan atas perintah Allah untuk

[5]Azyumardi Azra, *Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antar Umat* (Jakarta: Kompas, 2002), 162.

[6]Dalam kaitan ini, Azra sebenarnya tidak atau belum yakin jika Indonesia harus menjadi negara sekuler, sebab sebagaimana dikemukakan *Ernest Gellner*, by implication, kaum muslim itu secular resistant, meskipun demikian Azra juga tidak menghendaki adanya Negara Islam Indonesia .

[7]Zainuddin Maliki, *Agama Priyayi, Makna Agama di Tangan Elite Penguasa* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004), 30-36.

menjalankan pemerintahan negara dalam lembaga formal.[8] Sedangkan pemikiran substansialis dimaksudkan sebagai pemahaman agama yang dilakukan secara kontekstual. Pemahaman ini oleh Din Syamsuddin dikategorikan sebagai sekularistik. Pamahaman ini menolak baik relasi integralistik maupun relasi simbiotik antara agama dan

[8]Contoh simbol agama sebagai alat legitimasi, adalah pemahaman Sayyid Qutb (yang oleh Zainuddin Maliki dimasukkan pada representasi pemikir skripturalis, Zainuddin Maliki, 2004: 30-31) ketika memaknai ayat 44, 45, dan 47 surat al-Maidah:

إِنَّآ أَنزَلۡنَا ٱلتَّوۡرَىٰةَ فِيهَا هُدٗى وَنُورٞۚ يَحۡكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسۡلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلۡأَحۡبَارُ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِتَٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيۡهِ شُهَدَآءَۚ فَلَا تَخۡشَوُاْ ٱلنَّاسَ وَٱخۡشَوۡنِ وَلَا تَشۡتَرُواْ بِـَٔايَٰتِي ثَمَنٗا قَلِيلٗاۚ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ

(Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir).

وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَيۡنَ بِٱلۡعَيۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٞ لَّهُۥۚ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾

وَلۡيَحۡكُمۡ أَهۡلُ ٱلۡإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِۚ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ﴿٤٧﴾

(Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik).

negara. Ali Abdurroziq (yang oleh Din Syamsuddin dikategorikan sebagai aliran substansialis) menganggap bahwa Islam tidak mempunyai kaitan apapun dengan sistem pemerintahan kekhalifahan.[9]

Analog dengan pemikiran di atas, maka Muhammadiyah telah mengembangkan pola-pola relasi formalis-skriptualis dan juga relasi substansialis. Relasi yang sifatnya formalis-skriptualis di Muhammadiyah lebih banyak diterapkan dalam kaitannya dengan hubungan-hubungan administratif keorganisasian di semua tingkatan kepemimpinan struktural, misalnya kebijakan-kebijakan organisasi secara formal yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang harus disosialisasikan kepada warga Muhammadiyah secara keseluruhan. Pola relasi formalis ini bisa dilakukan lewat surat-surat resmi, surat terbuka dalam majalah *"Suara Muhammadiyah"*[10], atau lewat majalah khusus *"Berita Resmi Muhammadiyah"* [11].

Sedangkan pola relasi substansialis di Muhammadiyah, dilakukan dalam berbagai kegiatan dakwah baik yang dilakukan secara resmi oleh para elit Pimpinan Pusat Muhammadiyah ketika berkunjung ke daerah-daerah, maupun pada acara-acara yang tidak resmi. Dalam kegiatan ini para elit pimpinan Muhammadiyah berinteraksi secara langsung dengan warga Muhammadiyah

[9] Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani* (Jakarta: Logos, 2002), 62-64.

[10]Contoh, ketetapan Muhammadiyah tentang penetapan awal Ramad}an, awal Idul Fitri, atau Idul Adh-ha yang harus diketahui oeh seluruh warga atau umat Islam secara keseluruhan.

[11]Contoh, ketetapan-ketetapan hasil Muktamar, keputusan sidang tanwir, program majlis-majlis, ortom-ortom, lembaga-lembaga. Semuanya itu harus diketahui oleh seluruh jajaran pimpinan di bawah (Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Pimpinan Cabang Muhammadiyah, dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah).

setempat dalam suasana dialogis secara intensif. Berbagai persoalan kemasyarakatan maupun keagamaan seringkali muncul dan menjadi bahan dialog antara warga dengan pimpinannya.[12] Para elit pimpinan Muhammadiyah dalam mensosialisasikan pemikiran-pemikiran ideologis Muhammadiyah bisa dipastikan juga memberi berbagai interpretasi atau penafsiran-penafsiran yang dikaitkan dengan perkembangan dan perubahan di masyarakat yang berjalan cepat. Hal ini wajar karena pemahaman pemikiran bukanlah sesuatu yang mandek tetapi harus berkembang sesuai dengan konteks zaman.

Pada sisi lain pola relasi substansialis ini juga terjadi dengan cara dikemas lewat berbagai forum yang sengaja dilakukan oleh pimpinan struktural yang menghadirkan elit pimpinan di bawah dan warga secara keseluruhan. Dalam pola ini biasanya pimpinan sengaja menggali berbagai aspirasi yang muncul dari bawah untuk kemudian didialogkan, atau kalau sifatnya sangat urgen akan menjadi masukan bagi pimpinan untuk dirapatkan pada tingkat pimpinan.[13]

---

[12]Misalnya, hampir di semua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten/Kota, bahkan di tingkat cabang, mereka mengadakan pengajian rutin bulanan atau mingguan. Pembicara yang ditampilkan selain para muballigh local juga para pimpinan structural Muhammadiyah. Kehadiran para pimpinan sangat penting artinya bagi warga/jamaah, karena mereka akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan penjelasan tentang berbagai hal yang mereka hadapi, baik yang berkaitan dengan keorganisasian maupun persoalan-persoalan keagamaan. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu terutama yang berkaitan dengan politik kenegaraan, secara agak sembunyi Pimpinan structural ada juga yang memanfaatkan kesempatan untuk mengarahkan dukungan pada politisi tertentu.

[13]Relasi yang bersifat substansialis ini dimaksudkan dititik beratkan pada hal-hal yang fungsional dan non structural. Tetapi perlu ditegaskan di sini bahwa pelabelan/pengkategorian oleh penulis ini tidak ada kaitannya dengan makna substansialis dalam perspektif pemikiran keagamaan Islam sebagaimana yang terjadi belakangan. Bahwa perkembangan pemikiran Islam Kontemporer seperti pemetaan yang dilakukan oleh Komaruddin

B. Makna Kebijakan Pimpinan Struktural terhadap Warga

Dalam sebuah organisasi, kebijakan strktural pimpinan tertinggi selalu memiliki kekuatan hukum yang mengikat bukan hanya kepada pimpinan struktural di bawahnya, tetapi juga kepada anggota organisasi tersebut secara keseluruhan.

Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang relatif tertib dan solid, berlaku juga hukum mengikat antara kebijakan Pimpinan Pusat terhadap pimpinan di bawahnya, sampai kepada seluruh warga atau anggota secara keseluruhan. Untuk menguji keabsahan pernyataan tersebut, bisa diklarifikasikan kepada aturan pokok organisasi Muhammadiyah yang disebut AD & ART Muhammadiyah (Anggaran Dasar dan Anggaan Rumah Tangga Muhammadiyah). Lebih lanjut berikut penulis paparkan pasal-pasal yang ada dalam Anggaran Dasar & Anggara Rumah Tangga Muhammadiyah tersebut:

1. Dari segi susunan dan penetapan organisasi, secara berjenjang ada kaitan secara mengikat antara pimpinan paling bawah yaitu pimpinan ranting, sampai pimpinan tertinggi yaitu pimpinan pusat.[14]
2. Dari segi kewajiban dan wilayah kerja pada masing-masing tingkat kepemimpinan dalam Muhammadiyah dari tingkat pusat sampai tingkat ranting, bahwa seluruh tingkat pimpinan melakukan

Hidayat bahwa telah terjadi konfrontasi berhadap-hadapan antara kelompok Islam simbolis dan Islam substansialis khususnya di Indonesia ini (Hidayat: 1995). Selanjutnya bisa dilihat dalam: Zuly Qodir. *Pembaharuan Pemikiran Islam, Wacana dan Aksi Islam Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 234-238.

[14]PP Muhammadiyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah (hasil Muktamar Muhammadiyah ke 45 di Malang tahun 2005* (Yogyakarta: TB Suara Muhammadiyah, 2005), Bab V pasal 9 dan 10.

kebijakan yang sama dan tidak dibenarkan melakukan penyimpangan-penyimpangan ataupun melampaui kewenangan yang telah ditetapkan.[15]

3. Dari segi permusyawaratan yang dilakukan di lingkungan Muhammadiyah, maka keterlibatan secara mengikat antara pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah. Sedangkan pimpinan cabang dan ranting ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah cabang dan ranting yang ada di lingkungan Pimpinan Daerah tersebut.[16]
4. Dari segi aturan keanggotaan, ada sejumlah ketetapan yang mengikat dari pimpinan pusat, dan harus dipenuhi oleh seluruh warga atau anggota Muhammadiyah. Disamping itu juga ada hak dan kewajiban anggota Muhammadiyah.[17]
5. Dari segi kewenangan masing-masing pimpinan, ada kesinambungan antara wewenang pimpinan pusat, wewenang pimpinan wilayah, wewenang pimpinan daerah, weenang pimpinan cabang, dan wewenang pimpinan ranting di masing-masing lingkungan atau tingkatannya.[18]

Dari data Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah tersebut dapat dilihat benang merahnya, bahwa kebijakan pimpinan struktural di Muhamadiyah memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat bukan hanya pada pimpinan di bawahnya saja

[15] Ibid, Bab VI, pasal 11, 12, 13, 14, dan 15.
[16] Ibid, Bab IX, pasal 22, 25, 26, 27, 28.
[17] Ibid, Bab V, pasal 8, dan ART pasal 4.
[18] Ibid., pasal 10.

melainkan mengikat pada seluruh warga atau anggota Persyarikatan Muhammadiyah.

C. Pemikiran Ideologis Para Elit Muhammadiyah yang Berpengaruh

Max Weber menyatakan bahwa konflik adalah sebuah realitas sosial yang menyertai kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu haruslah senantiasa disadari agar kita tidak terbuai dalam mimpi yang membayangkan keadaan masyarakat tanpa ketegangan, tanpa percekcokan atau tanpa perang. Konflik itu eksis dan hidup bersama kehidupan sosial masyarakat.[19] Tesis ini berlaku pula pada kelompok sosial seperti organisasi Muhammadiyah. Lebih lanjut disebutkan bahwa konflik itu biasanya juga berujung pada integrasi sosial, demikian pula sebaliknya.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada Bab I (Pendahulan), bahwa secara organisatoris seluruh pimpinan struktural di Muhammadiyah memiliki rasa ketaatan atasan yang tinggi terhadap Persyarikatan. Hal ini terjadi karena Persyarikatan ini telah memiliki Hith-thah serta visi misi yang harus difahami dan ditaati oleh semua pimpinan dan anggota.

Akan tetapi tidak bisa dielakkan adanya potensi pengembangan atau penginterpretasian yang dilakukan oleh

[19]Muhammad Basrawi, *Teori Sosial dalam Tiga Paradigma* (Surabaya: Yayasan Kampusina, 2004), 31. lihat pula dalam, Zainuddin Maliki, *Narasi Agung*, Tiga Teori Sosial Hegemonic. (Surabaya: IPAM), 174-176. Zainuddin Maliki melihat bahwa ada titik singgung antara teori konflik Weber dengan Karl Marx. Bahwa Weber ikut mewarnai sosiologi konflik modern. Dalam menjelaskan tentang peran politik dan agama dia telah berada dalam skema atau logica Marx. Weber lebih memperhatikan Superstruktur darpada Substruktur, sebuah metode pendekatan yang bertolak belakang dengan pendeatan Marx.

masing-masing elit pimpinan Muhammadyah terhadap rumusan-rumusan ideologis yang telah ditetapkan oleh Persyarikatan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat yang lebih bawah. Meskipun hasil pengembangan dan penginterpretasian para elit pimpinan Muhammadiyah tersebut baru pada tataran wacana, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan pemikiran-pemikiran para elit pimpinan Muhammadiyah tersebut ikut mempengaruhi pola pikir umat yang dipimpin, warga Muhammadiyah di bawah.

Merujuk pada Bab yang lalu bahwa yang dimaksud dengan elit pimpinan Muhammadiyah di sini, adalah para pimpinan di tingkat Pusat (PP Muhammadiyah, termasuk Penasehat PP Muhammadiyah), yang memiliki pemikiran-pemikiran keagamaan, dan berpotensi mempengaruhi pemikiran pimpinan di bawahnya maupun warga Muhammadiyah. Berikut ini penulis paparkan empat tokoh pimpinan Muhammadiyah, yakni M. Amin Rais, Ahmad Syafii Maarif, M. Din Syamsuddin, dan Yunahar Ilyas, sebagai berikut:

1. Muhammad Amien Rais.

Riwayat Hidup, dan Pendidikannya.

Muhammad Amien Rais dilahirkan di Surakarta, pada tanggal 26 April tahun 1944. Suhud Rais ayahnya, adalah lulusan Mu'allimin Muhammadiyah dan semasa hidupnya bekerja sebagai pegawai kantor Departemen Agama. Sang ibu, Sudalmiyah, adalah alumni Hogere Inlandsche Kweekschool (HIK) Muhammadiyah, kemudian menjadi aktivis Aisyiyah dan pernah menjabat sebagai ketuanya di Surakarta selama dua puluh tahun. Sudalmiyah juga dikenal sebagai seorang guru yang ulet. Ia mengajar di Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP) Negeri dan Sekolah Bidan Aisyiyah Surakarta. Karena

prestasinya di dunia pendidikan, pada tahun 1985, Sudalmiyah mendapat gelar Ibu Teladan se-Jawa Tengah. Ia juga aktif di partai politik Masyumi ketika masa jayanya pada tahun 1950-an. Kakek Amien Rais, Wiryo Soedarmo, adalah salah seorang pendiri Muhammadiyah di Gombong, Jawa Tengah. Jadi, Amien Rais dilahirkan dari keluarga yang sangat kental warna Muhammadiyahnya. Sewaktu masih duduk di bangku SD, Amien kecil bercita-cita ingin menjadi walikota. Cita-cita ini sangat dipengaruhi oleh kekagumannya pada Muhammad Saleh yang menjabat Walikota Solo waktu itu. Muhammad Saleh adalah seorang muslim yang taat. Ia sering memberikan pengajian di Balai Muhammadiyah Solo. Walikota asal Madura ini sangat dihormati dan dicintai oleh rakyatnya. Namun setelah SMA, cita-cita Amien berubah. Ia ingin jadi duta besar. Mungkin cita-cita ini yang ikut mempengaruhinya untuk memilih jurusan hubungan internasional ketika memasuki perguruan tinggi. Amien Rais menikah pada 9 Februari 1969, dengan seorang gadis yang sudah dikenalnya sejak mereka masih sama-sama kanak-kanak, Kusnasriyati Sri Rahayu.

Pendidikan Amien Rais mulai dari TK sampai SMA, semuanya dijalani di sekolah Muhammadiyah, di kota kelahirannya, Solo. Menurut Amien, karena kecintaan sang ibu pada sekolah Muhammadiyah, maka seandainya ketika itu sudah ada perguruan tinggi Muhammadiyah, pasti ibunya akan memintanya untuk kuliah di Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Sekolah Dasar diselesaikan tahun 1956, kemudian SMP pada tahun 1959 dan SMA pada tahun 1962. Di samping sekolah umum, ia juga mengikuti pendidikan agama di

Pesantren Mamba'ul Ulum. Ia juga pernah nyantri di Pesantren al Islam. Setelah tamat SMA, ibunya menginginkan Amien melanjutkan studinya ke al-Azhar, Mesir. Sementara Ayahnya lebih memilih Universitas Gajah Mada (UGM). Amien tampaknya lebih cocok dengan pilihan sang ayah. Ia kemudian diterima di dua fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Fisipol UGM. Ia lalu berkonsultasi dengan sang ayah, mana fakultas yang lebih baik untuk dipilih. Sang ayah menyerahkan kembali pada Amien untuk memilihnya. Akhirnya ia memilih Fisipol. Mungkin untuk tidak mengecewakan harapan sang ibu, Amien juga kemudian mendaftarkan diri sebagai mahasiswa Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kuliah paralel ini dijalaninya sampai munculnya larangan kuliah ganda oleh pemerintah. Tahun 1968 Amien menyelesaikan studinya di UGM dengan tugas akhir berjudul '*Mengapa Politik Luar Negeri Israel Berorientasi Pro Barat'.*

Kemudian M. Amien Rais menyelesaikan Program Masternya dalam bidang Ilmu Politik di University of Notre Dame, Amerika Serikat, tahun 1974. Dan berhasil memperoleh *Certificate on East European Studies* dari Universitas yang sama. Amien Rais memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Politik dari University of Chicago, Amerika Serikat, tahun 1981. Disertasi Doktornya membahas tentang *Gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir*. Pernah mengikuti Post-Doktoral Program di George Washington University, tahun 1986, dan di UCLA tahun 1988.

Pengalaman di Organisasi

Sejak mahasiswa, ia menjadi aktivis organisasi kemahasiswaan dan pernah menjadi ketua III DPP IMM, dan ketua LDMI HMI Yogyakarta. Pertama kali duduk sebagai anggota PP Muhammadiyah sejak Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta tahun 1985 sebagai Ketua Majlis Tabligh PP Muhammadiyah. Pada Muktamar Muhammadiyah ke-42 di Yogyakarta tahun 1990 duduk sebagai Wakil Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada Muktamar Muhammadiyah ke-43 di Banda Aceh tahun 1995 terpilih sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 1995-2000. Sejak tahun 1995 diangkat menjadi Ketua Dewan Pakar ICMI.

Buku-buku Karyanya.

Buku-buku karya yang telah dihasilkan, antara lain: *Orientalisme dan Humanisme Sekuler* (Ṣalahuddin Press, Yogyakarta, 1983), *Tugas Cendekiawan Muslim* (terjemahan karya Ali Shari'ati, Ṣalahuddin Press, Yogyakarta, 1985), *Cakrawala Islam* (Mizan, Bandung, 1987), *Moralitas Politik Muhammadiyah* (Dinamika, Yogyakarta, 1995), *Visi dan Misi Muhammadiyah* (Pustaka SM, Yogyakarta 1997), *Tauhid Sosial* (Mizan, bandung, 1998), *Membangun Politik Adiluhung: Membumikan Tauhid Sosial Menegakkan Amar Makruf Nahi Munkar* (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan* (Bandung: Mizan, 1997), *Zakat Profesi 20 %*, dalam *majalah Pembaruan*, no. 2, Pebruari 1986 (Pembaruan,

Yogyakarta, 1986), *Keajaiban Kekuasaan* (Bening Budaya-PPSK, Yogyakarta, 1994).[20]

Pokok-Pokok Pikirannya

Pokok-pokok pikiran Amien Rais tentang keislaman banyak diwarnai nilai-nilai kemuhammadiyahan, hal ini dapat dilacak lewat beberapa tulisannya di berbagai buku/penerbitan, maupun ceramahnya, antara lain:

a. Amien Rais mencetuskan 5 (lima) Doktrin Muhammadiyah.

   Sesungguhnya, ada benang merah dalam kehidupan perjuangan Muhammadiyah yang boleh kita sebut sebagai lima doktrin Muhammadiyah. ***Pertama***, doktrin tauhid. Umat Islam tahu bahwa tauhid adalah aksis, poros, sumbu, titik pusat seluruh ajaran Islam daan juga seluruh langkahkita dalam mengisi kehidupan di dunia fana ini. Tauhid bagi Muhammadiyah memang di-injected, cultivate, again and again sepanjang hidupnya. Dan Alhamdulillah sudah *internalized* di dalam setiap warga Muhammadiyah sehingga yang tampak kemudian adalah ciri atau watak setiap orang Muhammadiyah yang sangat sensitive terhadap setiap fenomena yang menjurus kepada syirik.

   Akibatnya. Muhammadiyah mempunyai kepekaan dan kewaspadaan yang sangat tinggi terhadap segenap *taḥayul, bid'ah* dan *ḥurafat.* Dan ini sudah berjalan jauh walaupun di Indonesia sesungguhnya *taḥayul, bid,ah*, dan *ḥurafat* sering kali masih muncul ke permukaan. Misalnya, masih

[20] M. Amin Rais, *Membagun Kekuatan di atas Keberagaman* (Yogyakarta: Pustaka SM), 133. juga lihat, (Surabaya: Ipam, 2005), 167-177.

banyak gedung, jembatan, dan berbagai bangunan lain, yang diresmikan dengan menanam kepala kerbau untuk menyenangkan ruh-ruh halus yang menjaga gedung, jembatan dan bangunan itu.

Allah berfirman dalam Surat Ibrahim (14): 24-25,

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً
كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى ٱلسَّمَآءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِىٓ أُكُلَهَا كُلَّ
حِينٍۭ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾

Artinya: "Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat tayyibah seperti pohon yang indah. Pohon yang indah akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya sepanjang masa sengan izin Tuhannya. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan untuk manusia supaya meraka mau memikirkanya[21]."

Muhammadiyah telah membuktikan bahwa kalimat *ṭayyibah, la ilaha illa Allaah Muhammadur Rasuulullaah* yang meghujam di dada warganya telah menumbuhkan pohon yang indah. Dan pohon yang indah itu berupa 28 juta anggota dan simpatisan, belasan ribu lembaga pendidikan dati taman kanak-kanak hingga sekolah menengah tingkat atas, 159 perguruan tinggi, ratusan lembaga kesehatan, puluhan pondok pesantren, ratusan panti asuhan, ribuan

[21] al-Qur'aan, 14 (Ibrahiim): 24-25.

rumah ibadah, dan lain-lain, yang semua ini terus berkembang. Alhamdulillah, amal saleh Muhammadiyah ini telah memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat sekitar dengan izin Allah. Tentu Muhammadiyah juga memahami bahwa tauhid mempunyai social dimension. Surat al-Maa'uun jelas sekali menyambutkan bahwa seseorang dicap mendusta agama sekalipun dia shalat karena meraka lalai, membengkalaikan tugas-tugas, untuk meolong fakir miskin dan kaum lemah Artinya, bagi warga Muhammadiyah, tauhid tidak berhenti pada akidah, tetapi juga harus diturunkan dan dipraktikkan pada dataran *mu'amalah ma'annas.*

Jadi, *al-'adaalah, al-musaawah baina al-naas* adalah bukti tauhid. Kalau ada *exploitation de l'homme par l'homme* dan ada *istibdad* dalam Muhammadiyah atau dalam masyarakat, itu dikutuk oleh tauhid. Fazlur Rahman sering mengatakan, ayat-ayat Makiyah adalah ayat-ayat tauhid, tetapi sekaligus mengutuk kesenjangan social, mengutuk menumpuknya harta di sebagian tangan, mengutuk pelecehan orang ḍu'afa', dan lain-lain. Dan Ahmad Dahlan sendiri mempunyai formulasi yang berbunyi "*adaa'u musharakaatu allaahi fii jabaruutih wa al-da'watu fi tauhiidi allaahi haqqa".*

Muhammadiayah ingin bersama-sama Islam lainya dalam menegakkan tauhid social, yaitu jangan sampai ada ketidakadilan social dan kezaliman social. Dalam arti, ada orang yang terlalu kaya di satu pihak dan ada orang yang miskin di pihak lain. Ada orang yang memegang perutnya kesakitan karena kekenyangan, tetapi ada orang lain yang memegang

peruntnya kesakitan karena kelaparan. Jadi, tauhid itu penting sekali.

Yang ***kedua,*** Muhammadiyah menggerakkan *enlightenment, pencerdasan, pencerahan,* supaya umat Islam tidak dipencundangi atau dibohongi umat lain, tidak kalah dalam musabaqah, dan terdorong untuk senantiasa merebut masa depan. Untuk itulah, orang Islam harus cerdas, well enlightened. Alhamdulillah, Muhammadiyah sudah mengeluarkan banyak sekali anak Muhammadiyah, dengan ratusan doctor dan master dalam segala macam disipli ilmu. Itu pun masih kurang banyak lagi. Jadi, doktrin Muhammadiyah setelah tauhidnya bersih, akidahnya bersih, tentu juga harus menjadi manusia-manusia yang berilmu. Rasulullah bersabda. *Man aradad dunya fa'alaihi bil'ilmi wa man aradad akhirota fa'alaihi bil 'ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil 'ilmi.* Barang siapa mau menguasai dunia, mak aharus dengan ilmu. Dan barang siapa mau selamat di akhirat maka harus dengan ilmu, dan bagi yang mau sukses dunia-akhirat, juga harus dengan ilmu. Dengan demikian, Ahmad Dahlan sendiri sangat yakin bahwa umat Islam Indonesia hanya dapat hidup layak dan bermanfaat, serta tidak tertinggal dalam kemajuan zaman bilamana tangan kananya memegang al-Qur'aan dan tangan kirinya memegang ilmu pengetahuan. Sehingga, apabila Muhammadiyah sejak dulu sangat bergiat dalam menggalakkan pendidikan dalam artian *ta'lim, tarbiyah, dan tajdid,* maka langkah Muhammadiyah telah sesuai dengan tuntutan agama kita.

Doktrin ***ketiga,*** kita harus mengembirakan atau memobilisasi amal saleh sebanyak-banyaknya. Dengan demikian, di dalam konstitusi Muhammadiyah, tidak boleh ada cabang Muhammadiyah berdiri kalau tidak ada musala, masjid, Bustanul Atfal, atau atau Madrasah Ibtidakiyah. Itu harus ada. Tidak boleh hanya memasang nama Muhammadiyah cabang atau ranting, lalu pengurusannya tidur lagi.

Kelahiran Muhammadiyah 100 tahun yang lalu merupakan langkah terobosan. Mengapa? Karena sebelum Muhammadiyah lahir, umat Islam melaksanakan amal salehnya secara sporadis, terserak-serak, dan berdasarkan inisiatif individual semata-mata. Akan tetapi, dengan kelahiran Muhammadiyah, kita dapat menggelar amal saleh di berbagai bidang kehidupan secara kolektif. Lewat Muhammadiyah, kita dapat melakukan hal-hal yang lebih besar yang tidak mungkin kita lakukan sendiri-sendiri.

Allah berfirman dalam Surat al-Taubah: 71,

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ
وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: ”Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang makruf, mencegah dari mungkar,

mendirikan ṣalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi tahmat Allah. Kepada Allah dan Rasul. Mereka akan diberi rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah maha perkasa lagi Maha bijaksana.[22]"

Sampai-sampai, ada cerita imajiner -lanjut Amien Rais- yang mangatakan besok di akhirat, banyak orang *surprise*, kecele. Ada orang Muhammadiyah sudah masuk surga, ash-habul jannah, yang berjalan-jalan menikmati keindahan surga bertemu dengan orang Islam dari organisasi lain yang sedikit agak suka *bid'ah khurafat*. Lalu, orang Muhammadiyah bertanya, "Antum di dunia kan ikut organisasi itu, kok bisa masuk surga?"kemudian dia balik bertanya,"Antum dulu kan Muhammadiyah ketika hidup di dunia, antum tidak pernah selamatan, tidak memperbanyak tahlilan, tidak memperbanyak khaul, salawatan berlebihan, dan lain-lain, kok juga masuk surga?"

Kemudian mereka melihat banyak sekali orang Islam penghuni surga yang datang dari berbagai penjuru negara, berbagai organisasi, padahal saat mereka di dunia, lain-lain organisasinya, bajunya juga lain. Sehingga, diusulkan ada seminar sehari disurga yang temanya "apa yang meyebabkan mereka bisa menjadi Ash-habul jannah" Kemudian, panitia pengarahnya dari Muhammadiyah, lantas panitia pelaksananya dari al-Ihsan. Tidak perlu uang

[22] al-Qur'ān, 9 (At-Taubah): 71.

karena disurga tidak perlu ada uang sama sekali. Kemudian, makalah sudah dibuat dan dibacakan. Kesimpulanya, orang Islam bisa masuk surga karena ketika di dunia, mereka termasuk *alladhiina aamanuu wa-'amiluu al-shaalihaat*. Oleh karena itu, Muhammadiyah mendorong umat Islam agar setelah dibersihkan, ilmu direbut, kemudian menyebarkan amal saleh sebanyak-banyanya dengan semangat amar ma'ruf nahi mungkar.

Doktrin ***keempat,*** adalah menggalang kerjasama dengan segala pihak dalam kebijakan dan takwa serta menolak kerjasama dengan siapa pun dalam dosa dan permusuhan. Seperti ajaran al-Qur'aan dalam Surat al-ma'idah (5) : 2, *wa ta'aawanuu alaa al-birri wa al-taqwaa wa-laa ta'aawanuu alaa al-litsmi waa al-udwaan wa ittaqu allaah innallaaha shadiid al- 'iqaab.* Dan tolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. Empat dimensi kerja sama Muhammadiyah itu adalah, *Pertama*, kerjasama internal, diantara sesama keluarga besar Muhammadiyah, antara Muhammadiyah dengan Aisyiah, antara Muhammadiyah dengan berbagai organisasi otonomnnya, kerjasama antar majlis dan lembaga dalam Muhammadiyah. Jadi, jangan sampai ada balai kesehatan manjadi rebutan antara Muhammadiyah dengan Aisyiah seperti yang pernah terjadi di suatu daerah. *Kedua*, kerjasama Muhammadiyah dengan seluruh umat Islam tanpa

kecuali. *Ketiga,* kerjasama Muhammadiyah dengan umat beragama lainya dan segenap kekuatan social di tengah masyarakat. *Keempat,* kerjasama Muhammadiyah dengan pemerintah dan ABRI.

Khusus mengenai kerjasama Muhammadiyah dengan pemerintah, perlu ditegaskan bahwa sepanjang sejarahnya, Muhammadiyah bersikap kritis kooperatif kepada pemerintah. Dan tidak pernah mengambil sikap kontraktif-konfrontatif. Menurut istilah pak A.R. Fachruddin (alm), mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammdiyah, kepada pemerintah, kita memang kritis kooperatif, kerjasama *alalbirri wattaqwa*. Kalau ada yang tidak benar, kita koreksi dengan cara bijak, dengan cara yang mau'izhah hasanah, dengan mujadalah yang ihsan. Akan tetapi, kita tidak pernah berkacak pinggang, membusungkan dada, menantang-nantang karena itu bukan kepribadian Muhammadiyah. Dan sebaliknya, juga tidak membungkuk-bungkuk atau tiarap sama sekali karena yang demikian juga bukan kepribadian Muhammadiyah. Pendek kata, kita itu on equal fotting, kemitraan yang equal, sejajar, antara kekuatan-kekuatan didalam masyarakat, termasuk Muhammadiyah, dengan pemerintah kita yang harus kita hormati. Jadi, sesuatu yang penting adalah jangan sampai konfrontasi dengan pemerintah karena tidak produktif. Akan tetapi, kita, warga Muhammadiyah, melakukan critical and cooperated.

Doktrin ***kelima,*** adalah menjahui politik praktis. Doktrin kelima inilah yang memagari Muhammadiyah dari intrusi atau perembesan politik

yang dapat merusak kesehatan dan kesinambungan Muhammadiyah. Sejak zaman penjajahan, zaman revolusi kemerdekaan zaman demokrasi perlementer, zaman demokrasi terpimpin, orde baru hingga zaman reformasi sekarang ini, dan Insya Allah untuk masa-masa mendatang, Muhammadiyah tahu persis apa yang terjadi dalam kehidupan politik sehingga tidak tertelan politik, tetapi bisa menjaga secara bagus dan terus bisa berkembang di dalam memajukan program-program Muhammadiyah tidak melibatkan dirinya dalam percaturan politik praktis yang sering kali menimbulkan konflik dan pertikaian.

Lima doktrin itu cukup luwes untuk menghadapi tantangan-tantangan Muhammadiyah pada masa kini atau maupun masa dating. Bahwa doktrin-doktrin tersebut perlu penajaman dan penyegaran, itu sudah pasti sesuan dengan dinamika zaman yang berkembang cepat. Doktrin doktrin itu harus di asah dan dipertajam lagi agar fleksibel, bisa memacahkan masalah-masalah yang dihadapi. Dan rupanya, lima doktrin tersebut sudah teruji dalam rentang kehidupan Muhammadiyah yang cukup panjang yaitu selama 100 tahun.[23]

b. Amien Rais mencetuskan 2 format pola berpolitik *High Politics dan Low Politics.*

Sesungguhnya terjemahan yang tepat bagi *high politics* bukanlah politik tinggi, tetapi politik yang luhur, adiluhung dan berdimensi moral etis.

[23]*Makalah,* disampaikan pada pengarahan dan Fit and properties, pada Majlis MKKM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Pebruari 2010, di kantor PWM jatim. Lihat juga dalam, Mahsun jayady,

Sedangkan *low politics* bukanlah politik rendah tetapi politik yang terlalu praktis dan seringkali cenderung nista.

Bila sebuah organisasi menunjukkan sikap yang tegas terhadap korupsi, mengajak masyarakat luas untuk memerangi ketidak adilan, menghimbau pemerintah untuk terus menggelindingkan proses demokratisasi dan keterbukaan, maka organisasi tersebut sedang memainkan *high politics*. Saya yakin sebagian masyarakat pasti menyetujui imbauan-imbaan politis yang berdimensi moral dan etis seperti ini.

Sebaliknya, bila sebuah organisasi melakukan gerakandan manuver politik untuk memperebutkan kursi DPR, minta bagian di lembaga eksikutif, membuat kelompok penekan, membangun lobi, serta berkasak kusuk untuk mempertahankan atau memperluas *vested interests*, maka organisasi tersebut sedang melakukan *low politics*. Ungkapan bahwa Muhammadiyah tidak akan ikut bermain politik praktis perlu diterjemahkan dalam konteks itu.

Sampai kapanpun saya yakin Muhammadiyah tidak akan pernah terjun ke dalam kancah *power politics* yang dapat membahayakan kelangsungan hidupnya. Bermain langsung atau sekadar menadi pion kekuatan-kekuatan eksternal dalam gelanggang politik praktis tidak pernah terbayangkan dalam pikiran Muhammadiyah. Alhamdulillah sampai sekarang Muhammadiyah tidak pernah tergoda oleh iming-iming politik yang dapat melupakan misi pokoknya. Sejauh yang saya ketahui, mengapa

Muhammadiyah tidak gampang retak dan tdak mengalami polarisasi di dalam dirinya, di karenakan politik praktis itu dijauhinya. Namun sekaligus disadari bahwa *high politics* tetap harus dijalankan sesuai semboyan amar makruf nahi munkar, menyeru kepada kebajikan dan mencegah keburukan dan kejahatan.

Dalam pandangan Muhammadiyah, sesungguhnya ada hubungan organis antara dakwah dan politik. Dalam banyak hal kelancaran dakwah dan shiar Islam ditentukan oleh payung politik yang ada. Bila payung plitik tidak melindungi kelancaran dakwah, maka organisasi seperti Muhammadiyah dapat merasa kepanasan atau kedinginan. AR (sesepuh Muhammadiyah) pernah mengatakan bahwa berhadapan dengan suprastruktur, Muhammadiyah tidak pernah menjilat tetapi juga tidak pernah membusungkan dada dan berkacak pinggang.

Saya tidak sependapat dengan pendapat seseorang (Sulastomo) yang mengatakan: ...di dalam rangka penataan nasional, apakah justru tidak sebaiknya kita memegang disiplin bekerja sesuai dengan sifat dan fungsi organisasi kita. Yang orsospol ya bicaralah sebanyk-banyaknya soal politik, sedang yang organisasi sosial silahkan beramal sebanyak-banyaknya. Seklebat pandangan ini bagus, tetapi bermasalah, mengapa? Karena kiprah sosial, pendidikan dan dakwah pada umumnya, dapat menjadi bebas dan ceria kalau tidak dirintani oleh halangan-halangan politik. Sebaliknya kiprah tersebut menjadi ciut dan tidak

produktif bila interfensi politik terlalu mendalam. Ini berarti Muhammadiyah harus pandai-pandai memainkan *high politics* agar keputusan-keputusan politik yang bersifat nasional benar-benar bermuatan moral dan etis. Bila keputusan-keputusan politik yang dibuat sampai menggerus kipra dakwah, pendidikan, sosial dan budaya yang sedang dielar, tentu akibatnya dapat kita bayangkan.[24]

Dalam soal upaya sebagian umat Islam yang ingin mendirikan negara Islam di negeri ini, saya menanggapi: apa artinya Negara Islam kalau kemaksiatan, kejahatan, dan ketidak adilan merajalela? oleh sebab itu, Negara bukan simbolik islam tetapi Islam sebagai landasan etik para elit kekuasaan, itu yang penting untuk diperjuangkan.[25]

c. Amien Rais, mncetuskan *tauḥid sosial* sebagai upaya Revitalisasi Muhamadiyah.

Pada Muktamar Muhammadiyah ke-43 di Banda Aceh tahun 2005, Amien Rais mencetuskan gagasan baru yang ia sebut *tauḥid sosial* dalam kaitannya dengan upaya merevitalisasi Muhammadiyah, karena adanya anggapan bahwa Muhammadiyah mengalami stagnasi khususnya dalam bidang *tajdid*. Sesungguhnya yang dimaksud tauhid sosial adalah dimensi sosial dari tauhidullah. Karena Tauhidullah itu menjadi aqidah ummat Islam, maka kemudian ada yang menyebut tauhidullah itu dilihat dari segi vertikalnya sebagai

[24]M. Amin Rais, *Moralitas Politik Muhammadiyah* (Yogyakarta: Dinamika, 1995), 43-45.
[25]Fajlurrahman Urdi, *Aib Politik Muhammadiyah* (Yogyakarta: Juxtapose, 2007), 24-25.

tauhid aqidah. Adapun tauhidullah dilihat dari segi dimensi horizontalnya dipahami sebagai Tauhid Sosial.

Dalam kaitan dengan tauhid sosial ini, telah menunggu di hadapan umat Islam terutama organisasi Muhammadiyah agenda permasalahan kemanusiaan yang menjadi wilayah kerja tauhid sosial itu, misalnya perburuhan, pemberdayaan masyarakat, kesadaran etis dalam kehidupan bersama, perusakan lingkungan hidup, korupsi, kolusi, nepotisme, problem pluralitas agama-agama, hak-hak konsumen, dan lain-lain.[26]

2. Achmad Syafii Maarif

Riwayat Hidup dan Pendidikannya.

Ahmad Syafii Maarif lahir di Sumpur Kudus, Sawah Lunto, Sijunjung, Sumatera Barat, pada tanggal 31 Mei 1939. Sejak kecil telah bergumul dengan pengetahuan agama Islam di tengah tradisi Minangkabau yang kental dengan lingkungan budaya 'Adat Bersendi Shara', Shara' bersendi Kitabullah. Pengetahuan agama dan tradisi keagamaan ia terimanya dari orang tuanya, lingkungan Muhammadiyah serta tradisi keislaman kampung kelahirannya sendiri. Syafii menikah dengan Nurkhalifah dan dianugerahi seorang putera bernama Mohammad Hafiz.

Ketika berusia 7 tahun, Syafii memasuki Sekolah Rakyat/Madrasah Ibtidaiyah di Sumpur Kudus dan diselesaikan pada tahun 1974. Kemudian

[26] Mahsun Jayady,35-138.

melanjutkan ke Madrasah Mu'allimin Lintau, Sumatera Barat pada tahun 1953. dari situ kemudian dia hijrah ke Yogyakarta dan masuk ke Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta yang diselesaikan pada tahun 1956. Kemudian masuk Universitas Cokroamnoto Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Jurusan Sejarah, dan lulus sebagai Sarjana Muda pada tahun 1964. Lalu masuk ke IKIP Negeri , Fakultas Keguruan dan Ilmu Sosial (FKIS), dan memperoleh gelar sarjana tahun 1968. Syafii melanjutkan kuliah ke Ohio University, Athens, Amerika Serikat, memperoleh gelar Master tahun 1980. Kemudian mendapat gelar Doktor dari The University of Chicago, Amerika Serikat, tahun 1982 dengan disertasi berjudul *'Islam as the Basis of State: A Study of Islamic Political Ideas as Reflected in the Constituent Assembly Debates in Indonesia'.* Dan Pada tahun 1997 ia dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam Filsafat Sejarah, pada IKIP Yogyakarta.

Pengalaman Organisasi.

Aktifitas Achmad Syafii Maarif dalam kepemimpinan Muhammadiyah, dimulai dari anggota Majlis Pustaka PP Muhammadiyah (1965-1968), kemudian berturut-turut menjadi anggota Majlis Tabligh PP Muhammadiyah (1985-1990), Pimpinan Redaksi Suara Muhammadiyah (1988-1990), Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah (1990-1995). Kariernya mencuat ketika Muktamar Muhammadiyah ke-43 di Banda Aceh, masuk dalam jajaran 13 anggota PP Muhammadiyah, yang

kemudian mengantarkan menjadi Wakil Ketua PP Muhammadiyah (1995-2000). Kemudian diangkat menjadi Ketua PP Muhammadiyah (1998-2000) menyalesaikan kepemimpinan Amin Rais yang mengundurkan diri karena aktifitasnya di dunia politik. Dan pada Muktamar Muhammadiyah ke-44 di Jakarta tahun 2000, Syafii terpilih sebagai Ketua PP Muhammadiyah (2000-2005).[27] Dan pada Muktamar Muhammadiyah ke- 45 di Malang tahun 2005, Syafii Maarif ditetapkan sebagai penasehat PP Muhammadiyah bersama Amin Rais (2005-2010).[28]

Buku-buku Karyanya

Buku-buku karya yang telah dihasilkan, antara lain : *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1994), *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante* (Jakarta : LP3ES, 1993), *Membumikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), *Islam dan Politik : Upaya Membingkai Peradaban* (Cirebon : Dinamika, 1999), *Independensi Muhammadiyah di Tengah Pergumulan Pemikiran Islam dan Politik* (Jakarta: Cidesindo, 2000), *Islam Kekuatan Doktrin dan Kegamangan Umat* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1997), *Muhammadiyah dan Pemahaman Kreatif terhadap Islam* (dalam Sukriyanto AR dan Munir Mulkhan, ED),

[27]M Yusuf Yunan & Yusron Rozak, & Sudarnoto Abdul Hakim (ed). *Ensiklopedi Muhammadiya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, bekerja sama dengan Majlis Pendidikan dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, 2005), 213-214.

[28]*Hasil Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 45 di Malang*, 2005.

Pergumulan Pemikiran dalam Muhammadiyah (Yogyakarta: Sipress, 1990). [29]

Pokok-pokok Pikirannya

Pokok-pokok pikiran Syafii Maarif, hampir meliputi berbagai persoalan dalam kehidupan umat manusia khususnya yang menyangkut umat Islam di Indonesia. Sebagian merupakan peneguhan ideologi keagamaan, tetapi sebagian juga merupakan pengembangan atau interpretasi ideologis dalam ranah wacana pemikiran yang dalam batas-batas tertentu menimbulkan pro dan kontra di kalangan warga Muhammadiyah. Pemikiran-pemikiran Syafii Maarif dapat dilacak di berbagai tulisan maupun ceramahnya di berbagai forum. Berikut ini sebagian dari padanya:

a. Islam Inklusif (Islam dan Keindonesiaan).

Robert Hefner dalam suatu wawancara menanggapi hasil Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang 2005, dia berkomentar bahwa Syafii Maarif telah mengantarkan Muhammadiyah menjadi penjaga gawang mainstream Islam Indonesia yang moderat dan inklusif daripada pendahulu-pendahulunya.[30] Ada

[29]Ghozali, Abd. Rohim Ghozali & Daulay, Partaonan, Saleh. *Refleksi 70 Tahun Ahmad Syafii Maarif, Cermin Untuk Semua*. Jakarta: Syafii Institut, 2005, 3-12. juga lihat dalam, [29] Rais, M. Amin. *Membagun Kekuatan di atas Keberagaman*. Yogyakarta: Pustaka SM, 133. juga lihat, Bahrussurur-Iyunk. *Teologi Amal Saleh: Membongkar Nalar Kalam Muhammadiyah Kontemporer*. Surabaya: Ipam, 2005, 167-177. dan juga dalam, Rais, M. Amin. *Muhammadiyah & Reformasi*. Yogyakarta: Aditya Media, bekerjasama dengan Majlis Pustaka PP Muhammadiyah, 2000, 27-35.

[30]Siti Ruhaini Dzu Hayatin, " Islam Kritis Ahmad Syafii Maarif (Benar di jalan yang sesat, atau tersesat di jalan yang benar)", dalam *Jurnal Maarif*, Arus

dua hal yang krusial yang menjadi inti pemahaman keberagamaan yaitu kritik tajam terhadap keterjebakan umat Islam terhadap klaim "kebenaran" dan "kesesatan" keyakinan yang diasumsikan sebagai sesuatu yang absolut, given, dan ahistoris. Pada dataran normatif, wahyu harus dipercayai sebagai kebenaran absolut dan given, namun pada dataran historis-sosiologis kebenaran tersebut menjadi relativ karena telah menjadi bagian dari pemikiran manusia, apakah dia seorang ulama besar atau seorang awam beragama. Relativitas pemikiran manusia erupakan konsekwensi logis produk buaya (cultural production) dari perbedaan pengalaman hidup manusia.

Proses pembelajaran agamanya dan norma-norma sosial tidak pernah steril dari perbedaan jenis kelamin, dan peran gendernya, latar belakang budaya, sosial ekonomi, orientasi politik, dan lain sebagainya. Secara sosiologis dibuktikan bahwa pada setiap konteks sosial (keluarga, komunitas, negara) akan melahirkan pandangan hidup yang khas dan berbeda dari kelompok lainnya. Relativias nalar dan faham manusia merupakan bagian dari kodrat manusia yang menjadi dinamisator bergeraknya roda perubahan di dunia. Relativitas menjadi dasar bagi kemajemukan yang memberikan warna dalam kehidupan manusia, inilah yang dimaksud

pemikiran Islam dan sosial) Jakarta: Maarif Institut, Maarif adisi 4, no. 1-Juli 209, hal . 83.

dengan konsep *Islam Keindonesiaan dan Kemanusiaan.*

Inti masalahnya ialah bagaimana keberagaman tersebut dimaknai dan diposisikan dalam keyakinan yang *terejimintasi* secara historis. Di sisi lain, selalu ada tarik menarik antara dimensi universalitas dan lokalitas pada agama dakwah atau agama misi seperti Islam dan kristen yang lahir di wilayah timur tengah dan menyebar ke wilayah-wilayah budaya non timur tengah. Universalisasi Islam seringkali berakhir dengan jebakan Arabisme. Sebaliknya kontekstualisasi Islam pada budaya lokal juga rentan terhadap resapan residu tradisi yang feodalis atau paternalistik. *Ruhaini*, mencermati pemikiran Ahmad Syafii Maarif dengan mengatakan: dengan latar belakang sejarah, Syafii turut mempengarhi gaya bertutur dan pendekatan yang lebih kultural katimbang teologis-politis. Dalam buku Islam Keindonesiaan dan Kemanusiaan, makin nampak pula gaya bertutur khas 'minangkabau' yang seminim mungkin menggunakan jargon-jargon akademis. Tentu dmaksudkan agar pesan-pesan dalam buku tersebut dapat sampai pada semua khalayak, termasuk kelompok puritanis dan revivalis yang sering alergi dengan hal-hal yang berbau asing seperti hermeneutika, pluralisme, multikulturalisme, dan sejenisnya.[31] Bahkan gagasan pemikiran Ahmad Syafii Maarif ini

[31] Ibid,, 80.

sedang berhadapan di internal Muhammadiyah degan gerakan yang mengarah ke puritanisme yang dimotori oleh aktifis alumni timur tengah dan Malaysia.

Kita wajib malu mendapati sumbangan dari masyarakat (bukan atas nama negara ataupun lembaga-lembaga donor) negara-negara sekuler seperti Amerika, Eropa, dan Australia, yang jumlahnya lebih banyak dari sumbangan masyarakat muslim sendiri di dalam negeri maupun luar negeri ketika tsunami meluluh lantakkan Aceh. Apa sesungguhnya yang menggerakkan mereka untuk menghibahkan sebagian harta mereka pada orang-orang yang tidak dikenalnya, dan bahkan tidak diketahui tempat tinggalnya. Yang mereka tahu, para korban berada di Indonesia dan beraga Islam. Nyatanya mereka tidak termakan oleh propaganda pemerintahan Presiden Bush yang anti Islam.

b. Piagam Jakarta dan Khilafah Islamiyah

Kaum Intelektual muslim sejak awal 1980an tidak berminat mengungkit Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila telah cukup memadai menampung cita-cita umat Islam dalam bernegara. Muhammadiyah dan NU yang mewakili arus besar umat Islam di Indonesia tidak lagi memperjuangkan Piagam jakarta. Mari kita lupakan Piagam jakarta karena pendekatan legal-formal tidak efektif lantaran buta terhadap realitas sosiologis bangsa. Maka sebaiknya kedua organisasi besar Islam itu lebih berjuang untuk

tujuan-tujuan fundamental shri'ah, yaitu keadilan, persamaan, dan persaudaraan abadi. Dasar dan azaz shari'ah yang menjadi matra tindakan atau politik ialah kemaslahatan manuia di dunia dan akhirat. Maka konsekwensinya menolak kedua organisasi ini (NU dan Muhammadiyah) menolak konsep Khilafah Islamiyah, yang berarti bersebrangan dengan sikap MMI, FPI, dan Hizbuttahrir Indonesia (HTI). Penolakan konsep Khilafah Islamiyah didasarkan pada sikap menutup mata terhadap praktik kekuasaan yang berdarah. Sistem kekhilafahan merujuk pada era pasca Nabi sehingga secara teori merupakan hasil pemikiran para yuris untuk menjaga dan melindungi kepemimpinan formal komunitas muslim. Konsep Khilafah tidak punya tempat berpijak dalam al-Qur'aan dan Sunnah Nabi.[32]

Sikap Islam yang terbuka dan toleran tidak bisa lepas dari penerimaan demokrasi. Maka keragaman agama dan budaya tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip kebebasan yang menjadi pilar demokrasi. Tiak ada dasar yang memaksa orang untuk memeluk agama. Masalah ian adalah masalah pilihan, seperti disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 256 :

[32]Haryatmoko, "Islam Terbuka, Bersahabat, dan Dinamis", dalam, *Jurnal Maarif*, Arus pemikiran Islam dan sosial) Jakarta: Maarif Institut, Maarif adisi 4, no. 1-Juli 209, .45.

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

Artinya: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.[33]"

Ajaran tentang keragaman dan pluralits dalam Islam telah ditegaskan dalam al-Qur'an surat Arrum ayat 22 :

وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦ خَلۡقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱخۡتِلَٰفُ أَلۡسِنَتِكُمۡ وَأَلۡوَٰنِكُمۡۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّلۡعَٰلِمِينَ ٢٢

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.[34]"

[33] al-Qur'a>n, 2 (al-Baqarah): 256.
[34] al-Qur'ān, 30 (Ar-Rūm): 22.

Kultur toleransi mendasarkan pada diktum tidak ada paksaan dalam agama dan Nabi melarang memaksa pihak lain untuk beriman, dengan demikian al-Qur'aan telah menguatkan adanya keberbagian suku, bangsa, agama, bahasa, dan sejarah. Gelombang kekerasan yang menodai hubungan Islam dan kristen di Indonesia akhir-akhir ini membawa orang mendambakan kembali persahabatan Mohammad Natsir dengan kasimo, H. Johanes, Leimena, yang sekarang tinggal kenangan. Hilangnya memori manis itu mungkin karena integritas tokoh-tokoh dewasa ini lemah; Godaan politik kekuasaan sekarang ini lebih dahsyat daripada dulu. Menganggap diri paling benar cenderun menutup diri. Sikap memonopoi kebenaran adalah sumber kekacauan karena menutup pintu toleransi.[35]

3. Muhammad Din Syamsuddin.

Riwayat Hidup dan Pendidikannya

Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, lahir di Sumbawa Besar, pada tanggal 31 Agustus tahun 1958, dari pasangan Syamsuddin Abdullah dengan *Rohana*. Dien memulai sekolahnya di Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah NU di daerah kelahirannya, masing-masing tamat tahun 1968 dan 1972. setelah nyantri di pondok Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur (1975), hijrah dan melanjutkan belajar di Jakarta, di Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Jakarta (mendapat gelar BA /sarjana muda tahun

[35]Ibid., 46-47.

1979, dan sarjana tahun 1982). Kemudian dengan Beasiswa dari Fullbright, melanjutkan studi ke University of California Los Angeles (UCLA), Amerika Serikat hingga meraih gelar Doktor (1991). Menikah dengan puteri pengusaha asal Maninjau Sumatera Barat bernama Fira Beranata, dan dikaruniai tiga orang putera.

Pengalaman Organisasi

Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, yang kemudian lebih populer disapa Din Syamsuddin, dikenal sebagai orang yang hobi berorganisasi. Sejak di kampung halamannya, Din yang berbasis keluarga Nahdhiyyin ini pernah menjadi ketua IPNU (Ikatan Pelajar Nahḍtul Ulama) cabang Sumbawa. Setelah di Jakarta Dien adalah aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dari tingkat Komisariat hingga Ketua DPP (sementara) dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah (1989-1992). Pada Muktamar Muhammadiyah ke-44 tahun 2000 di Jakarta menjadi Wakil Ketua PP Muhammadiyah periode 2000-2005. dan pada Muktamar ke-45 tahun 2005 di Malang terpilih menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2005-2010. Di bidang akademik, Din Syamsuddin pernah menjadi Ketua Program Pascasarjana Studi Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian dikukuhkan sebagai Guru Besar tetap dalam bidang pemikran Politik Islam IAIN Syarif Hidayatullah pada bulan Februari 2001.

Selain berkhidmat di Muhammadiyah, Dien Syamsuddin pernah aktif di Harmoko, dan wakil Sekretaris Jendral (1998-1999) zaman kepemimpinan Akbar Tanjung. Pernah menjadi Wakil Dewan Penasehat ICMI Pusat (1995-2000), Menjadi anggota Dewan Riset Nasional , anggota Dewan Kehormatan PWI, dan Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (BINAPENTA) Departemen Tenaga Kerja RI (1998-2000). Pernah menjadi Sekretaris Umum (sekretaris jendral) Majlis Ulama Indonesia Pusat. Din juga sudah melakukan kunjungan ke beberapa negara dalam kaitannya dengan misi keagamaan dan perdamaian, tidak kurang 20 negara di dunia telah dikujunginya.

Buku-buku Karyanya.

Buku-buku karya yang telah dihasilkan antara lain: *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani* (Jakarta: Logos, 2002), *Muhammadiyah dan Rekayasa Politik Orde Baru: Akrulisasi Politik Amar Makruf Nahi Munkar*, dalam M. Din Syamsuddin (ed), Muhammadiyah Kini dan Esok (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), *Muhammadiyah dan Nahḍatul Ulama: Mengikhtiarkan Wawasa Sosial Politik Baru*, dalam Yunahar Ilyas, dkk.(ed), Muhammadiyah dan NU : Reorientasi Wawasan Keislaman (Yogyakarta : YPPI UMY, LKPSM NU, dan PP Al-Muhsin, 1993), Religion and Politic in

Islam, The Case of Muhammadiyah in Indonesia's New Order (Jakarta: IPS, 2000).[36]

Pokok-pokok Pikirannya

Pokok-pokok pikiran Dien Syamsuddin banyak disampaikan di beberapa forum seminar maupun diskusi di beberapa tempat, dan juga di beberapa bukunya. Berikut ini beberapa diantaranya :

a. Negara dalam Perspektif Islam.

Satu kenyataan bahwa konsep negara adalah konsep modern yang datang dari dunia barat, yang tidak ada presedennya dalam sejarah Islam. Dalam perspektif barat, negara disebut *nation state* (negara bangsa) terbentuk atas dasar solidaritas kebangsaan. Negara adalah fenomena modern yang terbentuk sebagai manifestasi nasionalisme yang melanda dunia pada paruh abad ke-20. Kendati Islam mengakui eksistensi bangsa dan suku bangsa, karenanya wawasan kebangsaan tidak bertentangan dengan wawasan keislaman, namun bentuk ekstrim dari rasa kebangsaan (nasionalisme) yang mendasari pelembagaan negara-bangsa dapat menjadi persoalan jika dihadapkan dengan universalisme Islam. Hal ini menjadi alasan bagi mereka yang menolak konsep negara-bangsa, dan kemudian mencari bentuk negara dalam khazanah sejarah

[36]M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani* (Jakarta: Logos, 2002), 263. juga lihat dalam, Bahrussurur-Iyunk. *Teologi Amal Saleh: Membongkar Nalar Kalam Muhammadiyah Kontemporer* (Surabaya: Ipam, 2005), 167-177. dan lihat pula dalam, Ahmad, Nur & Tanthowi, Pramono, U. *Muhammadiyah Digugat: Reposisi di Tengah Indonesia Yang Berubah* (Jakarta: Kompas, 2000), 265-270.

Islam. Dengan uraian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak cukup kuat untuk menunjukkan adanya konsep tentang negara dalam Islam.

Dalam pemikiran politik Islam, pembicaraan tentang negara dan pemerintahan oleh para ulama politik mengarah kepada dua tujuan. *Pertama*, menemukan idealitas Islam tentang negara atau pemerintahan (menekankanaspek teoritis dan formal), yaitu mencoba menjawab pertanyaan : 'apa bentuk negara menurut Islam'. Kedua, melakukan idealisasi dari perspektif Islam terhadap proses penyelenggaraan negara atau pemerintahan (menekankan aspek praksis dan substansial), yaitu mencoba menjawab pertanyaan : *''bagaimana isi negara menurut Islam'*. Pendekatan pertama bertolak dari anggapan bahwa Islam memiliki konsep tertentu tentang negara dan pemerintahan, sedangkan pendekatan kedua bertolak dari anggapan bahwa Islam tidak membawa konsep tertentu tentang negara dan pemerintahan, tetapi hanya membawa prinsip-prinsip dasar berupa nilai etika dan moral.[37]

b. Membangun Umat Tengahan

Dalam perkembangan pemikiran klam klasik, umat Islam memiliki pengalaman sejarah yang panjang. Bahwa perbedaan pandangan dalam dunia kalam zaman klasik sedemikian beragam, sampai-sampai memunculkan stigma negativ terhadap Dinul Islam ini. Ketia kaum

[37] Ibid, 42-43.

shi'i menampilkan performannya sebagai firqah yang paling benar lantaran berkaitan dengan ahlulbait, sebagai keluarga yang elit dan mulia. Tetapi pada saat yang sama muncul pula kelompok atau firqah yang menyeberang, kemudian memposisikan diri secara vis avis bahwa teologi shi'i adalah sesat bahkan telah keluar dari Islam. Maka kelompok atau firqah inipun mengklaim bahwa dirinya merasa yang paling benar

Umat (ummah), meminjam istilah Ali Shari'ati, [38] adalah ungkapan pengertian tentang kumpulan orang, di mana setiap individu sepakat dalam tujuan yang sama dan masing-masing saling membantu agar bergerak ke arah tujuan yang diharapkan, atas dasar kepemimpinan yang sama. Dengan pengertian ini maka ayat al-Qur'ān surat Ali Imran: 104 :

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya : ''Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan

[38]Ummah Ai Shari'ati, dalam, Dawam Raharjo: Ensiklopedi al-Qur'a>n, Tafsir Sosial Berdasarkan konsep-konsep Kunci. Jakarta: Paramadina, 2002, 486. dalan keterangan Ali Shari'ati lebih lanjut disebutkan bahwa penyebutan ummah mengharuskan adanya Imamah. Imamah adalah ungkapan tentang pemberian petunjuk kepada ummah ke tujuan itu. Bagi Shari'ati, tidak ada sebutan Ummah tanpa adanya Imamah. Dan ini menjadi landasan bagi pembicaraan tentang relasi/hubungan antara negara dan masyarakat.

mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.[39],,

Oleh kalangan Muhammadiyah dianggap salah satu yang mendasari berdirinya persyarikatan Muhammadiyah, maka kata 'Ummah' pada ayat tersebut dimaknai sebagai sekumpulan orang yang bekerjasama dan memiliki tujuan yang sama di bawah lembaga kepemiminan yang mantap. Istilah modernnya adalah apa yang dikenal dengan nama 'Organisasi' . oleh sebab itu Muhammadiyah sebagainama organisasi, merupakan *pengejawantahan* dari makna ayat tersebut. Karena keberadaan anggota Muhammadiyah pasti memiliki keragaman (al-Tanawwu') dalam pemikiran keagamaan baik yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, maupun politik, maka Muhammadiyah perlu membuat instrumen pemersatu yang disebut *landasan Ideologi*. Sungguhpun demikian, rumusan-rumusan yang terdapat dalam landasan ideologi itu masing memungkinkan terjadinya pengembangan pemahamannya atau penafsiran-penafsirannya.

4. Yunahar Ilyas.

Riwayat Hidup dan Pendidikannya.

Yunahar Ilyas, dilahirkan di Bukit Tinggi, pada tanggal 22 September 1956. putera dari Ilyas dan Ibu Syamsidar. Gelar Sarjana Muda (BA) Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam

[39] al-Qur'a>n, 3 (Ibrahi>m): 104.

Bonjol, Padang tahun 1978. Sarjana Lengkap (Drs) Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam (IAIN) Imam Bonjol, Padang tahun 1984. Mendapat gelar Lc. dari Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Imam Muhammad Ibnu Su'ud, Riyadh, Saudi Arabia, tahun 1983. Gelar Magister Agama, dan Doktor, diperoleh dari Pascasarjana IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, masing-masing tahun 1996 dan 2004. Pada tanggal 18 Nopember 2008 dikukuhkan sebagai Huru Besar Ulumul Qur'ān, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Pengalaman Mengajar dan Organisasi

Di samping mengajar di Strata satu Fakultas Agama Islam (FAI) dan Magister Studi Islam (MSI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), juga pernah menjadi Dekan FAI, Sekretaris, dan kemudian menjadi Wakil Kepala Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPII) di almamater yang sama. Di luar kampus, menjabat sebagai Direktur Pondok Pesantren Mahasiswa Budi Mulia, yaasan Shalahuddin Yogyakarta. Aktif memberikan ceramah agama Islam baik di dalam maupun di luar negeri. Menjadi ketua PP Muhammadiyah hasil Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang tahun 2005, untuk periode 2005-2010. di samping itu juga sebagai ketua Majlis Ulama Indonesia (MUI) pusat, periode 2005-2010.

Buku-buku Karyanya

Buku-buku yang telah dihasilkan antara lain: *Cakrawala al-Qur'ān, Tafsir Tematik* (Yogyakarta: Itqan Pulishing, 2009), *Kuliah Aqidah Islam* (LPPI Yogyakarta), *Feminisme dalam kajian Tafsir Klasik dan Kontemporer* (Pustaka Pelajar, Yogyakarta), *Kuliah Akhlaq* (LPPI, Yogyakarta), *Akhlaq Masyarakat Islam* (MTDK Yogyakarta), *Kisah Para Rasul* (serial di Suara Muhammadiyah, Yogyakarta), *Kesetaraan Gender dalam al-Qur'ān, studi pemikiran para mufasir* (LABDA Press, Yogyakarta). Di samping itu ada tiga karya editing: *Muhammadiyah dan NU, Reorientasi Wawasan Keislaman* (LPPI Yogyakarta), *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadits* (LPPI Yogyakarta), dan *Pendidikan Islam Perspektif al-Qur'ān* (LPPI Yogyakarta). [40]

Pokok-pokok Pikiranya

Pokok-pokok pikiran Yunahar Ilyas, dapat ditelusuri lewat buku-buku tulisannya maupun ceramah-ceramahnya di berbagai forum. Berikut ini penulis ketengahkan sebagian daripadanya:

a. Islam dan Pluralitas Agama.

Islam adalah satu-satunya agama yang diturunkan dan diridhai Allah SWT. Untuk umat manusia. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, niscaya tidak akan diterima oleh

[40]Yunahar Ilyas, *Cakrawala al-Qur'a>n: Tafsir Tematis Tentang Berbagai Aspek Kehidupan*. (Yogyakarta: Itqan Publishing, 2009), 329-230. juga lihat dalam penulis yang sama, *Feminisme dalam kajian Tafsir Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Allah SWT. Doktrin ini ditegaskan dalam dua ayat sebagai berikut:

إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ ۗ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿١٩﴾

Artinya: ”Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.(QS. Ai Imran: 19).[41]”

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: ”Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.(QS. Ali Imran: 85).”

[41] al-Qur’a>n, 3 (Ali- Imra>n): 19.

Seluruh nabi dan rasul yang dutus leh Allah SWT. Membawa agama yang sama yaitu Islam. Dengan demikian seluruh nabi-nabi dan para pengikutnya adalah muslimun. Tatkala orang-orang yahudi dan nasrani berebut mengklaim bahwa Nabi Ibrahim adalah pemeluk agama mereka, Allah membantahnya dan mengatakan Ibrahim itu muslim.

مَا كَانَ إِبْرَٰهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٦٧﴾

Artinya: ”Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri (kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. (QS. Ali Imran: 67).[42]”

Nabi Ibrahim dan Nabi Ya’qub telah memesankan kepada anak-anaknya untu menjadi orang-orang islam.

وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَٰهِـۧمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَٰبَنِىَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾

Artinya: ”Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya`qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini

[42] al-Qur’ān, 2 (al-Baqarah): 132.

bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam".(QS. al-Baqarah: 132).[43]”

Perbedaan ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul dari masa ke masa hanyalah dari aspek shari’ah, bukan dari aspek aqidah dan aspek informasi tentang alam semesta.

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

Artinya: ”Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.(QS. al-Maidah: 48).[44]”

Sebagai Nabi dan Rasul terakhir, Nabi Muhammad SAW. Membawa shari’at (baca: agama) yang telah disempurnakan dan dinyatakan oleh Allah sebagai agama yang diridhai-Nya untuk seluruh umat manusia.

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا

Artinya: ”Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni`mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.(QS. al-Maidah: 3).[45]”

[43] al-Qur’ān, 2 (al-Baqarah): 43.
[44] al-Qur’ān, 5 (al-Māidah): 48.
[45] al-Qur’ān, 5 (al-Māidah): 3.

Sebagai konsekuensi dari doktrin bahwa hanya Islamlah satu-satunya agama yang diridhai Allah SWT. Maka tentu saja agama-agama lain yang dianut dan diyakini oleh sebagian umat manusia ditolak kebenarannya, bukan keberadaannya. Keberadaannya tidak ditolak karena Allah tidak mau memaksa manusia untuk memeluk agama Allah. Islam mengajarkan kebebasan memilih agama ini. Hanya saja jika manusia memilih agama selain Islam, nanti di akherat akan merugi.

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

Artinya: ”Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.(QS. al-Baqarah: 256).[46]”

Jika kebenaran agama-agama selain Islam ditolak, lalau bagaimana kita memahami ayat berikut ini?

[46] al-Qur’ān, 2 (al-Baqarah): 256.

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَٰرَىٰ وَٱلصَّٰبِـِٔينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

Artinya: ”Sesungguhnya orang-orang mu'min, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.(QS. al-Baqarah: 62).[47]”

Dalam tafsir Ibnu Katsir (1: 132) disebutkan bahwa ayat ini turun dilatar belakangi oleh pertanyaan Salman al-farisi kepada Rasulullah SAW. Tenang teman-temannya dalam agama yang dipeluknya sebelum Islam. Teman-teman Salman itu mengerjakan ibadah ṣalat dan puasa menurut shari’at yang berlaku sebelum Nabi Muhammad SAW. Diutus. Setelah Salman selesai memuji teman-temannya, Rasulullah SAW Mengatakan: Hai Salman, mereka termasuk penghuni neraka. Timbul pertanyaan pada diri salman, kenapa harus msuk neraka padahal merekaberiman dan menjalankan shari’at. Kegalauan salman ini dijawab Allah dengan menurunkan ayat tersebut di atas.

[47] al-Qur’ān, 2 (al-Baqarah): 62.

Andai kata orang-orang yahudi dan nasrani benar-benar mengimani dan mengikuti ajaran taurat dan injil sebagai kitab suci mereka, tentu mereka beriman dengan kerasulan nabi Muhmmad SAW. Yang telah diberitakan kedatangannya dalam dua kitab suci tersebut. Andaikata orang-orang yahudi dan nasrani yang beriman kepada Allah dan har akhir tetapi tidak mau beriman kepada nabi Muhammad SAW. Maka mereka tidak termasuk yang mendapatkan janji Allah dalam ayat tadi (mendapat ganjaran atas iman dan amal salehnya), karena *"klaim keimanan"* mereka tidak benar dengan menolak keasulan Nabi Muhammad SAW. Apakah keimanan orang-orang yahudi dan nasrani sekarang ini sesuai dengan kriteria keimanan yang dituntunkan oleh al-Qur'ān yang di dalamnya adalah tentang kerasulan nabi Muhammad SAW ?.

Ahlul Kitab (yahudi dan nasrai) yang keimanannya tidak membenarkan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tidak termasuk dalam surat al-Baqarah ayat 62, sehingga di akherat kelak mereka tidak termasuk golongan yang selamat dari api neraka.[48]

a. Jihad dan Qital.

Secara etimologis istilah Jihad berasal dari kata *Jaahada-Yujaahidu* yang berarti mencurahkan segala kemampuan (*Badzlu al-Wus'i*) untuk mencapai tujuan. Bila istilah jihad dikaitkan dengan fi sabilillah, berarti

[48]Yunahar Ilyas, *Carawala al-Qur'an: Tafsir Tematis Tentang Berbagai Aspek Kehidupan*(Yogyakarta: Itqan Publishing, 2009), 49-54.

mencurahkan segala kemampuan atau mengerahkan secara maksimal semua potensi yang dimiliki pada jalan Allah. Secara garis besar (berdasar potensi yang dimiliki) jihad dapat dibagi dua yakni jihad dengan harta *(bi al-amwal)*, dan jihad dengan jiwa raga *(bi al-anfus).* Ini berdasarkan ayat-ayat berikut ini :

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَٰرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: ”Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar.(QS. al-Hujurat: 15).[49] Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik

[49] al-Qur’ān, 49 (al-Hujurāt): 15.

bagi kamu jika kamu mengetahuinya,(QS. As-Shaf: 10-11).[50]"

Jihad dengan harta pengertiannya lebih khusus dibandingkan *infaq fi sabilillah*. Jika seseorang memiliki uang sepuluh juta rupiah lalu menyumbang pembangunan masjid seatus ribu rupiah, itu kategori infaq fii sabilillah, padahal dia punya potensi untuk menyumbang lebih banyak dari itu. Tetapi kalau benar-benar bisa meaksimalkan potensinya, berarti dia telah berjihad fii salillah.

Jihad bil-anfus, tidak hanya berarti perang yang tantangannya adalah nyawa, tetapi lebih luas dari itu, mencakup segala macam potensi yang melekat pada diri seseorang (selain dari harta) seperti berjihad dengan kata-kata dan tulisan, baik dalam bidang pendidikan dan pengajaran, dakwah amar akruf nahi munkar, politik, maupun bidang kehidupan lainnya. Berjihad dengan menyumbangkan tenaga sebagai aktifis dan orgaisator dalam lembaga-lembaga yang bersifat fii sabilillah. Termasuk juga dalam kategori jihad bil anfus perjuangan melawan jiwa dan hawa nafsu sendiri.

Salah satu bentuk jihad itu adalah berperang yang secara khusus diistilahkan al-Qur'an dengan kata *"Qitāl".*

[50] al-Qur'ān, 61 (Ash-Shaff): 10-11.

۞ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِ ۚ فَٱسْتَبْشِرُوا۟ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

Artinya: ”Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu'min, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan al Qur'ān. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.(QS. Attaubah: 111).[51]”

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa perang adalah bagian dari jihad, tetapi tidak semua jihad dilakukan dengan peperangan. Jika Allah menggunakan kata *Qital* berarti peperangan, tetapi jika menggunakan Jihad tidak harus berarti perang, tetapi lebih luas dari itu, mencakup segala macam bentuk perjuangan, baik dengan harta benda, ilmu pengetahuan, dan potensi lainnya.[52]

[51]al-Qur’ān, 9 (At-Taubah): 111.
[52]Yunahar Ilyas, *Carawala al-Qur’an*, 79-81.

D. Pengaruh Pemikiran Ideologis Elit Muhammadiyah terhadap Sikap dan Perilaku Warga Muhammadiyah.

Jika menggunakan tesis Ali Shari'ati, bahwa tidak ada ummah tanpa adanya Imamah yakni tidak ada rakyat atau bangsa tanpa adanya pemimpin, atau menurut Saifuddin Zuhri tentang *"Ummat dan Waliyy al-Amr"* yakni adanya rakyat dengan adanya orang yang patut diberi kuasa mengurus rakyat, atau menurut Moenawar Khalil tentang *"uli al-Amr"* yakni rakyat dalam suatu negara terikat dengan kepemimpinan seorang presiden. Maka pemimpin suatu pemerintahan mempunyai relasi yang mengikat dengan rakyat yang memilihnya, dimana relasi itu bersiat struktural yakni secara hirarkhi sesuai aturan kepemerintahan yang ada, atau bersifat fungsional dalam arti sebagai seorang pimpinan yang musti menjadi teladan yang baik bagi rakyat yang telah mempercayakan kepemimpinan kepadanya.

Analog dengan itu, Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang modern, tentu memiliki statuten atau aturan main (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah) yang mengatur struktur organisasi, mekanisme kerja organisasi, bentuk-bentuk permusyawaratan, mekanisme pengambilan keputusan, dll. Aturan-aturan itu memiliki kekuatan hukum yang bersifat struktural bagi seluruh pimpinan dan warga Muhammadiyah.

Selain itu dalam permusyawaratan di tiap-tiap tingkatan pimpinan di Muhammadiyah, terutama ketika akan memilih pimpinan struktural, maka dalam aturannya (AD dan ART Muhammadiyah) ada ketentuan yang menyangkut syarat-syarat menjadi calon pimpinan, seperti

berakhlaqul karimah, taat menjalankan ibadah, memiliki kesaehan dan menjadi teladan yang baik, dll. Sejumlah syarat yang normatif tersebut mempunyai makna relasi secara fungsional antara pemimpin dan yang dipimpin. Dalam kaitan dengan ini maka sepak terjang seorang pmpinan di Muhammadiyah pasti akan berpengaruh kepada warga Muhammadiyah yang dipimpinnya.

Para elit pimpinan Muhammadiyah, dipastikan harus mengetahui teori-teori sosial, dan memahami psykologi keummatan tentang warga yang dipimpinnya. Ini penting sebab seorang pimpinan di samping harus memiliki keteladanan, juga harus menunjukkan performa yang layak dicontoh atau ditiru oleh warganya. Begitu juga warga Muhammadiyah sebagai warga organisasi yan relativ memiliki intelektualitas yangtinggi (rata-rata sebagai warga yang terdidik) akan sangat kritis menyikapi perilaku aau proses-proses kepemimpinan yang dilakukan oleh pimpinannya.

Ketika seorang elit pimpinan Muhammadiyah mengeluarkan statemen tertentu, khususnya berkaitan dengan pemikiran keagamaan yang bersifat teologis atau ideologis, maka dengan serta merta warga Muhammadiyah akan menyimak dengan serius apa isi pernyataannya itu, dan *baīmana* kaitanya dengan landasan-landasan ideologi Muhammadiyah yang telah disepakati bersama untuk dipedomani oleh baik pimpinan maupun warga Muhammadiyah. Jadi ketaatan warga terhadap para elit pimpinan di semua tingkatan struktural, bukanlah ketaatan yang ”tanpa reserve” yakni bukan ketaatan yang ”buta” tanpa adanya kritik. Inilah bentuk pengejawantahan dari ayat al-Qur’an surat Annisa’ ayat 59 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.[53]”

Pemahaman ayat tersebut berkaitan dengan pengaruh pemikiran ideologis elit pimpinan Muhammadiyah terhadap sikap keberagamaan warga Muhammadiyah, dimaksudkan bahwa ketika seorang elit pimpinan membuat pernyataan teologis atau ideologis di hadapan warga Muhammadiyah, maka warga akan menyikapinya dengan mengklarifikasikan atau mengkonsultasikan pernyataan seorang elit pimpinan Muhammadiyah tersebut dengan norma-norma yang telah disepakati sebagai landasan ideologis Muhammadiyah. Jika hasil klarifikasi tersebut mengindikasikan adanya paradoks dengan landasan ideologis Muhammadiyah, maka secara otomatis akan terjadi penolakan atas pemikiran atau pernyataan elit tersebut, meskipun

[53]al-Qur’ān, 4 (An-Nisā’): 59.

mekanisme menyampaikan kritik itu biasanya tetap dilakukan oleh warga Muhammadiyah melalui jalan yang konstitusional dan etis, serta tidak melakukan perlawanan secara terbuka.

Adapun norma-norma yang terkandung dalam landasan ideologis Muhammadiyah antara lain tercantum dalam:

1. Rumusan Muqaddimah Anggaran dasar Muhammadiyah, berisi 7 pokok pikiran, (naskah lengkapnya, lihat dalam lampiran).
2. Rumusan Kepribadian Muhammadiyah, yang berisi 4 pokok pikiran, (naskah lengkapnya, lihat dalam lampiran).
3. Rumusan Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, berisi 5 pokok pikiran, (naskah lengkapnya, lihat dalam lampiran).
4. Hith-thah Muhammadiyah, yang sebagian besar telah dipaparkan pada Bab II yang lalu.
5. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, (naskah lengkapnya, lihat dalam lampiran).

Dalam kasus pemilihan Presiden pada pilpres 2004, calon presiden Amien Rais yang pada waktu itu sebagai kader Muhammadiyah dan mantan Pimpinan pusat Muhammadiyah, maka segala pernyataannya selalu mengilhami semangat warga Muhammadiyah, sehingga dukungan warga Muhammadiyah begitu besar kepada sosok Amien Rais, meskipun ada juga kelompok warga Muammadiyah yang tidak sependapat dengan pemikiran Amien Rais, terutama ketika masa kampanye pilpres. Amien Rais mengatakan di gelora sepuluh Nopember Surabaya bahwa tidak ada larangan umat Islam untuk

melakukan *tahlilan*,[54] bahkan Aimen Rais juga melakukan ziyarah ke makam sunan ampel,[55] tujuannya tentu untuk menarik pendukung yang lebih banyak dari non warga Muhammadiyah dengan harapan akan mendongkrak suara dukungan kepadanya. Terlepas dari soal Amien Rais akhirnya kalah dalam pilpres, yang jelas sebagian warga Muhammadiyah yang tetap memegangi landasan ideologis Muhammadiyah merasa tidak menerima ucapan dan perilaku (ziyarah ke makam sunan ampel) Amien Rais, akhirnya berpengaruh juga terhadap sikap keberagamaan warga Muhammadiyah. sebagian menganggap Amien Rais sudah mengorbankan ideologi Muhammadiyah demi kepentingan pribadinya, dan sejumlah tanggapan negatif lainnya.

Ketika kampanye pilpres 2009, Dien Syamsuddin secara terbuka dan terang-terangan mendukung pasangan capres-cawapres Jusuf Kalla-Wiranto dengan argumentasi teologis yang cukup meyakinkan, misalnya: JK-Win dari keluarga religius, JK-Win sangat dekat dengan Muhammadiyah, Ibunda JK adalah pengurus Aisyiyah, keluarga Wiranto adalah sangat dekat dengan Muhammadiyah, dll. Wal hasil pernyataan Din Syamsuddin berpengaruh besar terhadap warga Muhammadiyah. Maka ketika JK-Win kalah dalam pilpres, maka pengaruh Din Syamsuddin yang tadinya relatif positif akhirnya sedikit melemah, lantaran warga Muhammadiyah merasa terjadi jarak antara pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono

[54]Tahlilan, adalah betuk kegiatan tradisi keagamaan yang biasanya dilakukan oleh warga Nahdhatul Ulama, dan oleh warga Muhammadiyah dianggap suatu yang bid'ah atau tambahan-tambahan yang mestinya tidak dilakukan.

[55]Tradisi ziyarah ke makam para wali (walisongo) telah lama dilakukan oleh warga Nahd}iyyin, dan itu merupakan sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh warga Muhammadiyah.

(SBY) yang memenangkan pilpres dengan organisasi Muhammadiyah. Apa lagi ketika menjelang Muktamar Muhammadiyah ke-46 yang akan dilaksanakan di Yogyakarta tanggal 3-8 Juli 2010, Din Syamsuddin juga masih menampakkan sikap oposisi terhadap pemerintahan SBY, ditambah lagi dalam kabiet bersatu jilid II tak seorangpun kader Muhammadiyah masuk dalam jajaran kabinet tersebut, maka sebagian warga Muhammadiyah yang masih merasa perlu bermitra dengan pemerintah, merasa bahwa pernyataan dan sikap Dien Syamsuddin terlalu vulgar dan oposisional terhadap pemerintah.

Efek samping lainnya, adalah ketika beberapa minggu menjelang pembukaan muktamar, rombongan PP Muhammadiyah menghadap presiden SBY dan memohon SBY untuk membuka muktamar. SBYpun menyanggupi membuka muktamar tetapi lewat telekonfrens yakni dibuka lewat jarak jauh dari Madinah al-Munawwarah, sebab menurut rencana waktu itu SBY sedang menunaikan ibadah umroh di tanah suci. Terlepas apakah ini suatu bentuk rekonsiliasi positiv yang dilakukan antara Muhammadiyah dengan pemerintahan SBY ? ataukah bentuk kekecewaan SBY terhadap Muhammadiyah dengan cara kesediaan SBY membuka muktamar jarak jauh itu merupakan penolakan secara halus atas rekonsiliasi inisiatif Muhammadiyah ? wallahu a'lam. Yang jelas sebagian warga Muhammadiyah ada yang menilai bahwa pemikiran dan sikap Din Syamsuddin sebagai elit pimpinan Muhammadiyah itu tetap positiv. Tetapi sebagian lainnya menilai sikap dan pemikiran Din Syamsuddin tersebut dianggap merugikan Muhammadiyah.

Dari paparan ini, dapat ditarik benang merahnya, bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pemikiran

ideologis para elit pimpinan Muhammadiyah, terhadap sikap dan perilaku warga Muhammadiyah.

---o0o---

BAB IV
MAKNA PEMIKIRAN IDEOLOGIS ELIT MUHAMMADIYAH BAGI WARGA MUHAMMADIYAH

A. Setting Sosial Masyarakat Paciran.

Berdasarkan Sumber lisan dan wawancara dengan sejumlah informan[1] yang dianggap mengerti tentang cikal bakal dan perkembangan Desa Paciran diperoleh informasi sebagai berikut; dinyatakan bahwa tidak satupun orang yang mengetahui asal-usul berdirinya Desa Paciran (sebelum bernama Paciran). Dipercayai bahwa penduduk desa ini pada awalnya beragama Hindu, hal ini dibenarkan dari beberapa sumber lisan dan catatan-catatan yang ditulis oleh para tokoh masyarakat setempat.

Kepastian pengaruh agama Hindu itu dikuatkan dengan cerita-cerita dan tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat, ritual-ritual warisan tradisi Hindu, seperti nyekar ke tempat-tempat keramat, larung puteri ke laut, membuang bunga di perempatan atau di suatu tempat yang diyakini memiliki kekuatan gaib dan lain sebagainya.

Islam secara murni yang kemudian disebut *Islam Murni* dianut oleh penduduk Paciran setelah bubarnya

[1]Informasi sejenis, pernah juga diperoleh oleh Ishomuddin ketika melakukan penelitian social di desa Paciran. Wawancara dilakukan dengan seseorang berdasarkan petunjuk dari beberapa informan kunci akhirnya dijumpai orang bernama *Nur Hamim*. Menurut pengakuannya ia pernah diberitahu oleh kakeknya bahwa ia adalah putera dari Kyai Darsono (seorang Kyai generasi kedua penyebar Islam di desa Paciran). Melalui garis keturunan ibunya Umi Kulsum puteri dari Ruminah puteri Abdurrahman putera Saqo putera Marchan putera Darsan (terkenal dipanggil Kyai Darsono) putera Ki Mala' Sa'du (seorang prajurit pelarian dari Kerajaan Demak) memperkenalkan Islam murni ke desa Paciran yang pertama.

Kerajaan Demak atau ketika masa Raden Qosim atau Syarifuddin yang disebut Sunan Drajat memegang kendali kaprajan di Wilayah Perdikan Drajat sebagai daerah otonomi Kerajaan Demak sekitar abad ke-15 dan ke-16.

Menurut sumber lisan, awal letak desa Paciran bukanlah berada di desa Paciran yang sekarang ini, tetapi berada di daerah Gili, yaitu berjarak 4 km sebelah barat desa Paciran sekarang. Namun dalam perkembangan berikutnya desa Gili dipindahkan ke daerah Paciran sekarang ini dengan tetap bernama desa Gili. Perubahan nama Gili menjadi Paciran adalah bersamaan dengan adanya peristiwa Raden Nur Rahmat (dikenal dengan Sunan Sendang)[2] pada suatu malam memboyong masjid

[2]Raden Nur Rahmat yang dikenal dengan Sunan Sendang yang berada di desa Sendang Agung 3 km sebelah selatan Desa Paciran termasuk wilayah Kecamatan Paciran. Peninggalan Sunan Sendang hingga kini masih ada berupa masjid. Berdasarkan sumber lisan diceritakan bahwa masjid Sunan Sendang adalah masjid tiban (adanya secara tiba-tiba). Sebelum didirikan masjid di tempat tersebut berdiri sebuah rumah besar milik seorang janda mantingan (Rondo Mantingan). Ia menyerahkan rumahnya kepada Raden Nur Rahmat untuk dijadikan masjid. Raden Nur Rahmat didesak supaya segera didirikan masjid dalam satu malam itu juga. Maka Raden Nur Rahmat memboyong masjid dari suatu tempat (tidak diceritakan asal mula tempat tersebut) ke desa Sendang. Dalam proses memboyong masjid ke desa Sendang itu ada sebuah pintu yang jatuh di desa Paciran (beberapa waktu lalu pintu tersebut masih disimpan di masjid Paciran). Peristiwa tersebut diabadikan penduduk setempat untuk menamai desa Paciran. Dari sumber lisan lain, Kyai Salamun Ibrahim (79 tahun) mengatakan bahwa penamaan desa Paciran karena secara historis di lokasi ini ada sebagian dari bangunan rumah berupa *pacira* artinya *ampik-ampik omah* (jawa) yang *cicir* (jatuh) kececeran, ketika Raden Nur Rahmat seorang Sunan Sendang mengangkut pindah rumah yang diberi oleh mbok Rondo Mantingan ke Sendang Duwur, sebuah desa di sebelah selatan Paciran, sehingga tempat jatuhnya barang berupa "pacira" (kayu pacira itu masih diabadikan di masjid *al-Taqwa* Paciran) disebut desa Paciran. Dalam sejarah perkembangan Islam di pesisir pantai utara Jawa nama Raden Nur Rahmat dihubungkan dengan Sunan Drajat. Sunan Drajat dan Sunan Sendang sekalipun berbeda usia, namun dalam nuansa cerita keduanya hidup dalam satu masa. Keduanya mengambil tempat di pantai utara Lamongan yang waktu itu menjadi wilayah Sedayu (Sedayu Lawas) dan tidak berjauhan satu dengan lainnya. Ini mengandung makna bahwa wilayah itu strategis dalam kaitannya dengan dakwah Islam.

menuju desa Sendang dan sebagian perkakasnya berupa pintu jatuh di desa Gili, maka desa ini berubah menjadi desa Paciran. Kata *jatuh* dalam bahasa penduduk setempat pada saat itu hingga kini adalah *cicir* (jatuh). Seorang tokoh masyarakat yang suka menyusun catatan-catatan kecil tentang berbagai peristiwa penting yang terjadi di desa Paciran, bernama Slm (82 tahun), tentang perubahan nama dari Gili menjadi Paciran, menuturkan sebagai berikut:

Dinamakan Paciran, karena secara historis di lokasi ini ada sebagian dari bangunan rumah berupa *pacira* artinya *ampik-ampik omah* (Jawa) yang *cicir* artinya jatuh kececeran, ketika Raden Nur Rahmat seorang Sunan

Dalam memahami legenda dalam konteks sejarah seperti itu maka Sunan Drajat memandang penting kehadiran Raden Nur Rahmat atau Sunan Sendang yang memiliki kesaktian dan semangat juang menegakkan agama Islam di tengah-tengah masyarakat yang masih kental dengan kepercayaan lamanya yaitu agama Hindu. Tanda bahwa kepercayaan lama demikian kuat tergambar secara jelas pada situs makam dan masjid Sendang Duwur yang sampai sekarang masih utuh. Bangunan lain yang memberi petunjuk bahwa agama Hindu tersebar di pesisir Lamongan ialah kompleks makam Sunan Drajat Secara keseluruhan dan dari kejauhan komplek tersebut (tahun 1950-1960-an) tidak ubahnya seperti komplek percandian Hindu. Baca Uka Tjandrasasmita, *Aspek-aspek Arkeologi Indonesia, Sepintas Mengenai Peninggalan Kepurbakalan Islam di Pesisir Utara Jawa*, Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Depdikbud, 1986), 5. Dari sumber ini maka dapat dipastikan bahwa di Paciran yang berjarak segitiga antara desa Sendang dan Drajat, sebelum kedatangan Sunan Drajat dan Sunan Sendang, penduduknya mayoritas beragama Hindu. Keterangan yang menguatkan fenomena itu adalah bahwa unsur-unsur Hindu dan Islam terlihat sangat jelas menyatu pada situs kepurbakalaan di Sendang Duwur. Hal tersebut menunjukkan adanya proses transisional dari Hindu ke Islam. Dilihat dari peninggalan yang terdapat di kompleks Sendang Duwur tersebut menunjukkan bahwa unsur Hindu masih belum hilang sama sekali dalam benak masyarakat Jawa sementara itu unsur Islam telah muncul di masyarakat pada masa sekitar abad ke-15 dan 16 M. Dengan kata lain walaupun Islam telah dianut oleh sebagian masyarakat, namun pengaruh agama lama, Hindu masih dominant. Baca Ali Mufrodi, "Sendang Duwur; Transisi Hidu-Islam Abad XV-XVI" . Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Masalah Kebudayaan Islam di Jawa Timur Abad XV-XVI Masa Peralihan dari Majapahit ke Islam yang diselenggarakan di Kampus IAIN Sunan Ampel pada tanggal 17 April 2002, di Surabaya.

Sendang mengangkut pindah rumah yang diberi oleh Mbok Rondo Mantingan Kudus ke Sendang Duwur, sebuah desa di sebelah selatan Paciran sehingga tempat jatuhnya barang berupa *pacira* (kini sebagian kayu pacira itu masih dipasang di masjid al-Taqwa Paciran) itu disebut desa Paciran.

Penduduk Paciran mempunyai kepercayaan terhadap suatu tempat yang disebut dengan *anjir*.[3] Tempat ini dipercayai memiliki kekuatan bahkan oleh sebagian masyarakat dianggap tempat bersemayamnya *dewa.* Dengan kepecayaan itu maka harus dilakukan sedekah secara rutin berupa pengorbanan seorang puteri terpilih. Orang tua puteri terpilih sangat berbahagia jika anaknya dipilih untuk upacara pengorbanan. Penduduk Paciran mempunyai kebiasaan setiap tahun mengorbankan seorang puteri yang tercantik untuk dipersembahkan kepada dewa yang bersemayam di *anjir* tersebut. Sebelum dilakukan pengorbanan anak itu terlebih dahulu diarak naik kuda keliling desa dengan berpakaian layaknya seperti pengantin dan setelah itu dibawa dengan perahu menuju ke *anjir* dan dilemparkannya sebagai persembahan. Tujuan persembahan ini adalah agar dewa *anjir* tidak melakukan

[3] "Anjir" adalah tanda (" tenger") berupa kayu yang ditancapkan di tengah laut yang berjarak sekitar 5 km sebelah utara desa Paciran. Jika dilihat dari desa sangat jelas sekali. Bertahun-tahun lamanya tempat ini oleh penduduk setempat dipercayai sangat angker. Dalam perjalanan sejarah nelayan desa ini disebutkan banyak terjadi kecelakaan perahu tenggelam di tempat ini. Namun sebagian besar masyarakat mengatakan bahwa penanaman tanda di tempat tersebut bertujuan sebagai petunjuk bagi para nelayan bahwa di tempat tersebut banyak batu karang besar yang membahayakan bagi perahu maupun kapal yang melintas di sekitar tempat tersebu. Tidak diketahui secara persis siapa dan tahun berapa tanda itu mulai ada. Jika dihubungkan dengan sejarah perkembangan agama maka "anjir" sudah ada sejak zaman kepercayaan lama masyarakat setempat.

kemarahan berupa angin dan ombak besar yang dianggap merugikan para nelayan dan petani di desa Paciran.

Setelah Kerajaan Demak bubar, datanglah seorang prajurit pelarian kerajaan tersebut ke Paciran, dia adalah seorang yang beragama Islam yang cukup kuat bernama Ki Mala' Sa'du. Setelah ia beberapa kali melihat tradisi dan kebudayaan yang dilakukan oleh penduduk Paciran, ia berkeinginan merubah tradisi bahkan menghilangkan tradisi-tradisi yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Padahal pada umumnya mereka menganggap diri mereka telah beragama Islam. Suatu ketika ia melihat perayaan persembahan itu dilakukan yaitu ketika seorang puteri dinaikkan kuda dan berkeliling desa, Ki Mala' Sa'du memaksa mengambil puteri tersebut kepangkuannya. Terjadilah perlawanan dan peperangan antara pengawal-pengawal perayaan tersebut dengan Ki Mala' Sa'du dan akhirnya dimenangkan oleh Ki Mala' Sa'du dan ia berhasil membawa puteri tersebut.

Peristiwa ini membuat penduduk Desa Paciran mulai gelisah akan adanya gejala-gejala baru yang dibawa oleh Ki Mala' Sa'du. Ki Mala' Sa'du, bersumbar dihadapan penduduk Paciran. Silahkan melakukan perayaan persembahan lagi, niscaya akan kuambil paksa lagi. Beberapa hari kemudian orang tua puteri ini datang ke Ki Mala' Sa'du meminta agar puterinya di kembalikan kepadanya. Namun Ki Mala Sa'du menolak dan berjanji akan mendidik dan memelihara hingga dewasa. Setelah dewasa puteri tersebut dinikahinya.

Setelah perlawanan antara para tokoh dan pengawal perayaan persembahan dengan Ki Mala Sa'du dimenangkan oleh Ki Mala Sa'du, maka Ki Mala Sa'du dengan leluasa memperkenalkan *Islam murni* kepada penduduk desa

Paciran. Maka berangsur-angsur penduduk Paciran meninggalkan tradisi-tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan jaran Islam tersebut. Tidak hanya penanaman Islam murni tetapi juga Ki Mala' Sa'du melakukan penataan dan pengembangan desa Paciran.[4]

Perkawinan antara Ki Mala' Sa'du dengan Puteri tersebut membuahkan seorang putera bernama Darsan (selanjutnya di kemudian hari dikenal dengan Kyai Darsono). Darsan oleh ayahnya dititipkan kepada seorang guru ngaji perempuan bernama Dewi Antasari yang tinggal di desa Penanjan, yaitu sebuah desa 1 km sebelah timur desa Paciran. Dewi Antasari melihat bahwa dalam diri Darsan terdapat *nur* (cahaya). Setelah ayahnya meninggal dunia dan Darsan sudah dewasa, maka pengembangan Islam di Paciran dan sekitarnya diteruskan olehnya dan mulailah ia dipanggil Kyai Darsono.[5]Kyai Darsono adalah pengembang Islam generasi kedua. Pengembangan Islam yang dilakukan oleh Kyai Darsono melalui anak-anak penggembala sapi. Setiap tempat penggembalaan, para penggembala itu dibuatkan sumur dan sekaligus *langgar* (mushalla). Tempat-tempat tersebut sampai sekarang masih ada, yaitu dikenal dengan *sumur galalo, Sumuran, Kandang*, dan terdapat dua sumur di tengah-tengah desa Paciran. Tempat-tempat ini oleh penduduk Paciran dibiarkan apa adanya sampai sekarang. Setelah Kyai

[4]Jalan-jalan dan perempatan di desa Paciran ditata secara rapi membujur dan bersilang lurus utara selatan dan timur barat lurus ke arah kiblat Tidak hanya itu setiap perempatan jaraknya hampir sama. Penataan seperti ini oleh sumber lisan dari para informan diyakini adalah warisan dari Ki Mala Sa'du.

[5]Kyai Darsono meninggal dan dikuburkan dipinggir desa Paciran (kini berada di tengah desa) dengan cungkup yang masih utuh. Sementara Dewi Antasari dikuburkan di daerah Suwerak (sebelah timur desa Paciran) yang kini juga termasuk berada di tengah Desa.

Darsono wafat diteruskan oleh Kyai Simin (generasi III), Kyai Tamhid (generasi IV) , Kyai Zen (generasi V), dan Kyai Abdurrahman Syamsuri dan Kyai Ridwan Syarqawi, Kyai Salamun, Kyai Chusen, Kyai Asyhuri (generasi VI).

Antara generasi ke III hingga V tidak ada perkembangan yang berarti hanya bersifat meneruskan saja. Pada generasi VI, pembaharuan Islam mulai nampak kembali bersamaan dengan masuknya Ormas Islam Persyarikatan Muhammadiyah. Bagi yang tertarik dengan gerakan pemurnian Islam yang dimotori oleh Muhammadiyah, mereka menjadi pengikut dan warga Muhammadiyah, sedangkan yang tetap ingin mempertahankan tradisi-tradisi lama mereka menjadi pengikut dan warga Nahdlatul Ulama (NU). Dalam perkembangannya jumlah warga Muhammadiyah mencapai 85 % dan sisanya adalah pengikut/warga NU.

B. Berdirinya Muhammadiyah di Paciran.

Sejak datangnya Ki Mala' Sa'du (prajurit dari kerajaan Demak ketika kerajaan itu bubar) masuk ke desa Paciran pada abad 16 mengajarkan agama Islam yang belakangan dikenal dengan *Islam Murni*, tetapi ajaran agama Islam murni itu belum terlembagakan sebagaimana pada era modern di kemudian harinya. Dan perjalanannya, pengamalan ajaran agama Islam di Paciran mengalami pasang surut sesuai irama perkembangan intelektual para elitnya.

Pada tahu 1950-an, di desa Blimbing kecamatan Paciran (6 Km arah barat desa Paciran), terdapat satu gerakan politik bernama Masyumi dipimpin oleh Kyai Sya'dullah. Beliau adalah seorang tokoh Islam yang pernah mengenyam pendidikan Islam di Arab Saudi. Di desa

Blimbing beliau mengembangkan ilmu yang diperoleh dengan wadah organisasi Masyumi. Beliau juga mendatangkan muballigh Masyumi dari Pusat yaitu Abdul Kahar Mudzakir.[6] Dari hasil wawancara terhadap informan disebutkan sebagai berikut:

> ”yang membawa Muhammadiyah dari tempat asalnya (Yogyakarta) menuju ke Paciran, adalah Kyai Sya’dullah. Beliau adalah tokoh Masyumi yang juga pernah mengenyam pendidikan di Arab Saudi. Di desa Blimbing, beliau menyebarkan Islam ala Wahabi, dengan mendatangkan tokoh-tokoh Masyumi pusat, seperti, Abdul Kahar Mudhakir, dan lain-lainnya”.[7]

Dalam beberapa kali pengajian itu ternyata terjadi transformasi budaya Masyumi ke Muhammadiyah, atau dari organisasi politik menuju organisasi sosial kemasyarakatan, kejadian ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh bubarnya Masyumi sebagai partai politik, sehingga pada waktu itu didirikanlah persyarikatan Muhammadiyah Cabang Blimbing kecamatan Paciran yang diketuai oleh Kyai Adnan Nur.

Di desa Paciran, ada dua tokoh yang berkompeten terhadap perkembangan agama Islam, yaitu, Kyai Ridhwan Syarqowi, dan Kyai Abdurrahman Syamsuri. Tokoh pertama (Kyai Ridhwan Syarqowi) mendirikan lembaga pendidikan *“Madrasah Islamijah Patjiran”* pada tahun 1946. didirikannya lembaga pendidikan ini bertujuan

[6]Abdul Kahar Mudzakir, selain sebagai muballigh Masyumi beliau juga sebagai anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah waktu itu.

[7]Ketika ada kampanye Pemilu tahun 1955, Muhammad Natsir ketua PP Masyumi juga menyampaikan pidato kampanye di Blimbing.

mendidik dan mencerdaskan putera-puteri Islam agar tidak menjadi umat yang bodoh dan terbelakang, serta untuk memperkokoh keimanan mereka supaya terhindar dari pengaruh-pengaruh luar.

Kemudian pada tahun 1948, Kyai Abdurrahman Syamsuri, dengan dukungan beberapa tokoh-tokoh lainnya, mendirikan sebuah pondok yang diberi nama *"Pondok Islamijah Patjiran"*. Didirikannya pondok ini bertujuan untuk: 1) mempertahankan kelestarian ajaran Islam, 2) melangsungkan pendidikan Islam melalui pesantren, 3) memberikan ketrampilan kepada generasi muda Islam, serta pendalaman nilai-nilai keagamaan secara benar dan tepat pengamalannya, 4) membina kader ulama yang mempunyai kualitas baik yaitu menguasai kitab-kitab kuning.[8] Dari sini pula, kemudian Kyai Ridhwan Syarqowi sebagai koordinator bagian pendidikan formal, sedangkan Kyai Abdurrahman Syamsuri sebagai koordinator lembaga pendidikan nonformal (pondok pesantren). Dengan demikian pondok merupakan tempat menampung santri untuk mendalami ajaran Islam, sedangkan sekolah formal merupakan tempat menampung putera-puteri untuk mendalami pelajaran-pelajaran umum.

Pada tahun 1951, gerakan Masyumi masuk ke Paciran melalui sebuah kegiatan kepanduan *Hizbul Wathan* dengan membawa misi gerakan Muhammadiyah.[9] Jadi

[8]Ahmad Fauzan Ihsan, *Pondok Karangasem Perspektif Kesejarahan, Kelembagaan* (Paciran: Biro Administrasi Informatika dan Lembaga Pendidikan Komputer Karanasem, Paciran, 1993), 25.

[9]Bahkan menurut data dari informan, Hizbul Wat}an mengikuti jambore Nasional kepanduan yang diadakan di Gresik. Diceritakan lebih lanjut: Warga Paciran pada tahun 1951, mulai mengenal partai politik yaitu Masyumi yang berfungsi sebagai wadah aspirasi umat Islam Paciran. Pengurusnya adalah orang-orang yang mempnyai faham seperti Muhamadiyah, terbukti pada waktu itu juga berdiri kepanduan Hizbul Wat}an yang sebenarnya adalah

warga Paciran telah mulai mengenal Muhammadiyah melalui kegiatan *Hizbul Wathan*. Dengan demikian sebelum Muhammadiyah lahir di Paciran telah didahului oleh bagian kepanduannya yaitu *Hizbul Wathan*, oleh sebab itu tidaklah mengherankan jika Masyumi mempunyai kegiatan seperti kegiatannya Muhammadiyah sebab orang-orang yang menjadi aktifis di Masyumi adalah orang-orang Muhammadiyah.

Setelah warga desa Paciran mengenal Muhammadiyah, maka kebijakan para tokoh waktu itu, yaitu tahun 1957 mengganti atau menambah label Muhammadiyah pada madrasah Islamijah Patjiran menjadi Madrasah Ibtidaijah Muhammadiyah Patjiran. Hal ini yang menjadi cikal-bakal berdirinya berbagai lembaga pendidikan Muhammadiyah di kemudian hari. Kemudian baru pada tahun 1965 Pondok Islamijah Patjiran, menggunakan label Muhammadiyah, sehingga menjadi Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah Patjiran, bersamaan dengan berdirinya Pimpinan Ranting Muhammadiyah Paciran, yang diketuai oleh Kyai Tibyani Mujahid, dan masih bernaung di bawah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Blimbing.

Kelahiran Muhammadiyah ranting Paciran disambut gegap gempita warga Paciran, bahkan kemudian para tokoh Muhammadiyah Ranting Paciran ini mendominasi Pimpian Cabang Muhammadiyah Blimbing. Akhirnya pada saat itu juga Pimpinan Cabang Muhammadiyah Blimbing dipindah ke Paciran, sesuai kebijakan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan. Alasan kebijakan ini adalah : 1) karena ternyata kegiatan para tokohnya lebih padat di

kepanduan milik Muhammadiyah, yang kemudian mengikuti jambore nasional di Gresik.

Paciran daripada di Blimbing, 2) secara strukutural Paciran adalah ibu kota Kecamatan, hal ini sesuai dengan AD da ART Muhammadiyah pada waktu itu.[10]

Pada tahun 1982/1983, terjadi perubahan pemisahan administratif Muhammadiyah Paciran menjadi dua unit; barangkali yang menyebabkan adalah faktor perlunya restrukturisasi keorganisasian di lingkungan Muhammadiyah Paciran. Pemisahan itu akhirnya menjadikan Kyai Ridhwan Syarqowi yang semula sebagai koordinator perguruan formal tetap dipertahankan dan mendirikan Pondok Modern Muhammadiyah, Pondok Pesantren Karangaem Muhammadiyah Paciran dan juga mendirikan berbagai lembaga pendidikan Muhammadiyah.

Berdasarkan data di lapangan, bahwa desa Paciran ini adalah satu-satunya Pimpinan Cabang Muhammadiyah di Lamongan, bahkan mungkin di seluruh Indonesia, yang mempunyai dua Pondok Pesantren, yang masing-masingnya mempunyai lembaga pendidikan dari sejak TK, Sekolah dasar/MI, Sekolah Menengah Pertama/Mts, Sekolah Menengah Atas/MA, dan Perguruan Tinggi. Masing-masing sama-sama berdiri megah dan sama-sama dipenuhi santri/siswa, dan mahasiswa baik dari desa Paciran sendiri maupun dari berbagai daerah di Jawa timur, bahkan sebagian dari luar jawa seperti Sumatera, Kalimantan, dan Bali.

Dalam perkembangannya, banyak alumni pondok pesantren Paciran yang kemudian menjadi tokoh masyarakat di tempat tinggalnya masing-masing. Satu hal

[10]Para tokoh generasi awal pergerakan Muhammadiyah Paciran, antara lain: Kyai Ridhwan Syarqowi, Kyai Abdurraman Syamsuri, Kyai Salamun Ibrahim, Kyai Tibyani Mujahid, Kyai Anwar Mu'rob, Kyai Abdul Karim Zein.

lagi yang penting untuk dikedepankan ialah bahwa banyak kader-kader Muhammadiyah dari Paciran ini yang menonjol kefaqihan dan wawasan keislamannya sehingga menempati berbagai posisi penting di Muhammadiyah baik di tingkat Daerah Lamongan, tingkat Wilayah Jawa Timur, maupun di Tingkat Pusat. Hal ini menjustifikasi anggapan bahwa salah satu basis Muhammadiyah di Jawa Timur adalah Muhammadiyah Lamongan, dan Muhammadiyah di kawasan Kabupaten Lamongan yang paling menonjol adalah Muhammadiyah Paciran. Dengan demikian, menjadi alasan penting pula bagi peneliti untuk memilih Paciran sebagai sasaran obyek penelitian ini.

C. Tipologi Desa Paciran.

Dalam perkembangannya, beberapa tahun terakhir ini wilayah desa Paciran semakin luas. Desa Paciran terdiri dari 3 dusun yaitu Kerajan, Jetak dan Penanjan. Jarak desa ini dengan ibu kota Kabupaten Lamongan sekitar 47 km jika dicapai melalui desa Banjarwati (Drajat) – Karanggeneng—Sukodadi—Lamongan. Dari desa ini apabila menuju ke arah barat sekitar 30 km. akan sampai di kota Tuban tempat makam Sunan Bonang, dan jika menuju ke arah timur sekitar 5 km. akan menjumpai makam Sunan Drajat, begitu juga jika 3 km. ke arah selatan akan sampai pada makam Sunan Sendang.

Desa ini, sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa. Sebelah timur berbatasan dengan desa Tunggul. Sebelah barat berbatasan dengan desa Kandang-semangkon dan sebelah selatan berbatasan dengan desa Sumurgayam. Ketiga desa tersebut termasuk wilayah Kecamatan Paciran. Dilihat dari segi geografis, Paciran terletak di pantai utara sekitar 3 meter dari permukaan air laut yang memiliki luas

wilayah 488.150 hektar, terdiri dari 7,985 hektar tanah sawah, 402,415 hektar tanah ladang atau tegalan, di samping 39,50 hektar tanah perumahan atau pekarangan dan 76,118 hektar tanah tandus, dengan bentuk permukaan tanahnya dari dataran, pegunungan dan perbukitan. Lihat peta pada lampiran II (kedua).[11]

Sebagai desa yang menjadi pusat pemerintahan kecamatan dan pembantu bupati, Paciran memiliki tiga wilayah pedusunan. *Pertama*, dusun Kerajan terletak di wilayah bagian barat yang lebih banyak dihuni oleh penduduk mayoritas santri, dan di wilayah ini banyak berdiri lembaga pendidikan Islam seperti, madrasah, pondok pesantren, perguruan tinggi agama serta masjid dan mushalla. *Kedua*, dusun Jetak terletak di wilayah bagian tengah yang lebih banyak dihuni oleh mayoritas pegawai negeri baik sipil maupun militer, dan di wilayah ini lebih banyak berdiri kantor-kantor instansi baik pemerintahan maupun swasta, tingkat desa, kecamatan maupun eks kawedanan. *Ketiga*, dusun Penanjan terletak di wilayah bagian timur yang lebih banyak dihuni oleh mayoritas para muallaf. Di wilayah ini tidak ada lembaga pendidikan Islam, tetapi merupakan pusat lokasi wisata yang cukup banyak dikunjungi wisatawan, yaitu Tanjung Kodok dan Istana Goa Maharani. Belakangan kompleks wisata Tanjung Kodok dan Istana Goa Maharani diresmikan oleh Bupati Lamongan dengan nama *WBL* (Wisata Bahari Lamongan).[12]

[11]Dokumentasi data di kantor Kelurahan Paciran.

[12]WBL, merupakan bagian dari pembaharuan dan modernisasi Paciran sejak Bupati Lamongan dijabat oleh H. Masyfuk, dari kader Muhammadiyah Lamongan, lewat Partai Amanat Nasional (PAN), terpilih didampingi wakil Bupati Tsalits Fahami (kader NU).

Berdasarkan sumber data kependudukan, penduduk Desa Paciran menurut data tahun 2002 berjumlah 14.551 jiwa; terdiri dari pria 7128 orang dan wanita 7447 orang, terdiri dari 2228 kepala keluarga yang semuanya WNI dan beragama Islam. Dari jumlah ini, jika dilihat menurut umur, penduduk yang berusia tingkat pendidikan taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi (5-29 tahun) menunjukkan angka cukup tinggi yaitu 71 %, dan jika dilihat menurut pendidikan, penduduk yang menamatkan SD/MI atau yang sederajat sampai dengan perguruan tinggi sebanyak 1567 orang menunjukkan angka yang besar sekali (11 %), artinya penduduk Paciran lebih banyak yang mempunyai kemampuan dan kedewasaan berfikir secara sosial minimal secara formal. Hal ini cukup berguna sekali untuk modal memahami ajaran-ajaran agamanya serta untuk melakukan hubungan sosial di antara sesama warga masyarakat.

Sebagai salah satu daerah pertanian di Kabupaten Lamongan, dengan luas tanah sawah 7,985 hektar dan ladang/tegalan 402,415 hektar, mata pencaharian pokok penduduk Paciran adalah bertani (42%), dan karena lokasinya di pantai berdekatan dengan Laut Jawa, sebagian lain berprofesi melaut sebagai nelayan (5,2 %) di samping sebagai pengrajin tangan/industri kecil (10%), pedagang (7%) dan tenaga profesi/pelayan jasa (30%) serta sebagai tenaga kerja di manca negara sebesar (0.6%).[13]

Ada beberapa hal berkaitan dengan kondisi keagamaan yang dapat dicermati peneliti khususnya mereka yang berprofesi sebagai nelayan, *pertama*, para nelayan dalam melakukan pekerjaan melaut berupaya tidak meninggalkan shalat wajib dan shalat Jum'at, karena itu

[13] Sumber data kependudukan di Kantor Kelurahan Paciran.

mereka meliburkan diri melaut pada hari Jum'at dan setiap pergi melaut setelah shalat subuh sampai dengan siang hari sebelum datang waktu duhur. Hal ini dilakukan karena pada masa dahulu meliburkan setiap hari sabtu sering meninggalkan ṣalat Jum'at, lalu para ulama memberikan fatwa agama agar hari Jum'at tidak digunakan untuk bekerja melaut. *Kedua*, para pekerja seperti tukang kayu, batu dan tenaga kasar lainnya terbiasa meliburkan pekerjaannya setiap hari Jum'at, agar secara leluasa dapat bersiap-siap untuk melaksanakan shalat Jum'at, dan sewaktu-waktu agar bisa memanfaatkan sisa tenaga dan waktunya untuk membantu kerja bakti atau gotong royong (kerjasama yang bersifat sosial).[14]

Ketiga, penduduk desa ini kurang berminat bekerja sebagai pegawai negeri seperti kenyataannya penduduk asli yang menjadi pegawai negeri hanya berkisar 0,35 % dan jika ditambah dengan penduduk yang berasal dari luar desa (mutasi) jumlah pegawai negerinya menjadi 6 %, hal ini karena mereka tidak terlalu berkeinginan diikat oleh atauran-aturan formal yang dinilai menekan dan membatasi kebebasan pilihan-pilihannya, sehingga lebih suka menjadi pekerja swasta seperti, guru, muballigh, pengrajin, dan wiraswasta yang lain. *Keempat*, para pengrajin atau pekerja *home industry* kebanyakan dari para pelajar mulai tingkat SLTP sampai perguruan tinggi yang masih sedang menekuni belajarnya di Desa Paciran. Hal ini dilakukan agar bisa menuntaskan studinya, dan tentunya dapat mengurangi beban biaya yang seharusnya masih menjadi tanggungan orang tuanya. Dalam kenyataan yang dapat

[14]Data lapangan, didukung oleh berbagai inforasi lesan dari para tokoh dan Pinisepuh di Paciran.

peneliti saksikan adalah bahwa hasil belajarnya tidak lebih rendah daripada pelajar yang murni sekolah tanpa ada sambilan sebagai pengrajin.[15]

Kedekatan jarak dan kemudahan jangkauan dengan desa yang lain atau daerah perkotaan dan sub terminal angkutan yang ada, membuka kesempatan luas bagi warga desa ini untuk berinteraksi secara intensif dan selektif dengan masyarakat kota dan masyarakat desa lainnya. Dalam kenyataannya, sebagaimana peneliti lihat setiap hari terjadi kunjungnan warga desa Paciran ke kota dan desa sekitarnya, juga sebaliknya warga kota dan desa luar berkunjung ke desa Paciran melalui sarana transportasi yang ada. Sebagian penduduk desa, bahkan melakukan kunjungan secara teratur, yakni penduduk desa yang bekerja sebagai pelajar/ mahasiswa, pedagang dan pekerja kasar lainnya.

Keterbukaan terhadap sentuhan masyarakat kota dan masyarakat desa lainnya tercermin pula pada kedekatan jarak desa dan kemudahan jangkauan berbagai fasilitas umum perkotaan yang sudah tersedia di desa Paciran, juga di desa tetangga dan kota terdekat lainnya sehingga semua fasilitas yang tersedia dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh penduduk desa Paciran. Di desa Paciran sendiri, jenis fasilitas perkotaan yang tersedia, yaitu, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren, Sekolah Tinggi Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Balai Kesehatan Islam, Puskesman, telepon,

[15]Temuan di lapangan.

kantor pos, lokasi wisata, Kantor instansi pemerintah tingkat desa, kecamatan dan Pembantu Bupati seperti, Kantor Urusan Agama (KUA), Kantor Dinas Pendidikan, Kantor Dinas Pertanian, Kantor pelayanan Listrik, Kantor Dinas Perikanan, Kantor Koperasi Unit Desa, Unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Kantor Kepolisian Sektor.[16]

Gerak sirkulasi harian penduduk desa ini ke daerah perkotaan atau ke desa sekitarnya, dan sebaliknya dari desa sekitarnya dan daerah perkotaan ke desa Paciran cukup tinggi, setiap harinya terdapat puluhan penduduk desa Paciran yang menuju kota Lamongan, Tuban dan Gresik maupun Surabaya dan ke desa lainnya. Demikian juga sebaliknya terdapat ratusan warga desa lainnya dan warga kota yang menuju ke desa Paciran untuk keperluan; bekerja, bersekolah/kuliah, berwisata maupun keperluan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi penduduk desa Paciran dengan penduduk desa atau kota lainnya cukup tinggi. Karena interaksinya dengan masyarakat perkotaan dan masyarakat desa lainnya cukup intensif dan selektif, maka transfer informasi dan akulturasi budaya, politik, ekonomi dan paham agama dapat dengan mudah dan cepat direspon masyarakat desa Paciran.

Jika dilihat dari sistem kekerabatan, prinsip keturunan yang dianut oleh penduduk Paciran adalah prinsip keturunan yang memperhitungkan hubungan kekerabatan dalam masyarakat melalui garis laki-laki (*patrilineal discent*). Karena itulah maka kedudukan laki-laki dalam keluarga inti khususnya dan dalam masyarakat umumnya diyakini sangat penting. Peranan orang tua terutama ayah dalam keluarga inti sangat besar terhadap

[16]Sumber data di Kantor Kelurahan Paciran.

anak-anaknya. Dalam hal waris, orang Paciran banyak dipengaruhi oleh ketentuan waris dalam agama Islam yang menetapkan pembagian waris untuk laki-laki dan anak perempuan dengan perbandingan 2:1, dan dalam praktiknya di masyarakat setiap kali ada pembagian waris pihak keluarga menghadirkan ulama untuk berperan mengatur pembagian waris itu sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Kekuasaan orang tua yang besar terhadap anak-anaknya antara lain tercermin dalam pemilihan jodoh bagi anak-anaknya. Orang tua biasanya akan memilihkan jodoh untuk anak perempuannya, dan anak laki-laki umumnya menunggu datangnya peminangan oleh pihak perempuan. Pilihan jodoh bagi anak laki-laki atau perempuan adalah atas dasar persyaratan dan pertimbangan tertentu. Yang terpenting adalah apakah perempuan atau laki-laki yang akan dipinang itu cukup kuat agamanya, agaknya lebih disukai untuk memilih wanita yang berlatar belakang pendidikan agama, sedang untuk memilih laki-laki yang relatif memiliki peran sosial dalam masyarakat. Selain itu ada kecenderungan orang tua untuk menjodohkan anaknya dengan anggota kerabat sendiri, biasanya dengan anak dari saudara ayah, atau saudara ibu, atau anak yang mempunyai hubungan dengan orang tua.

Di samping itu hal yang penting adalah adanya kecenderungan para orang tua untuk mengawinkan anaknya dengan orang yang mempunyai faham agama Islam yang sama dengannya dan keluarganya. Agaknya ada sedikit keberatan kalau calon isteri atau suami anaknya memiliki faham agama Islam yang berbeda yaitu antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

D. Tipe Kepemimpinan di Desa Paciran.

Dalam kehidupan masyarakat Paciran dikenal dua tipe kepemimpinan yang berlaku yaitu, *pertama*, kepemimpinan yang terwujud dari para pemimpin formal yakni pemimpin yang mengelola pemerintahan desa. Pemimpin formal tertinggi adalah kepala desa, ia mendapat surat keputusan pengangkatan dari pemerintah tingkat atasnya. Selain sebagai pemimpin formal kepala desa juga sebagai pemimpin informal, karena ia dipilih oleh warga masyarakat desanya, dan bukan semata-mata diangkat oleh pemerintahan atasannya. Dalam kenyataan yang peneliti bisa saksikan adalah bahwa tipe kepemimpinan yang pertama dalam melakukan peranan keseharian di tengah masyarakatnya relatif kurang mendapat perhatian bila dibandingkan dengan peran dan orientasi yang diberikan oleh para ulama atau kyai dan tokoh masyarakat lainnya.

Tipe kepemimpinan *kedua*, adalah kepemimpinan informal yang terdiri dari para pemuka masyarakat, termasuk dalam kategori pemimpin ini adalah para ulama, kyai pesantren dan tokoh-tokoh organisasi terpenting di Paciran yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Tokoh-tokoh ini sangat besar peranannya dalam ikut menentukan dan memelihara keseimbangan kesatuan sosial bagi masyarakat desa ini. Ada kaitan erat antara sesama pemimpin informal ini. Para ulama atau kyai pesantren memegang peranan yang sangat strategis, karena mereka berhubungan langsung dan secara intensif dengan warga masyarakat dan sekaligus merupakan pusat orientasi bagi warga masyarakat dari segi keagamaan, bahkan kadang-kadang juga mengenai masalah politik, ekonomi, sosial dan keluarga. Para ulama atau kyai ini mengelola masjid/musalla atau pesantren, menyelenggarakan dan

memimpin kegiatan keagamaan secara teratur, menyampaikan fatwa mengenai ajaran-ajaran agama Islam kepada para jama'ah dan anggota masyarakat pada umumnya.

Dalam realitas yang dapat peneliti lihat, para ulama atau kyai pesantren juga menjadi tempat meminta nasehat dan tempat bertanya dari masalah-masalah keagamaan hingga masalah pribadi. Pentingnya peranan dan kedudukan ulama atau kyai dalam masyarakat menyebabkan mereka diikutsertakan dalam proses ke arah pengambilan keputusan oleh pemimpin formal, bahkan mereka dimasukkan dalam struktur kepengurusan Lembaga Masyarakat Desa (LMD) atau Lembaga Keamanan Masyarakat Desa (LKMD). Kepala desa dalam mengambil suatu kebijaksanaan terhadap warga masyarakat Paciran tidak lupa berkonsultasi terlebih dahulu dengan ulama atau kyai sebagai orang yang selalu dituakan dan patut dimintai nasehat mengenai sesuatu masalah yang berhubungan dengan warga masyarakatnya.

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa mata pencaharian terpenting penduduk desa Paciran adalah bertani, nelayan, pengrajin dan pedagang menempati posisi penting. Kegiatan perekonomian penduduk berpusat di pasar Paciran yang berlokasi di dukuh *Kerajan* Paciran. Aktivitas pasar selain pada setiap pagi juga pada setiap pasaran *Wage*[17] siang hari, karena pada pasaran ini

[17] *Wage*, berasal dari salah satu nama pasaran yang umumnya dipakai hitungan masyarakat jawa tradisional. Jumlah hari pasaran ada 5 (lima), yaitu: Wage, Kliwon, Legi, Paing, Pon. Pasar Wage di desa Paciran sangat ramai karena berada di desa yang posisinya sebagai ibu kota Kecamatan, sehingga memungkinkan masyarakat dari desa-desa sekitarnya mendatangi pasar ini. Mereka datang, adakalanya sebagai tengkulak, sebagai pedagang, sebagai penjual hasil pertanian, dan yang lain adalah masyarakat yang berbelanja kebutuhan keseharian mereka untuk waktu 5 hari ke depan. Hampir semua

pedagang dari luar dan kota sekitar datang menjual aneka dagangannya ke pasar desa Paciran. Pada hari *Wage* layaknya seperti pasar besar di kota. Para penduduk desa lain di sekitar desa ini berdatangan melakukan belanja ke pasar *Wage* Paciran yang diadakan setiap lima hari sekali.

Para pengrajin yang kebanyakan pelajar dan mahasiswa di samping juga para ibu rumah tangga berusaha menyelesaikan barang kerajinan yang dibuatnya untuk dijual di pasar Wage atau ke pasar-pasar besar di kota-kota seperti, Surabaya, Solo, Yogyakarta dan sebagainya bahkan keluar pulau, Bawean, Kalimantan, Bali dan Sulawesi. Di antara barang industri yang diproduksi antara lain berupa pakaian bordiran seperti jilbab, mukena dan taplak meja serta kasur. Produksi bordiran ini ternyata tidak kalah kualitasnya dengan produksi yang sama dari daerah lain seperti dari Tasikmalaya, Yogyakarta dan Bandung.

Selain pengrajin, para pemuda juga banyak yang bekerja sebagai tukang kayu atau tukang batu. Mereka beroperasi di dalam dan luar desa Paciran bahkan banyak juga yang menekuni profesinya itu ke luar negeri seperti Malaysia dan Singapura. Desa Paciran yang di tengah-tengahnya dibelah oleh jalan raya Deandels (warisan zaman Belanda) yang membujur ke timur dan barat, mengesankan bahwa penduduk yang berdomisili di utara jalan raya tersebut berprofesi sebagai nelayan sementara di selatan

kebutuhan masyarakat bisa didapatkan di pasar ini, mulai dari ikan laut hasil tangkapan para nelayan, lauk pauk, aneka hasil pertanian, pakaian seragam sekolah, sembako, buku-buku pelajaran, bahan elektronika, pakaian jadi dan kain bahan untuk baju dan celana, dan lain-lain. Selain dipakai untuk kegiatan perekonomian, nama pasaran juga dipakai untuk kegiatan keagamaan misalnya jadwal khatib jumat di Masjid Jami' Paciran selalu menggunakan pasaran ini. Hitungan pasaran juga dipakai untuk kegiatan pengajian rutin yang dilakukan oleh warga Muhammadiyah ranting atau cabang beserta majlis dan ortomnya.

jalan lebih banyak berprofesi sebagai petani, pedagang dan pengrajin. Hal ini karena memang para nelayan lebih banyak tinggal di pinggir pantai.

E. Aspirasi Politik Warga Paciran.

Dilihat dari segi aspirasi politik, warga masyarakat Paciran telah memiliki cukup pengetahuan meskipun tidak terlalu luas dan dalam tentang bagaimana menentukan strategi-strategi dalam memperoleh sumber daya dalam masyarakat yang dipandang dapat memperkuat kedudukan mereka dalam menghadapi lingkungan global dan melalui organisasi-organisasi sosial, keagamaan, politik dalam masyarakat.

Pada kenyataannya masyarakat desa Paciran kurang tertarik dengan berpolitik praktis, mereka sekedar menyalurkan aspirasi politiknya dalam pemilu sesuai dengan apa yang kebanyakan dipilih oleh warga masyarakat dan didukung oleh tokoh panutan (ulama) atau kaum terpelajar yang ada, sehingga dalam perilaku politik kesehariannya lebih memilih masuk pada kegiatan organisasi sosial keagamaan yang ada di masyarakat yaitu Muhammadiyah dan NU.

Muhammadiyah di Paciran berdiri sekitar tahun 1946, tetapi organisasi ini sejak berdiri dan memiliki pengaruh di Paciran bukanlah organisasi yang terjun di bidang politik melainkan organisasi yang intinya adalah usaha melakukan perombakan atau pemurnian Islam dari tradisi-tradisi yang oleh sebagian umat Islam setempat dianggap menyimpang (pada waktu itu). Walaupun secara organisatoris Muhammadiyah bukan organisasi politik namun dalam menghadapi kelompok lainnya yang berbeda faham, para penganutnya juga menggunakan strategi-

strategi atau model-model yang bersumber pada strategi politik yang ada yang menjadi pilihannya.

Pada tahun 1950-an banyak pengikut faham pembaharuan memasuki Partai Masyumi (Majlis Syura Muslimin Indonesia) dan menyalurkan aspirasi politiknya melalui organisasi politik yang berlandaskan Islam ini hingga tahun 1960. Masyumi membubarkan diri karena terjadi perbedaan pandangan politik yang sangat tajam dengan pihak pemerintah pada saat itu, dan oleh pemerintah dianggap terlibat dalam pemberontakan PRRI di Sumatera Barat.

Sebelum Muhammadiyah berdiri, paham tradisional Islam telah ada dan berkembang terlebih dahulu. Ketika Muhammadiyah datang dan mendapatkan pengaruh di Paciran maka pengikut Islam tradisional, menyalurkan aspirasinya kepada organisasi Nahdlatul Ulama yang dianggap dapat mengakomodasi dan mengukuhkan tradisi-tradisi keislaman mereka. Pada pemilu tahun 1955 para penganut NU telah menyalurkan aspirasi politiknya ke dalam organisasi politiknya sendiri yaitu NU dan tidak lagi kepada Masyumi. Para penganut Muhammadiyah dan NU pernah bersama-sama dalam Partai Islam Masyumi yang berhadapan dengan kelompok nasionalis (PNI) dan Komunis (PKI) bahkan dengan kelompok-kelompok yang lain. Selain kedua organisasi yang disebutkan tadi tidak ada lagi partai politik dan organisasi Islam lain yang berkembang di Paciran, sehingga yang eksis adalah apa yang dikenal dengan masyarakat Masyumi, Muhammadiyah dan NU.

Ketika Masyumi menyatakan bubar pada tahun 1960, Muhammadiyah terus mengembangkan diri dan aktivitasnya sebagai organisasi massa berlandaskan Islam

pembaharuan, demikian pula NU dengan paham Islam tradisionalnya. Ketika Parmusi berdiri pada tahun 1967 banyak penganut Muhammadiyah yang masuk Parmusi (Partai Muslimin Indonesia) dan ikut meramaikan pemilu tahun 1971. Hampir semua pengurus Parmusi Paciran adalah penganut dan warga Muhammadiyah, sehingga dapat dikatakan bahwa ketika pemilu tahun 1971, persaingan NU dengan Parmusi dalam memperebutkan suara sebenarnya adalah persaingan antara NU dan Muhammadiyah. Dalam pemilihan umum tersebut secara keseluruhan untuk Paciran dimenangkan oleh Parmusi, karen jumlah pengikut dan warga Muhammadiyah mencapai lebih dari 85 persen dari jumlah penduduknya.

Ketika partai-partai Islam digabungkan dalam PPP, maka konstelasi kepartaian di Paciran juga berubah, warga Muhammadiyah nampaknya lebih suka memilih PPP termasuk penganut NU, karena berasaskan Islam, sehingga suara keseluruhan untuk desa Paciran, yang unggul adalah PPP sedangkan Golkar suaranya sangat sedikit karena hanya didukung oleh sebagian pegawai negeri saja, hal ini terjadi sampai dengan pemilu tahun 1977. Pada pemilu tahun 1999, setelah era reformasi dan peta perpolitikan secara nasional berubah, maka aspirasi politik masyarakat lebih banyak disalurkan kepada parpol yang mempunyai basis massa organisasi Islam terkuat di desa Paciran yaitu ke PAN oleh penganut dan warga Muhammadiyah, dan sebagian ke PKB yang didukung oleh penganut NU. Suara yang unggul adalah PAN, baru kemudian PKB, sedangkan PPP dan Golkar jauh lebih kecil suaranya dari pada sebelumnya. Pada pemilu 2004, dan 2009, partai-partai

politik pendulang suara terbanyak masih tetap seperti yang lalu yakni PAN dan disusul oleh PKB.[18]

F. Agama dan Pendidikan Masyarakat Paciran.

Dari segi keagamaan, penduduk Paciran hampir seluruhnya adalah beragama Islam. Di lingkungan pegawai negeri memang ada yang beragama lain, dan itu biasanya mereka berasal dari luar desa/daerah Paciran. Namun dalam kenyataannya mereka dengan sendirinya tidak pernah berani melakukan ibadah agamanya di Paciran, bahkan mereka tidak tahan (kerasan) tinggal di Paciran. Karena itu seringkali pegawai negeri yang beragama selain Islam tersebut mengikuti kegiatan keagamaan Islam seperti pengajian dan akhirnya masuk Islam.

Jika dilihat dari sisi pendidikan di Paciran, maka dapat peneliti kemukakan bahwa sarana pendidikan agama justeru lebih banyak jumlahnya dibandingkan sarana pendidikan umum/ non agama (dalam hal ini jumlah sekolah yang ada di Paciran). Berdasarkan catatan kantor desa Paciran tahun 2002 menunjukkan bahwa terdapat 8 sekolah umum dan 20 sekolah agama, 8 sekolah umum, meliputi 2 SD Negeri, 1 SLTP Negeri, 1 SLTP Swasta, 2 SMU Swasta, 1 SMK Swasta, 1 STIE Swasta. Sedangkan dari 20 jumlah sekolah agama itu meliputi 6 MI Swasta, 3 MTs Swasta, 3 MAU Swasta, 2 MAK Swasta, 2 STA Islam Swasta dan 3 Pondok Pesantren. Sekolah-sekolah agama dan umum yang jumlahnya 28 buah itu yang dimiliki atau

[18] Belakangan pada pemilu 2009, terjadi penurunan perolehan dua partai besar PAN dan PKB. Suara PAN turun karena sebagian elemen masyarakat terutama warga Muhammadiyah menyalurkan aspirasi politiknya ke partai baru PMB (Partai Matahari Bangsa). Suara PKB juga mengalami penurunan karena sebagian pendukungnya menyalurkan aspirasi politiknya ke partai baru PKNU (Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama).

dikelola Muhammadiyah 19 buah, NU 6 buah, dan yang didirikan pemerintah (negeri) 3 buah.

Jumlah sarana ibadah di desa Paciran terdiri dari 9 masjid dan 62 musalla (tidak untuk salat Jum'at). Dari jumlah 72 masjid dan musalla itu ada 6 buah musalla yang dikelola NU, 5 masjid dan 58 musallah yang dikelola Muhammadiyah, serta 3 masjid yang dikelola oleh umum atau bersama antara warga Muhammadiyah dan NU. Di samping sarana ibadah atau sarana pendidikan di atas Muhammadiyah juga mengelola atau memiliki 1 Panti Asuhan Yatim, 1 Balai Kesehatan, 8 TPQ atau TPA dan 6 Taman kanak-kanak. Sedangkan NU mengelola atau memiliki 2 TPQ dan 2 Taman Kanak-kanak dan 1 Panti Asuhan yatim.

Melihat banyaknya jumlah sarana ibadah, sarana pendidikan agama serta kegiatan-kegiatan keagamaan yang menonjol dan relatif mewarnai kehidupan masyarakat desa Paciran, maka Paciran sering mendapat sebutan sebagai desa *santri.* Sebutan itu diberikan oleh pihak pemerintah kabupaten atau oleh masyarakat luar desa Paciran

G. Sikap Warga Muhammadiyah Paciran terhadap Pemikiran Ideologi Elit Pimpinan Muhammadiyah.

Sejak awal masuknya agama Islam ke Paciran dan perkembangannya sampai sekarang, corak keberagamaan warganya menunjukkan pola ketaatan yang kuat, apalagi dengan masuknya organisasi Muhammadiyah sekitar tahun 1951, warga Paciran semakin antusias memahami dan mengembangkan *"Islam Murni"* yang dibawa oleh Muhammadiyah. Banyak warga Paciran yang menginginkan anak-anaknya memiliki pengetahuan agama Islam yang mendalam, sehingga sebagian anak-anak

mereka dimasukkan ke berbagai pondok pesantren di luar Paciran.

Pada era tahun 1950an banyak anak-anak muda yang masuk pondok pesantren di Kertosono, bahkan waktu itu menjadi trend dan kebanggaan orang tua jika anaknya lulusan pondok Kertosono. Setelah para alumninya kembali ke Paciran, kemudian memperkuat basis keagamaan di Muhammadiyah. Pada perkembangan berikutnya masyarakat Paciran dikenal memiliki semangat mempelajari hukum-hukum shari'ah Islam, sehingga pada era tahun 1970-an banyak anak-anak Paciran yang memasuki Pondok Pesantren Persis (Persatuan Islam) di Bangil, Pasuruan, jawa Timur.

Pondok Pesantren Persis dikenal dengan spesialisasi kajian Fiqh-nya karena diasuh oleh Abdul Qadir Hassan, putra Ahmad Hassan. Kedua ulama ini dikenal memiliki perhatian yang tinggi dalam ilmu fiqh dan ushul fiqh. Buku tanya jawab yang diterbitkan dari pesantren ini cukup besar pengaruhnya di Jawa Timur terutama bagi kalangan warga Muhammadiyah. Pengaruh yang sama juga terjadi pada masyarakat Paciran. Hampir semua tokoh-tokoh Muhammadiyah Paciran di samping lulusan Kertosono, dan sebagian kecil dari Gontor, adalah lulusan Persis ini.[19] Pandangan keberagamaan Islam warga Muhamadiyah Paciran akhirnya terkesan *fiqh sentris* yang lebih didominasi faham Islam ala pesantren Persis. Hal ini berdampak luas sampai pada proses pembelajaran di Pondok Pesantren Paciran sendiri diwarnai oleh Faham

[19]Untuk sekedar menyebut contoh, Syafiq A. Mughni, yang sekarang menjadi ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur (periode 2005-2010), adalah berasal dari Paciran, dan alumni Pondok Pesantren Persis Bangil, begitu juga para tokoh-tokoh lainnya, seperti Ahmad Ahzab, Shonhaji (alm), Abdul Majid.

Islam Persis ini. Dalam setiap acara *Muhadhoroh*,[20] disamping menggunakan rujukan kitab-kitab kuning (kitab-kitab Klasik), juga menggunakan buku tanya jawab keluaran Pesantren Persis bangil ini. Meskipun secara organisatoris, Muhammadiyah telah mengeluarkan buku Himpunan Putusan Tarjih (HPT) yang berisi tuntunan keagamaan yang meliputi Aqidah, Ibadah, dan Mu'amalah dunyawiyah, saat itu ternyata tidak begitu nampak pengaruhnya di Paciran, kecuali belakangan pada era 1990an sampai sekarang.

Dari data pengamatan yang terus menerus dan berulang-ulang, diketahui bahwa latar belakang pendidikan seperti yang telah dipaparkan di atas, sangat mempengaruhi ketaatan dan keteguhan keberagamaan warga Paciran.[21] Pada umumnya keberagamaan warga Paciran yang dikenal sebagai Desa Santri ini bercorak *fundamentalis* padahal mayoritas mereka adalah warga Muhammadiyah yang dikenal sebagai oragnisasi Modern dan reformis. Tetapi ketika mereka menyikapi pemikiran-pemikiran ideologis yang dilontarkan oleh para elit Muhammadiyah Pusat, tampak terjadi varian. Hal ini terjadi kemungkinan

[20]*Muhadhoroh*, adalah bentuk latihan berpidato atau berceramah di Pondok Pesanten (baik di Pondok karang Asem Muhammadiyah, maupun Pondok Modern Muhammadiyah). Muhadhoroh disamping sebagai ajang latihan berpidato, juga digunakan sebagai wahana mengasah ketrampilan berargumentasi dengan rujukan kitab-kitab kuning yang mereka kuasainya. Para santri bergantian tampil seminggu sekali dengan maudhu' (judul ceramah) yang ditentukan oleh ketua Muhadhoroh. Di bagian akhir presentasi, diberi waktu untuk proses diskusi Tanya jawab antara pembicara dengan audiens. Topik-topik pembicaraannya berkisar pada masalah keagamaan khususnya hukum Islam. Selain muhadhoroh seminggu sekali pada hari senin dengan bahasa Indonesia, juga ada muhadhoroh setiap jumat dalam bahasa jawa.

[21] Bahkan banyak kader-kader muda Muhammadiyah Paciran yang ditugaskan untuk menjadi da'i untuk masyarakat terasing dan masyarakat transmigran di Kalimantan, Sumatera, dan Irian Jaya (Papua).

dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, ekonomi, dan kesempatan berinteraksi dengan dunia luar yang mereka peroleh.

Dari hasil penelitian dengan menggunakan empat isu utama yakni, tentang Pluralisme atau pluralitas agama, Fundamentalisme, Negara Islam Indonesia, dan Jihad dalam Islam, dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Pluralisme atau Pluralitas Agama.

Pluralisme atau pluralits agama di kalangan umat Islam adalah sebuah kenyataan yang niscaya. Para penganutnya banyak mengedepankan faham ini berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an maupun hadith nabi Muhammad SAW. sebagai rujukan utama mereka, hal ini tentu saja sesuai dengan interpretasi yang mereka lakukan terhadap teks-teks ayat al-Qur'an maupun matan-matan hadith tersebut.

Di kalangan elit pimpinan Muhammadiyah, terjadi lontaran-lontaran pemikiran keagamaan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh cukup besar di kalangan warga Muhammadiyah. Sesungguhnya para elit pimpinan Muhammadiyah Pusat itu telah memahami bahwa Muhamadiyah telah memiliki pola pemahaman keagamaan yang jelas baik yang berupa rumusan-rumusan ideologis seperti *Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah*, dan lain-lain. Tetapi para elit pimpinan tersebut mencoba mengembangkan pemahaman terhadap rumusan-rumusan ideologis Muhammadiyah tersebut dengan jalan memberi interpretasi-interpretasi baru yang segar dalam kaitannya

dengan realitas kehidupan warga Muhammadiyah, umat Islam, dan bangsa Indonesia ini.

M. Amien Rais (mantan ketua umum PP Muhammadiyah periode 1995-2000, dan pada Muktamar Muhammadiyah ke 45 di Malang tahun 2005 ditetapkan sebagai penasehat Pimpinan Pusat Muhammadiyah), misalnya, sangat yakin mampu membangun kekuatan di atas keragaman baik ragam suku, ragam bahasa, maupun ragam agama/keyakinan. Partai Amanat Nasional (PAN) yang didirikannya pun diabdikan bukan untuk umat Islam melainkan untuk masyarakat luas bangsa Indonesia. Yang paling utama perjuangan Islam adalah memperjuangkan kesamaan atau egalitarianisme, demokrasi, dan keadilan.[22]

Achmad Syafii Ma'arif (mantan ketua umum PP Muhammadiyah periode 2000-2005, dan pada Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang tahun 2005 ditetapkan sebagai penasehat Pimpinan Pusat Muhammadiyah), sejalan dengan Amien Rais bahkan lebih lugas lagi mengatakan bahwa tidak benar sikap mengklaim kebenaran atau memonopoli kebenaran hanya pada Islam. Syafi'i Ma'arif menghendaki bahwa Islam yang moderat, toleran dan inklusif paling pas untuk masyarakat Indonesia saat ini dan ke depan. Syafii Ma'arif mengkritisi sebagian umat Islam yang sering tidak memiliki rasa toleransi beragama yang merupakan salah satu pilar menuju kehidupan beragama yang harmonis, damai, dan menyejukkan. Syafii Ma'arif menegaskan bahwa sesungguhnya al-Qur'an jauh

[22]Rais, M. Amien Rais, *Membangun Kekuatan di atas Keragaman* (Yogyakarta: Pustaka Suara Muhammadiyah, 1998), 111-120. juga bisa dibaca dalam berbagai buku karangannya misalnya: Moralitas Politik Muhammadiyah, Vici Misi Muhammadiyah, dll.

lebih toleran di bandingkan segelintir orang Islam yang intoleran terhadap umat lain non muslim.[23]

M. Din Syamsuddin ketua umum PP Muhammadiyah hasil Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang tahun 2005, lebih menekankan perlunya mewujudkan masyarakat pluralis dengan bahasa agama yakni *Masyarakat Madani* atau yang dikenal *Civil Society.* Meskipun demikian, Din Syamsuddin sebenarnya juga mengakui bahwa pelabelan Islam dengan beberapa label seperti *Islam pluralis, Islam liberalis, Islam sekularis,* dan lain-lain, justru akan semakin mendistorsi makna Agama Islam itu sendiri yang *kaaffah.* Menurut keyakinannya, Agama Islam adalah satu sistem nilai yang komprehensif, yang mencakup berbagai aspek kehidupan secara menyeluruh.[24]

Yunahar Ilyas salah satu ketua PP Muhammadiyah hasil Muktamar Muhammadiyah ke 45 di Malang tahun 2005, mengedepankan dua alternatif dalam memahami makna *pluralisme*. Sebenarnya *pluralisme* atau pluralitas agama, itu bisa bermakna positif dan bisa pula bermakna negatif. Baginya *pluralisme* bisa bermakna positif jika mengakui dan menghormati adanya perbedaan agama, bahwa keragaman agama adalah suatu yang wajar dan terjadi di setiap komunitas masyarakat. Akan tetapi sebagai seorang muslim tetap meyakini bahwa hanya agama Islam-

[23]Abdurrahman Wachid,(ed). *Ilusi Negara Islam, Ekspansi Gerakan Transnasional di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institut, Gerakan Bhinneka Tunggal Ika, dan Maarif Institut, 2009), 7-9. juga bisa dibaca dalam berbagai buku karangan Syafii Ma'arif sendiri, termasuk dalam buku Refleksi 70 tahun Ahmad Syafii Ma'arif, Cermin Untuk Semua, yang diterbitkan oleh Maarif Institut.

[24] Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), 93-100. juga bisa di baca dalam bukunya yang lain seperti: Islam dan Politik Era Orde Baru, dll.

lah yang benar. Sebab jika tidak demikian akan kehilangan makna ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa sesungguhnya agama yang ridhai Allah hanyalah agama Islam. Sebaliknya, Pluralisme bisa bermakna Negatif jika mengakui bahwa kebenaran itu ada dalam semua agama.[25]

Bagi warga Paciran, memaknai pemikiran ideologis para elit tersebut sebagai bagian dari pengembangan wacana pemikiran di Persyarikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah diakuinya sebagai organisasi Islam modern di Indonesia. Implikasi dari watak kemodernan tersebut antara lain munculnya berbagai pemikiran, pengembangan, serta interpretasi-interpretasi baik terhadap teks-tes ayat al-Qur'an dan matan-matan Hadith, maupun terhadap hasil rumusan-rumusan ideologis Muhammadiyah yang kemudian dikenal dengan sebagai landasan ideologis bagi Muhammadiyah. Hal ini pada akhirnya akan memperkaya cakrawala pemikiran warganya.

Damanhuri, seorang alumni Pondok Modern Gontor ini mengatakan bahwa pemikiran pluralisme atau pluralitas agama adalah sesuatu yang wajar, apalagi dalam wacana pemikiran Muhammadiyah. Kyai yang tergolong masih muda ini mengaku pernah akrab dengan tokoh-tokoh Islam seperti Nur Cholis Madjid, Syafii Ma'arif, Din Syamsuddin, dll. Bahkan ketika Nur Cholis Madjid melontarkan pemikiran tentang sekularisasi agama, dia merasa cocok dengan pemikiran tersebut. Ustad yang juga alumni Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini bahkan tidak keberatan dirinya disebut

[25]Yunahar Ilyas, *Cakrawala al-Qur'an, Tafsir Tematis tentang Berbagai Aspek Kehidupan* (Yogyakarta: Itqan Publishing, 2009), 49-54. juga bisa dibaca di berbagai makalah atau hand-out pada berbagai pelatihan atau training kader Muhammadiyah.

seorang Liberalis, lebih lanjut ia mengatakan, ”Saya memiliki kecenderungan berfikir bebas tetapi tetap dalam koridor Islam, saya menyukai pemahaman dan praktik keagamaan yang menfokuskan pada substansi jiwa, misalnya dengan dzikir dan do’a. Jadi saya ini bisa disebut sebagai seorang *liberalis-fundamentalis”*.

Pluralisme- menurut pemahamannya- berasal dari kata *plural* yang berarti banyak atau berbilang. Pluralisme dalam filsafat adalah pandangan yang melihat dunia terdiri dari banyak makhluq. Istilah ini sering dilawankan dengan *monisme* yang menekankan kesatuan dalam banyak hal atau dualisme yang melihat dunia tediri dari dua hal yang berbeda. *Monisme* terbagi dalam *phsical monoism* yang terwujud dalam filsafat materialisme bahwa seluruh alam adalah benda, dan *mental monism* atau *idealisme* yang menyatakan bahwa alam seluruhnya adalah gagasan atau idea. Pluralisme kemudian berkembang menjadi teori politik tentang bagaimana mengurus urusan bersama dalam masyarakat yang bersifat pluralistik dari segi kecenderungan plitik, agama, kebudayaan, kepentingan, dan lain-lain.

Lebih lanjut Damanhuri menjelaskan istilah pluralisme, monoisme, atau dualisme, sebenarnya tidak berasal dari agama atau sejarah Islam. Tetapi agama Islam ini mengenal pengertian-pengertian yang mirip dengan itu. Monoisme dapat dilihat dari ajaran tentang ke-Esa-an Tuhan (*al-Tauhid*), kesatuan makhluq Tuhan, kesatuan agama dari dulu hingga sekarang, kesatuan nasib manusia dan seluruh alam, dan seterusnya. Dualisme dapat dilihat dari konsep tentang baik dan buruk, ma’ruf dan munkar, dunia dan akhirat, surga dan neraka, pahal dan siksa, dan lain-lain. Sedangkan *pluralisme* dalam Islam antara lain

dapat dilihat dari kenyataan pluralisme makhluq Allah, suku bangsa, bahasa, agama, partai, profesi, sumber daya, dan hukum.

Pluralisme sebagai satu faham keragaman dalam kehidupan ini adalah satu keharusan sejarah, karena zaman Nabi Muhammad SAW. pun telah terjadi keragaman agama di Madinah. Tetapi tentu saja kita menggunakan pola yang dicontohkan oleh Nabi ketika menyikapi perbedaan keyakinan dengan ungkapan yang cukup simpel: *Lakum Dinukum Waliya Dini.* tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan, tetapi penanaman aqidah bagi generasi muda tetap menjadi kewajiban kita semua agar mereka tidak mudah terjerumus ke lembah kesyirikan, dan kesyirikan merupakan musuh tauhid itu sendiri.

Sikap yang agak senada diberikan oleh Shabir, memaknai faham Pluralisme terutama di kalangan Muhammadiyah hanya sebatas wacana dan tidak perlu dibesar-besarkan. Seorang ustad (muballigh Muhammadiyah) yang juga pimpinan yayasan *al-Rayyan* ini menengarai bahwa di Muhammadiyah itu sejak dulu memang terjadi perbedaan-perbedaan pemikiran para elit pimpinannya. Jika suatu saat ada yang cenderung agak-agak bebas atau liberal, maka biasanya ada juga yang mengimbangi yakni fihak-fihak yang cenderung Genuin. Jadi perbedaan yang bernuansa keragaman itu adalah dinamika dalam kehidupan.

Dalam pandangannya, perbedaan pemikiran itu memang sesuatu yang sering kita jumpai dalam komunitas apapun di dunia ini. Bahkan dalam lingkungan keluarga-pun kita jumpai perbedaan-perbedaan pemikiran. Jadi hal ini adalah wajar terjadi. Kita ummat Islam khususnya warga Muhammadiyah harus mempunyai wawasan yang luas sehingga tidak kaku ketika menghadapi berbagai perbedaan

tersebut. Wawasan yang sempit justeru akan mempersulit kita sendiri ketika menghadapi berbagai perbedaan pemikiran. Akan tetapi sebagai seorang muslim yang terpenting adalah aqidah yang mantap, iman yang mendalam, dan selalu menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Maka insyaallah Allah akan selalu menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Lebih lanjut ia menyatakan:

> Saya menyadari pentingnya wawasan keislaman bagi generasi muda agar mereka lebih siap menghadapi hidup dan berbagai keragaman pemikiran keagamaan di kalangan umat Islam, khususnya di kalangan warga Muhammadiyah. Dia mengaku bersyukur masih banyak kader-kader Muhammadiyah yang basis agamanya kuat dan siap melanjutkan kepemimpinan umat di masa depan.

Burhanuddin, agaknya merasa khawatir dengan munculnya pluralisme dalam Islam lebih-lebih di Muhammadiyah. Sebab sepengetahuannya pluralisme itu mengatakan bahwa semua agama itu benar adanya, maka ini tentu akan berdampak pada pendangkalan aqidah bagi generasi muda, apalagi bagi mereka yang pengetahuan agamanya sangat kurang, maka akan menimbulkan pemahaman yang salah terhadap Islam. Kita berbicara apa saja asalkan ada petunjuknya dari al-Qur'an dan Sunnah, tidak apa-apa. Tetapi jika seseorang mengada-ada, lalu mengatasnamakan al-Qur'an atau Assunnah, ini yang namanya orang berbuat sesuatu tanpa ilmu. Beriman kepada Allah butuh ilmu, berfikir juga butuh ilmu. Lebih lanjut Ustad yang juga pengasuh pondok pesantren ini mengatakan:

> Ya, kita ini sebagai orang tua, kan harus melakukan apa saja yang bisa kita lakukan terhadap anak atau santri, agar mereka mengerti dan memahami agamanya, kitab sucinya sebgaimana yang telah diajarkan oleh para ulama pendahulu kita. Jangan sapai upaya yang sudah mereka (para ulama pendaulu) lakukan itu menjadi sia-sia hanya lantaran munculnya berbagai faham keagamaan belum tentu jelas kebenarannya.

Saya yakin umat Islam masih menginginkan pemahaman agama yang benar sesuai petunjuk al-Qur'an dan Sunnah Rasul, artinya bahwa apa yang datang dari sumber utama itu mari kita pakai tetapi apa yang dilarang oleh sumber utama itu, maka hendaklah kita tinggalkan.

Burhanuddin menengarai adanya upaya sitematis dan masiv yang dilakukan oleh pihak barat terhadap dunia Islam lewat berbagai pemikiran keagamaan yang secara sepintas nampak rasional dan mudah diterima oleh kalangan muda muslim terpelajar terutama di Negara kita, tetapi sesungguhnya pemikiran-pemikiran tersebut mengandung racun berbahaya. Ironisnya, upaya itu telah berhasil melalui sebagian intelektual muslim kita terutama yang lulusan perguruan tinggi barat, meskipun tidak semuanya lulusan perguruan tinggi barat seperti itu..

Lebih lanjut Burhanuddin menjelaskan sambil mengutip pernyataan *Zwimmer* (seorang orientalis), bahwa Islam dan ummat Islam sebenarnya mudah ditaklukkan asalkan mengerti caranya. Menaklukkan islam dan ummat Islam tidak perlu dengan kekerasan atau kekuatan senjata, tetapi dengan pemikiran yang rasional dan halus serta

memikat. Cara ini mudah dipraktekkan dan hasilnya tidak mengecewakan.

Lebih lanjut ia menegaskan:

> Zwimmer bilang bahwa jangan menyerang Islam dengan fisik/ senjata, tetapi hancurkanlah Islam lewat pemkiran-pemikiran. Jadi pada hakekatnya Liberalisme, Pluralisme, Sekularisme, dan sejenisnya itu merupakan alat bagi barat untuk melumpuhkan Islam. Mereka telah melancarkan perang dengan pola *al-Ghazw al-Fikr* (perang pemikiran), juga *Ghazw al-Hadharah* (perang peradaban/kebudayaan), dan juga *al-Ghazw al-Aqidah* (perang aqidah/keykinan). Tujuan jangka pendeknya minimal melakukan *Tashkik al-Din* (menciptakan perasaan ragu terhadap agama), atau *Tashykik al-Iman* (menciptakan perasaan ragu terhadap keimanan). Dan tujuan jangka panjangnya adalah munculnya generasi baru muslim yang kemudian memusuhi agamanya sendiri, tidak percaya kepada ajaran agamanya sendiri.

Tetapi kita tetap yakin, asalkan disertai usaha yang maksimal melakukan penguatan aqidah dan perlawanan terhadap musuh-mush Allah, Allah akan memberikan kemenangan kepada kita, ingat firmannya :

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ ۖ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَٰكِرِينَ ﴿٣٠﴾

Artinya: ”Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir memikirkan daya upaya terhadapmu untuk

menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya.(QS. al-Anfal: 30).[26]"

وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُۖ وَٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلۡمَٰكِرِينَ ٣٠

Artinya: "Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.(QS. Ali Imran: 54).[27]"

وَمَكَرُواْ مَكۡرٗا وَمَكَرۡنَا مَكۡرٗا وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ ٥٠

Artinya: "Dan merekapun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh dan Kami merencanakan makar (pula), sedang mereka tidak menyadari. (QS. al-Naml: 50).[28]"

Penilaian senada juga diberikan oleh Nuruddin. Dia sangat prihatin melihat banyaknya para ilmuwan dan cendekiawan muslim yang mencoba bermain-main dengan nash-nash al-Qur'an sesuai dengan pikirannya sendiri, dan mengabaikan sejarah kehidupan Rasulullah SAW. bagaimana beliau itu melakukan penguatan akidah kepada

[26] al-Qur'an, 8 (al-Anfal):50.
[27] al-Qur'an, 3 (ali-Imron):54.
[28] al-Qur'an, 27 (al-Naml):50.

para sahabatnya, dan umat Islam secara keseluruhan. Nuruddin mewanti-wanti jangan melakukan *gebyah uyah* terhadap ajaran agama-agama yang ada di muka bumi ini. Misalnya karena tidak ada agama apapun di dunia ini yang memperbolehkan seseorang bertindak ḍalim, maka disimpulkan bahwa semua agama itu benar adanya. Misalnya, kalau orang-orang ahli kitab itu beriman kepada Allah, maka mereka berhak masuk surga, maka disimpulkan bahwa seseorang beragama apa saja asalkan beriman maka mereka berhak memperoleh surga Allah. Ini kesimpulan yang tergesa-gesa dan keliru. Ada orang memahami ayat ini (QS. al-Ma'idah ayat 69) sebagai dasar kesamaan:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّٰبِـُٔونَ وَٱلنَّصَٰرَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

> Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mu'min, orang-orang Yahudi, Shabiin dan orang-orang Nasrani, siapa saja (di antara mereka) yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.[29]"

Memahami ayat seperti ini harus hati-hati, dan harus mengikuti pemahaman para ulama salaf agar pemahaman kita tidak keliru. Para ulama salaf adalah termasuk kelompok ummat yang insyaallah dijamin keselamatannya

[29] al-Qur'an, 5 (al-Ma'idah): 69.

(al-Firqah al-Najiyah) karena mereka selalu mendapat bimbingan dari Rasulullah saw. berdasarkan wahyu. Selain itu mereka cukup hati-hati dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an. Mereka juga dikenal sebagai pribadi-pribadi yang memiliki sifat-sifat utama seperti *al-Tawadhu'* (rendah hati), dan *Husn al-Khuluq* (berperilaku baik/berakhlaqul karimah).

Menghadapi ayat seperti tersebut di atas, ia menyatakan:

> Masih harus dilihat dan diuji, apakah keimanan mereka (orang-orang yahudi, Shabiin, dan orang-orang Nasrani) benar-benar iman kepada Allah dan membenarkan Muhammad SAW. sebagai utusan Allah, dan al-Qur'an sebagai kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. ? cara beriman seperti inilah yang dituntunkan oleh Rasulullah saw.dan, cara berimannya orang Islam ternyata tidak sama dengan cara berimannya orang yahudi dan nasrani. Kalau mereka sekedar beriman kepada Allah tetapi tidak mengimani Nabi Muhammad saw. sebagai Rasulullah, padahal di dalam kitab suci mereka ada berita akan datangnya Nabi Muhammad saw. sebagai rasul Allah, maka keimanan mereka belum lengkap, bahkan tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya.

Nuruddin mengingatkan bahwa jangan memahami ayat al-Qur'an sepotong-sepotong, sebab ayat-ayat al-Qur'an itu satu sama lainnya saling menguatkan, jadi harus difahami secara komprehensif. Dia merasa prihatin kalau ada orang yang bekal ilmu agamanya belum cukup kemudian memutar balikkan ayat al-Qur'an disesuaikan

dengan kehendak fikirannya sendiri. Nuruddin mengaku pernah mengikuti rombongan ulama Indonesia melakukan kunjungan ke Amerika Serikat, di sana diterima oleh pemerintah dengan sangat hormat dan baik. Inti dari pertemuan itu adalah untuk menciptakan perdamaian dan dialog komunikatif antar agama di dunia.

Ketika terjadi dialog antar umat beragama baik yang disponsori oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga dana dari luar negeri dan melibatkan pribadi beliau sebagai ulama, maka beliau merasa ada sesuatu di balik berbagai kegiatan keagamaan yang mereka lakukan. Para pemegang dana bantuan kelas dunia pada umumnya adalah dari kalangan orientalis atau minimal dari orang-orang nonmuslim dan mereka menginginkan agar umat Islam menjadi umat yang mudah diatur oleh mereka. Kegiatan keagamaan yang melibatkan berbagai ormas keagamaan termasuk melibatkan para kyai/ulama menurut Nuruddin. sering diikutinya di berbagai forum dan tempat.

Lebih lanjut ia menegaskan:

> Tetapi saya sudah tahu arahnya, para ulama dihimbau agar bisa melakukan komunikasi antar agama, melakukan kompromi-kompromi agar bisa dicapai kerukunan hidup beragama di dunia ini. Tetapi bagi saya menghormati antar agama memang wajib, tetapi melakukan komromi-kompromi apa lagi di bidang keimanan, adalah sesuatu yang mustahil.

Karamullah sependapat dengan adanya keragaman dalam hidup ini. Saya lebih suka menggunakan kata keragaman karena kalau kata *pluralisme, sekularisme,* dan isme-isme lainnya itu bikinan orang kafir yang memang

tidak tahu menahu tentang Islam, tetapi mereka mencoba memecah belah umat Islam dan akhirnya menghancurkan Islam. Akhirnya yang rugi juga umat Islam.

Bahwa keragaman itu menyangkut banyak hal, ada keragaman makhluq Allah (bahwa manusia bukanlah satu-satunya makhluq berakal yang hidup di dunia ini, melainkan ada makhluq yang lain, seperti Jin), ada keragaman suku bangsa, seperti dalam firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 13 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

> Artinya: ”Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.[30]”

Ada *pluralisme* bahasa, seperti dalam surat Ar-rum ayat 22 :

وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦ خَلۡقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱخۡتِلَٰفُ أَلۡسِنَتِكُمۡ وَأَلۡوَٰنِكُمۡۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّلۡعَٰلِمِينَ ٢٢

[30] al-Qur’an, 13 (al-Hujurat): 13.

Artinya: ”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.[31]”

Ada pula pluralisme agama, dalam arti tidak ada paksaan dalam memasuki agama, seperti dalam surat al-Baqarah ayat 256 :

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

Artinya: ”Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.[32]”

Keragaman suku bangsa, keragaman bahasa, keragaman warna kulit baginya adalah sesuatu yang memang seharusnya terjadi di dunia ini. Akan tetapi jika perbedaan agama dan kepercayaan dianggap merupakan sesuatu yang wajar karena menuju kepada tuhan yang satu,

[31] al-Qur’an, 30 (ar-Rum): 22.
[32] al-Qur’an, 2 (al-Baqarah: 256.

maka ini perlu diluruskan logikanya, sebab berbagai macam agama yang ada itu, konsep ketuhanannya tidak sama. beliau tidak membenarkan logika semacam ini.

Lebih lanjut ia menegaskan:

> Kalau manusia memiliki bahasa, suku bangsa yang berbeda dan kita menghormati perbedaan itu, maka hal itu memang sesuai dengan tuntunan Islam yang benar. tetapi jika ada pernyataan bahwa agama-agama yang berbeda dan macam-macam itu pada hakekatnya sama karena mereka semua menuju Tuhan yang satu. Ini tidak bisa dibenarkan. Karena Allah mengutus Nabi dan Rasul itu tidak lain mempunyai ketuhanan yang satu. Akan tetapi ada agama-agama yang kemudian merobah kitab suci mereka dan memasukkan keyakinan lainnya ke dalam kitab suci mereka, seperti Tuhan Esa itu terdiri dari tiga pribadi yaitu Tuhan Bapa, tuhan anak, dan tuhan Roh kudus. Maka keimanan seperti ini jelas tidak selaras dengan konsep keimanan yang diturunkan Allah kepada semua Nabi dan Rasulnya.

Di zaman Nabi juga sering kali ada orang kafir atau orang munafiq yang sengaja menawarkan diri kepada Nabi Muhammad SAW. agar masing-masing keyakinan itu didekatkan, dikompromikan. Bahkan pihak kafir itu mengatakan bahwa sebenarnya berhala yang kami sembah itu pada hakekatnya adalah sebagai penyambung untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini direkan oleh al-Qur'an surat Azzumar ayat 3 :

أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ۚ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِى مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَـٰذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٣﴾

> Artinya: ”Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya". Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar.[33]”

Secara tegas beliau mewanti-wanti kepada ummat Islam di manapun berada agar tidak mudah terpengaruh kepada bujuk rayu terhadap berbagai pemikiran yang secara sepintas sepertinya benar, padahal kalau dicermati lebih dalam, tidak lebih hanyalah jeratan syetan untuk menyesatkan ummat Islam, setidak-tidaknya menumbuhkan rasa ragu ummat Islam terhadap kebenaran agamanya. Nabi Muhammad SAW. adalah contoh orang yang kokoh pendiriannya yang patut kita tiru.

Lebih lanjut ia menegaskan:

> Nabi tidak bergeming sedikitpun dengan rayuan orang-orang kafir tersebut. Nah, sekarang ini

[33] al-Qur’an, 39 (al-Zumar): 3.

> banyak rayuan dari orang-orang yahudi dan nasrani kepada orang Islam, agar kita mau kompromi dengan mereka, mau melakukan pendekatan-pendekatan agar saling berdampingan, saling membantu dan seterusnya. Saya ingatkan, bahwa itu semua adalah rayuan, jangan mudah kita terbujuk dengan rayuan Pluralisme, dan sekularisme, karena semuanya itu sesat dan menyesatkan. Makanya kita mendirikan lembaga pendidikan Muammadiyah, pondok Muhammadiyah. semuanya ini untuk membentengi generasi muda kita agar tidak mudah tertipu oleh bujuk rayu orang-orang musyrik, orang-orang kafir, dan orag-orang munafiq itu.

Sedangkan menurut pandangan Abdullah, mantan ketua majlis Tarjih PDM Lamongan ini secara lugas mengatakan bahwa pluralisme, liberalisme, dan sekularisme itu pada hakekatnya satu juga, yaitu kelompok pemikiran islam kontemporer yang ujung-ujungnya mendistorsi makna Islam yang sebenarnya.

Kesalahan fatal terjadi pada umat Islam ketika mereka mencoba membuat tafsir terhadap al-Qur'an tanpa dilengkapi ilmu alat (ilmu bahasa arab), serta berbagai ilmu dukung yang memadai. Para pendukung hermeneutika misalnya, ingin menafsiri ayat-ayat al-Qur'an dengan pendekatan kebahasaan *ansich* tanpa mengaitkannya dengan *asbabun nuzul*, atau berbagai riwayat seputar kejadian pada saat ayat tersebut diturunkan.

Lebih lanjut Abdullah menyatakan:

> Saya sering berdialog dengan anak-anak muda yang menamakan diri JIMM[34], saya katakan bahwa ajaran agama Islam itu jangan ditafsiri sendiri sesuai dengan kehendaknya sendiri. Jangan menafsiri teks-teks al-Qur'an atau hadits jika tidak memenuhi syarat keilmuannya. Sering ada orang yang merasa melakukan Ijtihad tetapi tidak faham bahasa arab, tidak faham asbabunnuzul, tidak faham ulumul hadith, dll. Ini janganlah terjadi, apa lagi di organisasi Muhammadiyah.

Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan saya yakin juga mempunyai landasan perjuangan yang kokoh dan dilandasi oleh semangat aqidah yang mantap. Bahwa kemudian di internal terjadi perbedaan pemahaman terhadap berbagai nas al-Qur'an, maka perlu dipertemukan, dan dimusyawarahkan, jangan sampai terjadi perbedaan-perbedaan pemahaman itu mengarah kepada perpecahan. Beliau sangat yakin bahwa kebenaran itu akhirnya yang menang, dan kebathilan akhirnya akan kalah. Ini merupakan hukum positif dari Allah SWT.

Lebih lanjut ia menegaskan:

> Saya tidak mendewa-dewakan Muhammadiyah, jika ada yang salah di Muhammadiyah ya saya ingatkan, atau kalau saya tidak sependapat dengan pikiran Muhammadiyah ya kemungkinan *mufarroqoh*,[35]

[34]Maksudnya, pernah beberapa kali berdialog dengan anak-anak jaringan intelektual muda muhammadiyah (JIMM) salah satunya adalah Pradana Boy ZTF, tentang liberalisme dan pluralisme, beliau mengaku sudah memberi beberapa tulisan, tetapi belum dibalasnya.

[35]Ada data informan pendukung, bahwa Umr pernah berbeda pendapat soal metode Hisab dalm menentukan awal Ramadhan dan awal bulan Syawal.

> tetapi yang penting jangan main-main dengan al-Qur'an apa lagi jika penguasaan bahasa arabnya lemah. sebaliknya jangan taqlid dalam memahami Islam, sebab taqlid itu bukan hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan orang lain dan masyarakat secara umum.

Semakin lama isu ini digulirkan maka akan semakin nyata kebohongannya. Saya menganggap kebohongan yang mereka lakukan secara bodoh dan taklid sebagai *"Pelacuran Intelektual"*.[36] Lebih lanjut Umr, mengingatkan dasar yang digunakan para pluralis Indonesia adalah Hermeneutika dalam menafsirkan al-Qur'an. bahwa hermeneutika adalah barang impor dari Kristen barat yang sama sekali tidak ada dasarnya dalam Islam.

Ulama kharismatik ini membuat perumpamaan dalam membedakan antara beriman dan kafir. Dua kata itu bukan sama nilainya, tetapi jauh berbeda. Tidak mungkin Allah SWT. Memberi nilai yang sama antara dua keadaan yang memang berbeda. Sesuatu yang tidak sama, pasti berbeda. Begitu juga sesuatu yang berbeda pasti tidak sama. Perumpamaan yang ia maksud adalah:

> Kalau Allah memberi dua alternatif antara beriman dan Kafir itu bukan berarti pilihan yang sama-sama positif, melainkan tawaran sekaligus peringatan. Barang siapa ingin beriman agar selamat kehidupannya, maka ikutilah ajaranku, tetapi barang siapa yang menolak kebenaran, kafir terhadap ajaran

Beliau cenderung menggunakan pola Ru'yah internasional sebagaimana yang dilakukan oleh HTI (Hizbuttahrir Indonesia) dalam menggunakan metode penentuan awal bulan qomariyah.

[36] Ibid.,

Allah SWT., maka ya silahkan saja tetapi ingat itu bukan jalan yang aku kehendaki.

Misalnya disebutkan dalam surat al-Kahfi ayat 29 :

وَقُلِ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكُمۡۖ فَمَن شَآءَ فَلۡيُؤۡمِن وَمَن شَآءَ فَلۡيَكۡفُرۡۚ إِنَّآ أَعۡتَدۡنَا
لِلظَّٰلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمۡ سُرَادِقُهَاۚ وَإِن يَسۡتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٖ كَٱلۡمُهۡلِ
يَشۡوِي ٱلۡوُجُوهَۚ بِئۡسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتۡ مُرۡتَفَقٗا ٢٩

Artinya: ”Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.[37]”

Penilaian yang agaknya lugas diberikan oleh A.Manar. Dia tidak terlalu risau dengan berbagai aliran atau isme-isme yang ada di kalangan ummat Islam ini, termasuk pluralisme atau pluralits agama, itu semua sama saja, adalah bikinan orang-orang bingung atau minimal bikinan orang-orang dari luar Islam yang ingin memecah belah

[37]al-Qur’an, 18 (al-Kahfi): 29.

umat Islam, dan ingin mendangkalkan akidah umat Islam. Hendaknya warga Muhammadiyah tenang saja, tidak perlu serius memikirkan itu semua, nanti kan bosan sendiri. Lebih lanjut beliau menegaskan pendiriannya:

> bahwa Pluralisme Agama, adalah faham bahwa agama pada intinya sama, semua agama benar, tidak boleh pemeluk agama mengklaim bahwa agamanya saja yang benar, seua agama membawa keselamatan di akhirat dan semua pemeluk agama akan berdampingan di syurga.

Alasan yang dipakai pengikut pluralisme agama adalah QS. al-Baqarah ayat 62, dan al-Ma'idah ayat 69 :

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَٰرَىٰ وَٱلصَّٰبِـِٔينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

> Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mu'min, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.[38]"

[38] al-Qur'ān, 2 (al-Baqarah): 62.

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّٰبِـُٔونَ وَٱلنَّصَٰرَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

> Artinya: ”Sesungguhnya orang-orang mu'min, orang-orang Yahudi, Shabiin dan orang-orang Nasrani, siapa saja (di antara mereka) yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.[39]”

A manar, mengkritisi, bahwa yang dimaksud *”amana bi Allah”* dalam kedua ayat tersebut tidak hanya beriman kepada adanya Allah saja, melainkan beriman kepada ada-Nya, dengan sifat-sifat-Nya (termasuk sifat Keesaan-Nya) dan asma’-Nya yang sempurna, dan juga beriman bahwa Allah telah menurunkan al-Qur’an dan telah mengutus Muhammad SAW. sebagai Rasul-Nya. Apakah orang Kristen, Yahudi, dan lain-lain beriman dengan keesaan Allah?, apakah mereka beriman kepada al-Qur’an dan Nabi Muhammad SAW.?

Menurut QS. Surat al-Fath ayat 13 orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya tergolong oang kafir :

وَمَن لَّمْ يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ فَإِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ سَعِيرًا ﴿١٣﴾

[39] al-Qur’an, 5 (al-Ma’idah): 69.

> Artinya: ”Dan barangsiapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya Kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala.[40]”

Sedangkan dalam surat an-Nur ayat 39, dijelaskan bahwa amal kebajikannya orang kafir tidak ada pahalanya :

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعۡمَٰلُهُمۡ كَسَرَابِۭ بِقِيعَةٖ يَحۡسَبُهُ ٱلظَّمۡـَٔانُ مَآءً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَهُۥ لَمۡ يَجِدۡهُ شَيۡـٔٗا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُۥ فَوَفَّىٰهُ حِسَابَهُۥۗ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ ٣٩

> Artinya: ”Dan orang-orang yang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. Dan di dapatinya (ketetapan) Allah di sisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitungan-Nya.[41]”

Dalam surat Ali Imran ayat 19, dan ayat 85, dan surat al-Maidah ayat 3, ditegaskan bahwa agama yang diridhai dan diterima Allah hanya Islam.

[40] al-Qur’an, 48 (al-Fath): 13.
[41] al-Qur’an, 24 (al-Nur): 29.

إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ ۗ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿١٩﴾

Artinya: ”Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.[42]”

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: ”Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.[43]”

Ia merasa prihatin terhadap banyaknya para intelektual muslim Indonesia yang mudah silau dan kemudian mengamini begitu saja pemikiran-pemikiran

[42] al-Qur’an, 3 (Ali-Imran): 19.
[43] al-Qur’an, 3 (Ali-Imran): 85.

yang dilontarkan oleh para pemikir barat yang anti Islam. Mereka mencoba melakukan penafsiran-penafsiran terhadap nash-nash al-Qur'an secara rasional tetapi keluar dari koridor keislaman. Mereka menemukan metode tafsir yang bernama hermeneutika, kemudian mencoba menerapkannya untuk penafsiran terhadap al-Qur'an. Para intelektual kita serta-merta kagum dan mengamini metode pemikiran mereka. Sepatutnya kita waspada.

Lebih lanjut ia menegaskan:

> Kalau agama selain Islam benar juga, mengapa yang diridhai dan diterima hanya Islam? WC. Smith, lanjut A. Manar, seorang pendeta pendiri Islamic Studies di McGill University Canada, memaknai Islam secara linguistik-hermeneutik: berserah diri kepada Tuhan, dan kemudian diusung oleh Nur Cholis Madjid ke Indonesia. Makna yang dikemukakan oleh pendeta itu adalah makna lughowi bukan makna istilahi-Shar'i. Makna yang benar adalah makna yang dijelaskan oleh pembawa wahyu al-Qur'ān, yaitu: bersyahadatain dengan segala konsekwensinya, bershalat dan seterusnya, bukan seperti yang difahami pendeta tersebut. Kita percaya kepada Nabi Muhammad SAW. atau kepada pendeta WC. Smith ?

Memang hidup beragama bukan semata-mata mengunakan akal fikiran yang cerdas, tetapi juga harus disinari oleh iman yang mantap. Persoalan iman inilah yang membedakan antara seorang muslim dan seorang kafir.

Lebih lanjut ia menegaskan:

> Kalau semua agama itu membawa keselamatan di akhirat, mengapa Rasulullah saw. menulis surat

kepada aja-raja yang tidak beragama Islam dengan kalimat :

" أسلم تسلم " ? apakah selain orang Islam mau beriman kepada al-Qur'an? tentu tidak ! bahkan dalam surat al-A'rof ayat 40 ditegaskan (dalalah ayat ini adalah *Qath'iyyah* bukan *dhanniyyah,* sehingga pengingkaran terhadap dalaah Qath'iyyah suatu ayat hukumnya Murtad), bahwa orang yang mendustakan al-Qur'an tida akan masuk syurga sampai unta bisa masuk lubang jarum, maksudnya selamanya mereka tidak akan masuk syurga.

Adapun *pluralitas* dalam arti kemajemukan merupakan sebuah kenyataan bahwa keragaman agama yang hidup berdampingan adalah niscaya. Dalam menghadapi pluralitas, orang Islam bersikap inklusif dalam artian tetap toleran dan bergaul baik dengan pemeluk agama lain selagi tidak merugikan agamanya, sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran surat al-Kafirun ayat 1-6, dan surat al-Mumtahanah ayat 8-9 :

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿١﴾ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ
أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ﴿٤﴾ وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ﴿٥﴾
لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ ﴿٦﴾

Artinya: "Katakanlah: "Hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku

sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan untukkulah, agamaku".[44]"

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ
يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓاْ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ
ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ
وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ وَظَٰهَرُواْ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ
وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٩﴾

Artinya: "Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang ḍalim.[45]"

[44] al-Qur'an, 60 (al-Kafirun): 109.
[45] al-Qur'an, 60 (al-Mumtahanah): 8-9.

Sikap toleran, bukan berarti tidak melakukan dakwah, dan bukan pula berarti mau ikut mengamalkan ajaran agama lain, bukan pula berarti mau meninggalkan kewajiban demi menjaga hubungan baik dengan pemeluk agama lain, atau menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal demi untuk mencari ridha manusia.

2. Fundamentalisme.

Jika Islam liberal tidak bisa dipertentangkan dengan kelompok-kelompok dalam taksonomi (model) lama, maka dalam kaitannya dengan pembaharuan pemikiran Islam nampaknya ada dua musuh utama islam liberal, yakni *konservatisme* yang merupakan musuh historis sejak munculnya pertama kali isla liberalis. Musuh kedua adalah *fundamentalisme* yang muncul akibat gesekan Islam dan politik setelah negara-negara muslim meraih kemerdekaannya.[46] Ada anggapan bahwa Konservatisme sebagai ideologi yang bertanggung jawab terhadap kemunduran dan keterbelakangan umat Islam. Bahkan ada anggapan bahwa banyak ilmuwan yang telah berjuang mengikis habis ideologi konservatif dan fundamentalis, misalnya Muhammad ’Abduh, ’Ali Abd al-Raziq, dan diteruskan generasi berikutnya seperti Hassan Hanafi, Thayyib Taizini, dan Mohammed Abid al-Jabiri.

[46]Luthfi As-Syaukani, “Dari Taksonomi Lama ke Islam Liberal: Pemikiran Islam Modern”, dalam, *http://www.islamlib.com* , diakses pada tanggal 20 April 2009. Luthfi lebih lanjut mengatakan bahwa kunci persoalan yang dihadapi umat Islam modern adalah Konservatisme dan Fundamentalisme, sebab dua ideology tersebut dianggap sebagai sebab utama yang mempengaruhi sikap keberagamaan, dan selanjutnya mendorong sikap-sikap social politik umat Islam.

Fundamentalisme dianggap sebagai ideologi berbahaya karena menyimang dari pluralitas dan inklusivitas ajaran Islam. Fundamentalisme dianggap juga menyimpang dari kedamaian (*al-Salam*), dan keragaman (*al-shu'ub wa qabail*). Fundamentalis juga dianggap selalu mengklaim kebenaran hanya dirinya sendiri, dan tak jarang memaksakan keinginan mereka dengan cara-cara kekerasan. Hamim Ilyas, menyebutkan bahwa *fundamentalisme* adalah satu tradisi interpretasi sosio religius yang menjadikan Islam sebagai agama dan ideologi, sehingga yang dikembangkan di dalamnya tidak hanya doktrin teologis, tetapi juga doktrin-doktrin ideologis. Lebih jauh ia mengatakan bahwa doktrin-doktrin itu dikembangkan oleh tokoh-tokoh pendiri *fundamentalisme* modern, yakni Hasan al-Banna, Abul al-A'la al-Maududi, Sayyid Qutb, Ruhullah Khumaini, Muhammad Baqir al-Shadr, Abd al-Salam Faraq, Said Hawa, dan Juhaiman al-Utaibi.[47]

Amien Rais menilai bahwa meskipun ada pandangan yang agaknya minor tentang fundamentalisme, tetapi baginya yang perlu diambil bukan ajarannya, melainkan spiritnya atau semangatnya. Amien Rais, yang ketika menyelesaikan disertasinya meneliti dan menulis tentang Ikhwanul Muslimin di Mesir, baginya fundamentalisme jika dimaknai secara positif adalah pemahaman Islam secara lebih mendasar (radik), sebab seseorang jika memahami Islam hanya dari kulitnya saja maka tidak akan

[47]Adian Husaini, "Hermeneutika dan Fundamentalisme", dalam, *ww.insistnet.cominsists-2profile.gallery template* , diakses pada 14 Desember 2007.

memperoleh pelajaran yang mendalam dan benar tentang Islam.

Syafii Ma'arif menilai bahwa sebenarnya *fundamentalisme* muncul karena adanya dorongan kesetiakawanan sesama saudara muslim yang dizalimi (palestina, afganistan, dll). Kesetiakawanan itu kemudian memunculkan sikap anti barat dan memusuhinya secara membabi buta, bahkan menutup diri tidak memberi kesempatan untuk berdialog dengan mereka. Kebenaran Islam sebagai ajaran agama yang selama ini mereka yakini merupakan harga mati dan tidak memungkinkan lagi adanya tawar menawar. Saya menilai sikap tersebut bermuara pada klaim kebenaran hanya ada pada dirinya saja, oleh sebab itu saya tidak membenarkan sikap memonopoli kebenaran termasuk Islam. Sikap memonopoli kebenaran pada akhirnya memunculkan sikap intoleran terhadap orang lain yang tidak sama dengan dirinya.

Lebih jauh Syafii Ma'arif mengungkapkan bahwa al-Qur'an jauh lebih toleran dibandingkan segelintir orang yang intoleran terhadap perbedaan, padahal kehidupan ini diciptakan oleh Allah beraneka ragam perbedaan, tinggal manusia ini mampu atau tidak mengelola perbedaan itu. *Fundamentalisme* yang hidup di Indonesia akhir-akhir ini berpotensi memunculkan instabilitas, dan tentu ini bukan sesuatu yang kita inginka. Saya berpendapat bahwa wajah Islam di Indonesia adalah wajah Islam yang anggun dan toleran. Bagi saya Islam moderat dan inklusif paling pas menuju Indonesia mencapai cita-cita kemerdekaannya. Golongan fundamentalis adalah kategori intoleran ini.

Ada beberapa teori tentang munculnya *fundamentalisme* di dunia Islam ini, yang paling banyak dikutip adalah, kegagalan umat Islam menghadapi arus modernitas yang dinilai telah sangat menyudutkan Islam karena ketidak berdayaan menghadapi arus panas itu golongan fundamentalis mencari dalil-dalil agama untuk enghibur diri dalam sebuah dunia yang dibayangkan belum tercemar. Kemdian mereka menyusun kekuatan untuk melawan modernitas melalui berbagai cara bahkan kekerasan sekalipun. Saya menilai masalah Indonesia yang merupakan jumlah muslim terbesar di dunia ini, tidak mungkin diselesaikan oleh ota-otak sederhana (kaum fundamentalis) yang lebih memilih jalan pintas.

Din Syamsuddin melihat *fundamentalisme* merupakan fenomena perkembangan pemikiran Islam kontemporer secara global. Tetapi kalau saya melihatnya dalam perspektif Muhammadiyah sesunggunya Muhammadiyah ingin mewujudkan konsep keummatan yang bukan ekstrim kanan atau ekstrim kiri, melainkan umat yang wasathiyah. Jadi yang perlu kita kembangkan terutama dalam konteks masyarakat Indonesia ke depan adalah konsep *Ummatan Wasatho* (ummat tengahan).

Muhammadiyah, lebih tepat memposisikan diri sebagai ummat tengahan. Namun demikian jika kita merunut ke belakang pada masa-masa awal perkembangan Muhammadiyah, sesungguhnya teologi Muhammadiyah periode awal, bercorak teologi proporsional yaitu puritan ortodoksi, dan salafiyah dalam bidang ibadah mahdhoh.

Yunahar Ilyas menilai bahwa apa yang disebut *fundamentalisme* memang sebuah fenomena perkembangan pemikiran Islam kontemporer terutama di Indonesia perlu kita cermati dan sikapi dengan penuh kearifan.

Fundamentalisme sebagai faham pemikiran bisa bermakna positive jika yang dimaksudkan adalah beragama dan mempelajari ajaran agama Islam secara mendasar atau mendalam. Bahwa segala sesuau yang berkaitan dengan ajaran agama Islam harus difahami dan dipelajari secara mendasar, mendalam. Dengan begitu kita akan memperoleh pemahaman yang benar, jelas dan tidak setengah-setengah. Akan tetapi, *fundamentalisme* sebagai sebuah faham pemikiran juga bisa bermakna negatif jika dimaksudkan adalah memperjuangkan ajaran atau shari'at Islam dengan semangat kekerasan dan radikalisme. Tidak ada paksaan dalam memasuki agama Islam, tetapi jika seseorang sudah beragama Islam maka wajib mentaati ajaran Islam.

Warga Muhammadiyah Paciran memaknai fenomena *fundamentalisme* ini dalam varian yang berbeda sesuai dengan sudut pandang mereka masing-masing dalam melihatnya. Sebagian memahami bahwa *fundamentalisme* bermakna positif, dan sebagian lain memaknai f*undamentalisme* sebagai sesuatu yang negatif.

Damanhuri merasa prihatin melihat tingkah laku kelompok *fundamentalisme* Islam akhir-akhir ini yang cenderung melakukan berbagai tindakan anarkhis untuk mencapai tujuan atau cita-cita mereka. Lebih jauh ia mengatakan:

> Di sudut kiri depan rumah saya (dalam jarak hanya puluhan meter) ada warung kopi dan jualan jajanan, banyak langganannya, dan banyak anak-anak muda yang nongkrong di warung itu. Tetapi beberapa hari kemudian warung itu sudah rata dengan tanah. Usut punya usut pemilik warung itu bilang bahwa warungnya diserbu dan dirusak oleh FPI (forum pembela Islam), dengan dugaan sebagai sarang maksiat. Pemilik warung itu bilang bahwa semua itu fitnah, mestinya mereka kan ngecek dulu sebelum bertindak anarkhis. Demikian kenyataan yang saya lihat

Sebenarnya, demikian Damanhuri melanjutkan penilaiannya, *fundamentalisme* Islam jika mau dimaknai secara positif bisa juga menjadi positif Bahwa kita umat Islam harus memahami ajaran agama Islam itu lebih dalam, mendasar, mengakar, dengan semangat akidah yang kokoh, keimanan yang mantap, dan dengan perilaku yang santun dan berakhlaqul karimah. Inilah ajaran agama Islam yang benar itu dan saya setuju atau mendukung hal itu. Tetapi nilai-nilai kebenaran dari ajaran Islam yang sedemikian gamblang itu tidak serta merta bisa diaplikasikan pada semua komunitas atau lingkungan masyarakat yang majemuk ini. Kita menyadari bahwa masyarakat kita bukan hanya majemuk dalam arti budaya dan adat istiadat, tetapi juga majemuk dalam hal pemahaman dan pemikiran keagamaannya, hal ini terjadi salah satu sebabnya adalah tingkat intelektual mereka masing-masing tidak sama.

Oleh sebab itu dalam mengaplikasikan nilai-nilai keislaman di tengah-tengah masyarakat dibutuhkan kearifan, persuasi-persuasi yang memungkinkan mereka bersedia berdialog, dan inilah inti dari dakwah Islam amar makruf nahi munkar itu dalam makna dan arti yang proporsional. Kita diingatkan oleh Allah untuk berlemah lembut dalam melakukan dakwah Islam amar makruf nahi munkar :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: ”Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma`afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

Dakwah Islam menurut beliau harus dilakukan dengan lemah lembut, jauh dari kekerasan, apalagi kesombongan dan arogansi. Rasulullah sendiri menghabiskan seluruh umurnya untuk kegiatan dakwah, dan tidak pernah beliau melakukannya dengan kekerasan

apalagi memaksakan kehendak. Dengan kata lain ummat Islam harus menghormati perbedaan, yang penting iman kita tetap terjaga, Islam kita tetap utuh dan kaaffah.
ia memungkasi pendapatnya dengan mengatakan:

> ”Saya yakin jika dakwah Islam dilakukan dengan kekerasan dan pemaksaan, malah menjadikan mereka lari. Dan akhirnya fihak yang melakukan tindakan kekerasan itu malah dimusuhi masyarakat. Saya mohon maaf kalau penilaian saya ini salah atau menyinggung semua fihak, inilah yang bisa saya lakukan”.

Penilaian yang dilakukan oleh Shabir hampir senada, Cuma agak memberi kelonggaran bagi para fundamentalis itu, karena tujuan mereka sebenarnya mulia hanya faktor teknis saja yang perlu dihaluskan. Memang kita diajarkan untuk menegakkan kebenaran dan merubah kemungkaran, sebagaimana sabda Rasul :

من رأى منكم منكرا فليغيّربيده فإن لم يستطع فبلسانه

وإن لم يستطع فبقلبه وهو أضعف الإيمان (رواه البخارى ومسلم) .

Artinya: “Barang siapa di antara kamu menyaksikan kemungkaran maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya, maka jika dia tidak mampu maka hendaklah dia merubahnya dengan lesannya, dan jika dia tidak mampu maka hendaklan dia merubahnya dengan hatinya, dan dia adalah selemah-lemah iman (HR. Bukhari dan Muslim).”

Dari hadits ini jelas bahwa yang wajib kita lakukan jika menjumpai kemungkaran, adalah merubah (bukan menghancurkan) kemungkaran itu untuk menjadi sesuatu yang makruf. Jadi merubah itu membutuhkan proses, dan tahapan-tahapan tertentu. Dalam catatan sejarah Nabi Muhammad SAW. Sepanjang dakwah yang dilakukannya tidak pernah disertai dengan ancaman, apalagi kekerasan, bahkan terhadap orang yang membencinya-pun beliau tetap memperlakukannya dengan baik. Dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwa Nabi setiap pagi hendak shalat shubuh ke masjid selalu disiram oleh seseorang di balik rumahnya. Suatu saat pagi itu Nabi tidak mendapat siraman air sebagaimana biasanya. Nabi-pun menghampiri pemilik rumah itu dan menanyakan kenapa kok tidak menyiramnya pagi tadi? orang itu menjawab: Ya, pagi tadi saya tidak menyiram anda karena saya sedang sakit. Nabi-pun mendoakan semoga cepat sembuh agar bisa menyiramnya lagi.

ia menegaskan bahwa seyogyanya ummat Islam mampu menunjukkan fungsi agama Islam yang memberi rahmat bagi seluruh alam. Jika agama Islam ini dilaksanakan ummat Islam dengan sebaik-baiknya maka bukan hanya ummat Islam yang merasakan manfaat dan keindahan Islam, melainkan juga umat manusia apapun agamanya, mereka akan merasakan juga manfaat dan indahnya Islam ini.

Lebih lanjut ia menegaskan:

> ”bahwa kita harus menampakkan ajaran Islam ini secara anggun, menyenangkan, mendamaikan, sehingga benar-benar rahmatan lil alamin. Kebijaksanaan dalam dakwah Islam benar-benar

merupakan perintah Allah, yaitu dalam firmannya surat An-Nahl ayat 125" :

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ

Artinya: "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.[48]"

Apa yang dikemukakan oleh Shabir, berbeda dengan pendapat Burhanuddin, Ustad yang juga koordinator FPI ini merasa bahwa dakwah Islam yang ia lakukan terutama dalam hal *"nahi Munkar"* sudah tidak kurang-kurang, artinya kami sudah mengingatkan secara baik-baik. Tetapi kesabaran demi kesabaran itu malah menjadikan mereka semakin merajalela. Akhirnya kami terpaksa melakukan tindakan yang tegas (bukan keras). Tujuan kami agar mereka jera dan tidak melanjutkan atau melestarikan kemaksiatan itu lagi.

Apa yang disebut *fundamentalisme*, kata dia, sebenarnya adalah istilah yang sengaja dipakai oleh pihak Barat/Amerika yang anti Islam untuk menyudutkan Islam.

[48] al-Qur'an, 16 (an-Nahl): 125.

Beliau merasa prihatin terhadap penyalah gunaan pengertian *fundamentalisme.* Seringkali *fundamentalisme* diberi makna kolot serta dianggap sebagai kelompok muslim yang berbahaya. Orang yang diidentikkan dengan fundamentalisme merasa tersisih, bahkan menjadi orang yang dicaricari oleh pihak keamanan lantaran dianggap mengganggu keamanan. Dan yang lebih mengenaskan adalah bahwa fundamentalisme dianggap merupakan cikal-bakal munculnya terorisme.
Lebih lanut ia mengatakan:

> Fundamentalisme menurut saya adalah faham keberagamaan secara bersungguh-sungguh dan mendasar. Fundamen adalah dasar atau asas, jadi semua umat Islam harus beragama secara mendalam dan mendasar. Tetapi istilah ini kemudian sengaja dibelokkan oleh pihak-pihak yang anti Islam sebagai faham yang sesat dan anti perdamaian. Silahkan lihat, di Negara manapun di dunia ini, jika umat Islam yang minoritas pasti jadi sasaran kekerasan dan jadi bulan-bulanan dari pihak yang mayoritas. Tetapi di Negara manapun jika Islam mayoritas maka agama lain yang minoritas pasti mendapat perlindungan semestinya dari Islam yang mayoritas. Barat dan Amerika sesungguhnya sedang ketakutan jika Islam sebagai ideology alternative ini akan benar-benar memimpin dunia menggantikan ideology kapitalis maupun Sosialis.

Penilaian Burhanuddin sama dengan yang disampaikan oleh Nuruddin. Beliau mengaku sering diejek atau diremehkan oleh berbagai fihak karena dianggap cara beragamanya kuno atau tidak mengikuti

perkembangan zaman. Saya pernah ditawari untuk mendirikan sebuah LSM dengan dukungan dana yang sangat melimpah. Dalam LSM itu harus membuat proyek memberi payung perlindungan kepada semua agama di Indonesia ini. Tetapi saya tolak karena saya tidak ingin ummat Islam nantinya dijerumuskan ke lembah kesyirikan. Saya juga pernah ditawari beasiswa santri-santri saya ke Amerika dengan syarat harus laki-laki dan wanita. Saya hanya merestui yang laki-laki saja tapi ditolak, akhirnya tidak jadi. Jadi intinya *fundamentalisme* itu sebenarnya baik-baik saja, tetapi sudah terlanjur diberi cap jelek oleh pihak yang benci Islam, bahwa fundamentalisme itu penghambat kemajuan Islam.

Lebih lanjut ia mengemukakan sikap dan pengalamannya ketika melakukan lawatan ke Amirika atas beaya pemerintah Amirika, sebagai berikut:

> Saya pernah ditawari untuk mendirikan sebuah LSM dengan dukungan dana yang sangat melimpah. Dalam LSM itu harus membuat proyek memberi payung perlindungan kepada semua agama di Indonesia ini. Tetapi saya tolak karena saya tidak ingin ummat Islam nantinya dijerumuskan ke lembah kesyirikan. Saya juga pernah ditawari beasiswa santri-santri saya ke Amerika dengan syarat harus laki-laki dan wanita. Saya hanya merestui yang laki-laki saja tapi ditolak, akhirnya tidak jadi. Jadi intinya fundamentalisme itu sebenarnya baik-baik saja, tetapi sudah terlanjur diberi cap jelek oleh pihak yang benci Islam, bahwa fundamentalisme itu penghambat kemajuan Islam, dll.

Peradaban Islam pernah memimpin dunia selama sekitar delapan abad (delapan ratus tahun), tetapi di sana sini tidak ada kesombongan dan kecongkakan. Tetapi ketika Barat dan Amerika merasa memimpin dunia sekitar duaratus tahunan belakangan ini, hampir semua perilakunya diwarnai kesombongan dan kecongkakan. Sekali lagi *fundamentalisme* adalah faham yang positif sepenuhnya.

Karamullah membuat analisis agak beda. Beliau tidak suka memakai istilah-istilah yang berbau barat apalagi yang sengaja menyudutkan umat Islam agar kacau dan bertikai melulu. Muhammadiyah sudah ada tuntunan beragama yang baku dan insyaallah tidak akan mencelakakan siapapun yang mengikutinya. Sistematika cara keberagamaan di Muhammadiyah adalah: memahami aqidah, memahami akhlaq, memahami ibadah, dan memahami mu'amalah dunyawiyah. Adapun metodenya adalah: 1) Untuk memperoleh pemahaman agama Islam yang benar harus melalui dasar utamanya yaki al-Qur'an dan Sunnah, 2) Mempelajari agama Islam (terutama bagi pemula) harus menggunakan rujukan atau referensi berua kitab atau buku-buku yang ditulis oleh para ulama dan *zu'ama* yang memiliki kopetensi di bidangnya, 3) Mempelajari agama Islam harus secara integral bukan parsial *(kulliyyah bukan juziyyah)*, 4) jangan mempelajari agama Islam berdasarkan kenyataan masyarakat setempat, maksudnya bahwa Islam itu tidak sama dengan umat Islam, oleh sebab itu pelajarilah *Risalah Islam* bukan berdasar orang per orang.

Dalam banyak kesempatan ceramah dan taushiyahnya, beliau malah menyatakan bangga disebut sebagai orang yang fundamentalis. Baginya tidak perlu

takut hanya dicap sebagai fundamentalis. Paling-paling orang yang mengecapnya fundamentalis tidak faham benar makna fundamentalis itu. Memang menyadarkan orang itu, kata beliau, tidak semudah membalikkan telapak tangan, memerlukan waktu yang panjang. Disinilah pentingnya pendidikan agama Islam bagi ummat Islam terutama generasi mudanya. Beliau menganggap penting makna lembaga ”Pondok Pesantren” sebagai lembaga kawah candradimuka untuk membentuk karakter generasi muda yang Islami.

Lebih lanjut Krm, menegaskan:

> “Jika umat Islam selalu mendasarkan pemahamannya, perilakunya, selalu pada al-Qur’an dan Assunah, maka itu berarti umat Islam ini termasuk Fundamentalis. Jadi kita semua umat Islam ini harus menjadi Fundamentalis. Jangan takut dibilang fundamentalis, harus bangga disebut fundamentalis, karena menurut saya fundamentalis itu artinya beragama secara mendasar. Jangan sampai beragama kita tidak mendasar, sebab kalau tidak mendasar berarti setengah-setengah. Jadi sekali lagi kita wajib menjadi fundamentalis, tetapi tetap harus berakhlaqul karimah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Saw. (uswatun hasanah).”

Jika umat Islam mau mempelajari agama Islam seperti tersebut di atas insyaallah akan menjadi manusia muslim yang kokoh dan kuat aqidahnya, taat ibadahnya, santun perilakunya, dan siap memperjuangkan agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Berjuang lewat Muhammadiyah insyaallah

legal, formal, tidak akan direcoki oleh siapapun, saya kira itu pendapat saya.

Abdullah menanggapi persepsi Barat tentang fundamentalisme. Barat tidak akan henti-hentinya mengecap Negara-negara Islam sebagai Negara-negara yang penuh masalah, sebagai negara sarang teroris, sebagai negara sumber keterbelakangan, kemiskinan, dan cap-cap lainnya yang serba negatif. Tujuannya adalah agar umat Islam di Negara-negara Islam merasa inferior, dan akan sibuk mengurusi persoalan-persoalan kecil yang sengaja dibesar-besarkan agar kita umat Islam tidak berfikir ke depan.

Ummat Islam dalam seluruh kehidupannya harus selalu menjunjung tinggi keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dll. Bahkan seluruh ummat Islam harus senantiasa berakhlaqul karimah. Salah satu contoh berakhlaqul karimah adalah sealu mengendalikan hawa nafsu, penyabar, tidak suka marah, lapang dada, dan luas pandangan, selalu arif dan bijaksana, selalu memikirkan dan memperhitungkan baik buruk dari apa yang akan dilakukannya. Meskipun begitu, bukan berarti kita tidak boleh marah. Nabi SAW. sendiri memperbolehkan kita untuk marah, tetapi dalam kondisi tertentu saja, misalnya ketika harga diri kita diinjak-injak oleh orang lain maka bolehlah kita marah.

Lebih lanjut ia menegaskan:

> "Memang nabi Muhammad SAW. telah memberi contoh bagaimana melakukan dakwah amar makruf nahi munkar. Nabi pun melarang marah kecuali dalam dua hal yakni pertama ketika agama ini dilecehkan oleh musuh kita harus marah, kedua ketika harga dan martabat umat

> Islam diinjak-injak maka kita wajib marah untuk membela diri. Dalam hal nahi mungkar juga begitu, kalau berkali-kali diingatkan tetap bandel maka harus gerakan-gerakan tertentu yang tegas agar mereka ada rasa jera dan tidak main-main dengan kemaksiatan yang mereka lakukan, agar segera tobat dan kembali kepada ajaran yang benar."

Fundamentalisme, sebenarnya hanya tameng bagi barat dan Amerika untuk untuk menyusupkan virus skeptis kepada para cendekiawan muslim kita, sehingga akhirnya para cendekiawan kita terjangkit penyakit *skeptisisme* yakni ragu dan tidak percaya diri terhadap agamanya sendiri. Ujung-ujungnya kemudian para cendekiawan itu memusuhi umat Islam sendiri, dan inilah yang menyulitkan kita sampai sekarang.

A. Manar lebih datar dalam menyikapi *fundamentalisme*. Ustad yang juga anggota majlis tarjih ini menegaskan bahwa sebenarnya kita sudah punya tuntunan beragama di Muhammadiyah secara lebih lengkap. Secara ideologis kita punya rumusan *Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah*, isi dan kandungannya berkaitan dengan penguatan akidah perjuangan menegakkan agama dengan ittiba' rasul dan dengan ketertiban organisasi, kemudian ada rumusan *Kepribadian Muhammadiyah*, isi dan kandungannya mengenai hakekat Muhammadiyah, dasar amal usaha, Pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah, dan sifat/karakter Muhammadiyah. Selain itu ada rumusan *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah*, rumusan ini memberi panduan kepada warga dan

keluarga muslim, bagaimana ketika menjadi warga Negara yang baik, bagaimana ketika menjadi professional, bagaimana ketika menjadi pejabat atau aktifis Organisasi, dll.

Dalam beragama hendaklah ummat Islam mengikuti al-Qur'an dan Sunnah, serta para salafussalihin yakni kelompok ummat Islam pada periode awal, sebab mereka inilah kelompok ummat Islam yang terjamin aqidanya, mantap keimanannya, dan memiliki sikap kejuangan yang gigih menghadapi musuh-musuh Islam.

Dalam persoalan ini ia menegaskan:

> "Kita juga punya Himpunan Putusan tarjih, jika kita cermati dalam *kitab al-iman* di sana akan kita temui bahwa Aqidah shohihah sebagai pedoman keyakinan kita, apabila kita mengikuti petunjuk para *salaf al-Shalih* , maka insyaallah kita termasuk *al-Firqah al-Najiyah* yakni kelompok aliran yang selamat. Dengan pemahaman ini sesungguhnya kita tak perlu risau dengan berbagai aliran atau isme-isme yang ada sekarang ini, karena semua itu hanya buatan manusia saja."

Mun, menilai bahwa istilah *fundamentalisme*, *radikalisme*, *terorisme*, itu pada mulanya diciptakan oleh-orang sekuler barat dan dialamatkan kepada nasrani yang menolak modernisasi. Istilah-istilah ini kemudian digelarkan kepada kaum muslimin yang menolak sistem barat dengan berbagai stigma (anarkhis, keras, radikal, garis keras, dll.). Fundamentalisme telah digunakan sebagai alat politik barat. Maka kita kaum muslimin tidak usah menggunakan dan mengembangkan istilah fundamentalisme tersebut agar kita tidak terjebak oleh

imperialis barat. Kita tidak usah ikut memperdebatkan penyebab munculnya fundamentalisme yang dikemukakan oleh para sarjana itu. Kita tidak usah berdebat tentang siapa yang benar pendapatnya, apakah Yaques Berque, Maxisme Rodinssonatau, F. Rahma, atau Garaudy, atau Syafii Ma'arif, atau Azyumardi Azra, dsb. Bedebat tentang itu tidak ada manfaat yang signifikan, melainkan malah menguntungkan pihak barat dan kaki tangannya.

Ia merasa sedih dengan ulah beberapa cendekiawan muslim kita yang dengan begitu saja percaya omongan orang-orang barat yang mengklaim bahwa fundamentalisme atau puritanisme sebagai momok yang harus dimusuhi bahkan harus dihabisi. Ulah mereka ini sebenarnya malah merugikan umat Islam sendiri, karena ummat Islam ini tidak semua memiliki ilmu yang memadai sehingga mereka seringkali terjerumus ke dalam taqlidisme atau mengikuti begitu saja omongan dan sikap para elitnya.

Lebih jauh ia menegaskan:

"Bisa saja, *fundamentalisme* diberi makna yang positif menurut kita, tetapi makna yang dimaksud oleh barat dan kaki tangannya itu mempunyai konotasi negatif. Dan kesan negatif inilah yang dipublikasikan lewat mas media, sehingga opinin public terhegemoni bahwa *fundamentalisme* itu tetap negatif".

Adapun Puritanisme, menurut A. Manar dijelaskan sebagai berikut:

> Muhammadiyah sejak awal sampai sekarang telah banyak melakukan tajdid dalam arti moderisasi dalam urusan duniawi, dan purifikasi dalam bidang

> aqidah dan ibadah mahdhah, sesuai madzhab salafiyah shalihah (ulama Mutaqaddimin). Jadi Muhammadiyah telah melakukan tajdid dalam urusan duniawiyah, dan aqidah serta ibadah mahdhah secara proporsional.[49]

Dari penegasan beliau ini, bisa dimengerti bahwa sebenarnya dalam Persyarikatan Muhammadiyah, sesungguhnya telah ada dan akan selalu terjaga nilai-nilai puritanisme yang selama ini dikembangkannya. Nilai-nilai puritanisme Muhammadiyah bisa dilihat dari banyaknya statemen dan rumusan-rumusan ideology yang ditetapkannya berdasarkan pada nash-nash yang sharih, bahkan Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi keagamaan yang selalu mendengungkan semboyan "Kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah".

3. Negara Islam Indonesia.

Sebagaimana diketahui, ide atau gagasan pendirian Negara Islam di Indonesia telah melahirkan bermacam respond an interpretasi di masyarakat Indonesia, baik dari kalangan muslim maupun non muslim. Sebagian berpandangan bahwa gagasan mendirikan Negara Islam di Indonesia itu memang benar-benar ada dan akan direalisasikan.[50]

Secara histories, NII (Negara Islam Indonesia), atau DI (Darul Islam) pernah dideklarasikan oleh S. Maridjan kartosuwiryo di Jawa Barat, kemudian diteruskan oleh

[49]Khusus dalam menilai puritanisme ini, Mun, nampaknya masih samar-samar tentang pemaknaannya tentang puritanisme.

[50]Misalnya, Kyai Haji Abdurrahman Wahid (alm), mengatakan bahwa ide atau aspirasi untuk mendirikan Negara Islam di Indonesia itu benar-benar ada.. selanjutnya lihat: Kyai Abdurrahman Wahid (ed). Ilusi Negara Islam (Jakarta: The Wahid Institut & Maarif Institut, 2009), 127-128.

Daud Beureuh di Aceh, dan Kahar Mudzakar di Sulawesi Selatan. Akhir-akhir ini di aceh diberlakukan hokum Islam, berikutnya banyak perda-perda shari'a diterapkan di beberapa daerah. Ini semua mengindikasikan bahwa ide mendirikan Negara Islam di Indonesia itu memang ada.

Di fihak lain ada sebagian yang berpendapat bahwa isu Negara Islam itu sengaja dihembuskan oleh fihak tertentu untuk mendiskreditkan kelompok-kelompok Islam. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa mainstream Islam di Indonesia sampai saat ini (NU dan Muhammadiyah) menganggap bahwa NKRI (Negara Kesatuan Repulik Indonesia) adalah sudah final, bahkan mereka sudah tidak pernah mengagendakan wacana pembentukan Negara Islam Indonesia, hal ini adalah riil dan factual.

Di kalangan non muslim, pada umumnya bersikap obyektif dengan melihat kekuatan politik yang ada. Jika partai-partai berhaluan kebangsaan masih menguasai parlemen, maka aspirasi Negara Islam tidak akan terwujud.[51] Tetapi sebagian lain dari kalangan non muslim tetap pada pandangan secara umum bahwa ide mendirikan Negara Islam itu ada dan tidak pernah akan mati. Kenyataan di lapangan menunjukkan banyaknya elit pimpinan Islam maupun Muhammadiyah yang punya persepsi tertentu tentang ide mendirikan Negara Islam dari kalangan atau kelompok-kelompok umat Islam di Indonesia ini.

[51]Belakangan PKS menolak tuduhan akan mendirikan atau setidaknya menfasilitasi pendirian Negara Islam. Bahkan hasil munas Juni 2010 ini PKS menyatakan sebagai partai terbuka, artinya bukan lagi beridentitas Islam dan memungkinkan elit pimpinan PKS terdiri dari orang-orang non muslim.

Amien Rais merasa risih dan tidak habis piker masihadanya kelompok masyarakat yang berpikiran cekak (berpikir pendek) seperti itu. Kita ini sedang berjuang habis-habisan untuk mewujudkan masyarakat yang egaliter, berkemajuan, berkeadilan, yang masing-masing pribadinya bertanggungjawab terhadap perilaku kesehariannya, bebas korupsi kolusi dan nepotisme, dan seterusnya. Apa artinya Negara Islam kalau kemaksiatan, kejahatan, dan ketidak adilan merajalela ? menurut saya, yang namanya Negara, bukan lagi bermakna simbolik seperti negara Islam, atau Negara Kristen, dll. tetapi bagaimana kita menjadikan Islam sebagai landasan etik dan moral bagi para elit kekuasaan, dan elit bangsa ini, itu yang penting.

Syafii Ma'arif juga memberi tanggapan yang cukup lugas tentang adanya ide mendirikan Negara Islam di Indonesia. Katanya, Upaya mendirikan Negara Islam di Indonesia adalah sebuah ilusi (mimpi di siang hari bolong). Upaya mendirikan negara Islam di Indonesia, dilakukan atau pengaruh dari Ekspansi gerakan Trans-nasional di Indonesia. Menanggapi maraknya perda shari'ah di beberapa daerah kabupaten kota yang cenderung diskriminatif, Syafii mengatakan bahwa Pemerintah pusat harus mengintervensi perda-perda shari'ah tersebut, karena konstitusi 1945 menjamin kebebasan beragama. Menurut keyakinannya, jika shari'ah islam benar-benar diterapkan sebagai hokum Negara, maka perpecahan tidak hanya akan terjadi antara kelompok muslim dan non muslim, tetapi juga antar

sesama umat Islam sendiri.[52] Menurut Syafii, Platform partai politik yang baik adalah yang berorientasi tegaknya demokrasi dan keadilan, tanpa melihat perbedaan agama, suku, dan latar belakang.

Din Syamsuddin lebih menekankan pada konten atau substansi masyarakat Indonesia yang perlu dibangun. Katanya, yang dibutuhkan bangsa Indonesia saat ini adalah terwujudnya masyarakat Madani, yang mana etika agama sebagai landasannya kehidupan berbangsa. Konsep Muhammadiyah tentang negara masih sangat bias. Para elit intelektual tidak menghendaki negara islam secara simbolik, tetapi secara intrinsik harus berlaku shari'at Islam. Di dunia Islam masih terjadi dua kutub tentang bentuk Negara Islam. Kutub pertama menghendaki adanya Negara islam dalam bentuknya yang riil simbolik,[53] sedangkan kutub kedua menghendaki Negara Islam dalam arti Substansial yakni bukan bentuk simolik tetapi substansi atau isinya, bahwa yang penting masyarakat muslim bisa melaksanakan shariat islam dengan baik.[54]

Masyarakat dan Warga Muhammadiyah Paciran yang umumnya sikap keberagamaannya cenderung puritan ini, ternyata bermacam-macam dalam menanggapi pemikiran para elit pimpinan Muhammadiyah pusat, seputar isu Negara Islam di Indonesia.

[52]Hasjim Muzadi (mantan ketua Tanfidziyah PB NU) mensinyalir, bahwa munculnya berbagai perda shari'ah merupakan indikasi disintegrasi bangsa sudah terlihat di depan mata, sebagai akibat adanya upaya peneraan hokum agama yang dipaksakan.

[53] Tokohnya antara lain, Abul A'la Maududi, yang dikenal sebagai tokoh fundamentalis Islam.

[54] Tokohnya antara lain, Ali Abdurraziq, yang dikenal sebagai tokoh Modernisme-sekularis Islam.

Damanhuri mengatakan bahwa tidak terlintas dalam pikirannya mendukung atau setidak-tidaknya ikut menfasilitasi kepada kelompok tertentu yang mempunyai gagasan mendirikan Negara Islam di Indonesia ini. Saya mempunyai pemikiran yang barangkali berbeda dengan teman-teman di Paciran lainnya. Berikut ini penuturannya:

> Negara Indonesia ini sejatinya didirikan oleh para tokoh dan ulama dengan cucuran keringat dan pemikiran mereka yang maksimal. Berdirinya Negara ini sungguh melalui perjuangan yang sangat panjang, dengan tetesan darah, dengan perjuangan yang melelahkan, sehingga rasanya tidak bermoral kalau kemudian rumah yang berupa Negara Kesatua Republik *Indonesia ini* dirubuhkan hanya karena didorong oleh angan-angan adanya gagasan Negara Islam.

Bagi Damanhuri sejauh ini Islam tidak memerintahkan dan juga tidak mengajarkan secara jelas mengenai sistem ketatanegaraan, tetapi mengakui terdapatnya sejumlah tata nilai dan etika dalam al-Qur'ān. Kendatipun Nabi Muhammad SAW. tidak pernah menyatakan dirinya sebagai pemimpin Negara tetapi beliau telah menjadikan Negara sebagai sebuah alat bagi agama Islam untuk menyebarkan dan mengembangkan agama. Baginya, meminjam istilah Fazlurrahman, bahwa *"antara agama dan politik tidak dapat dipisahkan"* .

Ia melihat banyak nilai-nilai yang sifatnya universal dalam al-Qur'an dan berlaku bagi semua umat manusia ini, seperti kata *khaira ummah* merupakan ungkapan al-

Qur'an yang bagus sekali bagi kita. Manusia ini harus menjadi ummat yang anggun, ummat yang patut diteladani, ummat yang patut dipuji karena kepandaiannya atau karena kualitasnya. Bagaimana mungkin kita menjadi "khaira Ummah" kalau kita selama ini hanya menjadi bangsa piggiran, hanya menjadi bangsa yang eksklusif, merasa benar sendiri, dll.

Lebih tegas lagi ia menyatakan:

> "Di antara tata nilai itu misalnya tentang *khaira ummah*, dan *al-amru bi al-ma'ruf wa al-Nahyu an al-Munkar.* Juga tentang *Rabbuna Allah, Yudzkaru Fiha Ismuhu*, dan juga tentang *Man Yansuruh*. Tata nilai tersebut disebutkan dalam al-Qur'an, misalnya dalam surat Ali Imran ayat 110 , sebagai berikut :

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

> Artinya: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma`ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.[55]"

[55] al-Qur'an, 3 (Ali-Imran): 110.

Selain itu, beliau juga menjelaskan makna ayat al-Qur'an yang menyebut kalimat *"Yudhkaru Fiha Ismu Allah Kathira"* (*yang di dalamnya banyak disebut nama Allah)*, yakni terdapat dalam surat al-Hajj ayat 40, sebagai berikut:

ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّآ أَن يَقُولُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ۗ وَلَوْلَا
دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَٰتٌ
وَمَسَـٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ
لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

> Artinya: "(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama) -Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.[56]"

Tata nilai yang lain adalah tentang keadilan, atau tentang syura, disebutkan dalam surat an-Nisa ayat 58, dan surat al-Maidah ayat 51, sebagai berikut:

[56] al-Qur'an, 18 (al-Hajj): 40.

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.[57]"

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥١

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan

[57] al-Qur'an, 4 (An-Nisa'): 58.

mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim.[58]"

Dalam pandangan Damanhuri, membangun masyarakat Indonesia jauh lebih penting daripada berangan-angan yang tidak jelas pijakan dan aplikasinya. Kalau kita perhatikan masyarakat Indonesia ini yang muslim dan mengerti tentang keislamannya, serta taat menjalankan shari'at masih terlalu sedikit. Di sinilah kewajiban kita melakukan berbagai upaya untuk memberdayakan mereka, mencerdaskan kehidupan mereka. Salah satu upaya yang riil adalah dengan 0mendirikan pondok pesantren, lembaga pendidikan Islam, dll.

Ia menegakan "Tidak mungkin kita bisa mencerdaskan umat Islam yang sekian banyak ini secara keseluruhan, tetapi cukuplah menfasilitasi dan menyediakan tempat untuk memperdalam ilmu agama bagi sebagian umat Islam yang memiliki kesadaran akan hal itu, dan nanti setelah mereka kembali ke masyarakat akan mentransfer ilmunya itu kepada masyarkat sekitar".

Mungkin inilah yang dimaksudkan oleh ayat al-Qur'an dalam surat at-Taubah ayat 22 :

[58] al-Qur'an, 5 (al-Maidah): 51.

۞وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ
مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ
لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Artinya: "Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mu'min itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.[59]"

Jadi perjuangan memberdayakan umat dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah kewajiban yang amat penting, jauh lebih penting daripada berangan-angan mendirikan Negara Islam. Pandangan Damanhuri ini, senada dengan apa yang diungkapkan oleh Shabir, apa yang dikemukakan oleh para elit pimpinan Muhammadiyah itu sudah betul, bahkan kalau perlu kita dukung. Muhammadiyah dan Negara (pemerintah) sesungguhnya lebih banyak bermitra dalam berbagai kebijakannya, sebab sesungguhnya peran Muhammadiyah ini tidak kecil dalam berjuang memperoleh kemerdekaan Negara Indonesia ini. Muhammadiyah adalah organisasi amal, oleh sebab itu ang penting mari kita tingkatkan amal usaha kita di

[59] al-Qur'an, 9 (At-Taubah): 22.

segala bidang. Jika kita bisa melakukan ini maka sesungguhnya kita memperoleh keuntungan ganda, di satu sisi dengan berbuat berarti kita sendiri yang memetik manfaatnya, dan di sisi lain dengan berbuat ikhlash insyaallah akan mendatangkan pahala dari Allah SWT. dijelaskan dalam surat al-Jatsiyah ayat 15 :

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۖ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka itu adalah untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri, kemudian kepada Tuhanmulah kamu dikembalikan.[60]"

Ummat Islam, khususnya warga Muhammadiyah menurut beliau haruslah berfikir rasional, jangan berandai-andai, realistis, memaknai hidup ini sebagai perjuangan menegakkan nilai-nilai keadilan, syura, kejujuran, dll. dalam kerangka rahmatan lil-alamin. Disamping itu harus yakin bahwa apapun yang kita perbuat asalkan memberi manfaat kepada sesame, maka Allah akan mencatatnya sebagai amal ibadah. Ia berujar:

"Jadi menurut saya praktis saja, tidak ada waktu kita untuk melamun dan berangan-angan ini dan itu. Berbuat yang terbaik dengat niat ikhlash, maka insyaallah Muhammadiyah dengan segala amal usahanya ini senantiasa memberi manfaat kepada masyarakat luas, tidak hanya bermanfaat bagi warga persyarikatan, tetapi juga bagi umat

[60] al-Qur'an, 45 (al-Jatsiyah): 15.

> Islam, bahkan yang non muslim pun ikut merasakan manisnya amal usaha Muhammadiyah ini, insyaallah."

Apa yang dikemukakan oleh para elit pimpinan Muhammadiyah seperti tersebut di atas, ditanggapi oleh Burhanuddin dengan datar-datar saja, bahkan dalam beberapa hal dianggap kurang pas. Bagi Brk, tatanan kehidupan masyarakat sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. ketika beliau hijrah ke Madinah. Ada tiga langkah strategis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu: 1) membangun masjid, yakni membangun pusat atau sentral kegiatan dan penguatan ideology, serta pengokoan aqidah umat, 2) mempersaudarakan kaum muhajirin dan anshor, maksudnya adalah mewujudkan persatuan dan kesatuan umat yang kokoh, ibarat dalam sholat harus dibentuk shaf yang lurus, rapat, dan kompak, 3) Melakukan negosiasi dengan fihak non muslim, artinya setelah kehidupan masyarakat dinaungi oleh shari'at Islam, umat Islam telah kokoh kuat, maka harus memiliki keberanian mennjukkan identitas keislamannya di hadapan orang lain sebagaimana para sahabat Nabi yang sangat percaya diri menghadapi para kuffar, termasuk para yahudi dan nasrani pada saat itu.

Semangat seperti itu, saat ini sudah tidak ada sama sekali pada diri kaum muslimin. Mereka malah mengalami keraguan yang akut tentang diri mereka dan agama mereka sendiri, mereka kehilangan kepercayaan diri akibat diteror baik fisik maupun mental (ditakut-takuti) oleh musuh-musuh Islam. Kita tidak tahu persis fenomena ini, apakah memang sedang terjangkit penyakit cinta yang berlebih-lebihan kepada dunia, dan takut

resiko kematian, atau memang zaman yang sudah tua ini. Oleh sebab itu semangat bangkit dan menumbuhkan percaya diri bagi umat Islam itu perlu kita tumbuhkan kembali, perlu kita lecut sehingga mereka tersadar kembali akan jati dirinya.

> saat ini sudah tidak ada sama sekali pada diri kaum muslimin. Mereka malah mengalami keraguan yang akut tentang diri mereka dan agama mereka sendiri, mereka kehilangan kepercayaan diri akibat *al-Takhwif* (ditakut-takuti) oleh musuh-musuh Islam. Saya tidak tahu persis fenomena ini, apakah memang sedang terjangkit penyakit *Hub al-Dun-ya wa Karahiyah al-Mawt* (cinta yang berlebih-lebihan kepada dunia, dan takut resiko kematian) atau memang zaman yang sudah tua ini. Oleh sebab itu semangat bangkit dan menumbuhkan percaya diri bagi umat Islam itu perlu kita tumbuhkan kembali, perlu kita lecut sehingga mereka tersadar kembali.

Banyak umat Islam yang inferior bukan karena lemah, tetapi karena tidak sadar bahwa sebenarnya dirinya itu punya kemampuan untuk berbuat. Akibat sikap inferior itu kemudian dia akan diam saja meskipun kemaksiatan merajalela di sekitarnya, ini yang disebut generasi *Muhhab* atau generasi *lolak-lolok* (tidak tahu apa yang harus diperbuat dan tidak tahu kemana dia harus berjalan), macet, stagnan, dan kehilangan dinamika. Meskipun demikian, kata Brk, mendirikan negara Islam itu tidak mustahil tetapi tidak mudah, dan harus melalui tahapan-tahapan yang panjang. Salah satu

tahapan penting yang perlu diupayakan adalah pemahaman keislaman umat Islam ini. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah tahapan mewujudkan satu *komitmen keislaman* di kalangan umat Islam dalam arti seiya sekata dalam keyakinan dan dalam perbuatan dan langkah, meskipun ini tidak mudah, tapi tetap wajib diupayakan dari waktu ke waktu.

Apa yang diungkapkan oleh Burhanuddin, sebagian sejalan dengan Nuruddin tetapi sebagian lainnya tidak. Nuruddin lebih menitik beratkan pada pentingnya pendidikan dan pemberdayaan umat Islam. Para elit pimpinan Muhammadiyah itu sebaiknya harus berbicara yang bijaksana, tidak usah menolak ini dan itu, termasuk mendukung atau menolak negara Islam, dll. Sebagai pimpinan Muhammadiyah yang berarti pimpinan umat harus memilih kalimat yang bijaksana supaya umat ini tetap teduh, tidak emosi, apalagi salah faham, dan akhirnya yang rugi yang kita sendiri.

Bagi Nuruddin yang teramat penting ialah, pentingnya kata kunci yakni *istiqomah*, bahwa seluruh perilaku keislaman ummat Islam diperlukan adanya istiqomah ini. Beliau sedih melihat seorang muslim yang labil pendiriannya, tidak tetap komitmennya, suka berubah-ubah pemikirannya, dl. Kata ia:

> semua umat Islam dan warga Muhammadiyah yang sudah punya tuntunan kehidupan beragama ini hendaklah terus melakukan amal perbuatan yang baik secara istiqomah. Jika kita istiqomah dalam kebaikan maka insyaallah kita akan memperoleh akibat yang baik. Kebanyakan elit pimpinan Muhammadiyah maupun warga Muhammadiyah

yang tidak percaya diri, sebabnya adalah karena tidak istiqomah dalam berislam.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat Fussilat ayat 30 sebagai berikut:

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَٰمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحۡزَنُواْ وَأَبۡشِرُواْ بِٱلۡجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمۡ تُوعَدُونَ ٣٠

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan): "Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih; dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu".[61]"

Mengenai sikapnya terhadap adanya gagasan mendirikan negara Islam, beliaumenjawab dengan mengutip ayat al-Qur'an. Agaknya sikap beliau ini cukup diplomatis, yakni setuju meskipun secara samar-samar. Hal ini bisa diketahui dari inti ayat yang dibaca. Bahwa ada dua kata kunci dalam ayat yang dibacanya itu, yakni identitas Islam dan motivasi perjuangan.

Karamullah memberi tanggapan terhadap pemikiran para elit Muhammadiyah tersebut dengan sudut pandang

[61] al-Qur'an, 41 (Fush Ṣilat): 30.

Muhammadiyah. Karamullah mengingatkan bahwa di Muhammadiyah sudah ada rumusan ideologis berupa Kepribadian Muhammadiyah. Salah satu diktum yang terdapat dalam sifat dan karakter Muhammadiyah, berbunyi: Mengindahkan undang-undang dan falsafah negara yang sah. Dari diktum ini sesungguhnya kita bisa menarik mafhumnya bahwa Negara Indonesia berikut produk undang-undangnya adalah sesuatu yang sudah sah dan harus kita hormati. Selain itu dalam rumusan Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, juga ada diktum yang menyatakan bahwa Muhammadiyah siap membantu pemerintah dan bekerjasama dengan sesama umat Islam dan dengan golongan lain (non muslim) untuk membangun negara ini menuju terwujudnya kehidupan yang harmonis, aman, dan damai.

Dari penegasan tersebut, secara tersirat Muhamadiyah meyakini bahwa negara kesatun Republik Indonesia ini adalah sah adanya, bahkan Muhammadiyah telah ikut serta mendirikannya. Banyak tokoh-tokoh Muhammadiah gugur menjadi pahlawan nasional dalam rangka meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita wajib mengisi kemerdekaan ini dengan meningkatkan kualitas masyarakatnya. Muhammadiyah punya kewajiban untuk membangun ummat dan bangsa ini lewat amal usaha di berbagai sektor kehidupan degan selalu dijiwai oleh ruh Islam.

Akan tetapi negara yang dibangun dengan susah payah itu telah dibelokkan oleh sebagian para elit penguasa sehingga menjadi negara yang kering spiritual religiusnya, sudah tidak disemangati oleh nafas Islam, bahkan negara ini telah tergadai oleh berbagai ideologi sesat. Beberapa gelintir elit negeri ini telah menjual martabat dan harga diri

bangsa dengan imbalan beupa rupiah untuk kekenyangan perut pribadi, dan mengorbankan kepentingan bangsa serta masa depan umat manusia. Banyak aset-aset negara dijual kepada pihak luar, banyak sektor-sektor ekonomi dikuasai oleh pihak luar. Jadi negara ini suah hampir lengkap keterpurukannya. Oleh sebab itu butuh penyelamatan, butuh aturan yang islami. Nabi Muhammad SAW. Ketika hijrah ke Madinah itu betul-betul telah melangkah secara politis, yakni membangun kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Perjuangan, menurut beliauharus dilakukan dalam kerangka *Ii I'lai kalimat Allah* di manapun kita berada, profesi apapun yang kita tekuni. Tetapi jangan lupa dalam perjuangan itu kita harus selalu mengikuti jejak langkah perjuangan Rasulullah SAW. Jangan bermental pengecut, jangan berani berbuat tetapi tidak berani bertanggung jawab, jangan takut resiko, jangan memiliki sikap cinta harta tetapi takut mati, dll.

Ummat Islam seharusnya meneladani Rasulullah yang pemberani, gagah perkasa memperjuangkan Islam, tetapi juga selalu berakhlaqul karimah, tidak mudah tergiur rayuan atau godaan duniawi, selalu optimis menghadapi masa depan, dst.

> Beliau menjadi Rasul, juga pemimpin pemerintahan, juga seorang guru ngaji, juga sebagai panglima perang. Itu berarti Nabi telah membentuk negara Islam. Maka saya setuju bahwa negara Islam itu memang ada, di zaman Nabi ada, di zaman sekarang juga bisa diadakan. Adapun bentuk negara itu bagaimana? itu soal konsensus, kapan diwujudkan? itu masih panjang, yang penting harus ada semangat dulu yang membara biar orang-orang kafir itu keder.

Jadi bagi saya Muhammadiyah tetap Muhammadiyah mari kita jaga kelestariannya agar tetap berjalan sesuai dengan khittahnya. Di samping itu mari kita kobarkan semangat juang kita dan jangan gentar menghadapi orang-orang kafir atau orang islam yang bermental kafir. Saya yakin kita dilindungi oleh Allah.

ia mengutip ayat al-Qur'an yang lain:

وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ ﴿٥٦﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya : "Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi Kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman."

Tanggapan lain disampaikan oleh Abdullah, baginya baik mendukung atau menolak gagasan negara

Islam itu harus dikemukakan dengan ekstra hati-hati, jangan sampai kita ditunggangi atau disusupi oleh kekuatan-kekuatan lain yang sengaja memecah belah umat Islam. Banyak gerakan-gerakan mengatas namakan Islam, tettapi setelah diteliti ternyata hanya berkedok Islam, malah ujung-ujungnya menyudutkan atau menjatuhkan Islam. Berbicara mendirikan negara Islam itu tidak main-main, harus hati-hati, jangan sembrono. Kita harus mencontoh kehidupan rasulullah SAW. Bahwa membentuk kehidupan masyarakat berdasarkan shyari'at itu harus disertai kesabaran dan kasih sayang. Secara teori dalam Islam itu tdak ada yang namanya *Revolusi,* yang ada adalah proses penyadaran melalui dakwah. Ketika Nabi membuka dan menguasai kota Makkah, disebutnya sebagai *Fathu* artinya membuka bukan memerangi atau menaklukkan.

Ketika suatu saat Rasulullah saw merasa kekuasaannya di atas angin, beliau tidak lantas *aji mumpung*, yakni kemudian memanfaatkan kesempatan untuk meraih keuntungan pribadi, apa lagi kemudian menghabisi lawan-lawan politik, maupun lawan-lawan aqidahnya. Yang terjadi justeru Rasulullah tetap berhati mulia, selalu mengendalikan hawa nafsu dari keserakahan, bahkan yang sangat menakjubkan ketika beliau berhasl membuka kota Makkah, malah beliau memaafkan semua kesalahan yang pernah dilakukan oleh penduduk Makkah. Bahkan Rasulullah SAW. Memaafkan semua tokoh quraisy yang pernah memusuhinya, yang pernah mengancam membunuhnya, bahkan menghina dan meremehkannya. Semuanya dimaafkan. Kejadian ini yang tak dsangka-sangka oleh penduduk kota Makkah terutama para tokoh quraisy.

Lebih rinci ia menceritakan:

Keteladanan Rasulullah bisa dilihat ketika membuka kota Makkah, oleh Abdullah, diceritakan sebagai berikut : Ketika Rasul membuka kota Makkah, rombongan tentara pertama yang membawa bendera memasuki kota di bawah panglima ”Sa’ad Bin Abi Waqosh”. Beliau disongsong oleh tokoh quraisy ”Abu Sufyan” dengan badan gemetaran lalu mengucapkan: apa yang akan engkau lakukan wahai Sa’ad?. Sa’ad menjawab: hari ini adalah hari penghancuran ! . Tidak lama kemudian rombongan Nabi juga masuk kota, dan Abu Sufyan pun berucap kepada Nabi : Anda bisa berbuat apa saja terhadap kami hari ini ! Apa yang akan engkau lakukan wahai Muhammad?. Rasulullah kemudian menjawab : Hari ini adalah hari kasih sayang, dan Ka’bah akan dikiswahkan ! . dengan harap-harap cemas Abu Sufyan balik bertanya kepada Rasulullah : Mengapa jawaban Sa’ad Bin Abi waqosh kok sepert itu (hari ini adalah hari penghancuran) ? Nabi menjawab: Sa’ad tidak benar. Dan aku akan membuktikan ucapanku: barang siapa yang masuk Masjidil haram maka dia aman, siapa saja yang masuk rumah Abu Sufyan (baik muslim maupun kafir) dia aman, dan siapa saja yang masuk rumahnya masing-masing (baik muslim maupun kafir) dan menutup pintu (tidak melakukan perlawanan) maka dia juga aman.

Dari secuil kisah itu dapat ditarik kesimpulan, lanjut Abdullah, bahwa upaya penyadaran terhadap masyarakat dan umat Islam itu penting, membutuhkan ketekunan dan kesabaran serta keteguhan. Maka jauhilah pemaksaan, hindarkan keputus asaan, dan jauhkan diri dari sifat emosional. Saya setuju bahwa berjuang menyadarkan umat Islam dengan akhlaqul karimah ini jauh lebih utama dibandingkan hanya sekedar berandai-andai, berkhayal mendirikan negara Islam. Boleh saja orang menggagas negara Islam tapi harus disertai fikiran yang jernih, jangan grusa-grusu agar tidak terjerat oleh pihak lawan yang sengaja mencari-cari kelengahan kita. Maka begitu ada peluang mereka masuk dan menusuk diri kita dengan pedang yang kita bikin sendiri, atau dalam ungkapan lain namanya senjata makan tuan, na'udhu billahi mindhalik.

A. Manar membuat analisis tersendiri mengenai gagasan mendirikan negara Islam. Baginya, "Negara Islam" adalah lafaḍ mushtarak, kata yang mempunyai dua makna atau lebih (homonim). Makna yang sering dipakai adalah: a) Negara Islam adalah negara yang penduduknya mayoritas muslim, sekalipun negara itu tidak menjadikan Islam sebagai dasar negara, b) Negara Islam adalah negara yang memberlakukan syari'at Islam secara legal formal, sekalipun tidak memakai label negara Islam, seperti negara Saudi Arabia, Kuwait, Malaysia, dll. Negara Islam dalam pengertian yang kedua inilah yang diinginkan oleh kaum muslimin yang benar-benar meyakini Islam sebagai rahmatan lil alamin.

Manar meminta kepada ummat Islam agar berhati-hati dan tidak mudah terjebak oleh pemikiran sekuler terutama seputar *Negara Islam*. Kita seharusnya berfikir

jernih tentang masalah ini. Apa lagi kemudian memaknai negara Islam dengan pemaknaan yang *hitam putih*, maksudnya kalau ada seseorang menolak adanya negara Islam berarti dia kafir. Padahal pemaknaan negara Islam mestilah mengikuti logika sebagaimana yang telah disebutkan di atas tadi. Jadi ini persoalan penting bagi ummat Islam. Secara khusus dia menegaskan:

> Maka tidak benar kalau ada orang Islam yang menolak negara Islam dalam pengertian kedua, apapun alasannya. Apa lagi dengan dalih rahmatan lil alamin. Kalau benar bahwa negara bangsa NKRI bagi NU dan Muhammadiyah sudah final, maka yang belum final adalah perjuangan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Memang diperlukan waktu yang panjang dan kesabaran yang tinggi untuk mewujudkan itu. Maka kita jangan putus asa. Kalau orang-orang sekuler tidak putus asa dalam memperjuangkan ideologi sekularisme, maka kita jangan berhenti memperjuangkan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dengan Rahmatan Lil Alamin.

Mun, menegaskan bahwa Shari'at Islam itu ada yang tidak bisa dilaksanakan kecuali oleh negara, misalnya shari'at bidang *jarimah*. *Hudud*, dan *uqubah-nya*, pencegahan jinayat, jarimah qiṣas, peradilan, dll. Maka untuk membumikan shari'at Islam secara kaffah, harus ditempuh dari dua arah secara simultan, yakni dari atas melalui jalur kekuasaan, dan dari bawah dengan mendorong umat Islam –terutama para elit kekuasaan- agar mengamalkan ajaran Islam dengan baik secara kaffah. Bukan hanya dalam hal etika dan moral saja.

Tanpa melalui kekuasaan, kita tidak bisa melaksanakan perintah menghakimi manusia khususnya dalam bidang jarimah hudud, dan lain sebaginya itu, sebagaimana firman Allah surat An-Nisa' ayat 105 :

إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا ١٠٥

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.[62]"

Ada beberapa pernyataan dari beberapa tokoh kita tentang isu negara Islam yang menurut hemat saya seharusnya tidak dilontarkan, sebab tidak membawa maslahat bagi umat Islam, melainkan malah berdampak negativ bagi keyakinan umat terhadap shari'at Islam. Adapun pernyataan bahwa para elit intelektual tidak menghendaki negara Islam secara simbolik, tetapi secara intrinsic harus berlaku shari'at Islam, maka saya menilai sebagai pernyataan yang cerdas, senafas dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah.

Khilafah Islamiyah mmang tidak mempunyai rujukan teologis baik dalam al-Qur'ān maupun Hadith, tetapi juga tidak dilarang oleh al-Qur'ān dan Hadith.

[62] al-Qur'an, 4 (An-Nisa'): 105.

Namun problemnya adalah bahwa seluruh negara di dunia sudah mempunyai pemerintahan dan konstitusi sendiri-sendiri yang wajib ditaati oleh warga negaranya. Lantas dari mana khilafah islamiyah itu dibentuk? bisakah khilafah pusat mengatur umat Islam yang tinggal di seluruh dunia yang sudah terikat oleh konstitusi negara masing-masing? nampaknya ini sulit dilaksanakan.

4. Jihad dalam Islam.

Salah satu ajaran Islam yang sangat penting adalah *Jihad.* Jihad telah banyak digunakan berbagai masyarakat/negara dalam aneka kegiatan yang sifatnya religius, misalnya *jihad*-nya Bung Tomo dengan pekik *Allahu Akbar* untuk membakar semangat juang arek-arek Surabaya melawan tentara sekutu. *Jihad* juga pernah dilakukan para ulama zaman dahulu ketika berjuang mengusir penjajah dalam rangka meraih kemerdekaan. *Jihad* yang dilakukan oleh pihak Iran melawan Irak dalam perang Irak-Iran (Iran menggunakan kata jihad karena negara Iran adalah negara Islam, sedangkan Irak tidak menggunakan kata jihad karena negara Irak adalah negara sosialis arab dan partai yang bekuasa adalah partai *Ba'ath* yang berhaluan komunis). Begitulah kata *jihad* telah dipakai berbagai komunitas muslim dalam memperjuangkan tegaknya Agama Islam.

Jihad memang merupakan bagian yang terpenting dalam ajaran Islam. Berbagai ulama malah cenderung berpendapat bahwa seandainya ada rukun Islam yang keenam, maka itu adalah Jihad, (di kalangan shi'ah menempatkan jihad sebagai rukun Islam yang keenam). Sebenarnya maksud jihad adalah dakwah, dan perang adalah bagian dari dakwah itu, (jadi jihad tidak selalu

berarti perang). Tetapi yang jelas bahwa jihad sebagai doktrin perjuangan membela agama dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, seperti kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian, dapat dipakai sebagai sumber nilai yang mampu menggerakkan perjuangan melawan kezhaliman seperti kolonialisme. Itulah sebabnya *Rudolf Peters*, mengungkapkan hubungan antara Islam dan kolonialisme Barat, khususnya dampak kolonialisme terhadap Islam, bahwa Doktrin Jihad sebaga sumber inspirasi religius perlawanan atas ekspansi Eropa terhadap dunia Islam.[63]

Mantan ketua PP Muhammadiyah, AR. Sutan mansur (ketua Umum PP Muhammadiyah periode 1952-1957) menggunakan kata *Jihad* untuk membangkitkan semangat kerja warga dan pimpinan Muhammadiyah**.** diakuinya bahwa jihad bisa berbentuk perang, tetapi baginya perintah perang adalah terbatas. Bahkan jihad di waktu damai itu lebih berat. Jihad di waktu damai itu artinya membangun, menegakkan, dan menyusun. Jihad harus melalui tiga tahap yakni 1) Menciptakan hubungan antara makhluq dengan khaliqnya, 2) Roh suciyang tumbuh pada seseorang akan menimbulan tenaga yang aktif dan dinamis yang tahu berbuat sesuai dengan tempat, waktu, dan keadaan, 3) Perkembangan intelektual dari *'Ilm al-Yaqin* ke *Haq al-Yaqin* melalui proses peningkatan iman.[64]

Amien Rais tidak mengelak bahwa jihad bisa berarti perang tetapi jihad tidak selalu perang. Jihad harus dimaknai sesuai dengan konteks yang dihadapi,

[63]Dawam Raardjo, *Ensikloedi al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Knci* (Jakarta: Paramadina, 2002), 512.
[64] Ibid, 523.

misalnya seperti saat ini umat Islam Indonesia sedang dalam keadaan tertinggal, mayoritas miskin, kurang berdaya, sering menjadi bulan-bulanan kekuatan asing, dan ujung-ujungnya itu adalah karena kebodohan kita sendiri. Maka jihad haruslah dimaknai dalam konteks seperti ini. Jihad yang sangat dibutuhkan sekarang ini adalah jihad damai dan membutuhkan dana yang cukup banyak, yaitu meningkatkan sumber daya manusia dan memperkokoh keimanan. Amien Rais, juga mengakui bahwa kemungkinan suatu saat dimana kaum muslimin dalam posisi terjepit dan tidak ada jalan lain kecuali harus berperang mengangkat senjata, maka bisa jadi jihad adalah perang suci, akan tetapi jihad dalam bentuk ini paling-paling bisa terjadi sekali dalam satu generasi atau abad.

Dalam satu generasi memungkinkan adanya sekali jihad dalam arti perang. Tetapi sebisa mungkin jihad kita artikan sebagai upaya yang sungguh-sungguh dalam menegakkan agama Allah di muka bumi ini.

Syafii Ma'arif, memaknai jihad sebagai bagian dari kewajiban agama Islam. Bahkan Jihad disebut beberapa kali oleh al-Qur'an, kurang lebih 41 kali dengan segala derivasinya. Tetapi yang harus difahami bahwa setiap kita memahami satu istilah harus dikonsultasikan ke al-Qur'an, termasuk kata jihad. Pemaknaan yang dimaksud harus kontekstual dengan kondisi masyarakat dimana jihad harus dilakukan. Nabi Muhammad SAW. ketika membangun kehidupan masyarakat di Madinah tidak pernah melakukan jihad dalam arti perang; Bahkan yang beliau lakukan adalah menggalang kerjasama dengan fihak non musim sehingga melahirkan konstitusi monumental nan abadi dalam catatan sejarah Islam,

yakni *Piagam Madinah.* Dengan piagam madinah ini Nabi benar-benar telah mampu mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang anggun berwibawa, membangunmasyarakat yang plural tetapi masing-masingnya memahami hak dan tanggung jawabnya. Ini yang kemudian dikenal dengan *Masyarakat Madani* atau *Civil Society*. Tetapi sayang semangat itu kini mulai sirna.

Mestinya kita umat Islam harus mengerahkan tenaga dan pikiran atau dalam bahasa agama *Berjihad* untuk mencontoh Nabi dalam membentuk kehidupan masyarakat yang damai itu. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau umat ini kita bangun lebih dahulu daya intelektualnya. Jihad, harus diarahkan ke ranah pencerahan, melakukan revolusi intelektual. Ini adalah jihad sepanjang masa. Menurut saya, lanjut Syafii Ma'arif, Jihad dalam arti perang untuk zaman sekarang ini sudah tidak relevan dengan semangat Rahmatan Lil 'alamin. Jihad yang besar nilainya adalah jihad mengendalikan hawa nafsu, dan jihad meningkatkan kualitas umat.

Din Syamsuddin memberi penilaian yang kurang lebih sama dengan Syafii Ma'arif. Din Syamsuddin dalam menjelaskan jihad senafas dengan ketika Dia memaknai *Civil Society* atau masyarakat madani, jadi kearah sanalah jihad ini mesti kita arahkan, tanpa menafikan adanya pemaknaan jihad dalam arti perang. Muhammadiyah dengan seperangkat landasan ideologisnya, secara tersirat maupun tersurat mengarahkan jihad Islam ini dalam konteks sosial, yakni pemberdayaan kualitas umat Islam.

Yunahar Ilyas, sesuai dengan kepakarannya di bidang ulumul qur'an, memaknai jihad ketika digandengkan dengan kata *fisabilillah*, maka pengertiannya sesuai dengan awal istilah ini muncul yakni perang untuk membela agama Allah. Akan tetapi jihad dengan berbagai bentuk derivasinya tidak otomatis bermakna perang, tergantung rangkaian kalimatnya. Tetapi yang jelas bahwa jihad secara etimologis adalah bersungguh-sungguh, atau perjuangan secara maksimal dengan mengerahkan segala potensi dan kemampuan. *Jihad fi sabilillah* berarti mengerahkan potensinya secara maksimal untuk agama Allah. *Jihad bil-Anfus* yakni perjuangan melawan jiwa dan hawa nafsu sendiri. Perang adalah bagian dari jihad, tetapi tidak harus selalu dilakukan, tergantung situasi dan tantangan.

Warga Muhammadiyah Paciran, ternyata juga beragam dalam memaknai pemikiran para elit pimpinan Muhammadiyah pusat, khususnya soal jihad ini.

Damanhuri sependapat dengan pemikiran para elit tersebut. Baginya jihad harus diarahkan kepada pemberdayaan umat, mengingat secara kasat mata umat Islam Indonesia sampai saat ini tergolong mayoritas. Mayoritas dalam jumlah statistik penduduk, juga mayoritas terbelakang dari segi intelektualnya, dan barangkali juga mayoritas dalam hal kemiskinannya. Oleh sebab itu jihad seyogyanya diarahkan pada upaya yang yang maksimal utuk menegakkan agama Allah secara intelektual dan etis, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, agar umat dan bangsa ini benar-benar bermartabat dan memiliki harga diri serta muru'ah, sehingga tidak mudah dipermainkan oleh orang atau ideologi lain.

Lebih rinci dijelaskan:

> Dalam rumusan majlis tarjih tentang ”Sabililah” dimaksudkan sebagai jalan yang menghantarkan kepada keridhaan Allah, berupa segala amalan yang diizinkan Allah untuk memuliakan kalimat (agama)-Nya dan melaksanakan hukum-hukumnya.[65] Dari pengertian itu menunjukkan bahwa melaksanakan perintah Allah membutuhkan kesungguhan (membutuhkan jihad), keberanian, dan keteguhan hati. Tanggapan terhadap pemikiran elit Muhammadiyah pada satu sisi memang benar bahwa jihad pada zaman sekarang jika dimaknai perang fisik itu tidak relevan dengan konteks rahmatan lil alamin, tetapi pemikiran m*ereka* mestinya belum titik, tetapi masih koma. Yakni pada kondisi tertentu mungkin saja jihad itu diartikan sebagai perang. Sungguhpun demikian untuk melakukan perang itu kan tidak mudah dilakukan. Maka sebaiknya jihad kita arahkan saat ini untuk kedamaian, dan pemberdayaan umat Islam agar tingkat intelektualitasnya semakin maksimal. Allah memberi peluang kepada umat manusia yang berjihad menuju keridhaannya akan memperoleh jalan menuju kepadanya, dalam al-Qur’an surat al-Angkabut ayat 67[66]:

وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٦٩

[65] PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih* (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 1967), 277.
[66] al-Qur’an, 29 (al-Angkabut): 6.

Artinya: ”Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan Kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.”

Ayat ini menunjukkan bahwa jihad itu adalah aktifitas kerohanian dalam rangka mencari keridhaan Allah. Apabila orsng itu berbuat baik, maka ia akan ditunjukkan kepada berbagai alternatif jalan menuju keridhaannya. Dwm, mengutip seorang orientalis asal Amerika Richard C. Martin (Islam: A Cultural Perspective, 1982), bahwa walaupun jihad tidak secara universal diakui seagai salah satu rukun Islam, namun jihad termasuk sebagai salah satu kewajiban yang tiwujudan oleh seorang muslim dalam satu dan lain bentuknya. Martin merumuskan pengertian jihad, bahwa jihad adalah upaya untuk mencapai kesempurnaan moral dan keagamaan. Jihad menurut observasi empirisnya, adalah suatu bentuk patriotisme dan kewarganegaraan.

Dengan demikian, para pemikir dan penulis modern, pada umumnya sepakat bahwa makna jihad perlu ditransformasikan menjadi etos kerja modern, semacam ”bushido” di Jepang yang dapat menjadi unsur nilai penting dalam restorasi Meiji. Atau menurut pakar Agribisnis Saifuddin, bahwa jihad pada zama ini perlu dijadikan nilai manusia industrial. Jihad adalah perwujudan dari upaya mobilisasi sumber daya, baik sumber daya manusia, maupun sumber daya teknologi dan kelembagaan.

Penilaian yang agak sejalan dengan Dwm, dilakukan oleh Sbr (60). Sbr, memberikan penekanan

pemaknaan kata Jihad dengan Qital. Kata Jihad maknanya memang luas sekali, dan para ulamapun memberi pemahaman yang sangat luas. Minimal ada tiga kategori jihad dalam Islam, yang *pertama* jihad mengendalikan hawa nafsu, sebagaimana firman Allah surat al-Ankabut ayat 6 :

وَمَن جَـٰهَدَ فَإِنَّمَا يُجَـٰهِدُ لِنَفْسِهِۦٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: ”Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.[67]”

Yang dimaksud dengan jihad untuk dirinya sendiri, adalah jihad melawan hawa nafsunya sendiri. Sedangkan yang *kedua*, adalah jihad damai yakni mengerahkan kemampuan atau kesungguhan untuk berupaya meninggikan kalimat Allah yakni menegakkan agama Islam di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat As-Shaf ayat 10-11 :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَـٰرَةٍ تُنجِيكُم
مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَـٰهِدُونَ فِى
سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

[67] al-Qur’an, 29 (al-Angkabut): 6.

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya.[68]”

Adapun yang *ketiga*, jihad dalam arti perang fisik, memang suatu saat bisa dilakukan oleh umat Islam, sebagai mana firman Allah dalam al-Qur’an surat at-Taubat ayat 74 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَىٰهُمْ
جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٧٣﴾

Artinya: ”Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah neraka Jahannam. Dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya.[69]”

Tetapi menurut saya, untuk bangsa Indonesia sekarang ini rasanya tidak relevan kalau jihad dimaknai perang, sebab tidak ada indikasi yang mengharuskan kita umat Islam untuk berperang. Justeru yang paling memungkinkan adalah jihad intelektual dan damai, dan ini sejalan dengan Muhammadiyah yang melakukan upaya pencerahan kepada umat Islam dan bangsa

[68] al-Qur’an, 37 (Ash-Shaffat): 10-11.
[69] al-Qur’an, 9 (At-Taubah): 74.

Indonesia pada umumnya. Jihad inilah yang membawa efek positif saat ini, sehingga visi *Rahmatan lil Alamin* itu benar-benar sesuai dengan jihad damai ini.

Penilaian yang dilakukan oleh Burhanuddin berbeda tajam, bahwa jihad tidak selalu perang, tetapi ketika kemungkaran dan kemaksiatan merajalela di tengah-tengah masyarakat, maka jihad melawan kemaksiatan malah wajib dilakukan. Jika kemungkaran merajalela, kedhaliman terjadi di mana-mana, dan kemaksiatan semakin meluas dilakukan orang, sedangkan umat Islam tidak melakukan reaksi apa-apa, maka jangan heranAllah akan menurunkan siksanya yang tidak hanya mengenai orang-orang fasik saja, tetapi juga akan mengenai orang-orang yang mendiamkan kezhaliman tersbut, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Anfal ayat 25 :

وَٱتَّقُواْ فِتۡنَةٗ لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمۡ خَآصَّةٗۖ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢٥

Artinya: ”Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya.[70]”

Jadi, jihad dalam arti perang itu kapanpun tetap relevan, tinggal kita lihat skup kemungkarannya, jika kemungkaran dan kemaksiatan lokal maka perang melawan kemungkaran ya sifatnya lokal, tetapi jika

[70] al-Qur’an, 8 (al-Anfal): 25.

kemungkaran dan kezhaliman itu luas cakupannya yakni negara atau nasional, maka jihad atau perangnya juga total secara nasional. Jika kezhaliman dilakukan oleh negara-negara kafir atas negara kita, maka kita wajib melakukan perang melawan mereka. Cuma peperangan fisik sat ini tidak lagi dilakukan oleh negara-negara barat yang anti Islam. Mereka lebih banyak melakukan perang ideologi, melakukan Takhwif atau perang urat syaraf, dan mereka lebih banyak juga melakukan perang dalam bentuk ’Adaawah atau menciptakan permusuhan-permusuhan, konflik-konflik di antara umat Islam. Maka jihad kita ini, adalah jihad pemikiran atau *Ghozwul Fikri,* dan juga *Ghozwul Hadhoroh* yakni perang peradaban, dst. Jadi makna jihad memang luas tetapi kapanpun tetap relevan, adapun bentuk peperangan kita harus disesuaikan dengan bentuk perlawanan atau peperangan mereka terhadap kita.

Penilaian serupa juga diberikan oleh Nuruddin. Menurutnya memang banyak ayat-ayat al-Qur’an yang menggunakan kata jihad, tetapi kata jihad itu memiliki makna yang barangkali agak beragam sesuai konteks kalimatnya meskipun substansi maknanya sama yakni ” بذل الجهد ” yakni mengerahkan potensi secara total. Jihad sebenarnya memmiliki akar kata yang sama dengan Ijtihad, yakni bersungguh-sungguh. Hal ini misalnya kita temukan dalam al-Qur’ān surat al-An’am ayat 109 :

وَأَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ لَئِن جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ
بِهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا ٱلْءَايَٰتُ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَآ إِذَا جَآءَتْ لَا
يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٩﴾

Artinya: ”Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan, bahwa sungguh jika datang kepada mereka sesuatu mu`jizat pastilah mereka beriman kepada-Nya. Katakanlah: "Sesungguhnya mu`jizat-mu`jizat itu hanya berada di sisi Allah". Dan apakah yang memberitahukan kepadamu bahwa apabila mu`jizat datang mereka tidak akan beriman.[71],,

Jadi kedua istilah tersebut sebenarnya makna asalnya sama. bedanya kalau jihad itu rujukannya ada dalam ayat-ayat al-Qur’an, sedangkan Ijtihad rujukannya dari beberapa riwayat hadits. Perbedaan yang kedua, bahwa jihad berarti berupaya secara total, sedangkan Ijtihad penekanannya lebih kepada upaya kretif fikiran.

Adapun di Muhammadiyah, sering kali kita temukan wacana Ijtihad dari pada Jihad. Dipakainya kata ijtihad oleh Muhammadiyah barangkali lantaran dikaitkannya dengan posisi Muhammadiyah sebagai gerakan Tajdid (pembaharuan), sehingga sebenarnya kerja tajdid itu menuntut adanya kerja ijtihad. Adapun soal mengkaitkan kata jihad dengan perang, itu memang ada secara khusus yakni semakna Qital. Saya punya

[71] al-Qur’an, 6 (al-An’am): 109.

pengalaman ketika kunjungan para ulama ke Amerika, oleh tuan rumah dihimbau bahwa jihad dalam islam itu bukan perang seperti zaman dulu, tetapi harus dimaknai sebagai upaya intelektual untuk mencerdaskan umat manusia.

> Saya yakin bahwa ucapan atau himbauan itu maksudnya untuk ”ngedem-ngedem” (membujuk agar secara dingin dan jernih) umat Islam tidak lagi memaknai jihad dengan perang. Tetapi saya sadar bahwa itu mengandung misi agar umat Islam Indonesia ini menjadi umat Islam yang tidak selalu memusuhi barat, atau agar tidak terlalu bersemangat memusuhi orang beragama lain. Menurut saya jihad dalam arti perang itu memang ada, bahkan Nabi pernah menyuruh jihad kepada salah seorang sahabat dengan cara menjemput paksa orang-orang yang menjadi profokator mendiskriditkan Islam. Dalam sebuah riwayat (dalam shahih Muslim), bahwa Nabi suatu saat memerintahkan salah seorang sahabatnya untuk menjemput paksa (mungkin dalam bahasa kasarnya: menculik) orang yang bernama ”Ka’ab Bin Asyraf”, karena diketahui bahwa Ka’ab bin Asyraf dikenal menjadi profokator, dan penyedia logistik paling banyak untuk orang-orang atau kelompok-kelompok yang memusuhi Nabi Muhammad saw. dan agama Islam secara keseluruhan. Jadi jihad yang berarti perang itu memang benar adanya dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad, Saw. Jihad dalam bentuk apapun tetap relevan dilakukan tergantung situasi yang mempengaruhinya.

Bagaimana dengan jihad melakukan pengeboman seperti yang beberapa waktu yang lalu dilakukan oleh beberapa anak muda (amrozi, cs) ? menurut saya pengeboman seperti itu dibenarkan dengan syarat: a) kelompok (sasaran) yang akan dibom itu benar-benar kelompk kafir yang memusuhi Islam (sirran wa 'alaniyah), b) sasaran tersebut dipastikan memang seluruhnya orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Jika sasaranya adalah campuran antara orang Islam dan orang kafir yang memusuhi Islam, maka pengeboman itu haram dilakukan.

Semangat jihad di jalan Allah seringkali diakitkan dengan kadar keimanan seseorang, sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Anfal ayat 72 :

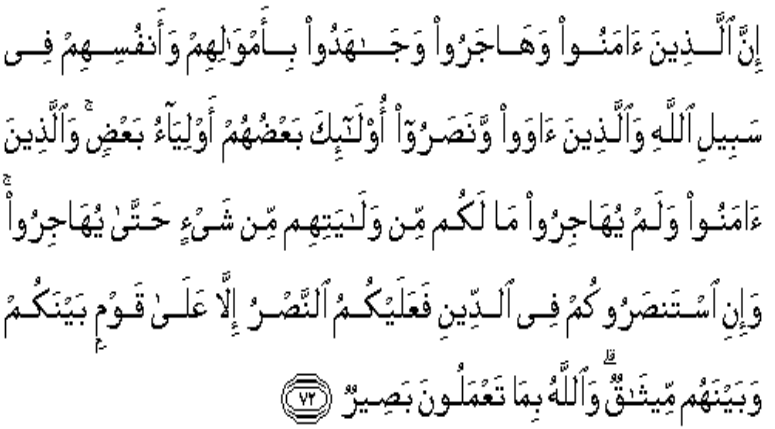
إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَٰٓئِكَ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلَٰيَتِهِم مِّن شَيۡءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْۚ وَإِنِ ٱسۡتَنصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيۡكُمُ ٱلنَّصۡرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٧٢

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap)

orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.[72]"

Penilaian atas pemikiran ideologis para elit Muhammadiyah khususnya tentang jihad, diberikan oleh Karamullah hampir sama dengan yang lain. Cuma dia mempertanyakan kenapa orang-orang sekarang merasa takut dengan jihad ? sehingga kalau seseorang melakukan perjuangan menegakkan agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, mereka takut nanti dicap teroris, atau dicap fundamentalis, atau dicap radikalis. Sikap ini seharusnya dihilangkan dari pikiran orang Islam. Jihad itu adalah kata-kata suci yang mengandung makna kesungguhan secara total pada diri seseorang untuk melakukan perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Pemaknaan ini sejalan denga maksud dantujuan Muhammadiyah.

Jihad pada hakekatnya adalah upaya yang maksimal dan terarah serta istiqamah untuk menciptakan keanggunan Islam. Itulah yang disebut "jihad fii sabiilillah". Sedangkan perang,

[72] al-Qur'an, 8 (al-Anfal): 72.

walaupun bisa merupakan suatu bentuk jihad, sifatnya defensif dan temporer. Pada zaman sekarang ini, jihad dikembangkan lebih luas sesuai dengan konteks zaman, misalnya *jihad al-Dakwah* (yakni jihad dalam bentuk dakwah Islam amar makruf nahi munkar), kemudian *jihad al-Tarbiyah* (yakni jihad melalui pendidikan), ada juga *jihad bi As-saif* (yakni jihad perang, dengan pedang), ada lagi *jihad bil Qalam* (yakni jihad dengan perantaraan pena/tulisan), dan ada lagi *jihad bil Amwal* (yakni jihad dengan mengerahkan harta benda), dst.

Dari paparan tentang jihad tersebut jelaslah bahwa jihad bisa dilakukan dalam semua bentuk-bentuknya tersebut dan disesuaikan dengan kebutuhan serta konteks sasaran yang membutuhkannya. Oleh sebab itu tidak ada jihad yang tidak relevan, semuanya relevan sesuai konteksnya. Adapun jihad dalam arti peang, memang diizinkan oleh Allah, sesuai dengan firmannya dalam surat al-Hajj ayat 39-40 :

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۟ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾
ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّآ أَن يَقُولُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ۗ وَلَوْلَا
دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَٰتٌ
وَمَسَٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ
لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

Artinya: ”Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.[73]”

Abdullah membuat analisis mengenai ijtihad sebagai respon terhadap pemikiran para elit pimpinan Muhammadiyah sebagai berikut: ada yang kurang pas

[73] al-Qur’an, 22 (al-Hajj): 39-40.

dengan pemikiran mereka (elit Muhammadiyah) tentang jihad, mereka memahami secara parsial dan tidak proporsional. Bahwa kata jihad dalam al-Qur'ān itu perang, itu memang benar adanya, akan tetapi untuk apa perang itu dilakukan ? dan mengapa perang itu dilakukan ? ini persoalan yang serius dan perlu difikir secara hati-hati jangan grusa-grusu.

Jihad memang tidak selalu berarti perang. Tetapi pada kondisi tertentu jihad bisa difahami dalam arti perang, dan memang diperintahkan Allah, dalam surat Hajj ayat 39 :

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۟ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

Artinya: "Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu.[74]"

Perang melawan orang kafir, diizinkan oleh Allah apabila memang orang-orang muslim didhalimi, atau dinjak-injak harkat dan martabatnya, sehingga kaum muslimin wajib membela diri dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Tetapi berdasarkan kitab-kitab yang saya baca, bukan hanya itu alasan melakukan peperangan. Masih ada lagi syaratnya yaitu, a) kekuatan memang seimbang antara kaum muslimin dan kaum kafirin, jadi menimbang dan menghitung segi kekuatan ini penting, sebab jika kekuatan tidak imbang maka yang terjadi akan menuai kehancuran atau kekalahan yang sia-

[74] al-Qur'an, 22 (al-Hajj): 39.

sia bahkan mati konyol, b) kondisi kaum muslimin memang benar-benar terjepit, terusir, dan tidak ada jalan lain untuk mengatasi kebuntuan itu, sedangkan kalau menyerah berarti akan semakin berujung kehancuran Islam, maka dalam kondisi seperti ini kaum muslimin diperbolehkan melakukan perang. Inilah jihad yang sebenarnya, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Mumtahanah ayat 1 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ
تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ
ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَٰدًا
فِى سَبِيلِى وَٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِى تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا۠ أَعْلَمُ
بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ①

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena

rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.[75]"

Adapun untuk apa kita melakukan peang ? maka kata Allah dalam surat al-Baqarah ayat 193 :

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟ فَلَا عُدْوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٩٣﴾

Artinya: "Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang ḍalim.[76]"

Jadi, menurut saya adanya anggapan bahwa jihad dalam arti perang itu sekarang tidak relevan, adalah salah besar. Tetapi salah satu makna jihad adalah perang itu memang benar, tetapi untuk melakukan perang itu harus dilakukan studi lebih dulu, agar tidak terjebak politik permainan atau skenario musuh yang akhirnya kita sendiri yang rugi, dengan kata lain pembicaraan tentang perang harus hati-hati, jangan sembrono.

[75] al-Qur'an, 60 (al-Mumtahanah): 1.
[76] al-Qur'an, 2 (al-Baqarah): 193.

A. Manar menilai pemikiran para elit Muhammadiyah tentang jihad, sebagai berikut: selama ada agresi, jihad dalam arti perang tetap relevan dengan semangat *rahmatan lil alamin*. al-Qur'an mengizinkan perang melawan agresi adalah dalam rangka *rahmatan lil alamin*. Untuk di Yogyakarta (seperti ungkapan Syafii Ma'arif atau Amin rais yang telah disebutkan di atas) sekarang memang jihad dalam arti perang tidak relevan dengan semangat *rahmatan lil alamin*, tetapi untuk Palestina tentu sangat relevan. Setiap negara mempunyai situasi dan tantangan sendiri-sendiri, dan mempunyai pertimbangan dan estimasi sendiri-sendiri.

Bagi A. Manar, jihad melawan hawa nafsu memang besar nilainya. Akan tetapi jihad perang melawan agresi lebih besar lagi nilainya, karena taruhan perang adalah nyawa. Dan orang yang berangkat perang pasti melawan hawa nafsu *"Hubbu al-Dun-ya wa Karahiyat al-Mawt"* lebih dulu. Jadi dia melakukan dua jihad sekaligus yaitu melawan hawa nafsu dan melawan agresi. Tidak ada yang sia-sia ketika seorang muslim melakukan jihad baik itu jihad damai, jihad melawan hawa nafsu, maupun jihad memerangi orang kafir, karena memang semua itu diperintahkan oleh Allah, tetapi satu hal yang amat menentukan bagi seorang yang berjihad adalah niyat yang ikhlash, tanpa niyat yang ikhlash maka tidak akan ada artinya jihad yang ia lakukan.

H. Makna Pemikiran Ideologis Elit Pimpinan Muhammadiyah Bagi Warga Muhammadiyah Paciran

1. Kategorisasi.

Dari paparan para informan dalam merespon pemikiran ideologis para elit pimpinan Muhammadiyah, dan mencermati argumentasi yang mereka berikan serta materi responsi mereka, tampaknya terjadi varian pemikiran dalam pola argumentasi dan pola responsinya, sehingga penulis dapat melakukan kategorisasi sebagai berikut:

a. *Tajrid ushuli,* yakni kelompok pemikiran Muhammadiyah Murni Sejati. Kelompok ini bisa diidentikkan dengan *fundamentalis-puritan.* Kelompok *tajrid ushuli* ini dalam merespon, dan memaknai pemikiran ideologis para elit pimpinan Muhammadiyah, senantiasa berargumentasi secara naqli dan cenderung bersifat *teks books,* sehingga tidak memungkinkan adanya penafsiran atau interpretasi alternatif terhadap nas-nas yang mereka gunakan sebagai argumentasi baik dari al-Qur'an maupun Hadith. Akan tetapi kelompok ini nampaknya tidak sama dan sebangun dalam berargumentasi, sehingga masih perlu dibedakan menjadi dua bagian, yakni kelompok *tajrid ushuli* yang ekstrim, dan kelompok *tajrid ushuli* yang moderat, sebagai berikut:

1) *Tajrid ushuli* ekstrim, menganggap tidak ada alternatif lain dalam menafsirkan nas-nas asasi baik al-Qur'an maupun al-Hadith selain apa yang sudah dilakukan oleh para mufassir tempo dulu yang mereka itu dianggapnya paling

berkompeten di bidangnya, misalnya penafsiran ayat-ayat tentang jihad, pemisahan secara hitam-putih antara konsep ketuhanan antara Islam dengan non Islam yang tidak mungkin dikompromikan, keyakinan bahwa keimanan umat Islam itu tidak sama dengan keimanan orang-orang non muslim, keyakinan bahwa keimanan yang tidak sesuai dengan perspektif Islam adalah sesat dan menyesatkan. Selain itu kelompok ekstrim ini sama sekali tidak mau menggunakan istilah-istilah yang diidentifikasikan dengan Islam, yang muncul dari barat, seperti Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme. Kelompok ini ditemukan dalam pemikiran Burhanuddin, Karamullah, dan A Manar.

2) *Tajrid ushuli* moderat, menganggap masih memungkinkan terjadinya penafsiran atau interpretasi alternatif terhadap nas-nas asasi baik al-Qur'an maupun al-Hadith sepanjang tidak keluar dari kaidah-kaidah pokok dalam melakukan penafsiran sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama/mufassir mutaqaddimin maupun mutaakhirin. Selain itu mereka sangat berhati-hati dalam merespon segala pemikiran ideologis khususnya yang berkaitan dengan pemikiran Islam kontemporer, misalnya gagasan menegakkan Negara Islam Indonesia, mereka tidak serta merta sependapat karena itu bukan gagasan mudah semudah membalikan tangan, harus dikaji dengan hati-hati serta membutuhkan waktu yang panjang

agar tidak salah langkah. Mereka tidak sependapat dengan gagasan mendirikan negara Islam, akan tetapi lebih bersemangat membangun dan membina masyarakat madani *(civil society)* sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. pada awal perkembangan Islam di Madinah. Kehati-hatian ini sangat beralasan karena dikaitkan adanya kemungkinan terjebak oleh skenario fihak *barat* yang dimungkinkan akan terjadinya serangan balik yang lebih keras. Kelompok moderat ini ditemukan dalam pemikiran Nuruddin, dan Abdullah.

b. *Tajrid 'ashri*, yakni kelompok pemikiran Muhammadiyah murni modern. Kelompok ini bisa diidentikkan dengan *fundamentalis-modern.* Kelompok *tajrid 'ashri* ini dalam merespon dan memaknai pemikiran ideologis para elit pimpinan Muhammadiyah menggunakan argumentasi-argumentasi teologis berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadith seperti ketika mereka menafsiri ayat-ayat yang ada kaitannya dengan jihad, pluralitas agama, mereka tidak gegabah menafsiri dan menginterpretasikan sesuai dengan pikiran mereka sendiri, melainkan tetap dikaitkan dengan aturan baku yang telah berlaku di Muhammadiyah. Di samping itu juga menggunakan teori-teori modern rasional yang umumnya produk barat meskipun dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Bagi mereka yang penting adalah substansi nilai-nilai ajaran agama Islam yang harus diperjuangkan, dan bukan sekadar simbol-simbol keagamaan. Dalam

konteks Muhammadiyah, kelompok ini cenderung mengikuti Mainstreem yang berlaku di Muhammadiyah, serta taat mengikuti tata aturan yang berlaku di dalam persyarikatan Muhammadiyah. kelompok *tajrid 'ashri* ini dapat ditemukan dalam pemikiran-pemikiran serta analisis Shabir.

c. *Tajrid tahriri,* yakni kelompok pemikiran Muhammadiyah murni liberal. Kelompok ini bisa diidentikkan dengan *fundamentalis liberal.* Kelompok *tajrid tahriri* ini dalam merespon dan memaknai pemikiran ideologis para elit pimpinan Muhammadiyah tetap menggunakan argumentasi-argumentasi teologis berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadith, dengan menggunakan tafsir-tafsir modern yang berwatak kekinian, misalnya ketika mereka memaknai ayat-ayat yang berkaitan dengan keragaman suku, ras, budaya dan bahasa. Mereka juga menafsiri dan memaknai ayat-ayat yang berkaitan dengan jihad, yang oleh mereka lebih dimaknai sebagai jihad damai bukan jihad perang.

Kelompok pemikiran ini juga menggunakan teori-teori modern rasional yang umumnya produk barat. Bagi mereka teori apapun bisa digunakan untuk memahami kandungan ajaran agama Islam. Mereka menganggap penting substansi ajaran agama Islam dan bukan sekadar simbol-simbol keagamaan. Kelompok pemikiran ini juga menggunakan rumusan-rumsan ideologis yang telah ditetapkan oleh Muhammadiyah, tetapi rumusan-rumusan ideologis tersebut tetap terbuka untuk ditafsiri dan diinterpretasi ulang sesuai dngan konteks serta

perkembangan jaman, seperti ketika mereka mengejawantahkan salah satu point dalam rumusan rumusan *Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah* tentang komitmen Muhammadiyah untuk membantu pemerintah RI serta kesiapan bekerjasama dengan semua elemen masyarakat alam mewujudkan negara Indonesia yang adil dan makmur. Juga terlihat dalam memberi penafsiran terhadap salah satu point dalam rumusan *Kepribadian Muhammadiyah* tentang kewajiban menghormati segala undang-undang serta falsafah negara RI yang sah. Kelompok pemikiran *tajrid tahriri* ini dapat ditemukan dalam pemikiran Damanhuri.

2. Pemaknaan Terhadap Pemikiran Elit Pimpinan Muhammadiyah.

Tentang fundamentalisme, hasil telaah baik dari pemikiran para elit pimpinan Muhammadiyah maupun warga Muhammadiyah ada perbedaan perspektif, bagi para elit pimpinan Muhammadiyah fudamentalise sebagaimana yang difahami oleh dunia pada umumnya, adalah faham keagamaan yang cenderung eksklusif, tidak mau menerima pemikiran dari luar, dan sebagian ada kecenderungan melakukan tindak kekerasan dalam rangka mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Fundamentalisme dianggap sebagai ideologi berbahaya bagi pluralitas dan inklusifitas Islam. Bahkan dalam pandangan Kurzman,[77]

[77]Kurzman, dalam, Lutfi As-Syaukani. *Dari Taksonomi (model) Lama ke Islam Liberal*, 6. lebih lanjut dikatakan bahwa salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh kalangan fundaentalisme adalah tentang *"kedamaian,*

fundamentalisme adalah musuh utama Liberalisme Islam dan bahkan mereka adalah kelompok menyimpang dari ajaran Islam.

Fundamentalisme dalam perspektif warga Muhammadiyah (dalam area sasaran penelitian) terutama bagi kelompok *tajrid ushuli* difahami sebagai sikap beragama yang berkonotasi baik/positif. Mereka memaknai fundamentalisme sebagai faham keagamaan yang mendasar serta pemahaman terhadap ajaran Islam secara rigit dan detail mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Warga Muhammadiyah *tajrid uṣulī* maupun *tajrid 'ashri* pada umumnya memaknai apa yang difahami oleh para elit pimpinan Muhammadiyah sebagai telah menyimpang dari *"manhaj"* ajaran Islam. Apa yang mereka tuduhkan bahwa perempuan adalah di belakang kaum laki-laki, perempuan adalah separuh harga kaum laki-laki, menurut warga Muhammadiyah semata-mata karena didasari oleh pemahaman mereka yang dangkal, dan karena ketidaksediaan mereka mengkaitkan antara ayat yang turun dengan asbabunnuzul yang melatar belakanginya. Ini terjadi karena mereka memilih hermeneutika sebagai alat untuk memahami teks-teks keagamaan dan terpisah dari sejarah masa lalu. Adanya berbagai istilah atau label seperti Islam fundamentalis, Islam eksklusif, islam militan, islam

keberagaman, (Syu'ub Wa Qabail), menolak pluralitas, dan menganggap bahwa kebenaran hanyalah satu adanya yakni kebenaran menurut dirinya sendiri. Dalam soal Negara misalnya, kaum fundamentalis sering kali berskap ahistoris, karena mengambil bentuk Negara yang tak pernah memiliki preseden dalam sejarah Islam sendiri. Dalam persoalan perempua, kaum fundamentalisme islam menganggap bahwa parempuan adalah setengah dari harga laki-laki, sehingga mereka meletakkan kaum wanita di belakang kaum laki-laki.

radikal, islam onservatif, dan sejenisnya memang sering digunakan oleh barat untuk memberikan stigma negativ terhadap kelompok-kelompok islam yang pemikirannya tidak sejalan dan tidak disukai oleh barat.

Meskipun demikian mereka tetap menghormatinya sebagai bagian dari komunitas warga Muhammadiyah. Hanya ada sedikit saja yakni dari kalangan *tajrid tahriri* yang memaknai bahwa pemikiran para elit pimpinan Muhammadiyah tersebut sebagai sesuatu yang wajar, benar, dan tidak ada yang perlu dipermasalahkan, sebab apa yang mereka lakukan sebenarnya adalah dalam rangka memperluas wacana keilmuan dan kita tinggal menyeleksi mana yang baik untuk digunakan dan mana yang tidak baik untuk dirubah dan diperbaiki.

Tentang Pluralisme, setelah memahami pemikiran ideologis para elit pimpinan Muhammadiyah, maka warga Muhammadiyah Paciran dari kalangan *tajrid ushuli* dan *tajrid 'ashri* memaknai bahwa pemikiran mereka telah terlampau jauh dari ajaran Islam. Bahwa pluralisme sebagai faham keragaman dalam segala sesuatu termasuk agama, telah melakukan upaya merubah paradigma kebenaran tunggal ke paradigma baru yakni kebenaran ganda. Bahwa tidak ada kebenaran di dunia ini yang hanya satu sesuai dengan pahamnya sendiri, melainkan pada dasarnya ada kebenaran di mana-mana.

Dalam pluralitas agama, disebutkan bahwa sejatinya ada kebenaran dalam Islam, ada kebenaran dalam kristen, ada kebenaran dalam yahudi, dan ada kebenaran dalam semua agama. Implikasinya adalah

semua agama pada hakekatnya mengandung kebenaran, sehingga kebenaran tidak boleh diklaim hanya milik salah stu agama saja. Pemahaman seperti ini oleh kalangan *tajrid ushuli* dan *tajrid 'ashri* dianggap telah menodai kebenaran isi al-Qur'an,[78] dan menyalahi ijma' kaum muslimin baik sunni maupun shi'iy. Kalangan *tajrid tahriri* meskipun agak tersamar-samar sejatinya juga sependapat dengan dua kelompok terdahulu, akan tetapi bagi kelompok *tajrid tahriri* hidup berdampingan antar pemeluk agama tidak mungkin terjadi kalau tidak ada pendekatan-endekatan, persuasi, dan bahkan kompromi-kompromi meskipun dalam batas-batas tertentu.

Tentang Negara Islam, Setelah mencermati pernyataan dan tulisan-tulisan tokoh dan inspirator gerakan Islam di Indonesia termasuk para elit pimpinan Muhammadiyah baik di pusat maupun lokal termasuk warga Muhammadiyah, baik dari kalangan *tajrid ushuli* (kecuali yang ekstrim), *tajrid 'ashri,* maupun *tajrid tahriri* akan mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa mendirikan Negara Islam sama sekali bukan *agenda utama* mereka. Tema utama mereka adalah *al-Islam huwa al-hal* atau *Islam is the solution*. Solusi Islam terhadap segala permasalahan bangsa yang mencangkup politik, sosial dan ekonomi. Bagi gerakan Islam mewujudkan pemerintahan yang bersih jauh dari korupsi, mensejahterakan rakyat (*prosperity*), mempertahankan integritas bangsa dan Negara,

[78] Bandingkan dengan beberapa penggalan ayat al-Qur'an ini :
إنّ الدين عند الله الإسلام
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الأخرة من الخاسرين

menegakkan supremasi hukum, profesional, mendukung segala proses demokratisasi di dunia Islam adalah agenda-agenda yang mendesak untuk diwujudkan. Agenda-agenda tersebut adalah sebuah nilai-nilai universal yang diterima oleh seluruh komponen bangsa.

Bahwa Negara yang dikehendaki oleh Islam[79] adalah Negara yang berlandaskan sipil bukan Negara teokrasi atau Negara kaum agamawan yang selama ini dituduhkan oleh media-media Barat. Hal ini sejalan dengan apa yang ditegaskan oleh Abdul Mun'im Abdul Fatuh, salah seorang tokoh dan anggota Maktab Irsyad Ikhwanul Muslimin di Mesir, dalam wawancara dengan islamonline (14/12/2005) dia menegaskan bahwa definisi kontemporer tentang Negara Islam adalah Negara yang dihuni oleh mayoritas kaum muslimin. Negara sipil (madani) yang dikelola oleh orang-orang yang profesonal, bukan Negara teokrasi yang dikelola oleh kaum agamawan.[80]

Lebih lanjut, dia mengutip ungkapan Muhammad Mahdi 'Akif, mursyid 'am (pimpinan) Ikhwanul Muslimin bahwa negara yang dicita-citakan adalah negara sipil yang berlandaskan kepada kebebasan (hurriyah) dan demokrasi, memberikan hak kepada warga negara untuk membentuk partai

[79]Yusuf al-Qaradhawi, salah seorang tokoh intelektual yang karya-karya ikut mengilhami gerakan Islam kontemporer dalam karyanya Fiqhud Dawlah mengatakan seputar Negara islam dalam benuknya yang "civil" bukan teokrasi.

[80]Mabni Darsi, *Peta Politik Gerakan Islam Kontemporer* (Pakistan: Department of Politics and International Relations, International Islamic University-Islamabad, Pakistan, 2008), 12.

poltik. Negara Islam, lanjut Abdul Mun'im Abdul Fatuh adalah Negara yang menerapkan pembagian kekuasaan *(check and balance)* antara eksekutif, legilatif dan yudikatif. Bahkan sistem pembagian kekuasaan ini, menurut beliau telah diterapkan pada masa khalifah Umar bin Khattab.[81]

Tentang Jihad dalam Islam, setelah mencermati pemikiran dan metodologi pemahaman warga Muhammadiyah (di daerah sasaran penelitian) baik kalangan *tajrid ushuli, tajrid 'ashri* pada umumnya sependapat bahwa jihad dalam Islam itu memang ada tuntunannya atau perintahnya dalam al-Qur'an maupun Hadith. Adapun kapan pelaksanaan perang itu bukan soal yang mudah dilakukan tetapi membutuhkan beberapa kriteria, misalnya karena kaum muslimin dizhalimi, terdesak, dan terusir, serta memang ada ukuran rasional bahwa kekuatan kaum muslimin dengan kekuatan lawan memang imbang.

[81] Bandingkan dengan Syeikh Qaradhawi adalah Negara yang berlandaskan kepada mufakat dan musyawarah bukan Negara kerajaan. Negara yang dibangun berdasarkan berbagai prinsip demokrasi yang baik, tetapi berbeda dengan demokrasi Barat , persamaan antara keduanya adalah keharusan rakyat memilih kepala Negara, rakyat tidak boleh dipaksa untuk memilih pemimpin mereka, seorang kepala Negara bertanggung jawab di hadapan wakil-wakil rakyat. Bahkan para wakil rakyat tersebut, menurut Syeikh Qaradhawi berhak memecat (*impeachment*) bila sang pemimpin melakukan hal-halyang inskonstitusional. Juga bisa dibandingkan dengan Syeikh *Abdul Aziz bin Baz*, ulama kharismatik di Saudi Arabia yang semasa hidupnya pernah menjadi mufti Saudi Arabia dalam sebuah wawancara dengan majalah Al-Jusur yang terbit di Saudi Arabia edisi 6 Dzul Qa'dah 1424 H. :
membolehkan kaum muslimin ikut berpartisipasi dalam pemerintahan yang tidak berlandaskan Islam selama niat mereka untuk memperbaiki Negara dan menyampaikan messege atau dakwah Islamiyah. Syeikh Al-'Usaimin yang juga salah seorang ulama dari Saudi Arabia dengan tegas lagi mengatakan bahwa tidak boleh membiarkan parlemen diisi oleh orang-orang fasik dan sekuler.

Mereka memaknai pemikiran para elit pimpinan Muhammadiyah yang lebih cenderung mengatakan bahwa jihad dalam arti perang itu tidak relevan dengan semangat rahmatan lil alamin, sebagai suatu pendapat yang keterlaluan. Para elit pimpinan Muhammadiyah itu (selain Yunahar Ilyas) menilai bahwa jihad dalam berbagai bentuknya hanya memungkinkan dilakuan dalam arti jihad damai yakni memberdayakan umat Islam serta meningkatkan kualitas maum muslimin. Kaum *tajrid tahriri* nampaknya sependapat dengan pemikiran para elit pimpinan Muhammadiyah bahwa jihad harus diartikan secara bahasa serta dimplementasikan sesuai dengan konteks sosial masyarakat yang ada. Bahwa ayat-ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. dengan menggunakan kata jihad tidak selalu bermakna perang. Dan Nabi Muhammad SAW. sendiri telah memberi contoh teladan ketika beliau membangun masyarakat baru di Madinah sama sekali tidak didasarkan kekerasan apalagi peperangan. Jihad dalam arti perang, dalam al-Qur'an menggunakan kata Qital, dan ini baru diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW. ketika keadaan kaum muslimin terusir, terjepit, dan dizhalimi, sehingga tidak ada jalan lain kecuali harus membela diri, maka pada saat itulah kaum muslimin diizinkan untuk berjihad dalam arti perang.

3. Pemaknaan terhadap Relasi Struktural dan Fungsional dalam Persyarikatan Muhammadiyah.

Dalam memaknai relasi struktural dan fungsional antara pimpinan dengan warga Muhammadiyah, semua varian yang ada di daerah

sasaran penelitian sepakat bahwa aturan organisasi diakui sebagai panduan yang harus ditaati secara keseluruhan dan ini tercermin pada sikap mereka yang tidak mau melakukan perlawanan secara terbuka terhadap tatanan keorganisasian di Muhammadiyah.

Relasi struktural diatur lewat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah yang sah dan memilki legalitas. Baik kaum *tajrid ushuli, tajrid 'ashri*, maupun *tajrid tahriri* memaknai bahwa relasi struktural diletakkan pada bingkai *"ketaat asas-an"* dan kebersamaan serta tekad melaksanakan aturan yang telah disepakati. semua instruksi, surat-menyurat, aturan permusyawaratan, serta berbagai kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah baik menyangkut internal organisasi maupun berkaitan dengan eksternal organisasi, sebagai sesuatu yang harus disikapi *"sami'na waatha'na"*. Sedangkan relasi fungsional antara pimpinan dengan warga diwujudkan dalam pola keteladanan serta contoh dalam perilaku dari para elit pimpinan Muhammadiyah yang memungkinkan para pimpinan di bawahnya sampai seluruh warga bisa meneladani para elitnya.

Dalam catatan sejarah para elit pimpinan Muhammadiyah, dikenal merupakan sosok pribadi-pribadi yang dikenal memiliki integritas yang tinggi. Mitsuo Nakamura, dalam hasil penelitiannya tentang Muhammadiyah mengatakan bahwa kehidupan tasawuf di persyarikatan ini ternyata tumbuh subur, hampir seluruh elit pimpinan Muhammadiyah , kata Mitsuo, adalah pribadi-

pribadi pengamal ajaran tasawuf yang taat. Penemuan ini sekaligus menepis tesis yang selama ini mengemuka bahwa di Muhammadiyah tidak dikenal yang namanya tasawuf.[82] Nilai-nilai keruhanian yang diamalkan oleh warga Muhammadiyah khususnya para elit pimpinan Muhammadiyah misalnya amanah, kejujuran, kesederhanaan, 'adalah, shaja'ah, shabar, tawakkal, dll.

Jadi, secara fungsional keteladanan para elit pimpinan Muhammadiyah telah mengikat secara emosional terhadap warga Muhammadiyah. Ketika warga Muhammadiyah menyaksikan bahwa (Fakhruddin) menjadi ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang sangat dihormati bahkan Presiden Soeharto-pun sangat homat kepadanya, ternyata kehidupan keseharian beliau sangat sederhana, di depan rumahnya beliau jualan bensin eceran, sedangkan rumah yang beliau tempati bukan rumah milik pribadinya, beliau tidak menggunakan pengawal atau asisten pribadi, melainkan bisa berhubungan langsung dengan warga dan masyarakat baik di kampung, pedesaan, maupun di forum-forum resmi. Beliau dalam posisi sebagai *presiden*-nya Muhammadiyah terbiasa mendatangi pengajian di kampung-kampung, di ranting-ranting dengan dibonceng sepeda motor dan tentu tanpa

[82]Sebenarnya Muhammadiyah tidak pernah mempopulerkan istilah tasawuf karena memang istilah ini bukan dari khazanah Islam zaman Rasul. Akan tetapi Muhammadiyah mengamalkan nilai-nilai keruhanian yang lebih dikenal dengan *Akhlaqul Karimah*.

pengawalan, adalah pemandagan yang rutin dilakukan oleh Beliau.

Keadaan seperti itu menjadikan warga Muhammadiyah, apa lagi para pimpinan persyarikatan di bawahnya tidak bisa berbuat lain kecuali harus ta'zhim kepada beliau. Begitu pula pada hampir seluruh pimpinan puncak Muhammadiyah dari masa ke masa, termasuk keteladanan sang pendiri Muhammadiyah sendiri Ahmad Dahlan. Wal hasi, semua kalangan warga Muhammadiyah baik kaum *tajrid ushuli, tajrid 'ashri*, maupun *tajrid tahriri,* memaknai relasi fungsional antara elit pimpinan Muhammadiyah dengan warga Muhammadiyah, diletakkan dalam pola hubungan yang religius, keteladanan, dan ketaatan yang berdimensi akhlaqul Karimah.

---o0o---

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, *pertama*, Muhammadiyah, sebagai organisasi keagamaan modern, sesuai dengan ketentuan organisasi tersebut, menghendaki adanya relasi antara pimpinan dengan warganya. Bahkan relasi ini adalah sebuah keniscayaan dalam Muhammadiyah. Hal ini bisa dilihat, misalnya, dalam kasus berdirinya sebuah ranting (satu kesatuan pimpinan Muhammadiyah terkecil di tingkat Kelurahan) bersifat *Battom-up* yakni muncul dari inisiatif sekelompok masyarakat yang kemudian tersusun pimpinan di tingkat ranting, maka keberadaan ranting tersebut baru absah jika dikomunikasikan kepada pimpinan di atasnya yakni pimpinan cabang, dan pimpinan cabang mengkomunikasikan kepada pimpinan di atasnya lagi begitu seterusnya sehingga terjadi relasi yang mengikat antara pimpinan ranting sampai pimpinan tertinggi. Implikasi dari fakta ini, maka di dalam persyarikatan Muhammadiyah memungkinkan adanya sosialisasi atas suatu kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan Muhammadiyah kepada warganya. Dalam banyak kasus yang pernah terjadi di persyarikatan ini menunjukkan bahwa para elit pimpinan telah melakukan pembentukan opini kepada warga Muhammadiyah, misalnya penentuan awal bulan Ramadan, penentuan awal Idul Fitri dan Idul Adh-ha, penentuan saat terjadinya gerhana matahari dan bulan. Dalam bidang politik Pimpinan Pusat

Muhammadiyah telah melakukan pembentukan opini publik tentang keanggotaan Muhammadiyah dalam partai Islam *Masyumi.* Pengarahan opini juga dilakukan ketika pembentukan partai *Parmusi,* dan begitu juga pada saat pencalonan M. Amien Rais sebagai presiden, PP Muhammadiyah melakukan hal yang sama. Adanya relasi antara pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah dengan warga Muhammadiyah terjadi bukan hanya adanya ikatan aturan organisasi berupa Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah serta berbagai *aturan organisasi* lainnya, tetapi juga adanya ikatan ideologi di antara keduanya. Ikatan ideologi dalam Muhammadiyah memungkinkan terjadinya ikatan emosional yang kuat antara pimpinan dengan warganya. Bentuk relasi dan pola hubungan yang dibangun di Muhammadiyah adalah relasi struktural dan relasi fungsional.

Dalam memaknai relasi struktural dan fungsional antara pimpinan dengan warga Muhammadiyah, semua varian yang ada di daerah sasaran penelitian sepakat bahwa aturan organisasi diakui sebagai panduan yang harus ditaati secara keseluruhan dan ini tercermin pada sikap mereka yang tidak mau melakukan perlawanan secara terbuka terhadap tatanan keorganisasian di Muhammadiyah. Relasi struktural diatur lewat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah yang sah dan memilki legalitas. Baik kaum *tajrid ushuli, tajrid 'ashri*, maupun *tajrid tahriri* memaknai bahwa relasi struktural diletakkan pada bingkai *ketaat asasan* dan kebersamaan serta tekad melaksanakan aturan yang telah disepakati. semua instruksi, surat-menyurat, aturan permusyawaratan, serta berbagai kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah baik menyangkut internal organisasi maupun berkaitan dengan

eksternal organisasi, sebagai sesuatu yang harus disikapi *sami'na Waatha'na*. Sedangkan relasi fungsional antara pimpinan dengan warga diwujudkan dalam pola keteladanan serta contoh dalam perilaku dari para elit pimpinan Muhammadiyah yang memungkinkan para pimpinan di bawahnya sampai seluruh warga bisa meneladani para elitnya. Dalam catatan sejarah para elit pimpinan Muhammadiyah, dikenal merupakan sosok pribadi-pribadi yang dikenal memiliki integritas yang tinggi. Nilai-nilai keruhanian yang diamalkan oleh warga Muhammadiyah khususnya para elit pimpinan Muhammadiyah, misalnya, amanah, kejujuran, kesederhanaan, 'adalah, syaja'ah, shabar, tawakkal, dll. Nilai-nilai keruhanian tersebut secara substantif termaktub dalam beberapa rumusan ideologis yang kemudian dijadikan landasan ideologis bagi pesyarikatan Muhammadiyah, seperti, Muqadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, dan Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah.

Secara fungsional keteladanan para elit pimpinan Muhammadiyah telah mengikat secara emosional terhadap warga Muhammadiyah. Ketika warga Muhammadiyah menyaksikan bahwa (AR. Fakhruddin) menjadi ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang sangat dihormati bahkan mantan Presiden Soeharto-pun (pada waktu itu) sangat homat kepadanya, ternyata kehidupan keseharian beliau sangat sederhana, di depan rumahnya beliau jualan bensin eceran, sedangkan rumah yang beliau tempati bukan rumah milik pribadinya, beliau tidak menggunakan pengawal atau asisten pribadi, melainkan bisa berhubungan langsung dengan warga dan masyarakat baik di kampung, pedesaan, maupun di forum-forum resmi. Beliau dalam

posisi sebagai *presiden*-nya Muhammadiyah terbiasa mendatangi pengajian di kampung-kampung, di ranting-ranting dengan dibonceng sepeda motor dan tentu tanpa pengawalan, adalah pemandagan yang rutin dilakukan oleh Beliau. Keadaan seperti itu menjadikan warga Muhammadiyah, apa lagi para pimpinan persyarikatan di bawahnya, tidak bisa berbuat lain kecuali harus ta'zhim kepada beliau. Begitu pula pada hampir seluruh pimpinan puncak Muhammadiyah dari masa ke masa, termasuk keteladanan sang pendiri Muhammadiyah sendiri Kyai Ahmad Dahlan. Wal hasil, semua kalangan warga Muhammadiyah di Paciran baik kaum *tajrid ushuli, tajrid 'ashri*, maupun *tajrid tahriri,* memaknai relasi fungsional antara elit pimpinan Muhammadiyah dengan warga Muhammadiyah, diletakkan dalam pola hubungan yang religius, keteladanan, dan ketaatan yang berdimensi akhlaqul Karimah.

Kedua, Para elit pimpinan Muhammadiyah (yang menjadi sasaran penelitian) yakni M. Amien Rais, Ahmad Syafii Ma'arif, M. Dien Syamsuddin, dan Yunahar Ilyas, memilki komitmen keorganisasian yang handal, serta memiliki integritas yang tinggi. Mereka dikenal memiliki latar belakang pendidikan agama Islam yang kuat. Pokok-pokok pikiran Amien Rais tentang keislaman, misalnya, banyak diwarnai nilai-nilai kemuhammadiyahan, hal ini dapat dilacak lewat beberapa tulisannya di berbagai buku/penerbitan, maupun ceramahnya, antara lain : mencetuskan "5 (lima) Doktrin" Muhammadiyah.1), doktrin tauhid. 2), Muhammadiyah menggerakkan "enlightenment, pencerdasan, pencerahan", supaya umat Islam tidak dipencundangi atau dibohongi umat lain. 3), Menggembirakan atau memobilisasi amal saleh sebanyak-

banyaknya. 4), "menggalang kerjasama" dengan segala pihak dalam kebijakan dan takwa serta menolak kerjasama dengan siapa pun dalam dosa dan permusuhan. 5), adalah menjahui politik praktis. Pokok-pokok pikiran Syafii Ma'arif, hampir meliputi berbagai persoalan dalam kehidupan umat manusia khususnya yang menyangkut umat Islam di Indonesia. Sebagian merupakan peneguhan ideologi keagamaan, tetapi sebagian juga merupakan pengembangan atau interpretasi ideologis dalam ranah wacana pemikiran yang dalam batas-batas tertentu menimbulkan pro dan kontra di kalangan warga Muhammadiyah. Pemikiran-pemikiran Syafii Maarif dapat dilacak di berbagai tulisan maupun ceramahnya di berbagai forum. Di antara pokok pikirannya adalah tentang Islam Inklusif, Penolakannya terhadap gagasan mengungkit kembali Piagam Jakarta, dan Khilafah Islamiyah. Pokok-pokok pikiran Din Syamsuddin banyak disampaikan di beberapa forum seminar maupun diskusi di beberapa tempat, dan juga di beberapa bukunya. beberapa diantaranya : Negara dalam Perspektif Islam, Membangun ummat tengahan yaitu yang tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri, melainkan berada pada posisi *wasatha* atau tengah. Pokok-pokok pikiran Yunahar Ilyas, dapat ditelusuri lewat buku-buku tulisannya maupun ceramah-ceramahnya di berbagai forum. sebagian daripadanya antara lain: Islam dan Pluralitas Agama, pembahasan tentang jihad dan qital. Tetapi ketika mereka menyikapi beberapa persoalan yang dianggap *krusial* di kalangan umat Islam Indonesia maupun global, yakni tentang Pluralisme, Fundamentalisme, Konsep Negara Islam, dan Jihad dalam Islam, ternyata terjadi polarisasi jalan pikiran mereka masing-masing. Dan ketika penulis konfirmasikan dengan

beberapa teori perkembangan pemikiran Islam kontemporer, maka dapat diberikan kategorisasi sebagai berikut: Amien Rais, dan Syafii Ma'arif, dapat diidentikkan sebagai pemikir bercorak *pluralis*. Din Syamsuddin, dapat diidentikkan sebagai pemikir yang bercorak *modernis-salafi*. Sedangkan Yunahar Ilyas, dapat diidentikkan sebagai pemikir yang bercorak *fundamentalis-modern*.

Ketiga, Warga Muhammadiyah Paciran, dalam merespon atau memaknai pemikiran ideologis yang dilakukan oleh para elit pimpinan Muhammadiyah, ternyata terdapat tiga varian yang masing-masingnya berbeda perspetif dalam memaknai pemikiran ideologis para elit pimpinan Muhammadiyah tersebut, tetapi masing-masing varian juga berada dalam satu titik bahwa keragaman pemikiran yang terjadi di kalangan elit Muhammadiyah, adalah suatu hal yang niscaya.

Sebagian warga Muhammadiyah Paciran, merespon bahwa pemikiran ideologis para elit pimpinan Muhammadiyah dalam empat isu utama (pluralisme, fundamentalisme, konsep negara islam, dan jihad dalam Islam), setuju dan mendukung pemikiran mereka. Bahwa pluralisme atau pluralitas agama adalah sesuatu yang wajar terjadi dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Fundamentalisme adalah faham keagamaan yang cenderung intoleran serta ada unsur pemaksaan kehendak melalui kekerasan, oleh sebab itu fundamentalisme adalah musuh peradaban Islam yang damai. Konsep negara Islam lebih bersifat substansialis bukan simbolis. Dan jihad pada saat ini bukanlah jihad perang tetapi jihad damai memberdayakan kualitas umat. Bagian ini penulis kategorikan sebagai kelompok *tajrid tahriri.*

Sebagian warga Muhammadiyah Paciran yang lain, merespon bahwa pemikiran ideologis para elit pimpinan Muhammadiyah dalam empat isu utama (pluralisme, fundamentalisme, konsep negara islam, dan jihad dalam Islam), setuju dengan catatan, bahwa pemikiran ideologis yang sifatnya berupa pengembangan atau interpretatif, ketika dikonfirmasikan kepada beberapa rumusan ideologis resmi Muhammadiyah (Muqaddimah AD Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah), jika tidak sesuai maka harus diluruskan, dan jika tidak bertentangan maka bisa dibenarkan. Kelompok warga ini penulis kategorikan sebagai kelopok *tajrid 'ashri*.

Sebagian Warga Muhammadiyah Paciran lainnya (bagian akhir), merespon bahwa pemikiran ideologis para elit pimpinan Muhammadiyah dalam empat isu utama (Pluralisme, fundamentalisme, konsep negara islam, dan jihad dalam Islam), pada umumnya telah keluar dari nilai-nilai dasar pemahaman mayoritas ulama dan zuama Islam. Pemikiran-pemikiran keagamaan yang menggunakan labelisasi produk barat pada hakekatnya adalah perangkap untuk mendistorsi makna Islam yang komprehensif, dan pada akhirnya akan menghancurkan Islam dan umat Islam itu sendiri. Bagian warga yang akhir ini penulis kategorikan sebagai kelompok *tajrid ushuli*.

B. Implikasi Teoretik

Setiap teori menawarkan cara memahami perubahan sosial. Setiap teori adalah sahih sejauh memenuhi fungsi menerangkan (terlepas dari perkara apakah orang dapat menerima penjelasan yang ditawarkan atau tidak). Setiap teori juga adalah sahih sejauh dapat dites

secara empiris. Tetapi tes empiris dapat berbeda-beda. Untuk mengetesnya, ada teori yang memerlukan data historis; ada teori yang membolehkan menggunakan data hasil survei dan data statistik; dan ada pula teori yang membolehkan menggunakan baik data historis maupun data survei dan data statistik. Contohnya teori Toynbee[1)], hanya dapat dites dengan data historis yang luas. Bila ingin mempersempit bidang penelitian dan masih bertahan dengan teori Toynbee, maka dapat mempelajari sesuatu seperti berfungsinya sejenis elit khusus selama periode keruntuhan kebudayaan. Atau, dapat mengetes hipotesis bahwa periode kehancuran kebudayaan ditandai oleh peningkatan perasaan berdosa di kalangan rakyat. Teori itu lebih sesuai untuk studi historis yang luas ketimbang untuk merumuskan dan menguji hipotesis. Sebaliknya, studi tentang kemodernan individu dapat menggunakan data historis untuk menunjukkan perkembangan kemodernan individu selama periode industrialisasi maupun data survei

[1)] Menurut Toynbee studi mengenai satu bangsa tertentu tidak dapat dipahami sebagai "sesuatu di dalam dirinya sendiri", bangsa tertentu harus dilihat sebagai bagian dari suatu proses yang lebih besar. Misalnya, tidak akan dapat memahami Inggris, hanya dengan mempelajari sejarah bangsa itu sendiri saja; kita harus melihat Inggris menurut tempatnya di dalam kehidupan umat Kristen Barat. Karena itu yang seharusnya menjadi pusat perhatian studi bukanlah Inggris, AS, atau bangsa tertentu lain, tetapi peradaban di mana bangsa tersebut hanyalah merupakan bagiannya saja. Menurut Toynbee, ada 21 peradaban di dunia (misalnya peradaban : Mesir kuno, India, Sumeria, Babilonia, dan peradaban Barat atau Kristen) Enam peradaban muncul serentak dari masyarakat primitif : Mesir, Sumeria, Cina, Maya, Minoan (di pulau Kreta) dan India. Masing-masing muncul secara terpisah dari yang lain, dan terlihat di kawasan luas yang terpisah. Semua peradaban lain berasal dari enam peradaban asli ini. Sebagai tambahan sudah ada 3 peradaban yang gagal (peradaban Kristen Barat Jauh, Kristen Timur Jauh, dan Skandinavia) dan 5 peradaban yang masih bertahan (Polinesia, Eskimo, Nomadik, Ottoman, dan Spartan). Lihat Toynbee, A *Study of History* Vol. 1-5, (New York: Oxford University Press 1946), dikutip Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial,* (Jakarta : Rineka Cipta, 1993),50.

dan data statistik untuk mengetes hubungan antara kemodernan masyarakat dan individu di masa sekarang. Jadi meskipun semua teori dapat menghasilkan hipotesis yang dapat dites, sebagian teori dan hipotesis yang berasal darinya ternyata terlalu luas untuk dapat dites oleh kebanyakan sosiolog. Tetapi teori yang luas bukanlah teori yang tidak bernilai, dan kenyataan menunjukkan bahwa teori yang tidak mudah menghasilkan hipotesis untuk dites, tidak menyebabkannya menjadi tidak bernilai. Sebagai contoh, Toynbee telah menegaskan peranan elit di seluruh proses perubahan sosial. Meskipun kita menolak teori umumnya itu, kita harus menerangkan peranan elit dan barangkali kita dapat meneliti peranan elit menurut pengertian yang dikemukakannya itu.

Dalam kaitan dengan implikasi teoretik hasil penelitian ini, penulis menemukan tiga varian pemikiran pada warga Muhammadiyah Paciran. Kemungkinan besar masing-masing varian tersebut dipengaruhi oleh basis pendidikannya, kemungkinan akses ke dunia luar dan berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran kontemporer yang sedang menggejala, bahkan juga kemungkinan besar dipengaruhi oleh kondisi social ekonomi masing-masing, sebagai berikut:

Pertama, *Tajrid ushuli,* yakni kelompok pemikiran Muhammadiyah Murni Sejati. Kelompok ini bisa diidentikkan dengan *"Fundamentalis-Puritan".* Kelompok *tajrid ushuli* ini dalam merespon, dan memaknai pemikiran ideologis para elit pimpinan Muhammadiyah, senantiasa berargumentasi secara naqli dan cenderung bersifat *Teks books,* sehingga tidak memungkinkan adanya penafsiran atau interpretasi alternatif terhadap nas-nas yang mereka gunakan sebagai argumentasi baik dari al-Qur'an maupun

Hadith. Akan tetapi kelompok ini nampaknya tidak sama dan sebangun dalam berargumentasi, sehingga masih perlu dibedakan menjadi dua bagian, yakni kelompok *tajrid usuli* yang ekstrim, dan kelompok *tajrid ushuli* yang moderat.

Kedua, tajrid 'ashri , yakni kelompok pemikiran Muhammadiyah murni modern. Kelompok ini bisa diidentikkan dengan *"Fundamentalis-Modern".* Kelompok *tajrid 'ashri* ini dalam merespon dan memaknai pemikiran ideologis para elit pimpinan Muhammadiyah menggunakan argumentasi-argumentasi teologis berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadith seperti ketika mereka menafsiri ayat-ayat yang ada kaitannya dengan jihad, pluralitas agama, mereka tidak gegabah menafsiri dan menginterpretasikan sesuai dengan pikiran mereka sendiri, melainkan tetap dikaitkan dengan aturan baku yang telah berlaku di Muhammadiyah. Di samping itu juga menggunakan teori-teori modern rasional yang umumnya produk barat meskipun dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Bagi mereka yang penting adalah substansi nilai-nilai ajaran agama Islam yang harus diperjuangkan, dan bukan sekadar simbol-simbol keagamaan. Dalam konteks Muhammadiyah, kelompok ini cenderung mengikuti Mainstreem yang berlaku di Muhammadiyah, serta taat mengikuti tata aturan yang berlaku di dalam persyarikatan Muhammadiyah.

Ketiga, tajrid tahriri, yakni kelompok pemikiran Muhammadiyah murni liberal. Kelompok ini bisa diidentikkan dengan *"Fundamentalis Liberal".* Kelompok *tajrid tahriri* ini dalam merespon dan memaknai pemikiran ideologis para elit pimpinan Muhammadiyah tetap menggunakan argumentasi-argumentasi teologis berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadith, dengan menggunakan tafsir-tafsir modern yang berwatak kekinian, misalnya

ketika mereka memaknai ayat-ayat yang berkaitan dengan keragaman suku, ras, budaya dan bahasa. Mereka juga menafsiri dan memaknai ayat-ayat yang berkaitan dengan jihad, yang oleh mereka lebih dimaknai sebagai jihad damai bukan jihad perang. Kelompok pemikiran ini juga menggunakan teori-teori modern rasional yang umumnya produk barat. Bagi mereka teori apapun bisa digunakan untuk memahami kandungan ajaran agama Islam. Mereka menganggap penting substansi ajaran agama Islam dan bukan sekadar simbol-simbol keagamaan. Kelompok pemikiran ini juga menggunakan rumusan-rumsan ideologis yang telah ditetapkan oleh Muhammadiyah, tetapi rumusan-rumusan ideologis tersebut tetap terbuka untuk ditafsiri dan diinterpretasi ulang sesuai dngan konteks serta perkembangan jaman, seperti ketika mereka mengejawantahkan salah satu point dalam rumusan *Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah* tentang komitmen Muhammadiyah untuk membantu pemerintah RI serta kesiapan bekerjasama dengan semua elemen masyarakat alam mewujudkan negara Indonesia yang adil dan makmur. Juga terlihat dalam memberi penafsiran terhadap salah satu point dalam rumusan *Kepribadian Muhammadiyah* tentang kewajiban menghormati segala undang-undang serta falsafah negara RI yang sah.

Dari temuan dan fakta ini, dan berdasarkan teori-teori perubahan sosial yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, penulis dapat kemukakan bahwa sepanjang yang penulis baca tentang teori modernisasi dan perubahann sosial menunjukkan bahwa perubahan sosial-budaya pada individu atau masyarakat terjadi karena dorongan atau pengaruh perkembangan eksternal (teknologi, informasi, komunikasi, sosial, budaya, politik

dan sebagainya) di luar diri manusia. Contoh teori Daniel Lerner, Robert H. Lauer, Wilbert E.Moore, atau secara tidak tegas menyertakan pengaruh internal, misalnya, Wan Hasyim, Selo Sumardjan, dan sebagainya.

Dengan demikian maka temuan penelitian ini adalah memodifikasi dan mempertegas bahwa perubahan sosial-budaya terjadi oleh dua pengaruh yang sama-sama kuat secara dialektik antara faktor-faktor eksternal dan internal, bahkan kadang-kadang faktor internal lebih kuat pengaruhnya dibanding dengan faktor eksternal.

C. Keterbatasan Studi.

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa sasaran atau unit analisis penelitian ini terbatas hanya pada warga Muhammadiyah di Paciran, kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, yang memiliki karakteristik tertentu sebagaimana juga yang dikemukakan pada karakteristik setting social masyarakat Paciran, atau kriteria informan pada bab V. Dengan demikian hasil penelitian ini dapat ditransfer terbatas hanya pada warga Muhammadiyah yang memiliki karakteristik relatif sama dengan sasaran penelitian ini. Kemungkinan hasil penelitian ini ditransfer pada warga Muhammadiyah lainnya, perlu dilakukan penelitian lagi.

D. Saran atau Rekomendasi

Penelitian ini dilakukan pada warga Muhammadiyah di Desa Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Unit analisis yang dikaji adalah sosial serta pemikiran keagamaan warga Muhammadiyah dalam ruang lingkup yang sangat sempit yaitu pada warga

Muhammadiyah di desa Paciran tersebut di atas. Dengan demikian hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisir untuk semua warga Muhammadiyah di daerah yang lebih luas. Atas dasar itu penulis memberi saran atau rekomendasi kepada semua pemerhati, para intelektual, peneliti lain yang tertarik kepada kajian sosial budaya terutama pemikiran keagamaan pada warga Muhammadiyah untuk melakukan penelitian yang lebih dalam namun luas untuk melengkapi hasil dari penelitian ini.

---o0o---

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdullah Puar, Yusuf. *Perjuangan dan Pengabdian Muhammadiyah.* Jakarta: Pustaka Antara PT, 1989.

Ahmad, Nur, & Pramono, U. Tanthowi. *Muhammadiyah Digugat.* Jakarta: Kompas, 2000.

Abou El Fadl, Khaled M. *Atas Nama Tuhan, Dari Fiqih Otoriter ke Fiqih Otoritatif.* Jakarta: Serambi, 2004.

Abdurrahman, Asymuni. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Abduh, Muhammad. *Risalah al-Tauhid,* maktabah wa mathba'ah, Ali Shabih wa Auladuhu. Qahirah: Maidan Al-Azhar, 1965.

Abdullah, M.Amin. *Falsafah Kalam di Era Post-Modernisme.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

..... *Falsafah Kalam di Era Post-Modernisme.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Abd al-Wahab, Muhammad Ibnu. *Masail al-Jahiliyyah al-Lati Khalafa Fiha Rasulullah Saw. Ahl Jahiliyyah,* terj. As'ad Yasin. Surabaya: Bina Ilmu, 1985.

Abou al-Fadl, Khaled. *The Great Theft: Wrestling Islam From The Extremists,* edisi Indonesia. Jakarta: Sumber Ilmu Semesta, 2006.

Abdullah, Taufik. *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar,* Taufik Abdullah & Rusli Karim (ED). Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.

Abdullah, M. Amin. *Rekonstruksi Metodologi Studi Agama Dalam Masyarakat Multikultural dan Multirelijius* (Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Filsafat, Disampaikan di Hadapan Rapat Senat Terbuka IAIN Sunan Kalijaga), Yogyakarta, 13-Mei-2000.

Abdullah, Irwan. *Dari Bouded System ke Borderless Society: Krisis Metode Antropologi dalam Memahami Masyarakat Masa Kini,* Antropologi Indonesia, tahun XXIII, No. 60, 1999, September-Desember, 1999.

Abdullah, M. Yatimin. *Studi Islam Kontemporer.* Jakarta: Amzah, 2006.

Abdalla, Ulil Abshar. *Menyegarkan Kembali Pemikiran Islam.* Jakarta: Nalar, 2007.

Abdul Aziz, Imam Tholhah, Sutarman. *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia.* Jakarta: Diva Pustaka, 2006.

Abd. Al-Jabbar, al-Qadhi. *Sharh al-Ushul al-Khamsah.* Abidin: Maktabah Wahabiyyah, 1965.

Abduh, Syekh Muhammad. *Risalah al-Tawhid.* Mesir: Dar al-Manar, 1373 H.

Abd. Al-Wahhab, Muhammad ibn, Syekh. *Kitab al-Tawhid,* alih bahasa, M. Yusuf Harun, MA., Maktabah Salma al-Athariyyah, 2007.

..... . *Majmu' Al-Fatawa Wa al-RasailWa al-Ajwibah,* Beirut, tt.

Abd Al-Rahman, Ibn Hasan, al-Shaikh. *Fath al-Majid: Sharkh Kitab Tauhid.* Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, tt.

Abu Zaid, Hamid, Nashir. *Naqd al-Khitabi al-Dini,* Sina Li al-Nasyr. Qahirah: al-Nasyr, 2002.

Abbas, Nukman. a*l-Ash'ari (874-935 M.) Misteri Perbuatan Manusia dan Takdir Tuhan.* Jakarta: Erlangga, 2002.

Achyad, Najih. *Ta'thirat Kitab al-Tauhid Shekh Muhammad Bin Abd al Wahhab Fi al-harakah al-Ishlahiyyah bi Indunisiyyah,* ma'had Maskumamban al-Islamy.

Afrizal M., Ibnu Rusyd. *Perdebatan Utama dalam Teologi Islam.* Jakarta: Erlangga, 2006.

Ahmad, ibn, Abd. Al-Jabbar. *Syarhk al-Ushul al-Khamsah,* Qahirah : Mathbaah al-Istiqlal al-Kubra, Wahdah, 1965, 149-216 (al-Tawhid), 299-326 (al-Adl), 609-613 (al-Waad wa al-Wa'id), 695-701 (al-Manzilah Baina al-Manzilatayni), 739-745 (al-Amru Bi al-Ma'ruf wa al-Nahyu 'an al-Munkar).

Akbar S. Ahmed and Hastings Donnan. *Islam Globalization and Postmodernity* Routledge: London and New York, 1994.

Ali, Mochammad. *Islam Muda, Liberal, Post-Puritan, Post-Tradisional,* Apeiron Philotes. Yogyakarta : 2006.

Ali Engineer, Ashghar. *Islam In Liberation Theology Essy on Liberative Element in Islam,* terj., Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, tt.

Ali Al-Syaukani, Muhammad. *al-Rasail al-Salafiyah Fi Ihya al-Sunnah Khairu al-Bariyyah,* Beirut. Libnan: Darul Kutub al-Ilmiyyah, tt.

Ali, A. Mukti. *Penelitian Agama di Indonesia, dalam,* Mulyanto Sumardi, 1982, Penelitian Agama: Masalah dan Pemikiran, Sinar harapan, Jakarta, 1982.

A'la, Abdul. *Dari Neomodernisme ke Islam Liberal.* Jakarta: Paramadina, 2003.

Ameer Ali, Syed. *The Spirit Of Islam,* terj., Margono, Kamilah.Yogyakarta: Penerbit Navila, 2008.

Amstrong, Karen. *Berperang Demi Tuhan: Fundamentalisme dalam Islam, Kristen, dan Yahudi.* Jakarta: Serambi dan Mizan, 2001.

Anselm, Strauss & Juliet Corbin. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar,, 2007.

Arkoun, Mohammed. *Menuju Pendekatan Baru Islam,* dalam UlumQul ur'an, seri 7., Jakarta, 1990.

'Araby, Ibn, Muhyiddin. *al-Futuhat al-Makiyyat (Jilid 4).* Beirut: Dar al-Fikr, tt.

..... *al-Futuhat al-Makiyyat (Jilid 3).* Beirut: Dar al-Fikr, tt.

..... *al-Walayah Wa al-Nubuwwah,* al-Maghrib: Dar al-Qubbah al-Zurqa', tt.

Arjuman, Said Amir. *Authority and Political Culture in Shi'ism,* State University of New York Press. New York, USA., 1977.

Arifin, Syamsul. *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamentalis,* Malang : UMM Press, 2005.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Armahedi, Mazhar. *Revolusi Integralisme Islam.* Bandung: Mizan, 2004.

Asyrofie, M.Yusron. *KH. Ahmad Dahlan Pemikiran dan Kepemimpinannya.* Yogyakarta: Yogyakarta Ofset, 1983.

Assyaukani, Luthfi. *Wajah Liberal Islam di Indonesia.* Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2002.

Asmawi. *"Menggagas Inklusifitas Keilmuan Islam: Landasan Filosofis Bagi Shifting Paradigm Kajian Islam", dalam, Akademika Jurnal Studi Keislaman,* Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, Vol. 18, Nomor 2, Maret 2006.

Aziz, Abdul, dkk. *Gerakan Islam Kontemporer.* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989.

Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII.* Bandung: Mizan, 1998.

……. *Pluralisme Islam dalam Perspektif Historis, dalam nilai-nilai Pluralisme dalam Islam,* ED, Sururin.Bandung: Nuansa, 2005.

……. *Historiografi Islam Kontemporer.*Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.

..... *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Post-modernisme.* akarta: Paramadina, 1996, 101-130.

al-Bahiy, Mohammad. *al-Fikr al-Islam al-Hadith Wa Siratuhu Bi al- Isti'mari al-Ghabiyyi,* alib bahasa, Su'adi Saat. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986.

al-Baqillany, Abi Bakr, Muhammad bin Tayyib. *al-Taqrib Wa al-Irshad,* Mu'assasah al-Risalah Jami'ah al-Imam Muhammad Su'ud, al-Su'udiyah al-'Arabiyyah, 1993.

al-Baghdadi, al-Tamimi, Abi Mansur. *Kitab Usul al-Din.* Libnan: Matba'ah al-Daulah, 1981.

Al-Banna, Hasan. *Allah Fi al-Aqidah al-Islamiyyah,* alih bahasa, Mukhtar Yahya. Sala: Ramadhani, 1981.

Badan Pendidikan Kader PP Muhammadiyah. *Materi Induk Perkaderan Muhammadiyah,* Yogyakarta : BPK PP Muhammadiyah, 1994.

Bahrussurur, Iyunk. *Teologi Amal Shaleh, Membongkar Nalar Kalam Muhammadiyah Kontemporer.* Surabaya: Ipam, 2005.

Boy ZTF, Pradana. *The Discourse Of Moderate, Progressive and Radical Islam in Contemporary Indonesia* (participating paper at international seminar, muhammadiyah university of malang). Malang: UMM Press, 2008.

Binder, Leonard. *Islamic Liberalism.*Chicago: The University Of Chicago Press., 1988.

Bernard Lewis, et., *Islam Liberalisme Demokrasi.* Jakarta: 2002.

Baso, Ahmad. *NU Staudies : Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam & Fundamentalisme Neo-Liberal,* Erlangga. Surabaya: Erlangga, 2006.

Basyir, Ahmad Azhar. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman : Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi.*Bandung: Mizan, 1994.

Badri, Abdu al-Rahman. *Madzahib al-Islamiyyin,* Dar al-Ilmy Li al-Malāyīn, 1983.

Basrowi MS, Muhammad & Soenyono. *Teori Sosiologi dlam Tiga Paradigma.* Surabaya: Yayasan Kampusina Surabaya, 2004.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Baihaqi, Imam, e.al. *Agama dan Relasi Sosial: Menggali Kearifan,* Dialog Yogyakarta: LKIS, 2002.

Beatty, Andrew. *Variasi Agama di Jawa: Suatu Pendekatan Antropologi,* diterjemahkan dari Varieties of Javanese Religion, Ahmad Fedyani Saefuddin. Jakarta: Murai Kencana, 2001.

Bellah, Robert N. *"Social Science as an Aproach to the Study of Religion In Indonesia",* Makalah dalam Symposium on Relegion and Society di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 25-29 Nopember 1992.

Central Leadership Of Muhammadiyah. *Muhammadiyah Movement In Indonesia,* Yogyakarta : CLM, 1985.

Connolly, Peter. *Aproaches to The Study Of Religion,* Cassel-Press. London: UK., 1999.

Crane, Diana. *"Introduction: The Challenge of The Sociology of Culture to Sociologyas a Dicipline. Dalam The Sociology of Culture:*

Emerging Theoretical Perspektifes, Diana Crane,ED, Oxfod Blackwell, 1994.

Damami, Mohammad. *Akar Gerakan Muhammadiyah.* Yogyakarta: Fajar Pustaka baru, 2000.

Dwi Susilo, Rahmad K. *Integrasi Ilmu Sosial.* Yogyakarta: Ar-Ruz, 2005.

Dhavamony, Mariasusai. *Fenomenologi Agama,* terjemah, Kelompok Studi Agama Driarkara. Yogyakart : Kanisius, 1995.

Elahi Zaheer, Ehsan. Al-Shi'ah *Wa al-Sunnah.* Lahore: Idara Tarjuman al-Sunnah, 1984.

Esposito, John L. & Mogahed Dalia. *Saatnya Muslim Bicara.* Bandung: Mizan, 2008.

Fazlurrahman. *Membuka Pintu Ijtihad,* alih bahasa, Anas mahyuddin. Bandung: Pustaka Salman, ITB, 1984.

Feally, Greg. Dan Barton Greg. *Tradisionalisme Radikal, Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara,* LKIS.Yogyakart: LKIS, 1997.

F.E. Peters. *A Reader on Classical Islam,* Priceton University Press. New Jersey: 1994.

Furchan, Arif. *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Geert, Cliffort. *The Religion Of Java,* The University Of Chicago Press, Chicago and London, Phoenix edition, 1976.

Gibb, H.A.R. *Aliran-aliran Modern Dalam Islam.* Jakarta: Rajawali Press Rajawali Press Rajawali Press, 1992.

al-Ghita, al Shaikh Muhammad Husain al Kashif. *al-Shi'ah Wa Usuluha,* Maktab Al Tsaqofah Al Islamiyah, tt.

al-Hanafi, Ali al-Qadhi, al-Mala. *Sharhu Kitab al-Fiqh al-Akbar Li al-Imam al-A'zham Abi Hanifah al-Nu'man bin Thabit al-Kufi,* Libnan : Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1984.

al-Hujwiri, Bin Uthman. *Kashf al-Mahjub, Menyelami Samodra Tasawwuf.* Yogyakarta: Futuh Printika, 2003.

Hanafi, Hassan. *Dari Aqidah ke Revolusi.* Jakarta: Paramadina, 2003.

..... *Islamologi-2, dari Rasionalisme ke Empirisme,* terj., Miftah Faqih, Yogyakarta : LKIS, 2004.

..... *Min al-Aqidah Ila al-Thaurah.* Kairo: Maktabah Madbūly, tt.

..... *Islamologi-2, dari Rasionalisme ke Empirisme,* terj., Miftah Faqih. Yogyakarta: LKIS, 2004.

Hadikusuma, Djarnawi. *Risalah Islamiyah.* Yogyakarta: Persatuan, 2003.

……, *Ahlussunnah Wal Jama'ah, Bid'ah, Khurafat.* Yogyakarta: Persatuan, tt.

Husaini, Adian. *Wajah Peradaban Barat, Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekuler-Liberal.* Jakarta: Gema Insani, 2005.

Helmi Syaifuddin, M.Lutfi Mustafa. *Intelektualisme Islam: melacak akar-akar inegrasi ilmu dan agama.* Malang: LKQS-UIN, 2007.

Harras, Muhammad Khalil. *Ba'ath Al-Nahdlah al-Islamiyah, Ibnu Taimiyyah al-Salafi.* Beirut. Libnan: Dar al- Kutub al-Amaliyyah, 1984.

Hamid, Muhammad, al-Faruqi. *Iqdhau al-Sirat al-Mustaqim Mukhalafatu As-hab al-Jahim Li Syaikh al-Islam Ibnu Taymiyah, Libnan, Beirut : Dar al-Kuub al-Ilmiyah, tt.*

Hammaz, Nashir Sunnah. *Sharh al-Fiqh al-Akbar.* Beirut. Libnan: Darul Kutub Al-Islamiyyah, 1984.

Hallaq, Wael B. *History Of Islamic Legal Theory.* Cambridge: University Press, Cambridge, 1977.

Harre, R. *The Philosophy Of Science; An Introductory Survey,* Oxford University. New York: Oxford University, 1972.

Hasan, Mahmud Abdul Karim. *Metode Perubahan Sosial Politik dengan Pertarungan Pemikiran*

dan Perjuangan Politik Menurut Sunnah Rasulullah saw., Jakarta : PSKII Press, 2003.

al-Hashimi, Muhammad Kamil. *Hakekat Aqidah Syi'ah Fil Mizan.* Jakarta: Bulan Bintang, 1989.

al-Īji, Abdu al-Rahman bin Ahmad. *al-Mawaqif Fi Ilm al-Kalam.* Beirut: Alim al-Kutub, tt.

al-Idhliby, Shalah al-Din, Ahmad. *"Aqaid al-'Asy'ariyyah.* Mesir: Dār al-Salam, Askandari, 2008.

Imarah, Muhammad. *Ma'rakah al-Musthalahat Baina Al-Gharbiy Wa al-Islam,* alih bahasa, Mustalah Maufur, MA., Jakarta : Rabbani Press, 1998.

..... *Tayyarat al-Fikr al- Islami,* Dar al-Shuruq, tt.

Ibnu Taimiyyah, Taqiyuddin, *Aqidatu al-Salaf Ma'a Aqidah al-Wasithiyyah,* alih bahasa, Jamaluddin Kafie, Bangil : Pustaka Abdul Muis, 1980.

Iqbal, Muhammad. *The Reconstruction Of Relegious Thought in Islam,* Iqbal Academy. Pakistan: Institut Of Islamic Culture, 1989.

Ishomuddin, MS. *Sosiologi Perspektif Islam.* Malang: UMM Press, 1997.

al-Jabiri, Muhammad Abid. *al-'Aql Al-Siyasi al-'Arabi, Muhaddidatuh Wa Tajalliyatuh,* Beirut : Markaz Dirasat Al-Wihdah Al-'Arabiyah, 1995.

----------. *Wijhat al-Nazar Nahwa I'adat Bina' Qadhaya al-Fikr al-'Arabi al-Mu'ashir,* Beirut: Markaz Al-Thaqofi Al-'Arabi, 1992.

----------. *al-Turath Wa al-Hadathah, Dirasat Wa Munaqashat,* Markaz Dirasat al-Wahdah al-Arabiyyah, 1999.

----------. *Bun-yat al-'Aql al-'Arabi: Dirasat Tahliliyah Naqdiyyah Li Nuzum al-Ma'rifah Fi al-Thaqofah al-'Arabiyyah.* Beirut: Markaz Dirasat Al-Wihdah Al-'Arabiyyah, 1986.

Al-Jabiri, Muhammad 'Abid. *al-'Aql al-Siyasi al-'Arabiy.* Beirut: Al-Markaz Al- Tsaqofi, 1991.

Al-Jawziyyah, Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in.* Beirut: Dar al-Fikr, 1977.

Johnson, Doyle Paul. *Classical Founders and Contemporary Perspectives,* alih bahasa, Robert M.Z. Lawang, Jakarta : Gramedia, 1988.

Jayady, Mahsun. *Muhammadiyah : Pola Pemurnian Akidah Islam & Strategi Perjuangannya.* Surabaya: CV Alifah Alfian, 1997.

Jainuri, Ahmad. *Orientasi Ideologi Gerakan Islam, Konservatisme, Fundamentalisme, Sekularisme, dan Modernisme.* Surabaya: Ipam, 2004.

Jakfar Subhani, Syaikh. *Studi Kritis Faham Wahabi, Tauhid dan Syirik.* Bandung: Mizan, 1992.

…… *Tawassul, Tabarruk, Ziarah Qubur, Karamah Wali, Termasuk ajaran Islam : Kritik atas Faham Wahabi.* Jakarta: Pustaka Hidayah, 1989.

Jamaluddin, Saiful Islam. *Surat-Surat Bersih Diri Muhammad Bin Abdil Wahab.* Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.

Jaibullah, Hasan Ahmad. *Dirasat Muqaranat Li Kitabi al-Iqtishad Fi al- I'tiqad Li al-Imam al-Ghazali,* 1998.

Johnson, Doyle Paul. *Classical Founders and Contemporary Perspectives,* alih bahasa, Robert M.Z. Lawang. Jakarta: Gramedia, 1988.

al-Khatib, Abd. Karim. *al-Qadha' wa al-Qadar Bain al-Falsafah wa al-Din,* al-Arman: Dar al-Fikr al-'Arabi, tt.

Kuntowijoyo. *Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi.* Bandung: Mizan, 1998.

Kurzman, Charles. *Wacana Islam Liberal, Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global,* 2001.

Kuswanjono, Arqom. *Revitalisasi Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar & UGM,, 2001.

Kartanegara, Mulyadi. *Mozaik Hasanah Islam, Bunga Rampai dari Chicago.* Jakarta: Paramadina, 2000.

Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat: Paradigma Bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum, dan Seni.* Yogyakarta: Paradigma, 2005.

LPPI, LP3M, FAI UMY. *Muhammadiyah Menyongsong Abad 21.* Yogyakarta: Pustaka SM, 1998.

Latif, Yudi. *On The Genesis of Intelectual Crossroads: early Fragmentation in the formation of Modern Indonesian Intelligensia/* Yudi Latif. *www.ppim.or.id/publikasi/conten*. Tanggal 28 Juli 2009.

Liddle, R., William. *Skriptualisme Media Dakwah; Suatu Bentuk Pemikiran dan Aksi Politik Islam Masa Orde Baru,* dalam, Ulumul Quran, nomor 3, Vol. IV, 1993, Jakarta, hal., 1993.

Lofland, John dan Lofland Lyn H. *Analyzing Social Setting ,* Publishing Company, Wadsworth, California, 1984.

al-Musawi, A.Syarafuddin. *Dialog Sunnah dan Shi'ah,* terj. Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, 1994.

……. *Isu-Isu Penting Ikhtilaf Sunnah Shi'ah.* Bandung: Mizan, 1993.

Maryadi, Abdullah Aly. *Muhammadiyah Dalam Kritik.* Surakarta: UMS Press, 2001.

Mohammad, Riezam. *Muhammadiyah Prakarsa Besar Kiyahi Dahlan,* UAD. Yogyakarta: UAD Press, 2006.

Muhammad, Syamsu As. *Ulama Pembawa Islam di Indonesia dan Sekitarnya.* Jakarta: Lentera, 1999.

Mulkhan, Abdul Munir. *Islam Murni dalam Masyarakat Petani.* Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2000.

..... *Islam Sejati, Kiyahi Ahmad Dahlan dan Petani Muhammadiyah.* Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005.

..... *Pesan-pesan Dua Pemimpin Besar Islam Indonesia KHA. Dahlan dan KH. Hasjim Asy'ari,* Yogyakarta : Pustaka SM, 1986.

Muhlas, M. Rowi. *Muhammadiyah Menuju Millenium III.* Yogyakarta: Pustaka SM, 1999.

Manan, A. Imron. *Pelbagai Masalah Tauhid Populer.* Surabaya: Bina Ilmu, 1982.

Mumtaz Ali, Muhammad. *Modern Islamic Movements,* AS Nordeen Hayathy, Kuala Lumpur : N. Hayathy, 2000.

Mulkhan, Abd. Munir, SU. *Menggugat Muhammadiyah.* Yogyakarta: Fajar Pustaka baru, 2000.

Madjid, Nurcholish. *Islam Universal.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

..... *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan.* Jakarta: Paramadina, 2005.

Mohammad, Ali. *Islam Muda, Liberal, Post-Puritan, Post-Tradisional.* Yogyakarta: Apeiron Philotes, 2006.

Maryam, Siti. *Sejarah Peradaban Islam Dari Masa Klasik Hingga Modern.* Yogyakarta : LESFI, 2004.

Mudzakkir, Yusuf. *Kawasan dan Wawasan Studi Islam.* Jakarta: Prenada Media, 2005.

M.C. Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern 1200-1400.* Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.

M . Yatimin, Abdullah. *Studi Islam Kontemporer.* Jakarta: Amzah, 2006.

Minhaji, Akhmad. *Respon Kelompok Tradisionalisme Terhadap Misi Pembaharuan Ahmad Hasan, dalam Neo-Ushul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual.* Yogyakarta: Fak. Syari'ah Press, 2004.

Musthofa, al-Shik'ah. *Islam Bila Madhhab,* Dar al Mishriyyah Allibnaaniyyah, tt.

Martin, Richard C-Marx Woodward-Dwi S., Atmaja. *Defender Of Reason In Islam : Mu'tazilah From Medieval to Modern Age,* terj. Mukti Ali, Ircisod. Yogyakarta: 2002.

Muzani, Saiful. *Islam Rasional: Gagasan Pemikiran Harun Nasution.* Bandung: Mizan, 1995.

Maliki, Zainuddin. *Narasi Agung, Tiga Teori Sosial Hegemonik.* Surabaya: Lpam, 2003.

..... Agama Priyayi, Makna Agama Di Tangan Elite Penguasa. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004.

Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Rake sarasin. Yogyakarta: Rake sarasin, 1996.

Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya.* Bandung: Rosda Karya, 2001.

Morisson, Ken, *Max, Durkheim, Weber: Formation of Modern Social Thought,* London : Sage Publication, 1996.

Marcidus, Roy C. *"Pengantar Sejarah, Fungsi, dan Typologi Partai-partai",* dalam Teori Mutakhir Politik, ed, Ichlasul Amal, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1988.

Miles, Matthew B. dan Haberman, A. Michael. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru* (diterjemahkan dari, Qualitatif Data Analisys, oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, jakarta : UI-Press, 1992.

Myrdal, Gunnar, *Obyektifitas Penelitian Sosial,* LP3ES, Jakarta : LP3ES, 1988.

al-Nadawi, Abu hasan Ali al-Hasani. *Dua Wajah Saling Menetang, antara Ahlussunnah dan Syi'ah.* Surabaya: Bina Ilmu, 1988.

Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942.* Jakarta: LP3ES, 1976.

Nurhadi, M. Musawir. *Muhammadiyah dan Reformasi.* Yogyakarta: Aditya Media, 2000.

Nashir, Haedar. *Dialog Pemikiran Islam Dalam Muhammadiyah.* Yogyakarta: BPK PP Muhammadiyah, 1992.

……. *Dinamika Politik Muhammadiyah.* Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2000.

……. *Ideologi Gerakan Muhammadiyah.* Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2001.

Nasri, Imron. *Kader Persyarikatan Dalam Persoalan.* Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2002.

Nakamura, Mitsuo. *The Reformist Ideology Of Muhammadiyah,* alih bahasa, Muhajir M. Darwin, Surakarta : Hapsara, 1983.

..... *Muhammadiyah Menjemput Perubahan,* Jakarta : Kompas & STIE KH Ahmad Dahlan, 2005.

..... *Agama Dan Lingkungan Kultural Indonesia: Pengaruh Gerakan Muhammadiyah Dalam Pemurnian Agama Islam,* alih bahasa, Muhajir Darwin. Surakarta: Hapsara, 1983.

Narwoko, J.Dwi & Sujanto, Bagong. (ED), *Sosiologi, Teks Pengantar dan Terapan.* Jakarta: Prenada Media, 2006.

Nur Hakim, Muhammad. *Gerakan Revivalisme Islam dan Formalisasi Shari'ah Di Indonesia,* (makalah seminar internasional "contemporary Islamic in southeast asia in the contect of social, political, and cultural change"), Malang : UMM Press, 2008.

Noer, Abdurrahim. *Wahabi Menurut Pandangan Para Ilmuan.* Bangil: Pustaka Abdul Muis, tt.

Nasir, Ridlwan. *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer.* Yogyakarta: LKIS, 2006.

Nasri, Imron. *Pluralisme & Liberalisme, Pergolakan Pemikiran Anak Muda Muhammadiyah.* Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2005.

Nata, Abuddin. *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia.* Jakarta: Rajawali Press, 2001.

Nasr, Seyyed Hossein. *The Heart Of Islam,* edisi Ind., *Pesan-pesan Universal Islam Untuk Kemanusiaan,* terj. Nur Asiah Faqih Sutan Harahap. Bandung: Mizan, 2003.

Nasution, Harun. *Islam Rasional.* Bandung: Mizan, 1996.

Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan.* Jakarta: Bulan Bintang, 1982.

Nashr, Seyyed Hossen. *Warisan Sufi,* Kuala Lumpur: William C Chittick, Leonard Lewisohn, 2003.

Nogroho, Heru. *Metode Penelitian Sosial,* makalah seminar penyempurnaan Kurikulum Sosiologi Fisipol-UGM. Yogyakarta: UGM Press, 1995.

PP Muhammadiyah. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.* Yogyakarta: PP Muhammadiyah & Suara Muhammadiyah, 2005.

…… *Berita Resmi Muhammadiyah (BRM NO. 04/2007),* Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2007.

..... *Himpunan Putusan Majlis Tarjih Muhammadiyah.* Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 1974.

Peacock, James. *Purifying The Faith The Muhammadiyah Movement In Indonesia Islam,* alih bahasa. Jakarta: Cipta Creatip, Jakarta, 1986.

Phil, Kamaruddin Amin. *Quo Vadis Islamic Studies In Indonesia ? (Current Trends and Future Challenges),* Direktorat Pendidikan Tinggi Islam DEPAG RI., & Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2006.

Pramono, U. Tanthowi. *Begawan Muhammadiyah, Bunga Rampai Pengukuhan Guru Besar Tokoh Muhammadiyah.* Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005.

Pranowo, M. Bambang. *Runtuhnya Dikotomi Santri-Abangan: Refleksi Sosiologis atas Perkembangan Islam di Jawa Pasca-1965,* Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Sosiologi Agama pada Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Press, 2001.

Price, Daniel E. *Islamic Political Culture, Democracy and Human Rights: A Comparative Study,* Westport, Preager Publisher, 1999.

Pawito. *Penelitian Komunikasi Kualitatif.* Yogyakarta: LKIS, 2007.

Parsons, Talcott. *Introduction, dalam Weber, Sociologi Of Relegion.* Boston: Beacon Press, 1972.

PWM Jatim, *Menembus Benteng Tradisi, Sejarah Muhammadiyah Jawa Timur.* Surabaya: Hikmah Press, 2005.

Qodir, Zuly. *Pembaharuan Pemikiran Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

..... *Islam Liberal: Paradigma Baru Wacana dan Aksi Islam Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Qomar, Mujammil. *NU Liberal: Dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam.* Bandung: Mizan, 2002.

Qardhawi, Muhammad Yusuf. *Nahwa Wahdah Fikriyyah Li al-'Āmilīn al-Islām,* terj. Ali Aktum Assalami. Jakarta: Gema Insani Press, 1993.

Rahman, Budi Munawar. *Islam Pluralis.* Jakarta: Sri gunting, 2004.

Rahman, Fazlur. *Aproaches to Islam In Religious Studies: Review Essay, dalam Richar C Martin, Aproaches to Islam In Religious Studies,* USA: The University of Arizona Press, 1985.

……. *Islam and Modernity: Transformation of an Intelectual Tradition,* Chicago: The University Of Chicago Press, 1982, (edisi Indonesia, terjemahan. Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1985).

……. *Membuka Pintu Ijtihad,* alih bahasa, Anas Mahyudin. Bandung: Pustaka Bandung, 1984.

……. *Aproaches to Islam in Religious Studies: Review Essay, dalam Richar C. Martin, Aproaches to Islam in Religious Studies,* The University of Arizona, USA : University of Arizona Press, 1985.

Ronald L Nettler, Mohammed. *Talbi' Ideas of Islam and Politics: a Conception of Islam for The Modern Word,* dalam *John Cooper: Islam and*

Modernity, London & New York: IBT Publishers, 2000.

al-Shahrashtani, Muhammad Abdul karim Ibn Abi Bakar Ahmad. *al-Milal Wa al-Nikhal.* Beirut: Dar al-Fikr, tt.

al-Shahrashtani, Muhammad Abdul karim Ibn Abi Bakar Ahmad. *Nihayah al-Aqdam Fii Ilm al-Kalam,* tt.

Sami, Ali, al-Nasyr. *Aqaid al-Salaf.* Mesir: Dar al-Salam, al-Iskandari, 2007.

Said, Abd. Fatah. *Rasail Ibn 'Arabiy (edisi 3),* Saudi Arabia & Libnan: Intisyar al-'Araby, 2002.

Sholihin, Muhammad. *Ajaran Makrifat Syekh Siti Jenar,* Buku Kita, Jakarta, 51-66.Rabbani, Wahid Bkhsh, 2004, Sufisme Islam, terj. Burhan Wirasubrata. Jakarta: Sahara, 2007.

……. *Manunggaling Kawulo Gusti.* Jakarta: Narasi, 2008.

Sri Mulyati. *Tasawuf Nusantara, Rangkaian Mutiara Sufi Terkemuka.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Shiddiqi, Nouruzzaman. *Jeram-jeram Peradaban Muslim.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Saleh, Fauzan. *Teologi Pembaharuan: Pergeseran Wacana Islam Sunni di Indonesia Abad XX,* Jakarta: Serambi, 2004.

Subangun, Emmanuel. *Dari Samin ke Postmodernisme.* Yogyakarta: Cri Alocita, 1994.

Syam, Nur. *Madzhab-madzhab Antropologi.* Yogyakarta: LKIS, 2007.

..... *Beban Berat Muhammadiyah : Antara Tuntutan Modernisasi-Kultural dan Purifikasi Agama,* (makalah yang disampaikan dalam seminar Pra Muktamar Muhammadiyah ke 45 yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 10 Oktober 2004), UM Surabaya, 2004.

Subhan, Mas. *Muhammadiyah Pintu Gerbang Protestanisme Islam.* Mjkrt: Al-Hikmah, 2005.

Suwarno. *Muhammadiyah Sebagai Oposisi, Studi Tentang Perubahan Perilaku Politik Muhammadiyah 1995-1998.* Yogyakarta: UII Press, 2002.

Sukrianto, AR., Abdul Munir Mulkhan SU. *Perkembangan Pemikiran Muhammadiyah dari Masa ke Masa.* Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985.

Shihab, Alwi. *Islam Inklusif.* Bandung: Mizan, 1999.

Sutrisno, Kuntoyo. *Pahlawan Nasional Kiyahi Mas Mansur, Proyek Biografi Pahlawan Nasional.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977.

Shonhaji Sholeh. *Arus Baru NU, Perubahan Pemikiran Kaum Muda dari Tradisionalisme ke*

Post-tradisionalisme. Surabaya: JP Books, 2004.

Syamsuddin, Din. *Pemikiran Muhammadiyah: Respon Terhadap Liberalisme Islam.* Surakarta: UMS Press, 2005.

Sholeh, A.Khudhori. *Pemikiran Islam Kontemporer.* Yogyakarta: Jendela, 2003.

Sutarjo, Adisusilo, JR. *Sejarah Pemikiran Barat, Dari Yang Klasik Sampai Yang Modern.* Yogyakarta: USD, 2005.

Stroumsa, Sarah. *Para Pemikir Bebas Islam.* Yogyakarta: LKIS, 2006.

Shihab, Alwi. *Islam Inklusif.* Bandung: Mizan, 1999.

…….. *Membendung Arus.* Bandung: Mizan, 1998.

Sururin. *Nilai-nilai Pluralisme dalam Islam.* Bandung: Nuansa, 2005.

Shihab, Alwi. *Membendung Arus.* Bandung: Mizan, 1998.

Sunanto, Musyrifah. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo, 2005.

Sufyan Raji, Abdullah. *Mengenal Aliran-aliran dalam Islam dan Ciri-ciri Ajarannya,* Jakarta : Pustaka Arriyadh, 2006.

Syekh, Abduh, Muhammad, Risalah Tauhid, (Firdaus AN. Penrj.). Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

Shihab, Alwi. *Islam Inklusif.* Bandung: Mizan, 1999.

Suprayogo, Imam. , Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial – Agama.* Bandung: Rosda Karya, 2003

Suryo, Joko. *Agama Dan Perubahan Sosial, Studi Hubungan antara Islam, Masyarakat dan Struktur Sosial-politik Indonesia,* Pusat Antar Universitas-Studi Sosial UGM. Yogyakarta: UGM Press, 1993.

Suyanto, Bagong. *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternative Pendekatan.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Tamimy, Djindar. *Pokok-pokok Pengertian Tentang Agama Islam.* Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 1981.

……. *Faham Tentang Ad-Dien Al-Islamy.* Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 1984.

Tibi, Bassam. *Krisis Peradaban Islam Modern,* Terj. Yudian W. Asmin, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.

Tariq Ali. *The Clash Of Fundamentalism, Crusades, Jihads and Modernity,* terj., Hodri Ariev. Jakarta: Paramadina, 2004.

Tim Pps IAIN. *Hermeneutika dan Fenomenologi dari Teori ke Praktik,* Pascasarjana IAIN Sunan

Ampel. Surabaya: Pps IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007.

Turner, Bryan S. *Sosiologi Islam, Suatu Telaah Analitis Atas Tesa Sosiologi Weber,* terjemahan, Jakarta : Rajawali, 1984.

Turner, Jonathan H. *The Structure Of Sosiological Theory.* Chicago, USA: The Dorse-Press, 1982, 3-18.

al-Utsaimin, Muhammad Shaleh. *al-Qoul al-Mufid 'Ala Kitabi al-Tauhid.* Riyadl: Daru Ibnu al-Jauzy, 1999.

Ulwan, Nasih, Abdullah. *Af'al al-Insaṇ Bain al-Jabr wa al-Ikhtiar.* Beirut: Dār al-Salam, 2005.

Usman, Sunyoto. *Laporan Penelitian Interaksi Antar Elite Lokal dalam Implementasi Pembangunan Pedesaan.* Yogyakarta: LP UGM, 1988.

Al-Wasilan, A. Chaedar. *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Pustaka Jaya, 2002.

Watt, William Montgomery. *Islamic Fundamentalism and Modernity* London: Routledge, 1988.

…… *The Majesty That Was Islam.* London: Sidgwick and Jackson, 1974.

Wrong, Dennis. *Max Weber-Makers of Modern Social Science (series),,* edisi Indonesia: Max

Weber Sebuah Khazanah, alih bahasa, A. Asnawi. Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2003.

Y. Thohari, Hajriyanto. *Muhammadiyah dan Pergulatan Politik Islam Modernis.* Jakarta: PSAP, 2005.

…….. *Dialog Pemikiran Islam dalam Muhammadiyah* Yogyakarta: BPK PP Muhammadiyah, 1992.

Youssef M., Choueiri. *Islamic Fundamentalism, Continuum.* London-New York: 2002.

Yahya, ibn, al-Husayn. *Al-Rasail al-'Adlu wa al-Tawhid.* Beirut: Dar al-Hilal, tt.

---o0o---

Lampiran: 1

"Zhawahir al-Afkar al-Muhammadiyyah Abra Qarn min al-Zaman"

Bismillahirrahmanirrahim

Bahwa keberhasilan perjuangan Muhammadiyah yang berjalan hampir satu abad pada hakikatnya merupakan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disyukuri oleh seluruh warga Persyarikatan. Dengan modal keikhlasan dan kerja keras segenap anggota disertai dukungan masyarakat luas Muhammadiyah tidak kenal lelah melaksanakan misi da'wah dan tajdid dalam memajukan kehidupan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan. Gerakan kemajuan tersebut ditunjukkan dalam melakukan pembaruan pemahaman Islam, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, serta berperan dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa di negeri ini.Namun disadari pula masih terdapat sejumlah masalah atau tantangan yang harus dihadapi dan memerlukan langkah-langkah strategis dalam usianya yang cukup tua itu. Perjuangan Muhammadiyah yang diwarnai dinamika pasang-surut itu tidak lain untuk mencapai tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya serta dalam rangka menyebarkan misi kerisalahan Islam sebagai rahmatan lil-'alamin di bumi Allah yang terhampar luas ini.

Karena itu dengan senantiasa mengharapkan ridha dan pertolongan Allah SWT Muhammadiyah dalam usia dan kiprahnya jelang satu abad ini menyampaikan pernyataan pikiran (zhawãhir al-afkãr/statement of mind) sebagai berikut:

A. Komitmen Gerakan**.**

1. Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang mengemban misi da'wah dan tajdid, berasas Islam, bersumber pada al-Quran dan as-Sunnah, dan bertujuan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah sesuai jatidirinya senantiasa istiqamah untuk menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memajukan kehidupan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan sebagai wujud ikhtiar menyebarluaskan Islam yang bercorak rahmatan lil-'alamin. Misi kerisalahan dan kerahmatan yang diemban Muhammadiyah tersebut secara nyata diwujudkan melalui berbagai kiprahnya dalam pengembangan amal usaha, program, dan kegiatan yang sebesar-besarnya membawa pada kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.
2. Muhammadiyah dalam usianya jelang satu abad telah banyak mendirikan taman kana-kanak, sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, balai pengobatan, rumah yatim piatu, usaha ekonomi, penerbitan, dan amal usaha lainnya. Muhammadiyah juga membangun masjid, mushalla, melakukan langkah-langkah da'wah dalam berbagai bentuk kegiatan pembinaan umat yang meluas di seluruh pelosok Tanah Air. Muhammadiyah bahkan tak pernah berhenti melakukan peran-peran kebangsaan dan peran-peran kemanusiaannya dalam dinamika nasional dan global. Kiprah Muhammadiyah tersebut menunjukkan bukti nyata kepada masyarakat bahwa misi gerakan Islam yang diembannya bersifat amaliah untuk kemajuan dan

pencerahan yang membawa pada kemaslahatan masyarakat yang seluas-luasnya. Peran kesejarahan yang dilakukan Muhammadiyah tersebut berlangsung dalam dinamika yang beragam. Pada masa penjajahan sejak berdirinya tahun 1330 H/1912 M., Muhammadiyah mengalami cengkeraman politik kolonial sebagaimana halnya dialami oleh seluruh masyarakat Indonesia saat itu, tetapi Muhammadiyah tetap berbuat tak kenal lelah untuk kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Setelah Indonesia merdeka pada masa awal dan era Orde Lama Muhammadiyah mengalami berbagai situasi sulit akibat konflik politik nasional yang kompleks, namun Muhammadiyah tetap berkiprah dalam da'wah dan kegiatan kemasyarakatan. Pada era Orde Baru di bawah rezim kekuasaan yang melakukan depolitisasi (pengebirian politik), deideologisasi (pengebirian ideologi), dan kebijakan politik yang otoriter, Muhammadiyah juga terus berjuang mengembangkan amal usaha dan aktivitas da'wah Islam. Sedangkan pada masa reformasi, Muhammadiyah memanfaatkan peluang kondisi nasional yang terbuka itu dengan melakukan revitalisasi dan peningkatan kualitas amal usaha serta aktivitas da'wahnya. Melalui kiprahnya dalam sejarah yang panjang itu Muhammadiyah telah diterima oleh masyarakat luas baik di tingkat lokal, nasional, dan internasional sebagai salah satu pilar kekuatan Islam yang memberi sumbangan berharga bagi kemajuan peradaban umat manusia.

3. Kiprah dan langkah Muhammadiyah yang penuh dinamika itu masih dirasakan belum mencapai

puncak keberhasilan dalam mencapai tujuan dan cita-citanya, sehingga Muhammadiyah semakin dituntut untuk meneguhkan dan merevitalisasi gerakannya ke seluruh lapangan kehidupan. Karena itu Muhammadiyah akan melaksanakan tajdid (pembaruan) dalam gerakannya sehingga di era kehidupan modern abad ke-21 yang kompleks ini sesuai dengan Keyakinan dan Kepribadiannya dapat tampil sebagai pilar kekuatan gerakan pencerahan peradaban di berbagai lingkungan kehidupan.

B. Pandangan Keagamaan**.**

1. Muhammadiyah dalam melakukan kiprahnya di berbagai bidang kehidupan untuk kemajuan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan dilandasi oleh keyakinan dan pemahaman keagamaan bahwa Islam sebagai ajaran yang membawa misi kebenaran Ilahiah harus didakwahkan sehingga menjadi rahmatan lil-'alamin di muka bumi ini. Bahwa Islam sebagai Wahyu Allah yang dibawa para Rasul hingga Rasul akhir zaman Muhammad SAW., adalah ajaran yang mengandung hidayah, penyerahan diri, rahmat, kemaslahatan, keselamatan, dan kebahagiaan hidup umat manusia di dunia dan akhirat. Keyakinan dan paham Islam yang fundamental itu diaktualisasikan oleh Muhammadiyah dalam bentuk gerakan Islam yang menjalankan misi dakwah dan tajdid untuk kemaslahatan hidup seluruh umat manusia.
2. Misi da'wah Muhammadiyah yang mendasar itu merupakan perwujudan dari semangat awal Persyarikatan ini sejak didirikannya yang dijiwai

oleh pesan Allah dalam al-Quran Surat Ali-Imran 104, yang artinya: ”Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung”. Kewajiban dan panggilan da’wah yang luhur itu menjadi komitmen utama Muhammadiyah sebagai ikhtiar untuk menjadi kekuatan Khaira Ummah sekaligus dalam membangun masyarakat Islam yang ideal seperti itu sebagaimana pesan Allah dalam al-Quran Surat Ali-Imran ayat 110, yang artinya: ”Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”. Dengan merujuk pada Firman Allah dalam al-Quran Surat Ali Imran 104 dan 110, Muhammadiyah menyebarluaskan ajaran Islam yang komprehensif dan multiaspek itu melalui da’wah untuk mengajak pada kebaikan (Islam), al-amr bi al-ma’ruf wa al-nahy ‘an al-munkar (mengajak kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar), sehingga umat manusia memperoleh keberuntungan lahir dan batin dalam kehidupan ini. Da’wah yang demikian mengandung makna bahwa Islam sebagai ajaran selalu bersifat tranformasional; yakni dakwah yang membawa perubahan yang bersifat kemajuan, kebaikan, kebenaran, keadilan, dan nilai-nilai keutamaan lainnya untuk

kemaslahatan serta keselamatan hidup umat manusia tanpa membeda-bedakan ras, suku, golongan, agama, dan lain-lain.

3. Kyai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah dikenal sebagai pelopor gerakan tajdid (pembaruan). Tajdid yang dilakukan pendiri Muhammadiyah itu bersifat pemurnian (purifikasi) dan perubahan ke arah kemajuan (dinamisasi), yang semuanya berpijak pada pemahaman tentang Islam yang kokoh dan luas. Dengan pandangan Islam yang demikian Kyai Dahlan tidak hanya berhasil melakukan pembinaan yang kokoh dalam akidah, ibadah, dan akhlak kaum muslimin, tetapi sekaligus melakukan pembaruan dalam amaliah mu'amalat dunyawiyah sehingga Islam menjadi agama yang menyebarkan kemajuan. Semangat tajdid Muhammadiyah tersebut didorong antara lain oleh Sabda Nabi Muhammad SAW., yang artinya: "Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat manusia pada setiap kurun seratus tahun orang yang memperbarui ajaran agamanya" (Hadith diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah). Karena itu melalui Muhammadiyah telah diletakkan suatu pandangan keagamaan yang tetap kokoh dalam bangunan keimanan yang berlandaskan pada al-Quran dan As-Sunnah sekaligus mengemban tajdid yang mampu membebaskan manusia dari keterbelakangan menuju kehidupan yang berkemajuan dan berkeadaban.
4. Dalam pandangan Muhammadiyah, bahwa masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang menjadi tujuan gerakan merupakan wujud

aktualisasi ajaran Islam dalam struktur kehidupan kolektif manusia yang memiliki corak masyarakat tengahan (ummatan wasatha) yang berkemajuan baik dalam wujud sistem nilai sosial-budaya, sistem sosial, dan lingkungan fisik yang dibangunnya. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang memiliki keseimbangan antara kehidupan lahiriah dan batiniah, rasionalitas dan spiritualitas, aqidah dan muamalat, individual dan sosial, duniawi dan ukhrawi, sekaligus menampilkan corak masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, kesejahteraan, kerjasama, kerjakeras, kedisiplinan, dan keunggulan dalam segala lapangan kehidupan. Dalam menghadapi dinamika kehidupan, masyarakat Islam semacam itu selalu bersedia bekerjasama dan berlomba-lomba dalam serba kebaikan di tengah persaingan pasar-bebas di segala lapangan kehidupan dalam semangat ”berjuang menghadapi tantangan” (al-jihad li al-muwajjahat) lebih dari sekadar ”berjuang melawan musuh” (al-jihad li al-mu’aradhah). Masyarakat Islam yang dicita-citakan Muhammadiyah memiliki kesamaan karakter dengan masyarakat madani, yaitu masyarakat kewargaan (civil-society) yang memiliki keyakinan yang dijiwai nilai-nilai Ilahiah, demokratis, berkeadilan, otonom, berkemajuan, dan berakhlak-mulia (al-akhlaq al-karimah). Masyarakat Islam yang semacam itu berperan sebagai syuhada ‘ala al-nas di tengah berbagai pergumulan hidup masyarakat dunia. Karena itu, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang bercorak ”madaniyah” tersebut senantiasa menjadi masyarakat yang serba

unggul atau utama (khaira ummah) dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Keunggulan kualitas tersebut ditunjukkan oleh kemampuan penguasaan atas nilai-nilai dasar dan kemajuan dalam kebudayaan dan peradaban umat manusia, yaitu nilai-nilai ruhani (spiritualitas), nilai-nilai pengetahuan (ilmu pengetahuan dan teknologi), nilai-nilai materi (ekonomi), nilai-nilai kekuasaan (politik), nilai-nilai keindahan (kesenian), nilai-nilai normatif berperilaku (hukum), dan nilai-nilai kemasyarakatan (budaya) yang lebih berkualitas. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya bahkan senantiasa memiliki kepedulian tinggi terhadap kelangsungan ekologis (lingkungan hidup) dan kualitas martabat hidup manusia baik laki-laki maupun perempuan dalam relasi-relasi yang menjunjungtinggi kemaslahatan, keadilan, dan serba kebajikan hidup. Masyarakat Islam yang demikian juga senantiasa menjauhkan diri dari perilaku yang membawa pada kerusakan (fasad fi al-ardh), kedhaliman, dan hal-hal lain yang bersifat menghancurkan kehidupan.

C. Pandangan tentang Kehidupan

1. Muhammadiyah memandang bahwa era kehidupan umat manusia saat ini berada dalam suasana penuh paradoks. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat luar biasa dibarengi dengan berbagai dampak buruk seperti lingkungan hidup yang tercemar (polusi) dan mengalami eksploitasi besar-besaran yang tak terkendali, berkembangnya nalar-instrumental yang

memperlemah naluri-naluri alami manusia, lebih jauh lagi melahirkan sekularisasi kehidupan yang menyebabkan manusia kehilangan keseimbangan-keseimbangan hidup yang bersifat religius. Kemajuan kehidupan modern yang melahirkan antitesis post-modern juga diwarnai oleh kecenderungan yang bersifat serba-bebas (supra-liberal), serba-boleh (anarkhis), dan serba-menapikan nilai (nihilisme), sehingga memberi peluang semakin terbuka bagi kemungkinan anti-agama (agnotisme) dan anti-Tuhan (atheisme) secara sistematis. Demokrasi, kesadaran akan hak asasi manusia, dan emansipasi perempuan juga telah melahirkan corak kehidupan yang lebih egaliter dan berkeadilan secara meluas, tetapi juga membawa implikasi pada kebebasan yang melampau batas dan egoisme yang serba liberal, yang jika tanpa bingkai moral dan spiritual yang kokoh dapat merusak hubungan-hubungan manusia yang harmoni.

2. Dalam memasuki babak baru globalisasi, selain melahirkan pola hubungan positif antarbangsa dan antarnegara yang serba melintasi, pada saat yang sama melahirkan hal-hal negatif dalam kehidupan umat manusia sedunia. Di era global ini masyarakat memiliki kecenderungan penghambaan terhadap egoisme (ta'bid al-nafs), penghambaan terhadap materi (ta'bid al-mawãd), penghambaan terhadap nafsu seksual (ta'bid al-syahawãt), dan penghambaan terhadap kekuasaan (ta'bid al-siyasiyyah) yang menggeser nilai-nilai fitri (otentik) manusia dalam bertauhid (keimanan terhadap Allah SWT) dan hidup dalam kebaikan di dunia dan

akhirat. Globalisasi juga telah mendorong ekstrimisme baru berupa lahirnya fanatisma primordial agama, etnik, dan kedaerahan yang bersifat lokal sehingga membangun sekat-sekat baru dalam kehidupan. Perkembangan global pasca perang-dingin (keruntuhan Komunisme) juga ditandai dengan pesatnya pengaruh Neo-liberalisme yang semakin mengokohkan dominasi Kapitalisme yang lebih memihak kekuatan-kekuatan berjuasi sekaligus kian meminggirkan kelompok-kelompok masyarakat yang lemah (dhu'afã) dan tertindas (mustadh'afin), sehingga melahirkan ketidak-adilan global yang baru. Namun globalisasi dan alam kehidupan modern yang serba maju saat ini juga dapat dimanfaatkan oleh gerakan-gerakan Islam seperti Muhammadiyah untuk memperluas solidaritas umat manusia sejagad baik sesama umat Islam (ukhuwah islamiyyah) maupun dengan kelompok lain ('alãqah insãniyyah), yang lebih manusiawi dan berkeadaban tinggi.

3. Karena itu Muhammadiyah mengajak seluruh kekuatan masyarakat, bangsa, dan dunia untuk semakin berperan aktif dalam melakukan ikhtiar-ikhtiar pencerahan di berbagai lapangan dan lini kehidupan sehingga kebudayaan umat manusia di alaf baru ini menuju pada peradaban yang berkemajuan sekaligus bermoral tinggi.

D. Tanggungjawab Kebangsaan dan Kemanusiaan

1. Muhammadiyah memandang bahwa bangsa Indonesia saat ini tengah berada dalam suasana transisi yang penuh pertaruhan. Bahwa keberhasilan

atau kegagalan dalam menyelesaikan krisis multiwajah akan menentukan nasib perjalanan bangsa ke depan. Masalah korupsi, kerusakan moral dan spiritual, pragmatisme perilaku politik, kemiskinan, pengangguran, konflik sosial, separatisme, kerusakan lingkungan, dan masalah-masalah nasional lainnya jika tidak mampu diselesaikan secara sungguh-sungguh, sistematik, dan fundamental akan semakin memperparah krisis nasional. Wabah masalah tersebut menjadi beban nasional yang semakin berat dengan timbulnya berbagai musibah dan bencana nasional seperti terjadi di Aceh, Nias, dan daerah-daerah lain yang memperlemah dayatahan bangsa. Krisis dan masalah tersebut bahkan akan semakin membebani tubuh bangsa ini jika dipertautkan dengan kondisi sumberdaya manusia, ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur nasional maupun lokal yang jauh tertinggal dari kemajuan yang dicapai bangsa lain.

2. Bangsa Indonesia juga tengah berada dalam pertaruhan ketika berhadapan dengan perkembangan dunia yang berada dalam cengkeraman globalisasi, politik global, dan berbagai tarik-menarik kepentingan internasional yang diwarnai hegemoni dan ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan. Indonesia bahkan menjadi lahan paling subur dan tempat pembuangan limbah sangat mudah dari globalisasi dan pasar bebas yang berwatak neo-liberal. Jika tidak memiliki daya adaptasi, filter, dan integritas kepribadian yang kookoh maka bangsa ini juga akan terombang-ambing dalam hegemoni dan liberalisasi

politik global yang penuh konflik dan kepentingan. Pada saat yang sama bangsa ini juga tengah berhadapan dengan relasi-relasi baru yang dibawa oleh multikulturalisme yang memerlukan orientasi kebudayaan dan tatanan sosial baru yang kokoh.

3. Dalam menghadapi masalah dan tantangan internal maupun eksternal itu bangsa Indonesia memerlukan mobilisasi seluruh potensi dan kemampuan baik berupa sumberdaya manusia, sumberdaya alam, modal sosial-kultural, dan berbagai dayadukung nasional yang kuat dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Dalam kondisi yang sangat penuh pertaruhan dan sarat tantangan tersebut maka sangat diperlukan kepemimpinan yang handal dan visioner baik yang didukung kemampuan masyarakat yang mandiri baik di ingkat nasional maupun lokal agar berbagai masalah, tantangn, dan potensi bangsa ini mampu dihadapi serta dikelola dengan sebaik-baiknya.
4. Bangsa Indonesia yang mayoritas muslim juga tidak lepas dari perkembangan yang dihadapi saudara-saudaranya di dunia Islam. Mayoritas dunia Islam selain dililit oleh masalah-masalah nasional masing-masing, pada saat yang sama berada dalam dominasi dan hegemoni politik Barat yang banyak merugikan kepentingan-kepentingan dunia Islam. Sementara antar dunia Islam sendiri selain tidak terdapat persatuan yang kokoh, juga masih diwarnai oleh persaingan dan konflik yang sulit dipertemukan, sehingga semakin memperlemah posisi umat Islam dalam percaturan internasional. Kendati begitu, masih terdapat secercah harapan

ketika Islam mulai berkembang di neger-negeri Barat dan terjadi perkembangan alam pikiran baru yang membawa misi perdamaian, kemajuan, dan menjadikan Islam sebagai rahmat bagi alam semesta.

E. Agenda dan Langkah Ke Depan

1. Dalam menghadapi masalah bangsa, umat Islam, dan umat manusia sedunia yang bersifat kompleks dan krusial sebagaimana digambarkan itu Muhammadiyah sebagai salah satu kekuatan nasional akan terus memainkan peranan sosial-keagamaannya sebagaimana selama ini dilakukan dalam perjalanan sejarahnya. Usia jelang satu abad telah menempa kematangan Muhammadiyah untuk tidak kenal lelah dalam berkiprah menjalankan misi da'wah dan tajdid untuk kemajuan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan. Jika selama ini Muhammadiyah telah menorehkan kepeloporan dalam pemurnian dan pembaruan pemikrian Islam, pengembangan pendidikan Islam, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan, serta dalam pembinaan kecerdasan dan kemajuan masyarakat; maka pada usianya jelang satu abad ini Muhammadiyah selain melakukan revitalisasi gerakannya juga berikhtiar untuk menjalankan peran-peran baru yang dipandang lebih baik dan lebih bermasalahat bagi kemajuan peradaban.
2. Peran-peran baru sebagai wujud aktualisasi gerakan da'wah dan tajdid yang dapat dikembangkan Muhammadiyah antara lain dalam menjalankan peran politik kebangsaan guna mewujudkan

reformasi nasional dan mengawal perjalanan bangsa tanpa terjebak pada politik-praktik (politik kepartaian) yang bersifat jangka pendek dan sarat konflik kepentingan. Dengan bingkai Khittah Ujung Pandang tahun 1971 dan Khittah Denpasar tahun 2002, Muhammadiyah secara proaktif menjalankan peran dalam pemberanrasan korupsi, penegakan supremasi hukum, memasyarakatkan etika berpolitik, pengembangan sumberdaya manusia, penyelamatan lingkungan hidup dan sumberdaya alam, memperkokoh integrasi nasional, membangun karakter dan moral bangsa, serta peran-peran kebangsaan lainnya yang bersifat pencerahan. Muhammadiyah juga akan terus menjalankan peran dan langkah-langkah sistematik dalam mengembangkan kehidupan masyarakat madani (civil society) melalui aksi-aksi da'wah kultural yang mengrah pada pembentukan masyarakat Indonesia yang demokratis, otonom, berkeadilan, dan berakhlak mulia.

3. Dalam pergaulan internasional dan dunia Islam, Muhammadiyah juga terpanggil untuk menjalankan peran global dalam membangun tatanan dunia yang lebih damai, adil, maju, dan berkeadaban. Muhammadiyah menyadari pengaruh kuat globalisasi dan ekspansi neo-liberal yang sangat mencengkeram perkembangan masyarakat dunia saat ini. Dalam perkembangan dunia yang sarat permasalahan dan tantangan yang kompleks di abad ke-21 itu Muhammadiyah dituntut untuk terus aktif memainkan peran kerisalahannya agar umat manusia sedunia tidak terseret pada kehancuran oleh

keganasan globalisasi dan neo-liberal, pada saat yang sama dapat diarahkan menuju pada keselamatan hidup yang lebih hakiki serta memiliki peradaban yang lebih maju dan berperadaban mulia.

4. Khusus bagi umat Islam baik di tingkat lokal, naional, maupun global Muhammadiyah dituntut untuk terus maminkan peran da'wah dan tajdid secara lebih baik sehingga kaum muslimin menjadi kekuatan penting dan menentukan dalam perkembangan kebudayaan dan peradaban di era modern yang penuh tantangan ini. Era kebangkitan Islam harus terus digerakkan ke arah kemajuan secara signifikan dalam berbagai bidang kehidupan umat Islam. Umat Islam harus tumbuh menjadi khaira ummah yang memiliki martabat tinggi di hadapan komunitas masyarakat lain di tingkat lokal, nasional, dan global. Di tengah dinamika umat Islam yang semacam itu Muhammadiyah harus tetap istiqamah dan terus melakukan pembaruan dalam menjalankan dan mewujudkan misi Islam sebagai rahmatan lil-'alamin di bumi Allah yang tercinta ini. Nashr min Allah wa fath qarib.[1]

[1] *Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 45 di Malang*, jawa timur, 2005.

Lampiran: 2

AD & ART MUHAMMADIYAH

BAB I

NAMA, PENDIRI, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Persyarikatan ini bernama Muhammadiyah.

Pasal 2

Pendiri

Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan tanggal 18 November 1912 Miladiyah di Yogyakarta untuk jangka waktu tidak terbatas.

Pasal 3

Tempat Kedudukan

Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta.

BAB II

IDENTITAS, ASAS, DAN LAMBANG

Pasal 4

Identitas dan Asas

(1) Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber pada Al-Qur`an dan As-Sunnah.

(2) Muhammadiyah berasas Islam.

Pasal 5

Lambang

Lambang Muhammadiyah adalah matahari bersinar utama dua belas, di tengah bertuliskan (Muhammadiyah) dan

dilingkari kalimat (Asyhadu an lã ilãha illa Allãh wa asyhadu anna Muhammadan Rasul Allãh)

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA USAHA

Pasal 6

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Pasal 7

Usaha

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan.

(2) Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan, yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

(3) Penentu kebijakan dan penanggung jawab amal usaha, program, dan kegiatan adalah Pimpinan Muhammadiyah.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 8

Anggota serta Hak dan Kewajiban

(1) Anggota Muhammadiyah terdiri atas:

a. Anggota Biasa ialah warga negara Indonesia beragama Islam.

b. Anggota Luar Biasa ialah orang Islam bukan warga

negara Indonesia.
c. Anggota Kehormatan ialah perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya bersedia membantu Muhammadiyah.
(2) Hak dan kewajiban serta peraturan lain tentang keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

SUSUNAN DAN PENETAPAN ORGANISASI

Pasal 9

Susunan Organisasi

Susunan organisasi Muhammadiyah terdiri atas:
1. Ranting ialah kesatuan anggota dalam satu tempat atau kawasan
2. Cabang ialah kesatuan Ranting dalam satu tempat
3. Daerah ialah kesatuan Cabang dalam satu Kota atau Kabupaten
4. Wilayah ialah kesatuan Daerah dalam satu Propinsi
5. Pusat ialah kesatuan Wilayah dalam Negara

Pasal 10

Penetapan Organisasi

(1) Penetapan Wilayah dan Daerah dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
(2) Penetapan Cabang dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah.
(3) Penetapan Ranting dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.
(4) Dalam hal-hal luar biasa Pimpinan Pusat dapat mengambil ketetapan lain.

BAB VI

PIMPINAN

Pasal 11

Pimpinan Pusat

(1) Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan.
(2) Pimpinan Pusat terdiri atas sekurang-kurangnya tiga belas orang, dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang diusulkan oleh Tanwir.
(3) Ketua Umum Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Muktamar dari dan atas usul anggota Pimpinan Pusat terpilih.
(4) Anggota Pimpinan Pusat terpilih menetapkan Sekretaris Umum dan diumumkan dalam forum Muktamar.
(5) Pimpinan Pusat dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Tanwir.
(6) Pimpinan Pusat diwakili oleh Ketua Umum atau salah seorang Ketua bersama-sama Sekretaris Umum atau salah seorang Sekretaris, mewakili Muhammadiyah untuk tindakan di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 12

Pimpinan Wilayah

(1) Pimpinan Wilayah memimpin Muhammadiyah dalam wilayahnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat.
(2) Pimpinan Wilayah terdiri atas sekurang-kurangnya sebelas orang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam MusyawarahWilayah.
(3) Ketua Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan

Pusat dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Wilayah terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Wilayah.

(4) Pimpinan Wilayah dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Wilayah yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Pusat.

Pasal 13

Pimpinan Daerah

(1) Pimpinan Daerah memimpin Muhammadiyah dalam daerahnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan diatasnya.

(2) Pimpinan Daerah terdiri atas sekurang-kurangnya sembilan orang ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah untuk satu masa jabatan dari calon-calon anggota Pimpinan Daerah yang telah dipilih dalam Musyawarah Daerah.

(3) Ketua Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Daerah terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Daerah.

(4) Pimpinan Daerah dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Daerah yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Wilayah.

Pasal 14

Pimpinan Cabang

(1) Pimpinan Cabang memimpin Muhammadiyah dalam Cabangnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan diatasnya.

(2) Pimpinan Cabang terdiri atas sekurang-kurangnya tujuh orang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah untuk satu masa

jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Cabang.

(3) Ketua Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Cabang terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Cabang.

(4) Pimpinan Cabang dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Cabang yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Daerah.

Pasal 15

Pimpinan Ranting

(1) Pimpinan Ranting memimpin Muhammadiyah dalam Rantingnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan diatasnya.

(2) Pimpinan Ranting terdiri atas sekurang-kurangnya lima orang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Ranting.

(3) Ketua Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Cabang dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Ranting terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Ranting.

(4) Pimpinan Ranting dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Ranting yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Cabang.

Pasal 16

Pemilihan Pimpinan

(1) Anggota Pimpinan terdiri atas anggota Muhammadiyah.

(2) Pemilihan dapat dilakukan secara langsung atau formatur.

(3) Syarat anggota Pimpinan dan cara pemilihan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17

Masa Jabatan Pimpinan

(1) Masa jabatan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang,danPimpinanRantinglimatahun.

(2) Jabatan Ketua Umum Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah, masing-masing dapat dijabat oleh orang yang sama dua kali masa jabatan berturut-turut.

(3) Serah-terima jabatan Pimpinan Pusat dilakukan pada saat Muktamar telah menetapkan Pimpinan Pusat baru. Sedang serah-terima jabatan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting dilakukan setelah disahkan oleh Pimpinan di atasnya.

Pasal 18

Ketentuan Luar Biasa

Dalam hal-hal luar biasa yang terjadi berkenaan dengan ketentuan pada pasal 12 sampai dengan pasal 17, Pimpinan Pusat dapat mengambil ketetapan lain.

Pasal 19

Penasihat

(1) Pimpinan Muhammadiyah dapat mengangkat penasihat.

(2) Ketentuan tentang penasihat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII

UNSUR PEMBANTU PIMPINAN

Pasal 20

Majelis dan Lembaga

(1) Unsur Pembantu Pimpinan terdiri atas Majelis dan Lembaga.
(2) Majelis adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah.
(3) Lembaga adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang menjalankan tugas pendukung Muhammadiyah.
(4) Ketentuan tentang tugas dan pembentukan Unsur Pembantu Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

ORGANISASI OTONOM

Pasal 21

Pengertian dan Ketentuan

(1) Organisasi Otonom ialah satuan organisasi di bawah Muhammadiyah yang memiliki wewenang mengatur rumah tangganya sendiri, dengan bimbingan dan pembinaan oleh Pimpinan Muhammadiyah.
(2) Organisasi Otonom terdiri atas organisasi otonom umum dan organisasi otonom khusus.
(3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Otonom disusun oleh organisasi otonom masing-masing berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
(4) Pembentukan dan pembubaran Organisasi Otonom ditetapkan oleh Tanwir.
(5) Ketentuan lain mengenai organisasi otonom diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX

PERMUSYAWARATAN

Pasal 22

Muktamar

(1) Muktamar ialah permusyawaratan tertinggi dalam Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.
(2) Anggota Muktamar terdiri atas:
a. Anggota Pimpinan Pusat
b. Ketua Pimpinan Wilayah
c. Anggota Tanwir Wakil Wilayah
d. Ketua Pimpinan Daerah
e. Wakil Daerah yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan Daerah, terdiri atas wakil Cabang berdasarkan perimbangan jumlah Cabang dalam tiap Daerah
f. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat.
(3) Muktamar diadakan satu kali dalam lima tahun.
(4) Acara dan ketentuan lain tentang Muktamar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 23

Muktamar Luar Biasa

(1) Muktamar Luar Biasa ialah muktamar darurat disebabkan oleh keadaan yang membahayakan Muhammadiyah dan atau kekosongan kepemimpinan, sedang Tanwir tidak berwenang memutuskannya.
(2) Muktamar Luar Biasa diadakan oleh Pimpinan Pusat atas keputusan Tanwir..
(3) Ketentuan mengenai Muktamar Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 24

Tanwir

(1) Tanwir ialah permusyawaratan dalam Muhammadiyah di bawah Muktamar, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.
(2) Anggota Tanwir terdiri atas:
a. Anggota Pimpinan Pusat
b. Ketua Pimpinan Wilayah
c. Wakil Wilayah
d. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat
(3) Tanwir diadakan sekurang-kurangnya tiga kali selama masa jabatan Pimpinan.
(4) Acara dan ketentuan lain tentang Tanwir diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 25

Musyawarah Wilayah

(1) Musyawarah Wilayah ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Wilayah, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Wilayah.
(2) Anggota Musyawarah Wilayah terdiri atas:
a. Anggota Pimpinan Wilayah
b. Ketua Pimpinan Daerah
c. Anggota Musyawarah Pimpinan Wilayah Wakil Daerah
d. Ketua Pimpinan Cabang
e. Wakil Cabang yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan Cabang yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah atas dasar perimbangan jumlah Ranting dalam tiap Cabang
f. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah
(3) Musyawarah Wilayah diadakan satu kali dalam lima tahun.
(4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Wilayah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26

Musyawarah Daerah

(1) Musyawarah Daerah ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Daerah, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Daerah.
(2) Anggota Musyawarah Daerah terdiri atas:
a. Anggota Pimpinan Daerah
b. Ketua Pimpinan Cabang
c. Anggota Musyawarah Pimpinan Daerah Wakil Cabang
d. Ketua Pimpinan Ranting
e. Wakil Ranting yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan Ranting yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah atas dasar perimbangan jumlah anggota
f. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah
(3) Musyawarah Daerah diadakan satu kali dalam lima tahun.
(4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 27

Musyawarah Cabang

(1) Musyawarah Cabang ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Cabang, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Cabang.
(2) Anggota Musyawarah Cabang terdiri atas:
a. Anggota Pimpinan Cabang
b. Ketua Pimpinan Ranting
c. Anggota Musyawarah Pimpinan Cabang Wakil Ranting
d. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang
(3) Musyawarah Cabang diadakan satu kali dalam lima tahun.
(4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 28

Musyawarah Ranting

(1) Musyawarah Ranting ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Ranting, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Ranting.
(2) Anggota Musyawarah Ranting terdiri atas:
a. Anggota Muhammadiyah dalam Ranting
b. Wakil Organisasi Otonom tingkat Ranting
(3) Musyawarah Ranting diadakan satu kali dalam lima tahun.
(4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Ranting diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 29

Musyawarah Pimpinan

(1) Musyawarah Pimpinan ialah permusyawaratan Pimpinan dalam Muhammadiyah pada tingkat Wilayah sampai dengan Ranting yang berkedudukan di bawah Musyawarah pada masing-masing tingkat.
(2) Musyawarah Pimpinan diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.
(3) Acara dan ketentuan lain mengenai Musyawarah Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 30

Keabsahan Musyawarah

Musyawarah tersebut dalam pasal 22 sampai dengan pasal 29 kecuali pasal 23 dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua pertiga anggotanya yang telah diundang secara sah oleh Pimpinan Muhammadiyah di tingkat masing-masing.

Pasal 31

Keputusan Musyawarah

Keputusan Musyawarah tersebut dalam pasal 22 sampai dengan pasal 29 kecuali pasal 23 diusahakan dengan cara mufakat. Apabila keputusan secara mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara dengan suara terbanyak mutlak.

BAB X

RAPAT

Pasal 32

Rapat Pimpinan

(1) Rapat Pimpinan ialah rapat dalam Muhammadiyah di tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Muhammadiyah apabila diperlukan.
(2) Rapat Pimpinan membicarakan masalah kebijakan organisasi.
(3) Ketentuan lain mengenai Rapat Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 33

Rapat Kerja

(1) Rapat Kerja ialah rapat yang diadakan untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut amal usaha, program dan kegiatan organisasi.
(2) Rapat Kerja dibedakan dalam dua jenis yaitu Rapat Kerja Pimpinan dan Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan.
(3) Rapat Kerja Pimpinan pada tiap tingkat diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
(4) Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan diadakan dua kali dalam satu masa jabatan.

(5) Ketentuan mengenai masing-masing jenis Rapat Kerja diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 34

Tanfidz

(1) Tanfidz adalah pernyataan berlakunya keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah, dan Rapat yang dilakukan oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.
(2) Keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah, dan Rapat berlaku sejak ditanfidzkan oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.
(3) Tanfidz keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah, dan Rapat semua tingkat
a. Bersifat redaksional
b. Mempertimbangkan kemaslahatan
c. Tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

BAB XI

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 35

Pengertian

Keuangan dan kekayaan Muhammadiyah adalah semua harta benda yang diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan amal usaha, program, dan kegiatan Muhammadiyah.

Pasal 36

Sumber

Keuangan dan kekayaan Muhammadiyah diperoleh dari:
1. Uang Pangkal, Iuran, dan Bantuan
2. Hasil hak milik Muhammadiyah

3. Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, Wasiat, dan Hibah
4. Usaha-usaha perekonomian Muhammadiyah
5. Sumber-sumber lain

Pasal 37

Pengelolaan dan Pengawasan

Ketentuan mengenai pengelolaan dan pengawasan keuangan dan kekayaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII

LAPORAN

Pasal 38

Laporan

(1) Pimpinan Muhammadiyah semua tingkat wajib membuat laporan perkembangan organisasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan serta kekayaan, disampaikan kepada Musyawarah Pimpinan, Musyawarah tingkat masing-masing, Tanwir, dan Muktamar.
(2) Ketentuan lain tentang laporan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 39

Anggaran Rumah Tangga

(1) Anggaran Rumah Tangga menjelaskan dan mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar.
(2) Anggaran Rumah Tangga dibuat oleh Pimpinan Pusat berdasarkan Anggaran Dasar dan disahkan oleh Tanwir.
(3) Dalam keadaan yang sangat memerlukan perubahan, Pimpinan Pusat dapat mengubah Anggaran Rumah Tangga dan berlaku sampai disahkan oleh Tanwir.

BAB XIV

PEMBUBARAN

Pasal 40

Pembubaran

(1) Pembubaran Muhammadiyah hanya dapat dilakukan dalam Muktamar Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk keperluan itu atas usul Tanwir.
(2) Muktamar Luar Biasa yang membicarakan usul Tanwir tentang pembubaran dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah anggota Muktamar Luar Biasa.
(3) Keputusan pembubaran diambil sekurang-kurangnya tiga perempat dari yang hadir.
(4) Muktamar Luar Biasa memutuskan segala hak milik Muhammadiyah diserahkan untuk kepentingan kemaslahatan umat Islam setelah Muhammadiyah dinyatakan bubar.

BAB XV

PERUBAHAN

Pasal 41

Perubahan Anggaran Dasar

(1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Muktamar.
(2) Rencana perubahan Anggaran Dasar diusulkan oleh Tanwir dan harus sudah tercantum dalam acara Muktamar.
(3) Perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah apabila diputuskan oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Muktamar yang hadir

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 42

Penutup

(1) Anggaran Dasar ini ini telah disahkan dan ditetapkan oleh Muktamar ke-45 yang berlangsung pada tanggal 26 Jumadil Awal s.d. 1 Jumadil Akhir 1426 H bertepatan dengan tanggal 3 s.d. 8 Juli 2005 M. di Malang, dan dinyatakan mulai berlaku sejak ditanfidzkan.

(2) Setelah Anggaran Dasar ini ditetapkan, Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

ANGGARAN RUMAH TANGGA MUHAMMADIYAH

Pasal 1

Tempat Kedudukan

(1) Muhammadiyah berkedudukan di tempat didirikannya, yaitu Yogyakarta

(2) Pimpinan Pusat sebagai pimpinan tertinggi memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan dan menyelenggarakan aktivitasnya di dua kantor, Yogyakarta dan Jakarta

Pasal 2

Lambang dan Bendera

(1) Lambang Muhammadiyah sebagai tersebut dalam Anggaran Dasar pasal 5 adalah seperti berikut:

(2) Bendera Muhammadiyah berbentuk persegi panjang berukuran dua berbanding tiga bergambar lambang Muhammadiyah di tengah dan tulisan MUHAMMADIYAH di bawahnya, berwarna dasar hijau dengan tulisan dan gambar berwarna putih, seperti berikut:

(3) Ketentuan lain tentang lambang dan bendera ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 3

U s a h a

Usaha Muhammadiyah yang diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan meliputi:

1. Menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan, serta menyebarluaskan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan.

2. Memperdalam dan mengembangkan pengkajian ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya.
3. Meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infak, wakaf, shadaqah, hibah, dan amal shalih lainnya.
4. Meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas sumberdaya manusia agar berkemampuan tinggi serta berakhlaq mulia.
5. Memajukan dan memperbaharui pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta meningkatkan penelitian.
6. Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas
7. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
8. Memelihara, mengembangkan, dan mendayagunakan sumberdaya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan.
9. Mengembangkan komunikasi, ukhuwah, dan kerjasama dalam berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri.
10. Memelihara keutuhan bangsa serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
11. Membina dan meningkatkan kualitas serta kuantitas anggota sebagai pelaku gerakan.
12. Mengembangkan sarana, prasarana, dan sumber dana untuk mensukseskan gerakan.
13. Mengupayakan penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran serta meningkatkan pembelaan terhadap masyarakat.
14. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah

Pasal 4

Keanggotaan

(1) Anggota Biasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia beragama Islam

b. Laki-laki atau perempuan berumur 17 tahun atau sudah menikah

c. Menyetujui maksud dan tujuan Muhammadiyah

d. Bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaha Muhammadiyah

e. Mendaftarkan diri dan membayar uang pangkal.

(2) Anggota Luar Biasa ialah seseorang bukan warga negara Indonesia, beragama Islam, setuju dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah serta bersedia mendukung amal usahanya.

(3) Anggota Kehormatan ialah seseorang beragama Islam, berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya diperlukan atau bersedia membantu Muhammadiyah.

(4) Tatacara menjadi anggota diatur sebagai berikut:

a. Anggota Biasa

1. Mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan Pusat dengan mengisi formulir disertai kelengkapan syarat-syaratnya melalui Pimpinan Ranting atau Pimpinan amal usaha di tempat yang belum ada Ranting, kemudian diteruskan kepada Pimpinan Cabang.

2. Pimpinan Cabang meneruskan permintaan tersebut kepada Pimpinan Pusat dengan disertai pertimbangan.

3. Pimpinan Cabang dapat memberi tanda anggota sementara kepada calon anggota, sebelum yang bersangkutan menerima kartu tanda anggota dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bentuk tanda anggota sementara

ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
4. Pimpinan Pusat memberi kartu tanda anggota Muhammadiyah kepada calon anggota biasa yang telah disetujui melalui Pimpinan Cabang yang bersangkutan
b. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan
Tata cara menjadi Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan diatur oleh Pimpinan Pusat
(5) Pimpinan Pusat dapat melimpahkan wewenang penerimaan permintaan menjadi Anggota Biasa dan memberikan kartu tanda anggota Muhammadiyah kepada Pimpinan Wilayah. Pelimpahan wewenang tersebut dan ketentuan pelaksanaannya diatur dengan keputusan Pimpinan Pusat.
(6) Hak Anggota
a. Anggota biasa:
1. Menyatakan pendapat di dalam maupun di luar permusyawaratan.
2. Memilih dan dipilih dalam permusyawaratan.
b. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan mempunyai hak menyatakan pendapat.
(7) Kewajiban Anggota Biasa, Luar Biasa, dan Kehormatan:
a. Taat menjalankan ajaran Islam
b. Menjaga nama baik dan setia kepada Muhammadiyah serta perjuangannya
c. Berpegang teguh kepada Kepribadian serta Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah
d. Taat pada peraturan Muhammadiyah, keputusan musyawarah, dan kebijakan Pimpinan Pusat
e. Mendukung dan mengindahkan kepentingan Muhammadiyah serta melaksanakan usahanya

f. Membayar iuran anggota
g. Membayar infaq
(8) Anggota Biasa, Luar Biasa, dan Kehormatan berhenti karena:
a. Meninggal dunia
b. Mengundurkan diri
c. Diberhentikan oleh Pimpinan Pusat
(9) Tata cara pemberhentian anggota.
a. Anggota Biasa:
1. Pimpinan Cabang mengusulkan pemberhentian anggota kepada Pimpinan Daerah berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pimpinan Daerah meneruskan kepada Pimpinan Wilayah usulan pemberhentian anggota dengan disertai pertimbangan.
3. Pimpinan Wilayah meneruskan atau tidak meneruskan usulan pemberhentian anggota kepada Pimpinan Pusat setelah melakukan penelitian dan penilaian.
4. Pimpinan Wilayah dapat melakukan pemberhentian sementara (skorsing) yang berlaku paling lama 6 (enam) bulan selama menunggu proses pemberhentian anggota dari Pimpinan Pusat,
5. Pimpinan Pusat, setelah menerima usulan pemberhentian anggota, memutuskan memberhentikan atau tidak memberhentikan paling lama 6 (enam) bulan sejak diusulkan oleh Pimpinan Wilayah.
6. Anggota yang diusulkan pemberhentian keanggotaannya, selama proses pengusulan berlangsung, dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Pusat. Setelah keputusan pemberhentian dikeluarkan, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan Pusat.

7. Pimpinan Pusat membentuk tim yang diserahi tugas mempelajari keberatan yang diajukan oleh anggota yang diberhentikan. Pimpinan Pusat menetapkan keputusan akhir setelah mendengar pertimbangan tim.
8. Keputusan pemberhentian anggota diumumkan dalam Berita Resmi Muhammadiyah.

b. Anggota Luar Biasa dan Kehormatan diberhentikan atas keputusan Pimpinan Pusat.

Pasal 5

Ranting

(1) Ranting adalah kesatuan anggota di suatu tempat atau kawasan yang terdiri atas sekurang-kurangnya 15 orang yang berfungsi melakukan pembinaan dan pemberdayaan anggota.

(2) Syarat pendirian Ranting sekurang-kurangnya mempunyai:

a. Pengajian / kursus anggota berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan

b. Pengajian / kursus umum berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan

c. Mushalla / surau / langgar sebagai pusat kegiatan

d. Jama`ah

(3) Pengesahan pendirian Ranting dan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Cabang.

(4) Pendirian suatu Ranting yang merupakan pemisahan dari Ranting yang telah ada dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Ranting yang bersangkutan atau atas keputusan Musyawarah Cabang / Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang

Pasal 6

Cabang

(1) Cabang adalah kesatuan Ranting di suatu tempat yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga Ranting yang berfungsi:

a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Ranting

b. Penyelenggaraan pengelolaan Muhammadiyah

c. Penyelenggaraan amal usaha

(2) Syarat pendirian Cabang sekurang-kurangnya mempunyai:

a. Pengajian / kursus berkala untuk anggota Pimpinan Cabang dan Unsur Pembantu Pimpinannya, Pimpinan Ranting, serta Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan

b. Pengajian / kursus muballigh / muballighat dalam lingkungan Cabangnya, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan

c. Korps muballigh / muballighat Cabang, sekurang-kurangnya 10 orang

d. Taman pendidikan Al-Quran / Madrasah Diniyah / Sekolah Dasar

e. Kegiatan dalam bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan

f. Kantor

(3) Pengesahan pendirian Cabang dan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah atas usul Ranting setelah memperhatikan pertimbangan Pimpinan Daerah.

(4) Pendirian suatu Cabang yang merupakan pemisahan dari Cabang yang telah ada dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Cabang yang bersangkutan atau atas keputusan

Musyawarah Daerah / Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah.

Pasal 7

Daerah

(1) Daerah adalah kesatuan Cabang di Kabupaten / Kota yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga Cabang yang berfungsi:

a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Cabang

b. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan Muhammadiyah

c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal usaha

d. Perencanaan program dan kegiatan

(2) Syarat pendirian Daerah sekurang-kurangnya mempunyai:

a. Pengajian / kursus berkala untuk anggota Pimpinan Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan

b. Pengajian / kursus muballigh / muballighat tingkat Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan

c. Pembahasan masalah agama dan pengembangan pemikiran Islam

d. Korps muballigh / muballighat Daerah, sekurang-kurangnya 20 orang

e. Kursus kader Pimpinan tingkat Daerah

f. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama / Madrasah Tsanawiyah

g. Amal Usaha dalam bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan

h. Kantor

(3) Pengesahan pendirian Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat atas usul Cabang setelah memperhatikan pertimbangan Pimpinan Wilayah.
(4) Pendirian suatu Daerah yang merupakan pemisahan dari Daerah yang telah ada dilakukan melalui dan atas keputusan Musyawarah Daerah / Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah.

Pasal 8

Wilayah

(1) Wilayah adalah kesatuan Daerah di propinsi yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga Daerah yang berfungsi
a. Pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Daerah
b. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan Muhammadiyah
c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal usaha
d. Perencanaan program dan kegiatan
(2) Syarat pendirian Wilayah sekurang-kurangnya mempunyai:
a. Pengajian / kursus berkala untuk anggota Pimpinan Wilayah dan Unsur Pembantu Pimpinannya serta Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
b. Pengajian / kursus muballigh / muballighat tingkat Wilayah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
c. Pembahasan masalah agama dan pengembangan pemikiran Islam
d. Korps muballigh / muballighat sekurang-kurangnya 30 orang.
e. Kursus kader pimpinan tingkat Wilayah
f. Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Mu`allimin / Mu`allimat/ Pondok Pesantren

g. Amal Usaha dalam bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan
h. Kantor.
(3) Pengesahan pendirian Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat atas usul Daerah yang bersangkutan.
(4) Pendirian suatu Wilayah yang merupakan pemisahan dari Wilayah yang telah ada dilakukan melalui dan atas keputusan Musyawarah Wilayah / Musyawarah Pimpinan tingkat Wilayah.

Pasal 9

Pusat

Pusat adalah kesatuan Wilayah dalam Negara Republik Indonesia yang berfungsi:
a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Wilayah
b. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan Muhammadiyah
c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal usaha
d. Perencanaan program dan kegiatan

Pasal 10

Pimpinan Pusat

(1) Pimpinan Pusat bertugas:
a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah berdasarkan keputusan Muktamar dan Tanwir, serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya
b. Membuat pedoman kerja dan pembagian wewenang bagi para anggotanya
c. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan Wilayah
d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan

mengkoordinasikan kegiatan Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom tingkat Pusat
(2) Anggota Pimpinan Pusat dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.
(3) Anggota Pimpinan Pusat harus berdomisili di kota tempat kantor Pimpinan Pusat atau di sekitarnya.
(4) Pimpinan Pusat dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Tanwir sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota Pimpinan Pusat terpilih. Selama menunggu keputusan Tanwir, calon tambahan anggota Pimpinan Pusat sudah dapat menjalankan tugasnya atas tanggungjawab Pimpinan Pusat.
(5) Pimpinan Pusat mengusulkan kepada Tanwir calon pengganti Ketua Umum Pimpinan Pusat yang karena sesuatu hal berhenti dalam tenggang masa jabatan. Selama menunggu ketetapan Tanwir, Ketua Umum Pimpinan Pusat dijabat oleh salah seorang Ketua atas keputusan Pimpinan Pusat.

Pasal 11

Pimpinan Wilayah

(1) Pimpinan Wilayah bertugas:
a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah dalam wilayahnya berdasarkan kebijakan Pimpinan Pusat, keputusan Musyawarah Wilayah, Musyawarah Pimpinan tingkat Wilayah, dan Rapat Pimpinan tingkat Wilayah.
b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan / instruksi Pimpinan Pusat dan Unsur Pembantu Pimpinan.
c. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan Daerah dalam wilayahnya sesuai dengan kewenangannya
d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan

mengkoordinasikan kegiatan Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom tingkat Wilayah
(2) Pimpinan Wilayah berkantor di ibu kota propinsi.
(3) Anggota Pimpinan Wilayah dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.
(4) Anggota Pimpinan Wilayah harus berdomisili di kota tempat kantor Pimpinan Wilayah atau di sekitarnya.
(5) Pimpinan Wilayah menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk ditetapkan sebagai anggota Tanwir apabila Ketua Pimpinan Wilayah tidak dapat menunaikan tugasnya sebagai anggota Tanwir.
(6) Pimpinan Wilayah dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Musyawarah Pimpinan Wilayah sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota Pimpinan Wilayah terpilih, kemudian dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Pusat. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Wilayah dan ketetapan dari Pimpinan Pusat, calon tambahan anggota Pimpinan Wilayah sudah dapat menjalankan tugasnya atas tanggungjawab Pimpinan Wilayah.
(7) Pimpinan Wilayah mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Wilayah calon pengganti Ketua Pimpinan Wilayah yang karena sesuatu hal berhenti dalam tenggang masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Pusat. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Wilayah dan ketetapan dari Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Wilayah.

Pasal 12

Pimpinan Daerah

(1) Pimpinan Daerah bertugas:
a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah dalam Daerahnya berdasarkan kebijakan Pimpinan di atasnya, keputusan Musyawarah Daerah, Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah, dan Rapat Pimpinan tingkat Daerah.
b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan / instruksi Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, serta Unsur Pembantu Pimpinannya
c. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan Cabang dalam daerahnya sesuai kewenangannya
d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom tingkat Daerah
e. Memimpin gerakan dan menjadikan Daerah sebagai pusat administrasi serta pusat pembinaan sumberdaya manusia
(2) Pimpinan Daerah berkantor di ibu kota Kabupaten / Kota.
(3) Anggota Pimpinan Daerah dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.
(4) Anggota Pimpinan Daerah harus berdomisili di Kabupaten / Kotanya.
(5) Pimpinan Daerah menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk ditetapkan sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Wilayah apabila Ketua Pimpinan Daerah tidak dapat menunaikan tugasnya sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Wilayah.
(6) Pimpinan Daerah dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Musyawarah Pimpinan Daerah sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota Pimpinan

Daerah terpilih, kemudian dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Wilayah. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah dan ketetapan dari Pimpinan Wilayah, calon tambahan anggota Pimpinan Daerah sudah dapat menjalankan tugasnya atas tanggungjawab Pimpinan Daerah.
(7) Pimpinan Daerah mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Daerah calon pengganti Ketua Pimpinan Daerah yang karena sesuatu hal berhenti dalam tenggang masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Wilayah. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah dan ketetapan dari Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Daerah.

Pasal 13

Pimpinan Cabang

(1) Pimpinan Cabang bertugas:
a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah dalam Cabangnya berdasarkan kebijakan Pimpinan di atasnya, keputusan Musyawarah Cabang, dan Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang.
b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan / instruksi Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, serta Unsur Pembantu Pimpinannya
c. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan Ranting dalam cabangnya sesuai kewenangannya
d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom tingkat Cabang
(2) Anggota Pimpinan Cabang dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.

(3) Anggota Pimpinan Cabang harus berdomisili di Cabangnya.
(4) Pimpinan Cabang menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk ditetapkan sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah apabila Ketua Pimpinan Cabang tidak dapat menunaikan tugasnya sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah.
(5) Pimpinan Cabang dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Musyawarah Pimpinan Cabang sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota Pimpinan Cabang terpilih, kemudian dimintakan pengesahan kepada Pimpinan Daerah. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang dan ketetapan dari Pimpinan Daerah, calon tambahan anggota Pimpinan Cabang sudah dapat menjalankan tugasnya atas tanggungjawab Pimpinan Cabang.
(6) Pimpinan Cabang mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Cabang calon pengganti Ketua Pimpinan Cabang yang karena sesuatu hal berhenti dalam tenggang masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Daerah. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang dan ketetapan dari Pimpinan Daerah, Ketua Pimpinan Cabang dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Cabang.

Pasal 14

Pimpinan Ranting

(1) Pimpinan Ranting bertugas:
a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah dalam Rantingnya berdasar kebijakan Pimpinan di atasnya, keputusan Musyawarah Ranting, dan Musyawarah Pimpinan tingkat Ranting

b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan / instruksi Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, serta Unsur Pembantu Pimpinan.
c. Membimbing dan meningkatkan kegiatan anggota dalam rantingnya sesuai dengan kewenangannya
d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan Organisasi Otonom tingkat Ranting
(2) Anggota Pimpinan Ranting dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.
(3) Anggota Pimpinan Ranting harus berdomisili di Rantingnya.
(4) Pimpinan Ranting menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk ditetapkan sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang apabila Ketua Pimpinan Ranting tidak dapat menunaikan tugasnya sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang.
(5) Pimpinan Ranting dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Musyawarah Pimpinan Ranting sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota Pimpinan Ranting terpilih, kemudian dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Cabang. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Ranting dan ketetapan dari Pimpinan Cabang, calon tambahan anggota Pimpinan Ranting sudah dapat menjalankan tugasnya atas tanggungjawab Pimpinan Ranting.
(6) Pimpinan Ranting mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Ranting calon pengganti Ketua Pimpinan Ranting yang karena sesuatu hal berhenti dalam tenggang masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Cabang. Selama menunggu keputusan

Musyawarah Pimpinan tingkat Ranting dan ketetapan dari Pimpinan Cabang, Ketua Pimpinan Ranting dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Ranting.

Pasal 15

Pemilihan Pimpinan

(1) Syarat anggota Pimpinan Muhammadiyah:
a. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam
b. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah
c. Dapat menjadi teladan dalam Muhammadiyah
d. Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah
e. Memiliki kecakapan dan berkemampuan menjalankan tugasnya
f. Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya satu tahun dan berpengalaman dalam kepemimpinan di lingkungan Muhammadiyah bagi Pimpinan tingkat Daerah, Wilayah dan Pusat
g. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat
h. Tidak merangkap jabatan dengan Pimpinan Muhammadiyah dan amal usahanya, baik vertikal maupun horisontal
(2) Penyimpangan dari ketentuan ayat (1) butir f, g, dan h pasal ini hanya dapat dilakukan atas keputusan Pimpinan Pusat.
(3) Pemilihan Pimpinan dapat dilakukan secara langsung atau formatur atas keputusan Musyawarah masing-masing.
(4) Pelaksanaan pemilihan Pimpinan dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan ketentuan:

a. Panitia Pemilihan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Tanwir atas usul Pimpinan Pusat
b. Panitia Pemilihan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan atas usul Pimpinan Muhammadiyah pada semua tingkatan
c. Panitia Pemilihan diangkat untuk satu kali pemilihan
(5) Pelaksanaan pemilihan Pimpinan diatur berdasarkan tata tertib Pemilihan dengan ketentuan:
a. Tata-tertib Pemilihan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Tanwir atas usul Pimpinan Pusat
b. Tata-tertib Pemilihan Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan atas usul Pimpinan Muhammadiyah pada setiap tingkatan

Pasal 16

Masa Jabatan Pimpinan

(1) Masa jabatan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting sama dengan masa jabatan Pimpinan Pusat.
(2) Pergantian Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dengan segenap Unsur Pembantu Pimpinannya, serta Pimpinan Ranting, disesuaikan dengan pergantian Pimpinan Pusat dan pelaksanaannya dilakukan setelah Muktamar dan Musyawarah di atasnya.
(3) Pimpinan-pimpinan dalam Muhammadiyah yang telah habis masa jabatannya, tetap menjalankan tugasnya sampai dilakukan serah-terima dengan Pimpinan yang baru.
(4) Setiap pergantian Pimpinan Muhammadiyah harus menjamin adanya peningkatan kinerja, penyegaran, dan kaderisasi pimpinan.

Pasal 17

Ketentuan Luar Biasa

Pimpinan Pusat dalam keadaan luar biasa dapat mengambil ketetapan lain terhadap masalah Pimpinan yang diatur dalam pasal 11 sampaidengan 16.

Pasal 18

Penasihat

(1) Penasihat terdiri atas perorangan yang diangkat oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.
(2) Penasihat bertugas memberi nasihat kepada Pimpinan Muhammadiyah, baik diminta maupun atas kemauan sendiri.
(3) Syarat untuk dapat diangkat sebagai penasihat:
a. Anggota Muhammadiyah
b. Pernah menjadi anggota Pimpinan Muhammadiyah, atau mempunyai pengalaman dalam organisasi atau memiliki keahlian bidang tertentu

Pasal 19

Unsur Pembantu Pimpinan

(1) Pengertian dan Pembentukan Unsur Pembantu Pimpinan:
a. Majelis:
1. Majelis bertugas menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan pokok dalam bidang tertentu.
2. Majelis dibentuk oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang di tingkat masing-masing sesuai dengan kebutuhan.
b. Lembaga:
1. Lembaga bertugas melaksanakan program dan kegiatan pendukung yang bersifat khusus.
2. Lembaga dibentuk oleh Pimpinan Pusat di tingkat pusat.
3. Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah, apabila

dipandang perlu, dapat membentuk lembaga tertentu di tingkat masing-masing dengan persetujuan Pimpinan Muhammadiyah setingkat di atasnya.
(2) Ketentuan lain tentang Unsur Pembantu Pimpinan diatur dalam Qa`idah yang dibuat dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 20
Organisasi Otonom

(1) Organisasi Otonom adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Muhammadiyah guna membina warga Muhammadiyah dan kelompok masyarakat tertentu sesuai bidang-bidang kegiatan yang diadakannya dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah.
(2) Organisasi Otonom dibedakan dalam dua kategori:
a. Organisasi Otonom Umum adalah organisasi otonom yang anggotanya belum seluruhnya anggota Muhammadiyah
b. Organisasi Otonom Khusus adalah organisasi otonom yang seluruh anggotanya anggota Muhammadiyah, dan diberi wewenang menyelenggarakan amal usaha yang ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah dalam koordinasi Unsur Pembantu Pimpinan yang membidanginya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang amal usaha tersebut
(3) Pembentukan dan pembubaran organisasi otonom ditetapkan oleh Tanwir atas usul Pimpinan Pusat.
(4) Ketentuan lain mengenai organisasi otonom diatur dalam Qa`idah Organisasi Otonom yang dibuat dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 21
Muktamar

(1) Muktamar diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Pusat.
(2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Muktamar ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
(3) Undangan dan acara Muktamar dikirim kepada anggota Muktamar selambat-lambatnya tiga bulan sebelum Muktamar berlangsung.
(4) Acara Muktamar:
a. Laporan Pimpinan Pusat tentang:
1. Kebijakan Pimpinan.
2. Organisasi.
3. Pelaksanaan keputusan Muktamar dan Tanwir.
4. Keuangan.
b. Program Muhammadiyah
c. Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat dan penetapan Ketua Umum
d. Masalah Muhammadiyah yang bersifat umum
e. Usul-usul
(5) Muktamar dihadiri oleh:
a. Anggota Muktamar terdiri atas:
1. Anggota Pimpinan Pusat.
2. Ketua Pimpinan Wilayah atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Pusat.
3. Anggota Tanwir wakil Wilayah.
4. Ketua Pimpinan Daerah atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Wilayah.
5. Wakil Daerah sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya tujuh orang, berdasar atas jumlah perimbangan Cabang dalam tiap Daerah, atas dasar keputusan Musyawarah Pimpinan Daerah. Ketentuan

perimbangan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
6. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat masing-masing tiga orang, diantaranya dua orang wakilnya dalam Tanwir.
b. Peserta Muktamar terdiri atas:
1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat masing-masing dua orang.
2. Undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh Pimpinan Pusat.
c. Peninjau Muktamar ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat
(6) Anggota Muktamar berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Muktamar berhak menyatakan pendapat. Peninjau Muktamar tidak mempunyai hak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.
(7) Keputusan Muktamar harus sudah ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat selambat-lambatnya dua bulan sesudah Muktamar.
(8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu berlangsungnya Muktamar diatur oleh penyelenggara.

Pasal 22

Muktamar Luar Biasa

(1) Muktamar Luar Biasa diadakan berdasarkan keputusan Tanwir atas usul Pimpinan Pusat atau dua pertiga Pimpinan Wilayah.
(2) Undangan dan acara Muktamar Luar Biasa dikirim kepada Anggota Muktamar selambat-lambatnya satu bulan sebelum Muktamar Luar Biasa berlangsung.
(3) Ketentuan-ketentuan pasal 21 berlaku bagi penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa, kecuali ayat (3) dan ayat (4).

(4) Muktamar Luar Biasa dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota Muktamar dan keputusannya diambil sekurang-kurangnya dua pertiga dari yang hadir.

Pasal 23

Tanwir

(1) Tanwir diadakan oleh Pimpinan Pusat atau atas permintaan sekurang-kurangnya seperempat dari jumlah anggota Tanwir di luar anggota Pimpinan Pusat.
(2) Tanwir diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin Pimpinan Pusat.
(3) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Tanwir ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
(4) Undangan dan acara Tanwir dikirim kepada Anggota Tanwir selambat-lambatnya satu bulan sebelum Tanwir berlangsung.
(5) Acara Tanwir:
a. Laporan Pimpinan Pusat
b. Masalah yang oleh Muktamar atau menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diserahkan kepada Tanwir
c. Masalah yang akan dibahas dalam Muktamar sebagai pembicaraan pendahuluan
d. Masalah mendesak yang tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Muktamar
e. Usul-usul
(6) Tanwir dihadiri oleh:
a. Anggota Tanwir terdiri atas:
1. Anggota Pimpinan Pusat.
2. Ketua Pimpinan Wilayah atau penggantinya yang telah disahkan oleh Pimpinan Pusat.
3. Wakil Wilayah terdiri dari unsur PWM dan atau PDM antara 3 sampai 5 orang berdasarkan perimbangan daerah

dalam wilayah atas dasar keputusan Musyawarah Wilayah atau Musyawarah Pimpinan Wilayah. Ketentuan perimbangan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
4. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat masing-masing dua orang.
b. Peserta Tanwir terdiri dari:
1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat masing-masing dua orang.
2. Undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh Pimpinan Pusat.
c. Peninjau Tanwir ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat.
(7) Anggota Tanwir berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Tanwir berhak menyatakan pendapat. Peninjau Tanwir tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.
(8) Keputusan Tanwir harus sudah ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat selambat-lambatnya satu bulan sesudah Tanwir.
(9) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu Sidang Tanwir diatur oleh penyelenggara.

Pasal 24
Musyawarah Wilayah

(1) Musyawarah Wilayah diselengarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Wilayah.
(2) Ketentuan tentang pelaksanaan tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah.
(3) Undangan dan acara Musyawarah Wilayah dikirim kepada Anggota Musyawarah Wilayah selambat-lambatnya satu bulan sebelum Musyawarah Wilayah berlangsung.

(4) Acara Musyawarah Wilayah:
a. Laporan Pimpinan Wilayah tentang:
1. Kebijakan Pimpinan.
2. Organisasi.
3. Pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, Tanwir, Instruksi Pimpinan Pusat, pelaksanaan keputusan Musyawarah Wilayah , Musyawarah Pimpinan Wilayah, dan Rapat Pimpinan tingkat Wilayah.
4. Keuangan.
b. Program Wilayah
c. Pemilihan Anggota Pimpinan Wilayah dan pengesahan Ketua
d. Pemilihan Anggota Tanwir Wakil Wilayah
e. Masalah Muhammadiyah dalam Wilayah
f. Usul-usul
(5) Musyawarah Wilayah dihadiri oleh:
a. Anggota Musyawarah Wilayah terdiri atas:
1. Anggota Pimpinan Wilayah yang sudah disahkan oleh Pimpinan Pusat.
2. Ketua Pimpinan Daerah atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Wilayah.
3. Anggota Pimpinan Daerah, yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah.
4. Ketua Pimpinan Cabang atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Daerah.
5. Wakil Cabang yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah berdasarkan atas perimbangan jumlah Ranting pada tiap-tiap Cabang.
6. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah masing-masing dua orang.
b. Peserta Musyawarah Wilayah terdiri atas:
1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah,

masing-masing dua orang.
2. Undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh Pimpinan Wilayah.
c. Peninjau Musyawarah Wilayah ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Wilayah
(6) Anggota Musyawarah Wilayah berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Musyawarah Wilayah berhak menyatakan pendapat. Peninjau Musyawarah Wilayah tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.
(7) Keputusan Musyawarah Wilayah harus dilaporkan kepada Pimpinan Pusat selambat-lambatnya satu bulan sesudah Musyawarah Wilayah. Apabila dalam waktu satu bulan sesudah laporan dikirim, tidak ada keterangan atau keberatan dari Pimpinan Pusat, maka keputusan Musyawarah Wilayah dapat ditanfidzkan oleh Pimpinan Wilayah.
(8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu Musyawarah Wilayah diatur oleh penyelenggara.

Pasal 25

Musyawarah Daerah

(1) Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Daerah.
(2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.
(3) Undangan dan acara Musyawarah Daerah dikirim kepada Anggota Musyawarah Daerah selambat-lambatnya satu bulan sebelum Musyawarah Daerah berlangsung.
(4) Acara Musyawarah Daerah:
a. Laporan Pimpinan Daerah tentang:

1. Kebijakan Pimpinan.
2. Organisasi.
3. Pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah dan Pimpinan di atasnya serta pelaksanaan keputusan Musyawarah Daerah, Musyawarah Pimpinan Daerah dan Rapat Pimpinan tingkat Daerah.
4. Keuangan.

b. Program Daerah

c. Pemilihan Anggota Pimpinan Daerah dan pengesahan Ketua

d. Pemilihan anggota Musyawarah Pimpinan Wilayah Wakil Daerah

e. Masalah Muhammadiyah dalam Daerah

f. Usul-usul

(5) Musyawarah Daerah dihadiri oleh:

a. Anggota Musyawarah Daerah terdiri atas:

1. Anggota Pimpinan Daerah yang telah disahkan oleh Pimpinan Wilayah.
2. Ketua Pimpinan Cabang atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Daerah.
3. Wakil Cabang sebanyak tiga orang.
4. Ketua Pimpinan Ranting atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Cabang.
5. Wakil Ranting yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah berdasarkan jumlah anggota.
6. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah masing-masing dua orang.

b. Peserta Musyawarah Daerah terdiri atas:

1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah, masing-masing dua orang.
2. Undangan Khusus dari kalangan Muhammadiyah, yang ditentukan oleh Pimpinan Daerah.

c. Peninjau Musyawarah Daerah ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Daerah
(6) Anggota Musyawarah Daerah berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Musyawarah Daerah berhak menyatakan pendapat. Peninjau Musyawarah Daerah tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.
(7) Keputusan Musyawarah Daerah harus dilaporkan kepada Pimpinan Wilayah selambat-lambatnya satu bulan sesudah Musyawarah Daerah. Apabila dalam waktu satu bulan sesudah laporan dikirim tidak ada keterangan atau keberatan dari Pimpinan Wilayah, maka keputusan Musyawarah Daerah dapat ditanfidzkan oleh Pimpinan Daerah.
(8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu Musyawarah Daerah diatur oleh penyelenggara.

Pasal 26

Musyawarah Cabang

(1) Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Cabang.
(2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang.
(3) Undangan dan acara Musyawarah Cabang dikirim kepada Anggota Musyawarah Cabang selambat-lambatnya 15 hari sebelum Musyawarah Cabang berlangsung.
(4) Acara Musyawarah Cabang:
a. Laporan Pimpinan Cabang tentang:
1. Kebijakan Pimpinan.
2. Organisasi.
3. Pelaksanaan keputusan Musyawarah dan keputusan

Pimpinan di atasnya serta pelaksanaan keputusan Musyawarah Cabang dan Musyawarah Pimpinan Cabang.
4. Keuangan.
b. Program Cabang
c. Pemilihan Anggota Pimpinan Cabang dan pengesahan Ketua
d. Pemilihan anggota Musyawarah Pimpinan Daerah Wakil Cabang
e. Masalah Muhammadiyah dalam Cabang
f. Usul-usul
(5) Musyawarah Cabang dihadiri oleh:
a. Anggota Musyawarah Cabang terdiri atas:
1. Anggota Pimpinan Cabang yang telah disahkan oleh Pimpinan Daerah.
2. Ketua Pimpinan Ranting atau penggantinya yang telah disahkan oleh Pimpinan Cabang.
3. Wakil Ranting sebanyak tiga orang.
4. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang masing-masing dua orang.
b. Peserta Musyawarah Cabang terdiri atas:
1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang, masing-masing dua orang.
2. Undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh Pimpinan Cabang.
c. Peninjau Musyawarah Cabang ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Cabang.
(6) Anggota Musyawarah Cabang berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Musyawarah Cabang berhak menyatakan pendapat. Peninjau Musyawarah Cabang tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.
(7) Keputusan Musyawarah Cabang harus dilaporkan

kepada Pimpinan Daerah selambat-lambatnya 15 hari sesudah Musyawarah Cabang. Apabila dalam waktu 15 hari sesudah laporan dikirim tidak ada keterangan atau keberatan dari Pimpinan Daerah, maka keputusan Musyawarah Cabang dapat ditanfidzkan oleh Pimpinan Cabang.
(8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu Musyawarah Cabang diatur oleh penyelenggara.

Pasal 27

Musyawarah Ranting

(1) Musyawarah Ranting diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Ranting.
(2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Ranting.
(3) Undangan dan acara Musyawarah Ranting dikirim kepada Anggota Musyawarah Ranting selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Musyawarah Ranting berlangsung.
(4) Acara Musyawarah Ranting:
a. Laporan Pimpinan Ranting tentang:
1. Kebijakan Pimpinan.
2. Organisasi.
3. Pelaksanaan keputusan Musyawarah dan keputusan Pimpinan di atasnya serta pelaksanaan keputusan Musyawarah Ranting dan Musyawarah Pimpinan Ranting.
4. Keuangan.
b. Program Ranting
c. Pemilihan Anggota Pimpinan Ranting dan pengesahan Ketua
d. Masalah Muhammadiyah dalam Ranting
e. Usul-usul

(5) Musyawarah Ranting dihadiri oleh:
a. Anggota Musyawarah Ranting:
1. Anggota Muhammadiyah.
2. Wakil Organisasi Otonom tingkat Ranting.
b. Peserta Musyawarah Ranting ialah undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh Pimpinan Ranting
c. Peninjau Musyawarah Ranting ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Ranting
(6) Anggota Musyawarah Ranting berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Musyawarah Ranting berhak menyatakan pendapat. Peninjau Musyawarah Ranting tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.
(7) Keputusan Musyawarah Ranting harus dilaporkan kepada Pimpinan Cabang selambat-lambatnya 15 hari setelah Musyawarah Ranting. Apabila dalam waktu 15 hari sesudah laporan dikirim tidak ada keterangan atau keberatan dari Pimpinan Cabang, maka keputusan Musyawarah Ranting dapat ditanfidzkan oleh Pimpinan Ranting.
(8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu Musyawarah Ranting diatur oleh penyelenggara.

Pasal 28

Musyawarah Pimpinan

(1) Musyawarah Pimpinan diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu masa jabatan.
(2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan

acara Musyawarah Pimpinan ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara.
(3) Undangan dan acara Musyawarah Pimpinan dikirim kepada anggota Musyawarah Pimpinan selambat-lambatnya:
a. Tingkat Wilayah dan Daerah, satu bulan,
b. Tingkat Cabang, 15 hari,
c. Tingkat Ranting, tujuh hari,
sebelum Musyawarah Pimpinan berlangsung.
(4) Acara Musyawarah Pimpinan:
a. Laporan pelaksanaan kegiatan
b. Masalah yang oleh Musyawarah atau menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diserahkan kepada Musyawarah Pimpinan
c. Masalah yang akan dibahas dalam Musyawarah sebagai pembicaraan pendahuluan
d. Masalah mendesak yang tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Musyawarah
e. Usul-usul
(5) Musyawarah Pimpinan dihadiri oleh:
a. Pada tingkat Wilayah:
1. Anggota:
(a) Anggota Pimpinan Wilayah yang telah disahkan oleh Pimpinan Pusat
(b) Ketua Pimpinan Daerah atau penggantinya yang telah disahkan oleh Pimpinan Wilayah
(c) Wakil Daerah tiga orang
(d) Wakil Organisasi Otonom tingkat Wilayah dua orang
2. Peserta:
(a) Wakil Unsur Pembantu Pimpinan

masing-masing dua orang

(b) Undangan khusus

b. Pada tingkat Daerah:

1. Anggota:

(a) Anggota Pimpinan Daerah yang telah disahkan oleh Pimpinan Wilayah

(b) Ketua Pimpinan Cabang

(c) Wakil Cabang tiga orang

(d) Wakil Organisasi Otonom tingkat Daerah dua orang

2. Peserta:

(a) Wakil Unsur Pembantu Pimpinan masing-masing dua orang

(b) Undangan khusus

c. Pada tingkat Cabang:

1. Anggota:

(a) Anggota Pimpinan Cabang yang telah disahkan oleh Pimpinan Daerah

(b) Ketua Pimpinan Ranting

(c) Wakil Ranting tiga orang

(d) Wakil Organisasi Otonom tingkat Cabang dua orang.

2. Peserta:

(a) Wakil Unsur Pembantu Pimpinan masing-masing dua orang

(b) Undangan khusus

d. Pada tingkat Ranting:

1. Anggota:

(a) Anggota Pimpinan Ranting yang telah disahkan oleh Pimpinan Cabang

(b) Wakil Organisasi Otonom tingkat Ranting dua orang.

2. Peserta (undangan khusus).
(6) Anggota Musyawarah Pimpinan berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta berhak pendapat.
(7) Keputusan Musyawarah Pimpinan mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan sampai diubah atau dibatalkan oleh keputusan Musyawarah Wilayah / Daerah / Cabang / Ranting, selambat-lambatnya satu bulan sesudah Musyawarah Pimpinan berlangsung

Pasal 29

Keabsahan Musyawarah

Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua pertiga dari anggota Musyawarah. Apabila anggota Musyawarah tidak memenuhi jumlah dua pertiga, maka Musyawarah ditunda selama satu jam dan setelah itu dapat dibuka kembali. Apabila anggota Musyawarah belum juga memenuhi jumlah dua pertiga, maka Musyawarah ditunda lagi selama satu jam dan setelah itu dapat dibuka serta dinyatakan sah tanpa memperhitungkan jumlah kehadiran anggota Musyawarah.

Pasal 30

Keputusan Musyawarah

(1) Keputusan Musyawarah diambil dengan cara mufakat.
(2) Apabila keputusan secara mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan suara terbanyak mutlak.
(3) Keputusan Musyawarah yang dilakukan dengan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup / rahasia.

Pasal 31

Rapat Pimpinan

(1) Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 Anggaran Dasar dihadiri oleh:

a. Pada tingkat Pusat:

1. Anggota Pimpinan Pusat.
2. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Wilayah.
3. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Organisasi Otonom tingkat Pusat.
4. Ketua dan Sekretaris Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat.

b. Pada tingkat Wilayah:

1. Anggota Pimpinan Wilayah.
2. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Daerah.
3. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Organisasi Otonom tingkat Wilayah.
4. Ketua dan Sekretaris Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah.

c. Pada tingkat Daerah:

1. Anggota Pimpinan Daerah.
2. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Cabang.
3. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Organisasi Otonom tingkat Daerah.
4. Ketua dan Sekretaris Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah.

(2) Ketentuan pelaksanaan dan acara Rapat Pimpinan ditentukan oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.

(3) Keputusan Rapat Pimpinan mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan.

Pasal 32

Rapat Kerja Pimpinan

(1) Rapat Kerja Pimpinan ialah rapat yang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, atau Pimpinan Ranting untuk membahas pelaksanaan program dan mendistribusikan tugas kepada Unsur Pembantu Pimpinan Muhammadiyah.

(2) Rapat Kerja Pimpinan dihadiri oleh:

a. Pada tingkat Pusat:

1. Anggota Pimpinan Pusat.
2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat.
3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat.

b. Pada tingkat Wilayah:

1. Anggota Pimpinan Wilayah.
2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah.
3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah.

c. Pada tingkat Daerah:

1. Anggota Pimpinan Daerah.
2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah.
3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah.

d. Pada tingkat Cabang:

1. Anggota Pimpinan Cabang.
2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang.
3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang

e. Pada tingkat Ranting:

1. Anggota Pimpinan Ranting.

2. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Ranting.

(4) Keputusan Rapat Kerja Pimpinan mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan.

Pasal 33

Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan

(1) Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan ialah rapat yang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Unsur Pembantu Pimpinan pada setiap tingkatan untuk membahas penyelenggaraan program sesuai pembagian tugas yang ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah.

(2) Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan dihadiri oleh:

a. Pada tingkat Pusat:

1. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat.
2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah.
3. Undangan.

b. Pada tingkat Wilayah:

1. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah
2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah.
3. Undangan.

c. Pada tingkat Daerah:

1. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah.
2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang.
3. Undangan.
4. Pada tingkat Cabang:
5. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat

Cabang.

6. Wakil Pimpinan Ranting.
7. Undangan.

(3) Keputusan Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan.

Pasal 34

Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan

(1) Seluruh keuangan dan kekayaan Muhammadiyah, termasuk keuangan dan kekayaan Unsur Pembantu Pimpinan, Amal Usaha, dan Organisasi Otonom pada semua tingkat secara hukum milik Pimpinan Pusat.
(2) Pengelolaan keuangan dan kekayaan :
a. Pengelolaan keuangan dalam Muhammadiyah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Muhammadiyah
b. Pengelolaan kekayaan dalam Muhammadiyah diwujudkan dalam Jurnal
(3) Ketentuan tentang pengelolaan keuangan dan kekayaan Muhammadiyah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 35

Pengawasan Keuangan dan Kekayaan

(1) Pengawasan keuangan dan kekayaan dilakukan terhadap Pimpinan Muhammadiyah, Unsur Pembantu Pimpinan, Amal Usaha, dan Organisasi Otonom pada semua tingkat.
(2) Ketentuan tentang pengawasan keuangan dan kekayaan Muhammadiyah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 36

Laporan

Laporan terdiri dari:

1. Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh Pimpinan Muhammadiyah dan Unsu Pembantu Pimpinan disampaikan kepada Musyawarah Pimpinan, Musyawarah masing-masing tingkat, Tanwir, atau Muktamar.
2. Laporan tahunan tentang perkembangan Muhammadiyah, termasuk laporan Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom, dibuat oleh masing-masing Pimpinan dan disampaikan kepada Pimpinan di atasnya untuk dipelajari dan ditindaklanjuti.
3. Pimpinan Amal Usaha membuat laporan tahunan disampaikan kepada Unsur Pembantu Pimpinan dengan tembusan kepada Pimpinan Muhammadiyah untuk dipelajari dan ditindaklanjuti.

Pasal 37

Ketentuan Lain-lain

(1) Muhammadiyah menggunakan Tahun Takwim dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember.
(2) Surat-surat resmi Muhammadiyah menggunakan tanggal Hijriyah dan Miladiyah.
(3) a.Surat resmi Muhammadiyah ditandatangani:

1. Di tingkat Pusat oleh Ketua Umum / Ketua bersama Sekretaris Umum / Sekretaris. Surat resmi mengenai masalah keuangan ditandatangani oleh Ketua Umum / Ketua bersama Bendahara Umum / Bendahara.
2. Di tingkat Wilayah ke bawah ditandatangani oleh Ketua / Wakil Ketua bersama Sekretaris / Wakil Sekretaris. Surat resmi mengenai masalah keuangan ditandatangani oleh Ketua / Wakil Ketua bersama Bendahara / Wakil

Bendahara.

b. Surat-surat yang bersifat rutin dapat ditandatangani oleh Sekretaris Umum / Sekretaris atau petugas yang ditunjuk

(4) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 38

Penutup

(1) Anggaran Rumah Tangga ini telah disahkan dan ditetapkan oleh Muktamar ke-45 yang berlangsung pada tanggal 26 Jumadil Awal s.d. 1 Jumadil Akhir 1426 H bertepatan dengan tanggal 3 s.d. 8 Juli 2005 M. di Malang, dan dinyatakan mulai berlaku sejak ditanfidzkan.

(2) Setelah Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan, Anggaran Rumah Tangga sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.[2]

[2] PP Muhammadiyah. *Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*. Yogyakarta: PP Muhammadiyah, hasil Muktamar ke 45 tahun 2005.

Lampiran: 3

MATAN KEYAKINAN DAN CITA-CITA HIDUP MUHAMMADIYAH.

Rumusan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ini, tidak mengalami perubahan walaupun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah mengalami perubahan di sesuaikan dengan undang-undang No. 8 tahun 1985 M. tentang organisasi kemasyarakatan.

Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah (MKCHM), terdiri dari 5 pokok pikiran yaitu :

1. Muhammadiyah adalah gerakan berasas Islam, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah di muka bumi
2. Muhammadiyah berkeyakinan, bahwa Islam adalah agama Allah yang di wahyukan kepada para rasun-Nya, sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya dan di tutup Muhammad Saw. Sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umatnya manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan materiil dan spiritual duniawi dan ukhrawi.
3. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan :
    a. Al Quran: kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw

b. Sunnah Rasul: Penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw.

Dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam.

Adapun fungsi akal fikiran (Arro'yu) adalah sebagai alat untuk :

a. Mengungkapkan dan mengetahui kebenaran yang terkandung dalam Al Quran dan Sunnah.
b. Mengetahui maksud yang tercakup dalam pengertian Al Quran dan Sunnah.
c. Mencari jalan dan bagaimana melaksanakan ajaran Al Quran dan Sunnah Rasul, dalam mengatur Dunia guna memakmurkannya.

4. Muhammadiyah bekerja untuk teralaksananya ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang aqidah, akhlak, ibadah, mu'amalat dunyawiyah.
   a. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya aqidah Islam yang murni bersih dari gejala-gejala kemusrikkan. Bid'ah dan khurafat tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam
   b. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengaan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia.
   c. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya mu'amalat dunyawiyah (pengelola dunia dan pembinaan masyarakat) dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah SWT.

5. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapatkan karunia Allah, berupa tanah air yang memounyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang bersalsafah Pancasila, untuk berusaha bersama-sama menjadikannya suatu Negara yang adil dan makmur yang diridhai Allah Swt : *Baldatun Thayyibatun Wa Robbun Ghofur*.[3]

Ke 5 (lima) pokok pikiran tersebut mengandung 3(tiga) kelompok persoalan, yaitu :

1. Kelompok persoalan "ideoligi" (yaitu pokok pikiran nomer 1 dan 2)
2. Kelompok Persoalan " Faham agama menurut Muhammadiyah" (yaitu pokok pikiran nomer 3 dan 4)
3. kelompok persoalan "Fungsi dan misi Muhammadiyah, didalam masyakat Negara Repuplik Indenesia" (yaitu pokok pikiran nomer lima).

[3] Nashir, Haedar, 110-122.

CATATAN